RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024 - 2026

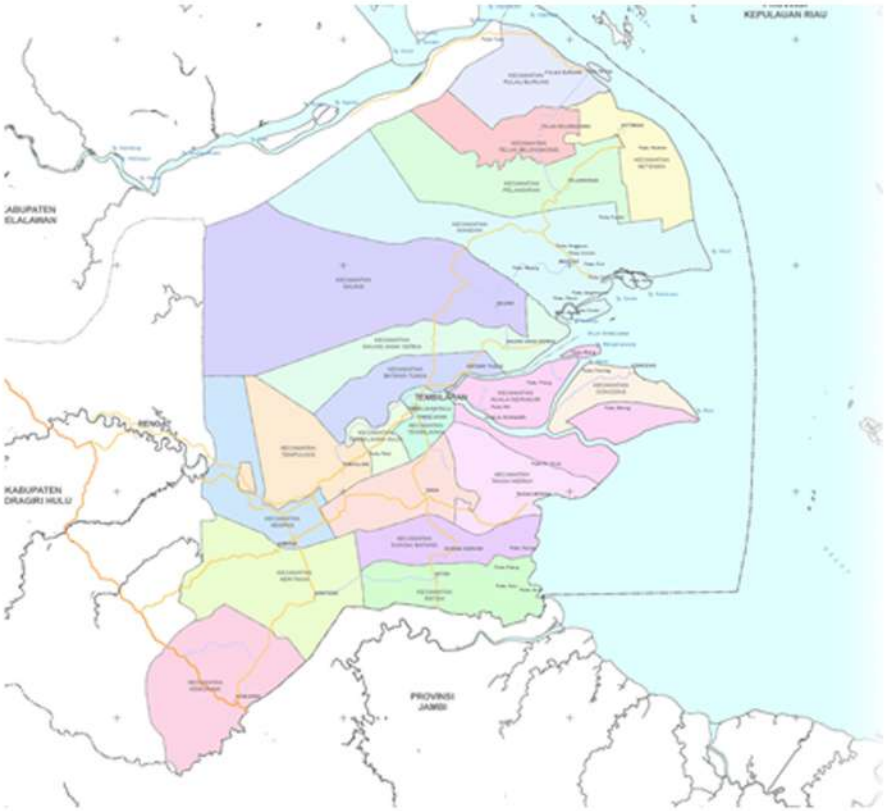

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;

b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;

c. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) akan digunakan oleh Penjabat (pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
7. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026 merupakan program prioritas daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
19. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
21. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

RPD Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan Keuangan Daerah serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu Tahun 2024-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergi dan terpadu.

Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

a. pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

b. pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX : PENUTUP

Pasal 5

RPD Tahun 2024-2026 yang disusun dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

(2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati maupun Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.

(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;

b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD; dan
c. Evaluasi terhadap RPD.

(3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 28 April 2023
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 28 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 4

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-9

1.4 Maksud dan Tujuan I-11

1.5 Sistematika Penulisan I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi II-1

2.1.1 Kondisi Geografi Wilayah II-1

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana II-14

2.1.3 Kondisi Demografi II-16

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-19

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-19

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi II-19

2.2.1.2. Inflasi II-24

2.2.1.3. PDRB Per kapita II-26

2.2.1.4. Indeks Gini II-27

2.2.1.5. Kemiskinan II-28

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-29

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia II-30

2.2.2.2. Harapan lama Sekolah II-31

2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah II-31

2.2.2.4. Angka Harapan Hidup II-32
2.2.2.5. Pengeluaran Perkapita II-33
2.2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) II-34
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-34
2.2.3.1 Seni Budaya II-34
2.2.3.2 Olahraga II-66
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-34
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-67
2.3.1.1. Pendidikan II-67
2.3.1.2. Kesehatan II-70
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-75
2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-79
2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-82
2.3.1.6. Sosial II-83
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-87
2.3.2.1. Ketenaga Kerjaan II-87
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... II-89
2.3.2.3. Pangan II-91
2.3.2.4. Lingkungan Hidup II-92
2.3.2.5. Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-93
2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-94
2.3.2.7. Kominikasi dan Informatika II-95
2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-98
2.3.2.9. Perhubungan II-98
2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah II-99

2.3.2.11 Penanaman Modal II-100
2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga II-100
2.3.2.13 Statistik II-101
2.3.2.14 Kebudayaan II-102
2.3.2.15 Persandian II-102
2.3.2.16 Perpustakaan II-103
2.3.2.17 Kearsipan II-104
2.3.3 Layanan Urusan Pilihan II-104
2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan II-104
2.3.3.2. Pariwisata II-105
2.3.3.3. Pertanian II-106
2.3.3.4. Perdagangan II-109
2.3.3.5. Perindustrian II-110
2.3.4. Pendukung Urusan Pemerintahan II-111
2.3.4.1 Sekretariat Daerah II-111
2.3.5. Penunjang Urusan pemerintahan II-114
2.3.5.1. Perencanaan II-114
2.3.5.2. Keuangan II-115
2.3.5.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan II-115
2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan II-116
2.3.6. Pengawasan II-117
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-117
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-118
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-119
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi II-121
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-121
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-4
3.1.2 Neraca Daerah III-18
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-29
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-29
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-34
3.3 Kerangka Pendanaan III-37
3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah III-38
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-51
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah IV-2
4.2 Isu Strategis IV-18
4.2.1 Isu Strategis Internasional IV-18
4.2.2 Isu Strategis Nasional IV-25
4.2.3 Isu Strategis Regional IV-31
4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir IV-37
BAB V TUJUAN DAN SASARAN V-1
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS VI-1
6.1 Strategi VI-1
6.2 Arah Kebijakan VI-6
6.3 Program Pembangunan Daerah VI-14
6.4 Proyek Strategis Pembangunan Daerah VI-28
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah VIII-1

8.1.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan VIII-1

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) VIII-2

8.1.3 Indikator Kinerja Daerah VIII-3

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 Kaidah Pelaksanaan IX-2

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	II-1	Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2022	II-3
Tabel	II-2	Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir	II-11
Tabel	II-3	Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022	II-12
Tabel	II-4	Bencana Alam Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022	II-15
Tabel	II-5	Nilai indeks risiko Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2021	II-15
Tabel	II-6	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-17
Tabel	II-7	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Indragiri Hilir Tahun 2022	II-18
Tabel	II-8	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2022	II-21
Tabel	II-9	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022	II-22
Tabel	II-10	Perkebangan Indeks Gini Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-28
Tabel	II-11	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022	II-30
Tabel	II-12	Kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	II-35
Tabel	II-13	Kinerja keolahrgaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-67
Tabel	II-14	Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-68
Tabel	II-15	Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-71
Tabel	II-16	Sebaran Tenaga Kesehatan di Indragiri Hilir tahun 2022	II-74
Tabel	II-17	Kinerja Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-75
Tabel	II-18	Panjang dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	II-76
Tabel	II-19	Capaian Pengurangan Kumuh Kabupaten Indragiri Hilir Sampai dengan 2022	II-81
Tabel	II-20	Kinerja Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-82
Tabel	II-21	Kinerja Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-82

Tabel	II-22	Rekapitulasi DTKS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	II-86
Tabel	II-23	Kinerja Indikator Urusan Ketenaga kerjaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-89
Tabel	II-24	Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-91
Tabel	II-25	Kinerja Indikator Urusan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-92
Tabel	II-26	Kinerja Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-93
Tabel	II-27	Wajib KTP , Memiliki KTP, dan Persentase Tahun 2019-2022 Kabupaten Indragiri Hilir	II-93
Tabel	II-28	Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-95
Tabel	II-29	Website OPD menurut Jenis Pengamanan Yang Di Gunakan Di Lingkungan Pemda Kab.Inhil Tahun 2022	II-96
Tabel	II-30	PPID Pembantu (OPD) dan PPID Desa Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	II-98
Tabel	II-31	Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-98
Tabel	II-32	Kinerja Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-99
Tabel	II-33	Kinerja Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-99
Tabel	II-34	Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-100
Tabel	II-35	Kinerja Indikator Urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-101
Tabel	II-36	Kinerja Indikator Urusan KebudayaanKabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-102
Tabel	II-37	Pengamanan Dokumen Elektronik Sanapati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-102
Tabel	II-38	Kinerja Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-103
Tabel	II-39	Kinerja Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-104
Tabel	II-40	Kinerja Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-105
Tabel	II-41	Kinerja Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-105
Tabel	II-42	Kinerja Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-108
Tabel	II-43	Kinerja Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-109
Tabel	II-44	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-111
Tabel	II-45	Implementasi Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-113

Tabel	II-46	Kinerja Indikator Perencanaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-115
Tabel	II-47	Kinerja Indikator Perencanaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2022	II-116
Tabel	II-48	Kinerja Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2022	II-117
Tabel	II-49	Kinerja Indikator Perencanaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-117
Tabel	II-50	Panjang dan Kondisi jalan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	II-120
Tabel	II-51	Panjang Jembatan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	II-120
Tabel	II-52	Hasil Akhir Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	II-121
Tabel	II-53	Rekapitulasi Capaian Indikator Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022	II-123
Tabel	II-54	Capaian Indikator Sasaran RPJMD (Perubahan) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020	II-133
Tabel	II-55	Inovasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir	II-137
Tabel	III-1	Skala interval Otonomi Fiskal	III-3
Tabel	III-2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-4
Tabel	III-3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-10
Tabel	III-4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-14
Tabel	III-5	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan)	III-17
Tabel	III-6	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-20
Tabel	III-7	Rasio Lancar Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-24
Tabel	III-8	Rasio Hutang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)	III-26
Tabel	III-9	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-26
Tabel	III-10	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)	III-27
Tabel	III-11	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017– 2021 (dalam Jutaan)	III-28
Tabel	III-12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-30
Tabel	III-13	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2022 (dalam Jutaan)	III-32
Tabel	III-14	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-34
Tabel	III-15	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)	III-35
Tabel	III-16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)	III-35
Tabel	III-17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)	III-36

Tabel	III-18	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (dalam jutaan)	III-42
Tabel	III-19	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)	III-46
Tabel	III-20	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)	III-49
Tabel	III-21	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)	III-51
Tabel	III-22	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)	III-52
Tabel	III-23	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2026 (dalam Jutaan)	III-53
Tabel	III-24	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan DaerahvKabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	III-53
Tabel	IV-1	Rata Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah (tahun) Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	IV-6
Tabel	IV-2	Keterkaitan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	IV-15
Tabel	V-1	Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Nasional	V-5
Tabel	V-2	Indikator Tujuan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	V-6
Tabel	V-3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024–2026	V-9
Tabel	V-4	Keterkaitan (Cascading) IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 -2026	V-12
Tabel	V-5	Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 -2026	V-27
Tabel	VI-1	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026	VI-2
Tabel	VI - 2	Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026	VI-10
Tabel	VI - 3	Keselaran program dengan Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	VI-19
Tabel	VII - 1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (dalam Juta)	VII-3
Tabel	VII - 2	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	VII-7
Tabel	VIII - 1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	VIII-2
Tabel	VIII - 2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	VIII-2
Tabel	VIII - 3	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	VIII-4

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar	I - 1	Kerangka Logis Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	I-3
Gambar	I - 2	Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-10
Gambar	II - 1	Peta Kabupaten Indragiri Hilir	II-2
Gambar	II - 2	Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-13
Gambar	II - 3	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Harga Konstan (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022	II-19
Gambar	II - 4	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022	II-20
Gambar	II - 5	Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2022	II-23
Gambar	II - 6	Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021	II-24
Gambar	II - 7	Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2019 – 2022	II-25
Gambar	II - 8	Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022	II-25
Gambar	II - 9	Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022	II-26
Gambar	II - 10	Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2022	II-27
Gambar	II - 11	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022	II-29
Gambar	II - 12	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022	II-31
Gambar	II - 13	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022	II-32
Gambar	II - 14	Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022	II-33
Gambar	II - 15	Perbandingan pengeluaran Perkapita Indragiri Hilir, Inhu, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022	II-33
Gambar	II - 16	Perbandingan pengeluaran Perkapita Indragiri Hilir, Inhu, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022	II-34
Gambar	III - 1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-6
Gambar	III - 2	Trend Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-8
Gambar	III - 3	Realisasi Belanja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	III-12
Gambar	IV - 1	Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026	IV-4
Gambar	IV - 2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2022	IV-5

Gambar	IV - 3	Angka Harapan Hidup Nasional dan Provinsi Riau Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2022	IV-7
Gambar	IV - 4	Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi RiaU Menurut Kota /Kabupaten Tahun 2022	IV-8
Gambar	IV - 5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Kabupaten /Kota Tahun 2022	IV-9
Gambar	IV - 6	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026	VI-7
Gambar	VI - 1	Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi RiaU Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2022	IV-8
Gambar	VI-1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026	VI-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang melayani sebagai agen pembangunan untuk menghadirkan negara yang menyejahterakan masyarakat adalah cita-cita yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan. Menempatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah tujuan pembangunan daerah merupakan harapan yang besar dalam pembangunan daerah hal harus dipertanggungjawabkan segenap pemangku kepentingan (Pemerintah daerah, *stakeholder*, dan masyarakat) secara konsisten dan sungguh-sungguh. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang prima guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus mengupayakan cara paling efektif agar mampu menghasilkan sistem yang dapat membuat seluruh masyarakat mau dan mampu terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Perumusan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat harus

dituangkan dalam suatu dokumen rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan secara akuntabel, efektif dan efisien. Hal tersebut menjadikan pembangunan daerah menjadi *starting point* bagi setiap tahapan kebijakan pembangunan daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kabupaten Indragiri Hilir sedang melaksanakan RPJMD Tahun 2019-2023, **sehingga Kepala Daerah berakhir masa jabatanya pada Tahun 2023**.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa **untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024**. Dengan demikian, Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati saat masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 merupakan periode keempat (Tahap ke-IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir adalah ***"INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025"***. Dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil evaluasi RPJMD dapat dirumuskan tujuan dan sasaran dalam rangkaian pohon kinerja dan cascading sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024-2026 seperti yang digambarkan pada kerangka logis penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Gambar I.1

Kerangka Logis Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

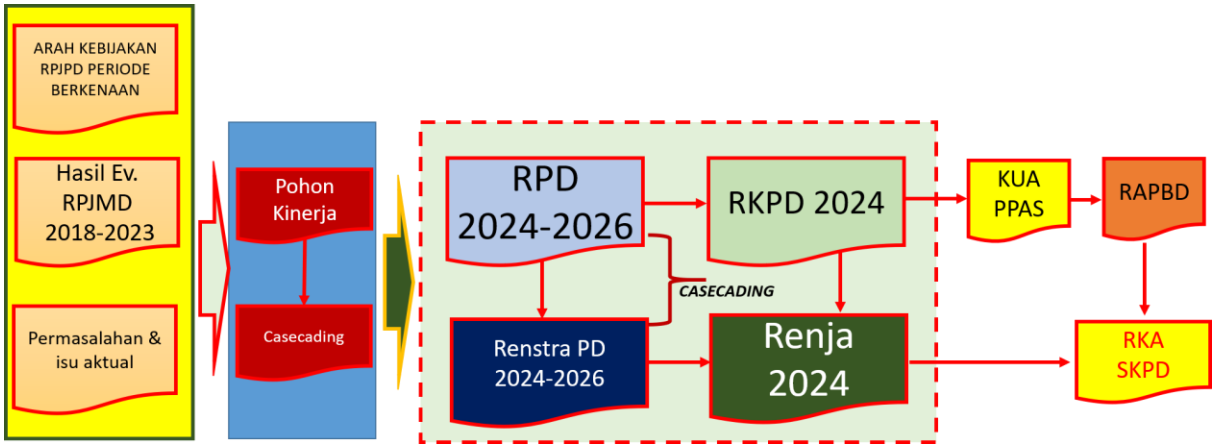

Dengan regulasi nasional yang terus berkembang, salah satunya ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kabupaten Indragiri Hilir dan Renstra Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mengimplementasikan RPJPD dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu RPD juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis bagi seluruh Perangkat Daerah. Dengan ini, penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga RPD ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan, Tahun 2024, 2025 dan 2026. Melalui RPD diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19, serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan demikian tujuan pembangunan dapat segera tercapai.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan

Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
36. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26); dan
38. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 memperhatikan:

1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024;
2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan pada tahap keempat RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025;
3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023;
4) Isu-isu strategis yang berkembang;
5) Kebijakan Nasional; dan
6) Regulasi yang berlaku.

Dalam implementasinya, dokumen RPD Kabupaten Indragiri Hilir perlu menyelaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional. Sehingga menghasilkan dokumen yang sinergis dan tepadu. Berikut penjabaran keterkaitan antar dokumen perencanaan, adapun keterkaitan antara RPD dan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar I.2

Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

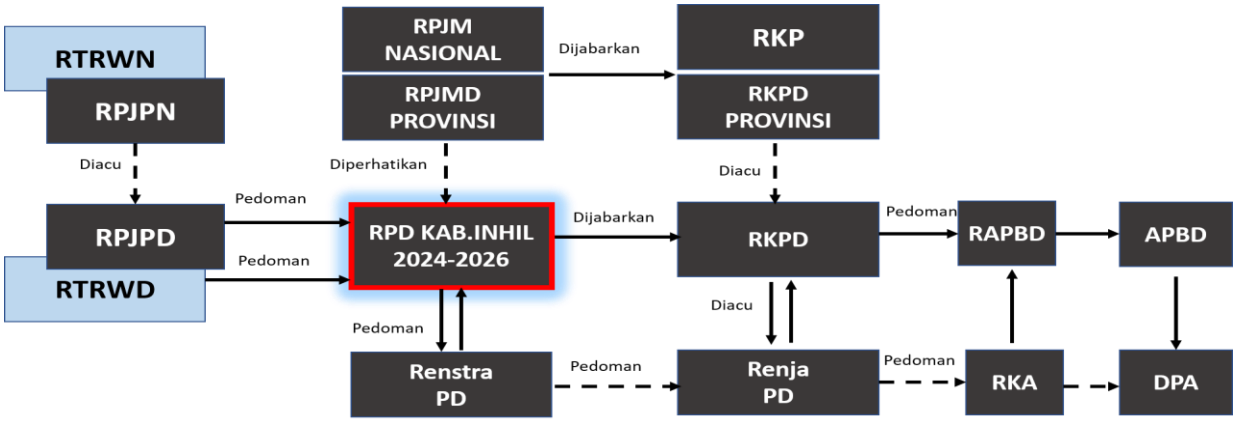

➢ Hubungan Antara RPD dan RPJMN

RPD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*,

prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Dalam hal periode RPJMN yang segera berakhir saat penyusunan RPD maka arah kebijakan pada RPJPN periode berikutnya menjadi sumber acuan.

- Hubungan Antara RPD dan RPJMD Provinsi Riau

RPD Kabupaten Indragiri Hilir juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Riau sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi Tema, Sasaran serta Prioritas, arah kebijakan Pembangunan Provinsi Riau yang telah tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

- Hubungan Antara RPD dan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir

RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir 2005-2025 pada tahap keempat. RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan tahap akhir dalam rangka mencapai kondisi dokumen jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025. Arah pembangunan dan kebijakan pada tahap keempat RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini untuk memastikan pembangunan jangka Panjang dapat terlaksana dengan maksimal.

- Hubungan Antara RPD dengan Renstra OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Renstra OPD merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2024 hingga 2026. Implementasi dari RPD Kabupaten Indragiri Hilir dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah.

- Hubungan Antara RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPD Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026 dilaksanakan melalui dokumen RKPD Tahun 2024, RKPD Tahun 2025, dan RKPD Tahun 2026. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

- Hubungan Antara RPD dan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir

Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir harus memperhatikan RTRWD Kabupaten Indragiri Hilir, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam RPD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW. RTRWD sebagai pedoman dalam memperhatikan, menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah dengan berdasarkan potensi wilayahnya. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan harus memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan sebagai jembatan bagi Kabupaten Indragiri Hilir yang masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir di tahun 2023 untuk memberikan arahan bagi *stakeholders* dan Perangkat daerah dalam menyusunan dokumen Rencana Strategis serta dapat dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Memberikan landasan dan pedoman Pj Bupati dalam melaksanakan pembangunan di Tahun 2024-2026
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun waktu 2024 – 2026.
c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola strategi dan tindakan;
d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat; serta
e. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan isertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun untuk lebih memfokuskan tindakan–tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kesatuan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta pagu anggaran setiap tahunnya

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPD Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan gambaran tentang kondisi capaian pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir pada periode pembangunan sebelumnya. Gambaran umum tersebut merupakan acuan awal penyusunan rencana pembangunan daerah melalui pemetaan secara obyektif kondisi daerah dari aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan mengindetifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan pencapaian untuk pembangunan pada masa transisi sebelum pemilihan umum serentak dilaksanakan pada tahun 2024 nanti.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pembangunan daerah bertumpu pada kondisi kewilayahan daerah, aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2024-2026 dapat terpetakan dengan baik.

2.1.1 Kondisi Geografi Wilayah

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi 0°36’ Lintang Utara – 1°07’ Lintang Selatan dan 102°32’ Bujur Timur – 104°10’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 13.525,10 KM^{2}. Batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau)

Gambar II.1
Peta Kabupaten Indragiri Hilir

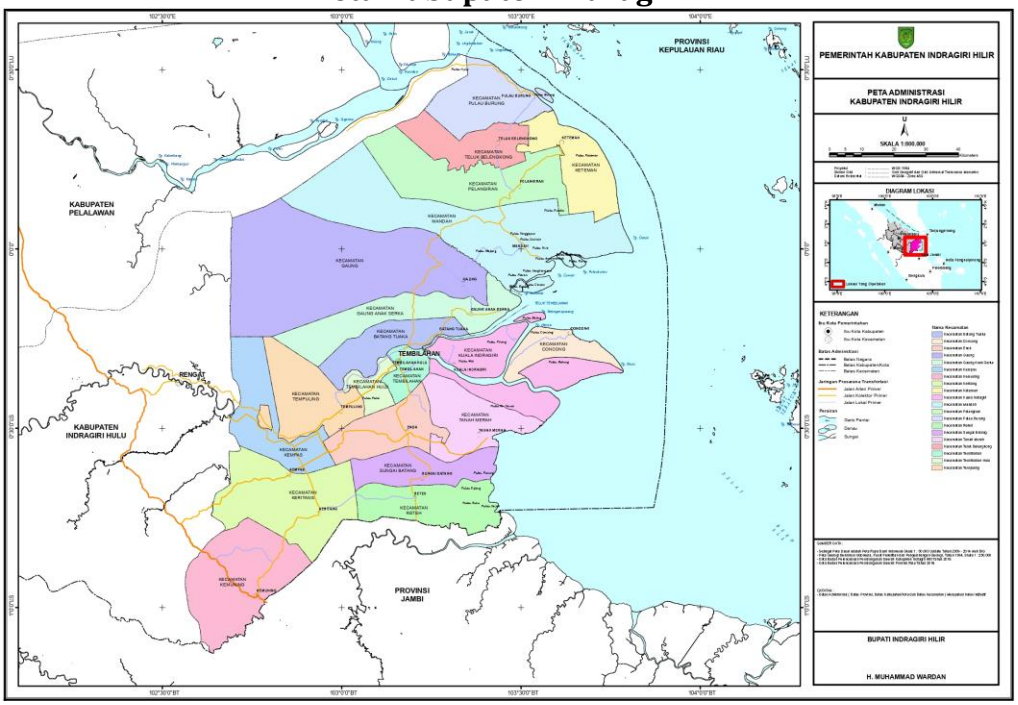

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawah ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Disisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus dilintasi oleh jalan Nasional Lintas Timur. Posisi Kabupaten yang strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.1.

Tabel II.1
Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2022

No	Kecamatan	Luas		Jumlah	
		Km²	%	Desa	Kelurahan
1	Keritang	918,96	6,79	16	1
2	Kemuning	907,17	6,71	11	1
3	Reteh	529,29	3,91	11	3
4	Sungai Batang	413,35	3,06	7	1
5	Enok	457,76	3,38	10	4
6	Tanah Merah	502,07	3,71	9	1
7	Kuala Indragiri	814,34	6,02	7	1
8	Concong	280,38	2,07	5	1
9	Tembilahan	169,57	1,25	-	8
10	Tembilahan Hulu	148,71	1,10	4	2
11	Tempuling	586,62	4,34	5	4
12	Kempas	576,60	4,26	10	2
13	Batang Tuaka	406,22	3,00	12	1
14	Gaung Anak Serka	671,48	4,96	9	3
15	Gaung	2.093,52	15,48	15	1
16	Mandah	1.747,39	12,92	16	1
17	Kateman	491,90	3,64	8	3
18	Pelangiran	865,16	6,40	15	1
19	Teluk Belengkong	412,92	3,05	13	-
20	Pulau Burung	531,68	3,93	14	-
	Jumlah	**13.525,10**	**100,00**	**197**	**39**

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023)

b. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), dan daerah hutan payau (*mangrove*). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun- kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut maka terdapat pula

selat- selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0 – 3 Meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6.69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6 - 35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh kemiringan 0 – 2 % seluas 1.298.763 Ha (94.97 %), kemiringan 3 - 5 % seluas 9.710 Ha (0.71 %), kemiringan 16 - 40% seluas 21.197 Ha (1.55 %) dan kemiringan di atas 40 % seluas 37.744 Ha (2.76 %). Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0 – 8 %.

c. Kondisi Geologi

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan jalur cekungan sebagai akibat adanya peningkatan kegiatan tektonik bumi yang menyebar luas dan berbentuk morfologi pendataran. Morfologi pendataran ini biasanya memiliki bentuk sungai berbelok-belok dan membawa pasokan material sedimen dari hulu ke hilir. Sedimen-sedimen tersebut akhirnya terperangkap bersama media air pada cekungan- cekungan. Tanah pada cekungan tersebut ditumbuhi oleh *mangrove* (hutan bakau) sebagai sumber daya hayati pada ekosistem rawa dan hutan dataran rendah. Dalam jangka waktu skala geologi, cekungan- cekungan dan sumber daya hayati diatasnya mengalami

penurunan untuk mencari keseimbangan akibat adanya gaya-gaya tektonik dan pembenanan. Cekungan-cekungan ini tertutup kembali oleh sedimen yang terus memasoknya dimana kejadian ini berulang terus hingga sekarang.

Sumber daya hayati yang terperangkap dan tertutup sedimen pada masa muda akhirnya membentuk suatu endapan rawa pada tanah gambut. Sementara proses-proses ini terus berlangsung, endapan gambut yang sudah berumur lebih dewasa dapat disebut sebagai batu bara muda. Jadi gambut dapat dianggap sebagai tahapan awal pembentukan batubara. Endapan batubara yang mengalami pembebanan hingga jangka waktu skala geologi sampai suatu saat berubah menjadi lempung hitam dapat dianggap sebagai sumber minyak bumi yang mengalami pencucian atau *leaching*. Hasil pencucian ini akhirnya terjebak dalam suatu batuan perangkap minyak bumi Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran *alluvium* Sumatera Timur yang sangat luas. Dataran *alluvium* tersebut sebagian berupa rawa yang terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut pada zaman es. Perubahan ini merupakan awal proses pembentukan gambut di dataran *alluvium* Sumatera Timur. Ketika zaman es berakhir, air laut kembali surut, tetapi proses pembentukan gambut dan akumulasi sedimen di daerah rawa dan sepanjang pantai wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tetap berlangsung terus. Batuan yang tersingkap di permukaan kawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari jenis *alluvium*, endapan pantai (Qac) dan endapan rawa (Qs) yang keduanya mempunyai umur Kuarter. Tanah dan batuan yang tampak dipermukaan terdiri dari gambut, lumpur, lempung dan pasir. Gambut terletak di atas lumpur dan lempung, serta pasir didapatkan sebagai sisipan pada lumpur dan lempung. Sedangkan kedalaman batuan dasar sangat beragam, dimana ke arah pantai semakin dalam.

Tanah dan batuan di kawasan dataran pantai merupakan *alluvium* dan endapan pantai (Qac) yang disusun oleh pasir, lanau, lempung, lumpur, kerikil dan kerakal, sisa tumbuhan setempat dan lapisan gambut dengan tebal mencapai 5 meter. Tanah di dataran pantai terdiri dari lumpur berwarna abu-abu (terdapat dalam keadaan cair, sangat lunak, sangat plastik, memiliki rekah kerut tinggi, kadang-kadang mengandung bahan organik kurang dari 10% dan nilai *unconfined strength* kurang dari
0.5 kg/cm^2).

Dalam keadaan kering sifat lumpur sulit dibedakan dengan lempung. Lumpur abu-abu memiliki sifat keteknikan buruk, kurang teguh dan stabil. Batuan dasar, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 60 meter. Karena batuan dasar, diperkirakan satu-satunya batuan keras di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dapat ditafsirkan sebagai lapisan keras yang mampu menahan bangunan berat dan berada pada kedalaman lebih dari 60 meter. Tanah dan batuan di dataran limbah banjir dan rawa tepian sungai merupakan endapan rawa (Qs) yang disusun oleh lempung, lanau, pasir dan gambut. Tanah di kawasan ini terutama terdiri dari lempung abu-abu atau abu - abu dengan bercak kuning. Di beberapa lokasi kadang-kadang di atas lempung ditemukan gambut dengan ketebalan beragam, berkisar antara 50-300 cm.

- **Lempung abu-abu**, terdapat dalam keadaan liat, bersifat plastis, mengotori tangan/*sticky*, dan kadang - kadang mengandung bahan organik kurang dari 10%, rekah kerutnya tinggi, mudah mencair dan memiliki nilai *unconfined strength* kurang dari 2 kg/cm^2.Selain itu, dalam keadaan kering dapat mencapai 4 kg/cm^2 dan menjadi bersifat rapuh/*brittle* (Rajiyowiryono, 1986).
- **Pasir**, terdapat sebagai sisipan tipis pada lempung dan lumpur. Komposisi utamanya berupa kuarsa yang belum terikat kuat dan masih bersifat lepas.
- **Batuan dasar**, diperkirakan terdapat pada kedalaman lebih dari 40 meter.
- **Gambut,** bersifat sangat higroskopis, mampu menghisap dan melepas air dengan cepat, butirannya tidak terlalu kuat karena hanya terikat oleh tegangan pori dari air yang mengisi rongga antar butiran. Dalam keadaan kering akan kehilangan tegangan pori hingga mudah lepas, tetapi dalam kondisi kelewat jenuh air, gambut bersifat cair dan daya dukungnya bertambah lemah, sehingga gambut memiliki sifat keteknikan yang buruk. Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (90%) merupakan lahan dengan karakteristik tanah gambut ini.

Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat delapan kecamatan yang berlokasi di wilayah pesisir atau wilayah kecamatan berada di wilayah pesisir, yang meliputi 50 Desa. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Kateman, Pulau Burung, Mandah, Gaung Anak Serka, Kuala Indragiri, Tanah Merah, Sungai Batang dan Reteh. Kecamatan-kecamatan tersebut sebagian masih belum bisa disentuh melalui jalan darat seperti Pulau Burung, Kateman, Kuala Indragiri, sementara lima kecamatan lainnya sudah dapat dihubungi melalui jalan darat (roda 4 atau roda 2). Kompleknya permasalahan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan pembangunan pesisir daerah ini agak lambat. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah pesisir adalah keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan/jerambah, dermaga, air bersih, PLN dan telekomunikasi. Selain itu yang menjadi permasalahan adalah perambahan/penebangan hutan *mangrove*, *illegal fishing* dan minimnya sarana prasarana penangkapan dan pengolahan hasil perikanan.

d. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang Anadara dan kolam).

Disamping sungai-sungai dan selat, di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia, sehingga Kabupaten Indragiri Hilir disamping terkenal dengan julukan Negeri Sri Gemilang, juga di kenal sebagai Negeri Seribu Parit. Sumber daya air di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai dan parit. Air tanah terdiri dari air tanah bebas/*unconfined ground water* dan air tanah agak tertekan/*semiconfined groundwater*. Penentuan potensi ditentukan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sumber daya

air terutama ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan di samping dari data yang terhimpun dari penelitian terdahulu. Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pesisir Selatan ke arah Utara, yaitu DAS Reteh Gangsal, DAS Indragiri Tuaka, DAS Gaung Anak Serka, DAS Batangtumu, dan DAS Guntung Kateman.

e. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (80%) memiliki struktur tanah berupa tanah *Organosol* (*Histosol*), yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan organik. Lapisan tanah gambut mencapai ketebalan lebih dari 100 cm. Tanah ini dominan di daratan rendah diantara aliran sungai. Jenis tanah ini berasal dari akumulasi humus atas permukaan hutan yang melapuk pada permukaan tanah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, jenis tanah ini hampir menyebar di semua kecamatan.

Di sepanjang aliran sungai pada umumnya terdapat formasi tanggul alam *Natural River Leves* yang terdiri dari tanah-tanah *Aluvial* (*Entisol*) dan *Gley Humus* (*Inceptisol*). Selain itu, juga terdapat jenis tanah Podsolik merah-kuning dan bahan induk batuan endapan dengan fisiografi dataran. Jenis ini hanya terdapat di bagian barat ke arah selatan (Kecamatan Keritang). Di samping itu, sebagian wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan daerah muara sungai. Lapisan atas batuan permukaannya terdiri dari endapan *alluvial* lunak yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh sungai, sehingga sebagian besar lapisan permukaan tanah yang dilewati oleh aliran sungai adalah deposit sabuk *meander*. Secara teknis lapisan permukaan *alluvial* lunak (lapisan sabuk *meander*, organik dan gambut) mempunyai sifat kompresitasnya yang tinggi, sehingga menyebabkan mudahnya penurunan lapisan tanah.

Penurunan lapisan tanah diakibatkan oleh adanya aliran air pori menuju ke butir tanah karena pembebanan struktur yang bersifat konstan baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan demikian akan diperlukan biaya yang lebih besar terutama dari material dan teknik pembangunan untuk mendapatkan struktur bangunan yang baik di atas tanah tersebut. Berdasarkan Peta Zonasi Kerentanan Tanah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber daya

Mineral, Zona Kerentanan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah (ZKGTSR) dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah (ZKGTR). ZKGTSR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai. ZKGTR adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

Daerah Indragiri Hilir bagian Selatan disekitar Kecamatan Keritang terdapat tanah *Podsolik* merah kuning (*Ultisol*). Potensi tanah *Orgasol* ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut atau bahan organiknya. Daerah-daerah yang mempunyai ketebalan gambut lebih dari 1 (satu) meter pada umumnya tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kesuburan tanah-tanah *gleihumus* dan *organosol* termasuk sedang sampai tinggi, sehingga tanah-tanah di daerah ini cukup baik untuk pengembangan komoditi pertanian dalam arti luas.

Nilai ekonomis tanah gambut untuk lahan pertanian ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut. Semakin tebal lapisan gambut, maka semakin kurang baik tanah itu untuk pertanian. PH tanah gambut sangat rendah, yaitu antara 3,5 – 6, sehingga bersifat asam. Di daerah Reteh, lapisan mineral di bawah gambut berwarna kelabu. Ditempat- tempat dengan tebal bahan organik 100 - 200 cm, pada umumnya telah ditanami dengan tanaman keras seperti kelapa, karet, kopi, buah-buahan dan tanaman-tanaman tahunan lainnya.

Tanah gambut yang tebal diidentifikasi memiliki bahan organiknya lebih dari 200 cm. Sampai dengan saat ini praktis belum terolah dan kalaupun ada masih sangat terbatas luasnya. Karena masalah yang dihadapi dari tanah gambut, maka diperlukan adanya usaha reklamasi tanah dengan pembuatan drainase, akan tetapi berakibat bahwa akan terjadi aksinasi yang cepat dari bahan organik. Oleh sebab itu, pembuatan parit harus

memperhatikan agar pengaturan kedalaman air tanah sampai pada batas yang dikehendaki sehingga tidak mempercepat terjadinya pengerutan tanah. Sebagaimana halnya dengan *gleihumus* tanah *organosol* yang peka terhadap peristiwa penurunan atau pengerutan tanah, sehingga juga perlu usaha reklamasi.

f. Daya Dukung Lahan

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Indragiri Hilir digolongkan menjadi dua yaitu tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral yaitu tanah yang dihasilkan dari proses pelapukan batuan seperti tanah *latosol* (merah) dan tanah *andosol* (hitam). Sedangkan tanah dari hasil pematangan sisa-sisa tanaman akan membentuk tanah organik seperti tanah gambut. Keadaan fisiografi, bentuk wilayah dan sifat-sifat tanah menggambarkan karakteristik yang membedakan satuan lahan. Kualitas lahan sangatlah dipengaruhi oleh kualitas jenis tanahnya yang juga sangat tergantung pada kondisi geologis, iklim maupun topografinya. Secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 5 (lima) kelompok satuan lahan fisiografi, yaitu: kelompok *marin*, kubah gambut, *alluvial*, dataran dan perbukitan.

1. Kelompok Marin**,** terletak disepanjang pantai dengan ini merupakan hasil proses sedimentasi dan secara jelas terlihat dengan adanya pelebaran pantai yang terjadi karena penambahan bahan endapan dan proses pengangkatan. Satuan lahan pada kelompok ini dapat dibedakan antara lain beting pasir, dataran pasang surut, rawa belakang pantai, dan endapan *delta*. Kelompok ini luasnya mencapai 17.09% dari luas lahan di Kabupaten Indragiri Hilir dan umumnya adalah berupa dataran pasang-surut dengan kemiringan lahan yang umumnya kurang dari 3%.
2. Kelompok Kubah Gambut**,** terbentuk dari endapan organik yang berasal dari endapan permukaan muda dan tua. Secara umum ketebalan gambut akan meningkat semakin jauh dari sungai. Dengan pengendalian tata air yang baik, daerah ini sebenarnya memiliki potensi untuk perkebunan. Namun miskinnya kandungan hara dapat menjadi penghambat utama. Tanah *organosol* atau tanah gambut ini merupakan jenis tanah yang paling dominan terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir,

mencapai 75.32% dari luas wilayahnya dan umumnya mempunyai ketebalan lebih dari 2 meter.

3. Kelompok *Alluvial*, terbentuk dari endapan *alluvial* sungai dan terletak di sepanjang jalur- jalur aliran sungai. Pada umumnya daerah ini cukup potensial untuk lahan persawahan, tentunya dengan memperhatikan jalur hijau yang harus dipertahankan. Kelompok ini merupakan satuan fisiografi yang terkecil di Indragiri Hilir, yaitu hanya sekitar 0.57% dari luas wilayah.

Tabel II.2
Luas Satuan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Satuan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Keterangan
1	Marin	233.714	17,09	Umumnya kelerengan < 3% dan sebagian kecil < 8%
2	Kubah Gambut	1.030.039	75,32	Didominasi oleh oligotrofik air tawar dengan kedalaman > 2 meter
3	Alluvial	7.795	0,57	Umumnya Kelerengan < 3%
4	Dataran	58.121	4,25	Umumnya Kelerengan < 3% dan terdapat di bagian selatan
5	Perbukitan	37.881	2,77	Umumnya kelerengan 16-25% dan terdapat dibagian selatan
Total		1.367.551	100	

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir

4. Kelompok Dataran, berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya <3%. Luasnya mencapai 4.25% dari luas wilayah.
5. Kelompok Perbukitan, seperti halnya kelompok dataran, kelompok perbukitan berkembang dari batuan sedimen dan tur intermedier dan mafik. Kelompok ini juga hanya ditemui pada bagian selatan Indragiri Hilir dengan kelerengan umumnya 16-25%, terutama yang berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan provinsi Jambi (TNBT). Luasnya mencapai 2.77% dari luas total wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

g. Klimatologi

Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim. Iklim dalam konteks ini membahas tentang perkembangan curah hujan dan hari hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dipermukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dalam satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, *run off* dan infiltrasi. Sifat hujan dibagi kedalam tiga kategori yaitu (i) diatas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya, (ii) normal, jika nilai curah hujan antara 85 -115% terhadap rata-ratanya dan (iii) dibawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Curah hujan normal sekitar 150 mm/bulan dengan kisaran antara 2.000 – 3.000 mm/tahun.

Selama periode 2015 - 2019, rata-rata hari hujan di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 93 - 149 hari hujan per tahunnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata hari hujan Kabupaten Indragiri Hulu yang berkisar antara 171 – 210 hari hujan per tahun. Rata-rata hari hujan menurun tajam pada tahun 2015 yang hanya sebanyak 93 hari hujan dengan curah hujan yang rendah yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disertai kabut kabut asap.

Tabel II.3
Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022

No.	Bulan	2019		2020		2021		2022	
		Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)	Hari Hujan (HH)	Curah Hujan (CH)
1	Januari	11	171.8	9	124.5	12	209.5	10	282
2	Februari	9	138.2	7	98	4	22.1	16	323.1
3	Maret	10	170	9	134	11	177.6	15	258.6
4	April	12	188.7	12	198.9	13	291.3	13	239.4
5	Mei	9	142.5	12	234.1	10	164.3	11	154.2
6	Juni	8	88	9	154.2	9	114.8	11	169
7	Juli	5	62.1	8	129.5	6	101.2	9	158.2
8	Agustus	6	84.5	9	147.8	12	218.5	13	150.4
9	September	5	79.9	13	229.6	12	211	11	160
10	Oktober	8	110.9	11	236.5	11	223.1	18	344.5
11	November	11	169.7	13	263.2	12	236.2	13	218.9
12	Desember	12	162.9	11	210.2	14	214.7	13	214.9
Jumlah		106	1569.2	123	2160.5	126	2184.3	153	2673.2

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2023

Selama periode 2019 – 2022, rata-rata hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi atau musim penghujan, umumnya mulai terjadi pada bulan Agustus hingga bulan Desember. Sejalan dengan hari hujan, curah hujan di Kabupaten Indragiri Hilir juga dibawah normal dengan kisaran sebesar 1.307 mm/tahun – 2.021 mm/tahun dengan rata-rata sebesar 1.744 mm/tahun, lebih rendah dibanding curah hujan di Kabupaten Indragiri Hulu yang rata-ratanya sebesar 2.292 mm/tahun.

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi pengembangan pertanian khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki total luas lahan kering dan lahan basah Kabupaten Indragiri terluas di Riau yaitu seluas 1.355.095,84 hektar atau 15,25% dari total luas lahan kering dan lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki lahan basah seluas 1.321.623,13 hektar atau 15,18% dari total lahan basah di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki total luas lahan kering seluas 33,457,33 hektar atau 18,63% dari total lahan kering Provinsi Riau.

Gambar II.2
Distribusi Lahan Basah dan Lahan Kering
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

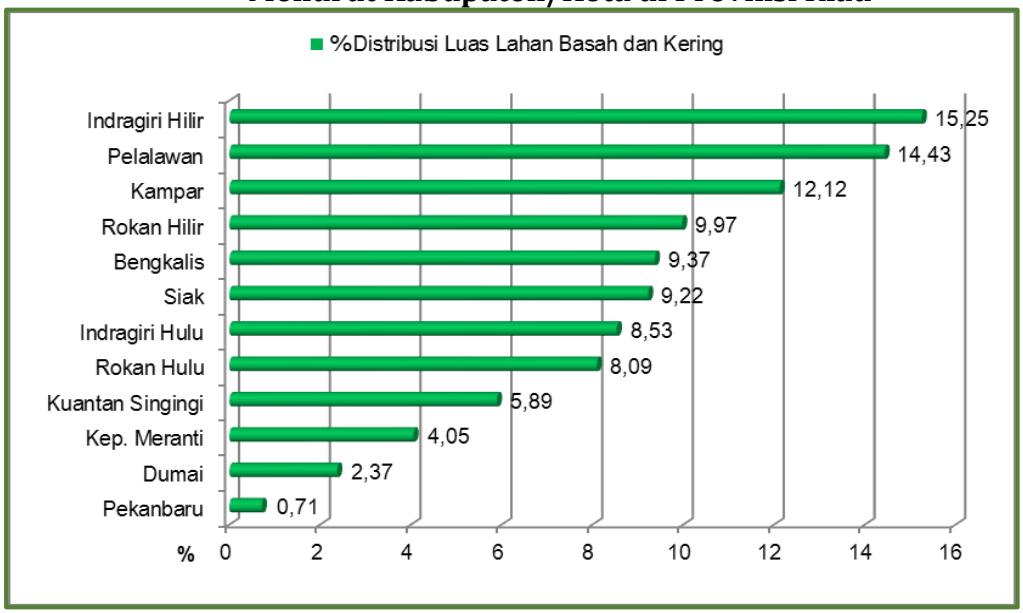

Sumber: BPS Provinsi Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2017)

Potensi lahan basah dan lahan kering yang sebagian telah dikembangkan menjadi perkebunan kelapa, kelapa sawit dan tanaman pangan. Produksi hasil perkebunan kelapa dan kelapa sawit ini perlu didukung dengan industri hilir sehingga nilai tambah dapat diperoleh oleh daerah.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam yang umumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan kebakaran hutan/lahan. Bencana banjir di Kabupaten Indragiri Hilir terjadi karena perubahan musim khususnya musim hujan yang disertai dengan gelombang pasang surut yang juga cukup besar. Bencana tanah longsor umumnya terjadi dikawasan tepi sungai yang merupakan kawasan sempadan sungai yang penggunaan untuk budidaya atau perumahan. Potensi bencana longsor di Kabupaten Indragiri Hilir berada di kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari rawa serta sebagian gambut dan berada di pinggiran sungai, termasuk daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti, tanah longsor/ abrasi, kebakaran hutan dan lahan, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang dan Banjir. Daerah rawan Longsor berada pada sepanjang bantaran sungai Indragiri antara lain Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, dan Kecamatan Kateman. Daerah rawan kebakaran Lahan adan Hutan berada pada daerah Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Keritang, Kemuning,Kempas, Tempuling, Gaung, Enok, Kateman, Gaung Anak Serka, Pelangiran, Concong, Reteh, dan Tanah Merah.

Bencana non alam yang rawan terjadi adalah epidemis dan wabah penyakit berupa *Covid-19* Selain itu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dengan heterogenitas suku, agama dan sosial budaya juga sangat rentan terhadap bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas. Pada pelaksanaan Penanggulangan Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Indragiri Hilir Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam SK Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 341/III/HK-2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-*

19) Kabupaten Indragiri Hilir kepala Pelaksana Badan Penangglangan Bencana Daerah bertugas menjadi Sekretaris Umum Penanggulangan Pandemi *Covid-19* yang bertugas menyusun regulasi – regulasi pendukung dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran *Covid-19* seperti, SK Bupati, Instruksi Bupati, Keputusan Ketua Gugus Tugas, Surat Edaran dan lain-lain.

Tabel II.4
Bencana Alam Menurut Jenis Bencana
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jenis Bencana				
	Longsor /Abrasi	Puting Beliung	Banjir	Gelombang Pasang	Karlahut
2018	10	4	-	-	32
2019	4	2	3	-	67
2020	10	6	3	1	51
2021	8	12	20	3	49
2022	15	9	18	1	23
Jumlah	58	33	44	6	226

Sumber : BPBD Indragiri Hilir

Dari tabel rekap kejadian bencana yang sering terjadi Kabupaten Indragiri Hilir terdapat kawasan – kawasan yang memiliki tingkat kerentanan terjadi nya bencana, seperti bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan kebakaran hutan/lahan, namun selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dapat memetakan kawasan tersebut di setiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dan hanya 4 kecamatan terdapat Peta daerah rawan bencana dari 20 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Kateman, Kecamatan Tempuling, dan Kecamatan Tanah Merah.

Berdasarkan data dari Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten yang masuk dalam kelas resiko bencana tinggi yakni pada tahun 2021 nilai IRB 168.40 poin. Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.5
Nilai indeks risiko Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2021

Indragiri Hilir	Tahun					Kelas Resiko
	2018	2019	2019	2020	2021	
	168.40	168.40	168.40	168.40	168.40	Tinggi

Sumber : Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kebakaran Hutan, Longsor/Abarsi dan Banjir masih mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Tahun 2021. Kultur masyarakat yang mendirikan bangunan ditepian sungai serta Keberadaan hutan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Indragiri Hilir, begitupun tumbuhan dan satwa liar yang menggantungkan hidupnya di kawasan hutan. Karena itu pengelolaan hutan sebaiknya memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan agar kesejahteraan manusia ikut terjamin.

2.1.3. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 654.909 jiwa yang terdiri atas 339.599 jiwa penduduk laki-laki dan 315.310 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 107,7. Kondisi ini meningkat pada tahun 2021 menjadi 658.025 jiwa yang terdiri atas 315.310 jiwa penduduk laki-laki dan 317.111 jiwa penduduk perempuan atau naik 0,36 persen dari tahun 2020.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 mencapai 48,65 jiwa/Km^2. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tembilahan sebesar 463,55 jiwa/ Km^2 dan kepadatan terendah di Kecamatan Kuala Indragiri sebesar 18,05 jiwa/ Km^2.

Kondisi lebih rendahnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir karena Kabupaten Indragiri Hilir "belum" menjadi 'sasaran' migrasi penduduk luar Provinsi Riau. Pada masa yang akan datang, dengan semakin berkembangnya perekonomian dan khususnya industri kelapa sawit dan kelapa, akan menarik migrasi penduduk ke Indragiri Hilir.

Tabel II.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)			
		2019	2020	2021	2022
1	Keritang	61.203	63.103	63.567	63.994
2	Kemuning	35.893	38.499	38.782	39.043
3	Reteh	34.97	35.974	36.006	36.015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)			
		2019	2020	2021	2022
4	Sungai Batang	10.098	10.066	10.08	10.087
5	Enok	33.999	33.846	33.959	34.051
6	Tanah Merah	24.916	25.236	25.268	25.283
7	Kuala Indragiri	14.345	14.679	14.697	14.706
8	Concong	11.66	11.764	11.78	11.788
9	Tembilahan	75.864	77.862	78.605	79.309
10	Tembilahan Hulu	45.781	46.662	47.108	47.528
11	Tempuling	31.848	31.633	31.866	32.080
12	Kempas	37.574	38.671	38.955	39.217
13	Batang Tuaka	26.727	27.19	27.289	27.372
14	Gaung Anak Serka	22.476	22.591	22.744	22.883
15	Gaung	36.93	38.367	38.407	38.422
16	Mandah	33.416	34.531	34.578	34.603
17	Kateman	37.007	39.284	39.32	39.331
18	Pelangiran	28.718	35.318	35.354	35.367
19	Teluk Belengkong	8.579	9.229	9.237	9.239
20	Pulau Burung	17.837	20.404	20.423	20.429
	Kab. Indragiri Hilir	**740.598**	**654.909**	**658.025**	**660.747**

Sumber: https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id, Kab. Indragiri Hilir dalam angka 2023

Selama periode 2019 – 2022, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurun yaitu dari 740.598 orang menjadi 666.747 orang dengan rata-rata Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20 persen per tahun. Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir ini lebih rendah dibandingkan rata- rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau pada periode yang sama yang masing-masingnya 2,23 persen per tahun, 2,77 persen per tahun dan 1,68 persen per tahun. Namun, pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan menjadi 660.747 orang atau menurun 10,78 persen dari tahun 2019.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut tingkat kepadatannya pada tahun 2021 - 2022 berkisar antara 48.65 - 48,85 jiwa/Km^2 dan masih tergolong rendah. Pada tahun 2022, penduduk terpadat menurut kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat di kecamatan Tembilahan yang merupakan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 467,70 jiwa/Km^2

diikuti oleh Kecamatan Tembilahan Hulu sebanyak 319,61 jiwa/Km^2, Kecamatan Kateman dengan 79.96 jiwa/Km^2 dan Kecamatan Keritang 69,64 jiwa/Km^2. Sedangkan untuk kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kuala Indragiri dan Kecamatan Gaung dengan 18 jiwa/Km^2. Tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan ini berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi dan keterbukaan wilayah.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir menurut kelompok umur data tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 69,40% terkategori umur produktif dan 30,60% terkategori tidak produktif. Hal yang mendapat perhatian adalah bahwa Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai mendapat '*baby boom*' yang ditunjukkan dari porsi penduduk usia muda (0 - 14 tahun) yang saat ini sedang sekolah yaitu sebesar 25,90%. Oleh karena itu, penguatan program keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pembukaan kesempatan bekerja dan berusaha harus lebih mendapat perhatian lebih dalam pembangunan ke depan.

Tabel II.7
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Indragiri Hilir Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Penduduk		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	27.979	26.539	54.518
2	5 - 9	28.809	27.606	56.415
3	10 - 14	29.708	28.440	58.148
4	15 - 19	28.655	27.014	55.669
5	20 - 24	30.017	28.078	58.095
6	25 - 29	28.599	26.334	54.933
7	30 - 34	27.946	25.898	53.844
8	35 - 39	26.287	25.047	51.334
9	40 - 44	25.499	24.361	49.860
10	45 – 49	23.214	21.726	44.940
11	50 - 54	19.337	18.082	37.419
12	55 - 59	15.328	13.964	29.292
13	60 - 64	12.187	10.935	23.122
14	65 - 69	9.325	7.641	16.966
15	70 - 74	5.722	4.457	10.179
16	75+	3.410	2.603	6.013
Indragiri Hilir		**342.022**	**318.725**	**660.747**

Sumber: Kab. Indragiri Hilir dalam angka 2023.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi difokuskan pada analisis terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat inflasi dan indikator-indikator kemiskinan.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2019-2022, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Idragiri Hilir atas dasar harga konstan dengan trend meningkat. Peningkatan pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 yang erat kaitannya dengan kelembaban ekonomi dunia, diperparah oleh wabah *covid-19* pada tahun 2020 sehingga aktifitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat dan menurun pada tahun tersebut dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 ini.

Gambar II.3
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Harga Konstan
(Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022

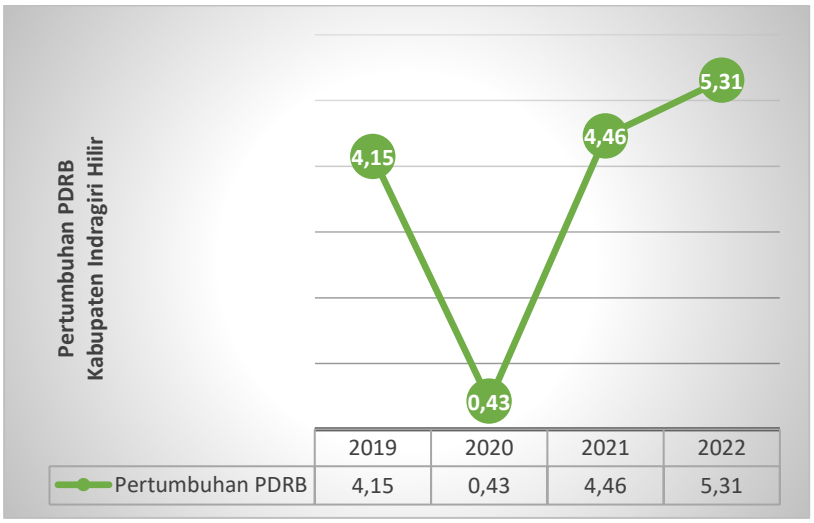

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Pada tahun 2019 dan 2020, pertumbuhan ekonomi Indragiri Hilir lebih baik dibanding Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau. Pada tahun

2020, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari pandemi *COVID-19*. Hanya Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan yang mengalami pertumbuhan positif yaitu 0,34 persen dan 2,24 persen. Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi minus 0,12 persen dan minus 1,13 persen. Kabupaten Indragiri Hilir masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi 46,78 persen terhadap PDRB. Sedangkan Kabupaten Pelalawan ditopang oleh kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masing – masing sebesar 48,65 persen dan 40,62 persen. Pada Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Indragiri Hilir kembali meningkat menjadi 5,31 persen, nilai ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau (4,55), Kabupeten Pelalawan (4,39) , serta Indragiri Hulu (4,63) persen.

Gambar II.4
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022

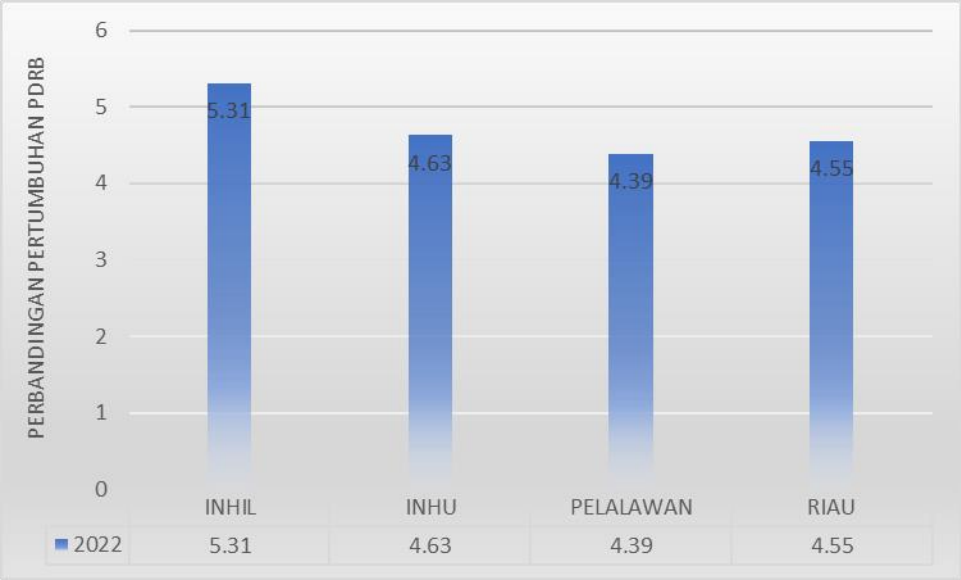

Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir dan Riau Dalam Angka 2022

Selama periode 2019 – 2022, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diikuti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan kontruksi. Lapangan usaha pertanian memberikan kontribusi terbesar pada dengan tren kontribusinya semakin menurun yaitu dari 48,03% pada tahun 2017 menjadi 44,68% pada tahun 2019, kemudian kembali mengalami peningkatan

sebesar 47,54% pada 2021. Meski kontribusi lapangan usaha pertanian cenderung menurun pada tahun 2019 namun kontribusi pertanian yang besar telah menyakinkan semua pihak bahwa Pertanian adalah sektor unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga kembali meningkat di tahun 2021.

Penurunan kontribusi lapangan usaha pertanian yang seharusnya diimbangi dengan meningkatnya tren kontribusi industri pengolahan. Namun kenyataannya kontribusi industri pengolahan berfluktuatif menurun yaitu dari 23,65% pada tahun 2017 menurun menjadi 23,63% pada tahun 2019. Kondisi ini menggambarkan telah mulai terjadi kemunduran dalam transformasi ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir dari pertanian ke industri. Namun Pada tahun 2021 Industri pengolahan kembali meningkat menjadi 24,65%.

Tabel II.8
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Indragiri Hilir
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2022

Kategori Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44.68	46.77	47.50	46.10
b	Pertambangan dan Penggalian	0.96	0.83	1.12	2.41
c	Industri Pengolahan	23.63	24.06	24.63	25.06
d	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.06	0.06
e	Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01
f	Konstruksi	6.28	5.88	5.77	5.74
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.55	16.11	14.98	14.89
h	Transportasi dan Pergudangan	1.15	0.93	0.90	0.94
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.47	0.38	0.39	0.39
j	Informasi dan Komunikasi	0.64	0.65	0.62	0.58
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.59	0.58	0.56	0.56
l	Real Estate	0.88	0.86	0.79	0.76
m,n	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00
o	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	1.76	1.66	1.53	1.41
p	Jasa Pendidikan	0.63	0.62	0.57	0.53
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.16	0.18	0.18	0.16
r,s,t,u	Jasa Lainnya	0.54	0.42	0.39	0.40
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100.00**	**100.00**

Sumber: Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022

Selama periode 2017 – 2021, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan kontruksi yang merupakan lapangan usaha terbesar ketiga dan keempat pembentuk Produk Domestik Regional Bruto Indragiri Hilir. Relatif terbatasnya sumber -sumber lapangan usaha yang hanya mengandalkan pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan kontruksi maka dipandang perlu upaya - upaya menggerakkan lapangan usaha potensial yang belum tersentuh dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar dalam pembentukan PBRB Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel II.9
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2022

Kategori		Tahun			
		2019	2020	2021	2022
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.00	3.50	4.01	4.34
b	Pertambangan dan Penggalian	0.45	-0.21	6.70	28.25
c	Industri Pengolahan	4.27	1.89	4.61	4.68
d	Pengadaan Listrik dan Gas	0.28	6.98	7.25	9.38
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.62	0.40	4.85	2.87
f	Konstruksi	4.87	-3.22	6.34	5.48
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.87	-8.30	4.57	7.72
h	Transportasi dan Pergudangan	2.23	-18.42	5.83	9.80
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.54	-17.99	14.23	12.09
j	Informasi dan Komunikasi	6.81	8.18	7.40	4.54
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.17	1.63	4.68	3.97
l	Real Estat	6.03	0.95	3.01	4.38
m,n	Jasa Perusahaan	2.67	-20.83	1.43	15.16
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.18	-3.29	3.01	3.89
p	Jasa Pendidikan	4.64	1.56	3.23	3.22
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.96	12.36	11.38	1.21
r,s,t,u	Jasa lainnya	6.06	-20.66	4.20	15.47
	Produk Domestik Regional Bruto	4.15	0.43	4.46	5.31

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023)

Lapangan usaha yang perlu mendapat perhatian untuk didorong agar dapat memberikan kontribusi yang besar pada Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat dari pertumbuhannya yang tinggi dari rata- rata pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2020, dimana pandemi *COVID-19* melanda, lapangan usaha jasa perusahaan dan jasa lainnya

mengalami kontraksi cukup dalam yaitu 20,83 persen dan 20,66 persen. Lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu 12,36 persen. Lapangan usaha informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan cukup tinggi seiring dengan pembatasan interaksi yang diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran *COVID-19* sehingga masyarakat bekerja dari rumah (WFH) dan sekolah juga dilakukan secara daring. Lapangan usaha ini adalah sektor perlu mendapat perhatian, namun demikian, sektor pertanian dan industri pengolahan tetap menjadi prioritas utama.

Gambar II.5
Kinerja Indikator Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2022

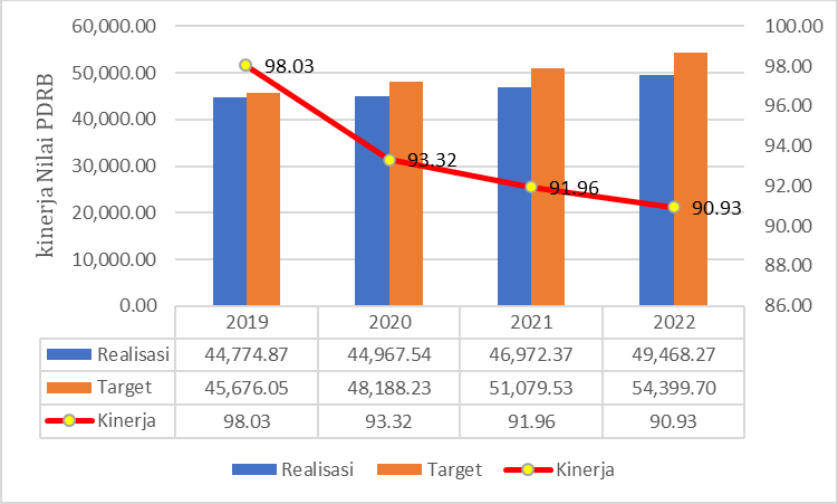

	2019	2020	2021	2022
Realisasi	44,774.87	44,967.54	46,972.37	49,468.27
Target	45,676.05	48,188.23	51,079.53	54,399.70
Kinerja	98.03	93.32	91.96	90.93

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023)

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2022 telah ditargetkan bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 sebesar Rp 45.676,05 (juta), meningkat menjadi Rp 54.399,70 (juta) sampai dengan tahun 2022. Realisasi nilai PDRB tahun 2019 sebesar Rp 44.774,87 dengan kinerja sebesar 98,03 persen, sementara pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen maka nilai PDRB 2022 Rp 49.468,27 (juta) dengan kinerja sebesar 90.93%. Meskipun target RPJMD tidak tercapai atau melebihi , namun rata-rata capaian kinerja terkategori sangat baik yaitu sebesar 93,56 Persen.

Gambar II.6
Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2021

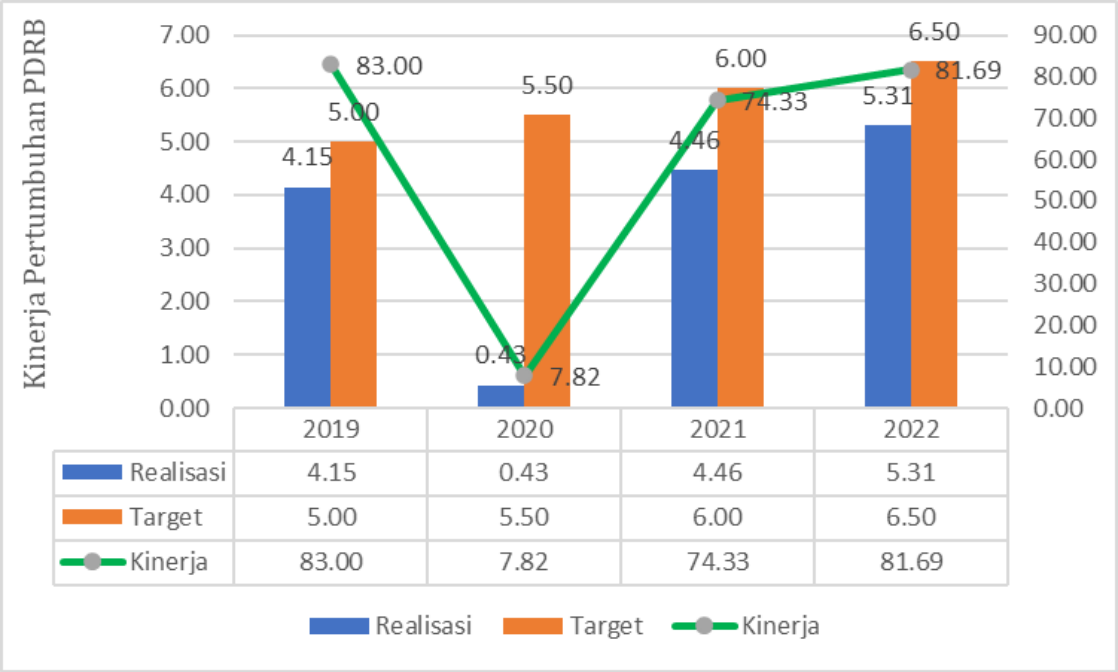

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir(Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2023)

Dalam RPJMD Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023, pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan ditarget berkisar antara 5,00 persen hingga 7,00 persen. Pada tahun 2019, realisasi pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami penurunan dari 4,15 persen menjadi 0,34 persen Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir mulai pulih Kembali di tahun 2021 sebesar 4,46 persen,sehingga realisasi kinerja nya juga meningkat sebesar 74,33 bahkan tahun 2022 meningkat tajam menjadi 5.32 Persen dengan kinerja terkategori tinggi yakni 81,69 persen. Penyebab rendahnya realisasi pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat dari pandemi COVID-19 menjadi 0,34 persen dengan realisasi kinerja hanya 7,82 persen.

2.2.1.2. Inflasi

Selama periode 2019 – 2021, inflasi di Tembilahan – Indragiri Hlir berada terkategori inflasi ringan. Namun Pada tahun 2022, Kota

Tembilahan mengalami Inflasi yang terkategori ringan yaitu mencapai 4,82 persen dengan nilai terbesar pada kelompok transportasi yaitu 13,35 persen dan terendah pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -2,06 persen.

Gambar II.7
Perkembangan Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pekanbaru, Dumai dan Riau Tahun 2019 – 2022

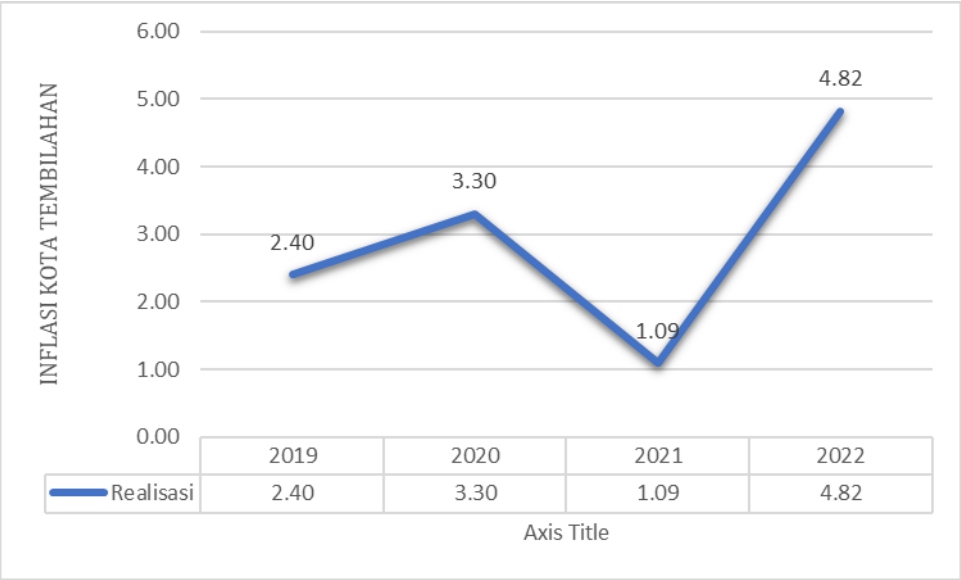

Sumber: BPS Prov. Riau (Provinsi Riau Dalam Angka, 2023)

Gambar II.8
Kinerja Indikator Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022

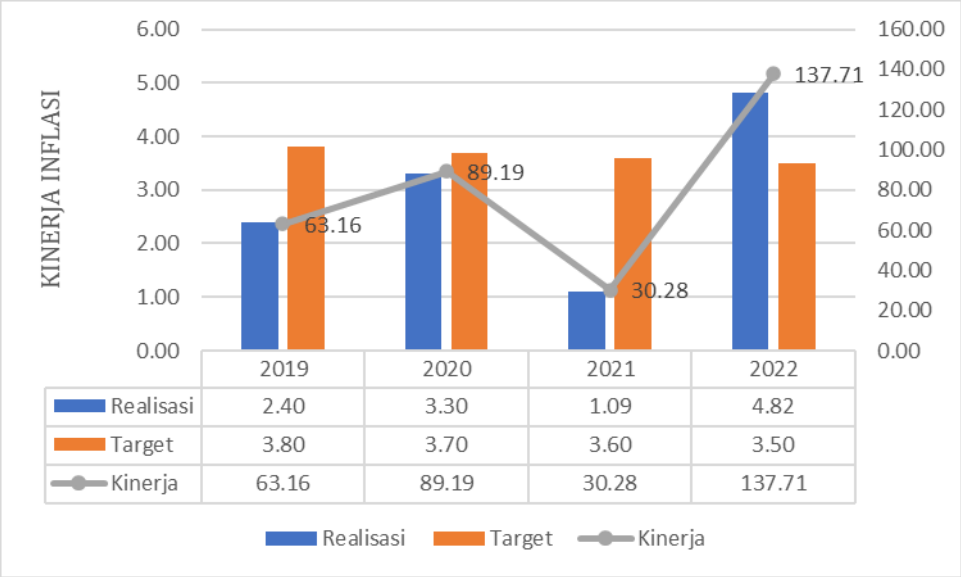

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka, 2022)

Pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2020 telah ditargetkan inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 3,80 dan 3.70 persen serta untuk tahun 2021 dan 2022 sebesar 3,60 persen dan 3,50 persen yang masih terkategori inflasi ringan. Selama periode 2019 – 2022, Realisasi inflasi di Indragiri Hilir berkisar antara 1,09 persen - 4,82 persen, hal ini mengalamai peningkatan dimana selama periode 2019 – 2022, realisasi kinerja umumnya terkategori sangat tinggi.

2.2.1.3. PDRB Per kapita

Selama periode 2019 – 2022, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren yang terus meningkat. Pada tahun 2019, PDRB per kapita sebesar Rp 87,34 juta per kapita/tahun meningkat menjadi Rp 126,25 juta per kapita/tahun pada tahun 2022. PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibanding PDRB per kapita Kabupaten Pelalawan yaitu 159,54 Juta Perkapita/tahun, sementara Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 117, 34 Juta Perkapita/tahun pada tahun 2022. Sementara PDRB per kapita Provinsi Riau sebesar 149,91 Juta Perkapita/tahun.

Gambar II.9
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022

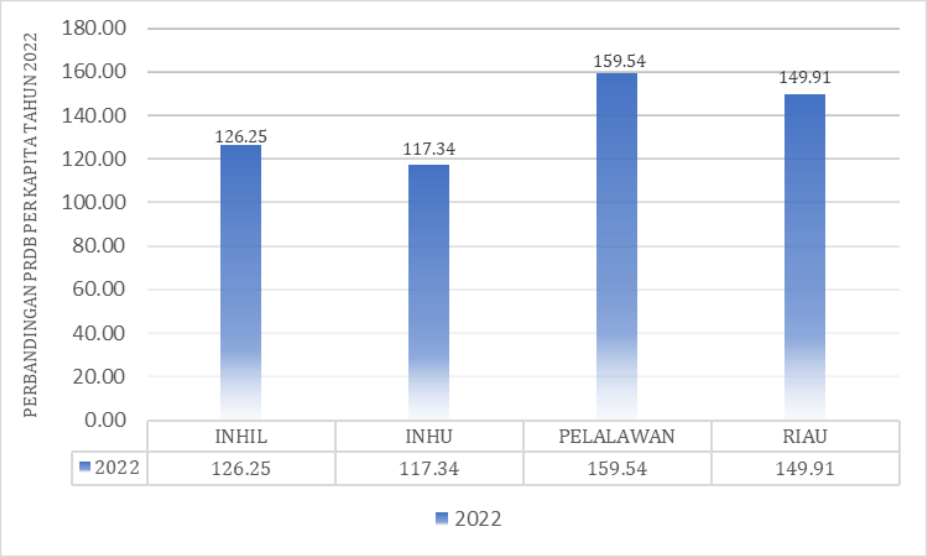

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Angka, 2023)

Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 telah ditargetkan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2019 sebesar Rp 60,73 juta/kap/tahun, meningkat menjadi Rp 62,02

juta/kap/tahun pada tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2021 disesuaikan menjadi 63,34 juta/kap/ tahun dan sebesar 64,69 juta/kap/tahun pada tahun 2022. Realisasi PDRB per kapita tahun 2019 - 2022 berkisar antara Rp 87,34 juta/kap/tahun – Rp 126,25 juta/kap/tahun. Selama periode 2019 – 2022, realisasi kinerja PDRB per kapita terkategori sangat tinggi bahkan melebihi target

Gambar II.10
Kinerja Indikator PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 – 2022

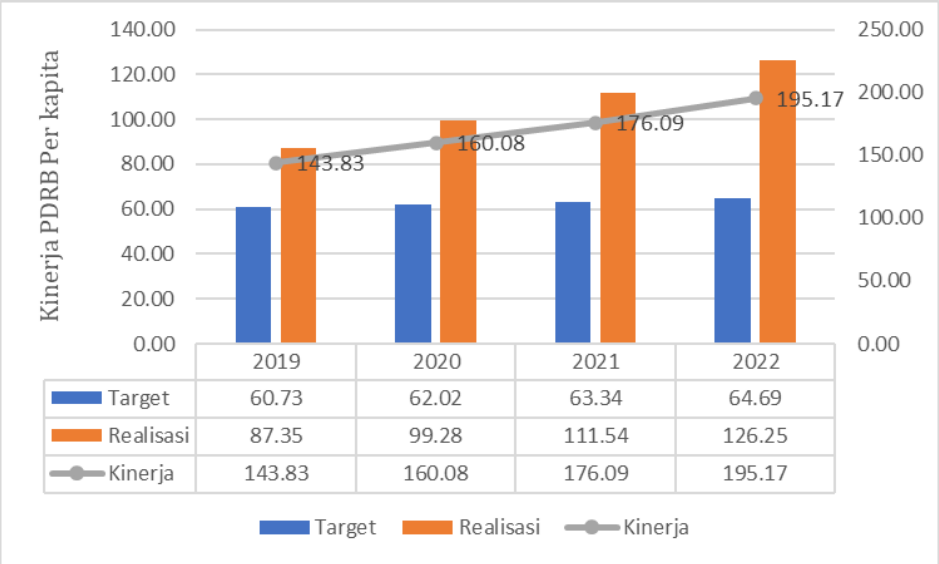

	2019	2020	2021	2022
Target	60.73	62.02	63.34	64.69
Realisasi	87.35	99.28	111.54	126.25
Kinerja	143.83	160.08	176.09	195.17

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Dalam Angka, 2017-2021)

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1.Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi kemerataan sempurna,sementara indeks gini bernilai satu berarti ketimpangan tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2019 – 2022 berada di kisaran angka 0.296 – 0.310, angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tingkat ketimpangan yang relatif sedang. Akan tetapi angka ini merupakan peringatan dini untuk Kabupaten Indragiri Hilir agar bisa mengantisipati kesenjangan distribusi pendapatan yang ada di kalangan masyarakatnya. Angka kesenjangan yang relatif tinggi dapat menyebabkan

terjadinya kecemburuan-kecemburuan sosial diantara masyarakat, sehingga bisa menyebabkan adanya konflik sosial serta tindakantindakan kriminal lainnya. Perkebangan Indeks Gini Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.10
Perkebangan Indeks Gini Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Indeks Gini	0.303	0.310	0.297	0.296

Sumber : BPS Indragiri Hlir, 2023

2.2.1.5. Kemiskinan

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan disini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran baik makanan maupun non makanan di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, untuk melihat penduduk masyarakat yang sejahtera, maka dapat didekati dengan melihat persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan atau dianggap penduduk tidak miskin.

Secara umum, angka kemiskinan di Indragiri Hilir mengalami penurunan dimana pada tahun 2018, angka kemiskinan mencapai 7,05 persen dan menurun hingga encapai 5,98 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2021, angka kemiskinan sempat mengalami kenaikan hingga mencapai 6,18 persen yang merupakan dampak dari Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan ini merupakan sinyal positif dari berhasilnya berbagai program pemulihan perekonomian daerah yang berimbas pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Gambar II.11
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2018 – 2022

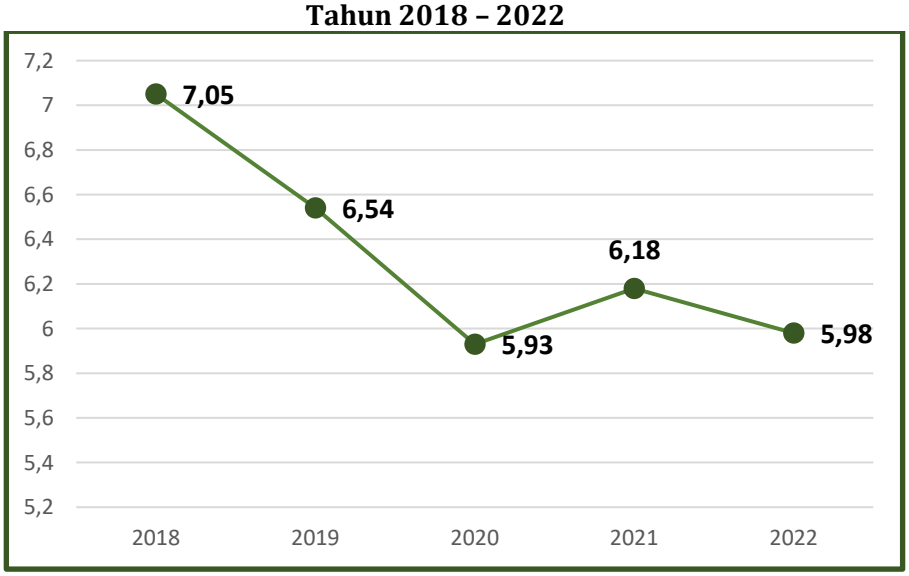

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

Kemiskinan ekstrem, atau kemiskinan absolut adalah suatu kondisi yang tidak dapat membantu kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi, tidak hanya tergantung dari pendapatan, tetapi juga ketersediaan jasa. Kemiskinan esktrem indagiri Hilir pada tahun 2022 sebesar 0,69 persen atau 5.020 jiwa, menurun sebesar 0,84 Persen atau 5.990 jiwa dari tahun 2021 yakni 1.53 Persen atau sebesar 11.010 Jiwa. Lebih kecil dari Indragiri Hulu sebesar 11.150 jiwa dan kebih kecil dari Pelalawan yang berjumlah 9.650 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Riau Tahun 2022 mencapai 10.033 Jiwa. Kemiskinan ekstrem erat kaitannya dengan permasalahan stunting. Ini artinya, jika ingin mengentaskan kemiskinan ekstrem, isu stunting menjadi hal penting untuk diperhatikan.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberikan kesempatan kepada semua masyarakat dalam membangun suatu kehidupan yang layak. Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek, namun dari seluruh aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus ultimate impact dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Indragiri Hilir

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan sosial. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Metode perhitungan IPM diadaptasi dari metode perhitungan *Human Development Index* (HDI) oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indragiri Hilir disertai dengan komponen pembentuknya.

Tabel II.11
Komponen Pembentuk
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	67,32	67,66	67,85	67,98	68,31
Rata-rata Lama Sekolah	7,19	7,22	7,23	7,24	7,26
Harapan Lama Sekolah	11,89	11,9	11,91	11,93	12,19
Pengeluaran per kapita	10.254	10.382	9.954	9.945	10.234
Indeks Pembangunan Manusia	**66,51**	**66,84**	**66,54**	**66,63**	**67,37**

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

Selama periode 2018 – 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren berfluktuatif meningkat. Tahun 2018, IPM Indragiri Hilir sebesar 66,51 meningkat menjadi 66,84 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, IPM Kabupaten Indragiri Hilir mengalami sedikit penurunan menjadi 66,54. Pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 66,63 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi sebesar 67,37.

2.2.2.2. Harapan lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefenisikan sebagai lama sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang sehingga HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Selama periode 2018–2021, HLS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yang menggambarkan bahwa kondisi pembangunan pendidikan di Indragiri Hilir terus meningkat. Peningkatan Harapan Lama Sekolah terjadi di Indragiri Hilir hingga tahun 2021 mencapai 11,93 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk Indragiri Hilir yang berusia tujuh tahun memiliki kesempatan mengenyam pendidikan selama 11,93 tahun. Kondisi ini cukup menarik perhatian dikarenakan Harapan Lama Sekolah tidak mencapai angka wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan upaya optimal dalam mengembangkan aspek pendidikan secara berkualitas dan merata.

Gambar II.12
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022

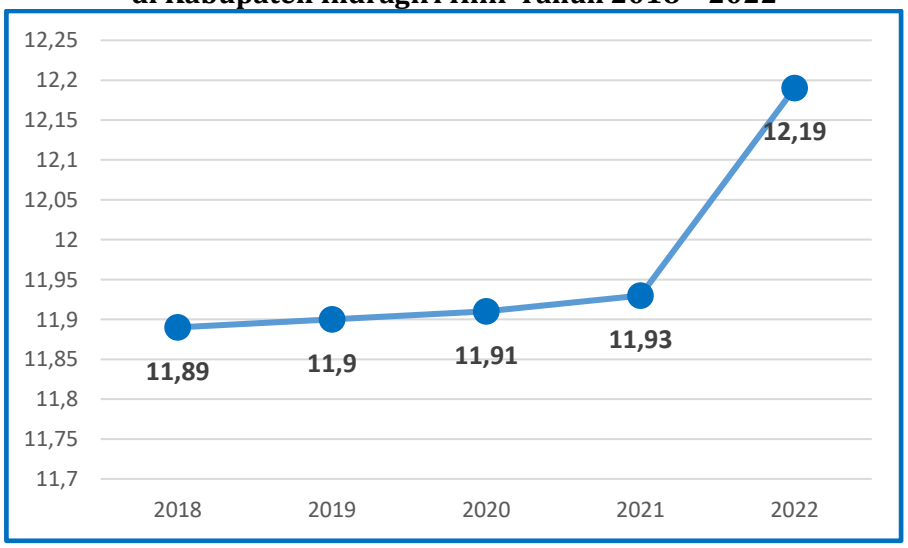

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefenisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Selama periode 2018 – 2022, RLS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat meski dengan slope yang hampir datar. Posisi RLS Kabupaten Indragiri Hilir kembali

menjadi yang terendah dibandingkan dengan RLS Kabupaten sekitarnya dan Provinsi Riau, sehingga kondisi ini perlu dilakukan percepatan dalam pembangunan bidang pendidikan periode berikutnya. Pada tahun 2022, angka Rata-rata Lama Sekolah Indragiri Hilir mencapai 7,26 tahun dimana angka ini mengindikasikan bahwa penduduk Indragiri Hilir yang memiliki umur 25 tahun ke atas telah mengenyam rata-rata jenjang pendidikan hingga 7,26 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

Gambar II.13
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022

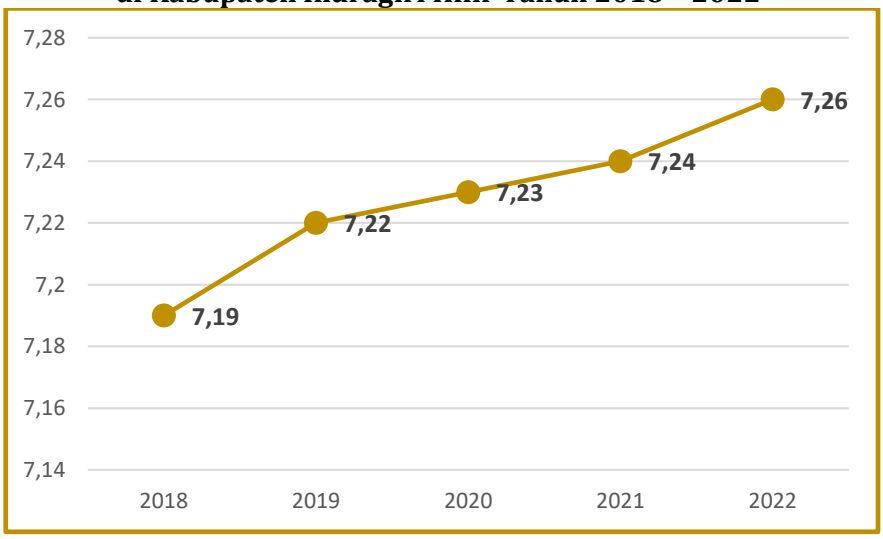

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

2.2.2.4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Selama periode 2018 – 2022, AHH Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren meningkat yaitu dari 67,32 tahun pada tahun 2018 menjadi 68,31 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir diharapkan memiliki usia hingga 68,31 tahun.

Gambar II.14
Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun)
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2022

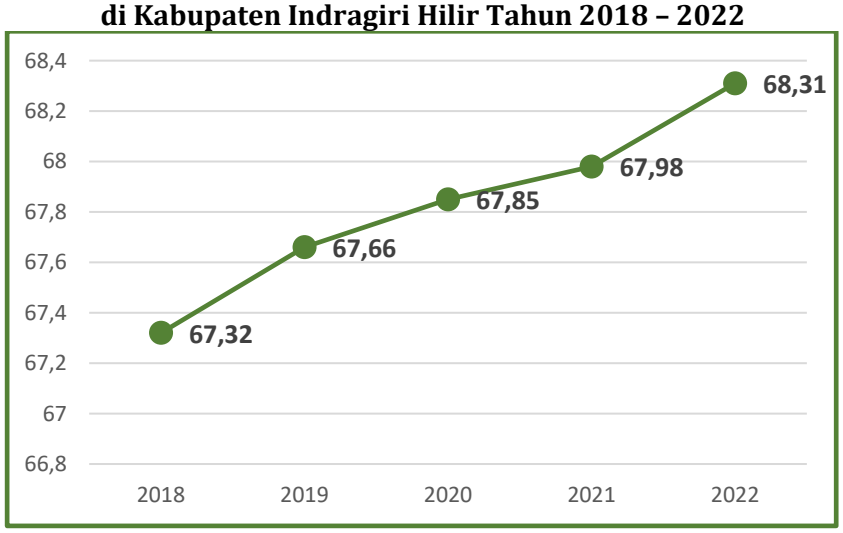

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023

2.2.2.5. Pengeluaran Perkapita

Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita Kabupaten Indragiri Hilir menunjukan perkembangan yang cukup positif sejak periode 2019-2022, pada tahun 2019 pengeluaran per kapita sebesar Rp 10.382 (ribu) menurun menjadi 9,954 (Ribu) pada tahun 2020 dan 9,945 (Ribu) pada tahun 2021. Tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp 10,234 (ribu). Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga (Inhu dan Pelalawan) serta provinsi Riau (tahun 2022), pengeluaran Perkapita Indragiri Hilir lebih rendah kisaran 238 - 1,929 (Ribu).

Gambar II-15
Perbandingan pengeluaran Perkapita Indragiri Hilir, Inhu, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022

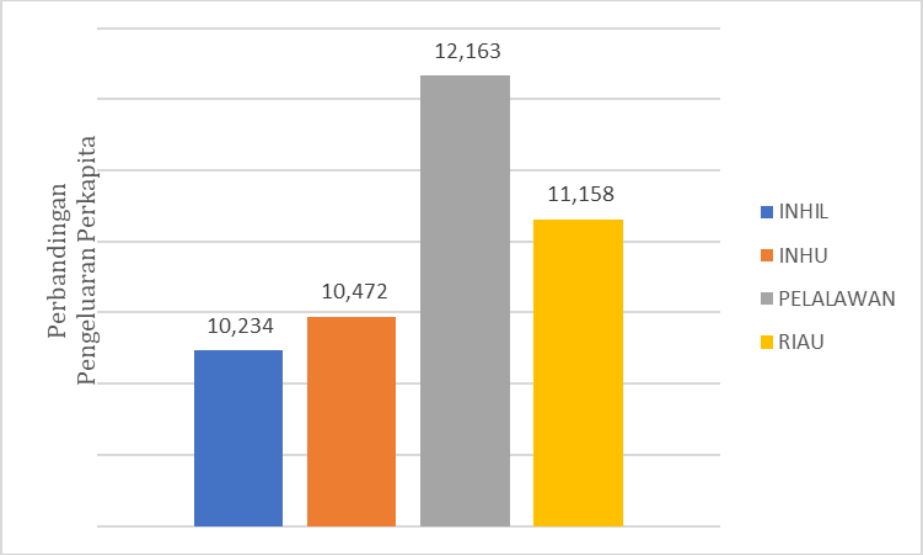

Sumber : BPS (Riau dalam angka,2023)

2.2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika pada suatu daerah terdapat TPT yang tinggi, maka hal ini mengindikasikan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. TPT di Indragiri Hilir pada tahun 2019 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya (2019 sebesar 4,76 persen; 2020 sebesar 4,35 persen; 2021 sebesar 2,66 persen), meski sempat naik pada ta- hun 2019. TPT pada tahun 2022 adalah sebesar 1,50 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi, sekitar 2 orang adalah pengangguran, terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2021;3 orang).

Gambar II-16
Perbandingan pengeluaran Perkapita Indragiri Hilir, Inhu, Pelalawan dan Provinsi Riau Tahun 2022

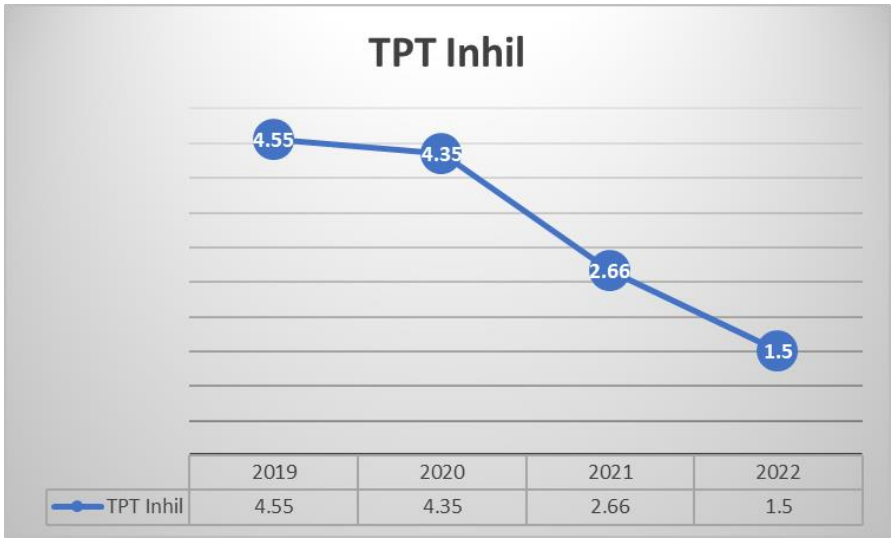

Sumber : BPS kab. Indragiri Hilir

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Seni Budaya

Kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus pembangunan kebudayaan dilakukan pada

objek kebudayaan meliputi nilai nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni.

Berdasarkan Keputusan Bupati Indragirihilir Nomor : Kpts. 803/xl/HK-2020 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Manuskrip, Tradisi Lisan, 4 Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisonal dan Cagar Budaya.

Berikut Kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ;

Tabel II- 12

Kondisi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
A	**Manuskrip**						
	1	Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan Tuan Guru Sapat	Beberapa tulisan tangan Tuan Guru Sapat ada pada ahli waris dan masyarakat.	Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	2	Manuskrip Mandah	Beberapa tulisan tangan catatan tentang sengketa tanah, surat tanah, surat nikah, ilmu falakiyah, doa khatam Al Quran dan perkumpulan sosial, ada pada ahli waris dan masyarakat.	Kecamatan Mandah	60%	30%	10%
	3	Manuskrip Gaung	Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.	Kecamatan Gaung	60%	30%	10%
	4	Manuskrip Reteh	Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.	Kecamatan Reteh	60%	30%	10%
	5	Manuskrip Tembilahan	Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.	Kecamatan Tembilahan	50%	35%	15%
	6	Manuskrip Tempuling	Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.	Kecamatan Tempuling	50%	35%	15%
	7	Manuskrip Enok	Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.	Kecamatan Enok	50%	35%	15%
	8	Manuskrip Kateman	Beberapa tulisan tangan catatan tentang surat tanah dan ijazah, ada pada ahli waris dan masyarakat.	Kecamatan Kateman	50%	35%	15%
B	**Tradisi Lisan**						
	Sastra Lisan						

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	1	Pantun	Tradisi lisan yang sering digunakan pada acara adat perkawinan Melayu dan pada acara-acara resmi yang berisikan pantun nasehat, jenaka, agama, dan adat.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	10%	-
	2	Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan Tuan Guru Sapat	1. Syair Ibarat Khabar Kiamat merupakan hasil karya Tuan Guru Sapat bercerita tentang akhir hidup ini. 2. Syair Selendang Delima	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	3	Madihin	Tradisi lisan yang dilakukan suku Banjar merupakan jenis puisi rakyat anonim bertipe hiburan yang dituturkan di depan publik dengan cara dihapalkan (tidak boleh membaca teks) yang dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, atau 4 orang seniman yang sering digunakan sebagai hiburan dalam pesta perkawinan dan acara-acara event kebudayaan yang dilakukan di tempat terbuka, seperti halaman, lapangan yang luas dan di dalam gedung pertunjukan.	Kecamatan yang memiliki populasi masyarakat suku Banjar mayoritas diantaranya : Kecamatan Tembilahan, Kuindra, Batang Tuaka dan Tempuling	50%	30%	20%
	4	Manuskrip Gaung	Tradisi lisan yang dilakukan suku Banjar merupakan seni cerita bertutur untuk menyampaikan pesan-pesan moral (cerita kerajaan/kebangsawanan, keagamaan dan lain-lainnya) untuk para penontonnya dimainkan dengan alat gendang terbangan sebagai alat tabuh untuk seni hadrah.	Kecamatan yang memiliki populasi masyarakat suku Banjar mayoritas diantaranya : Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Kuindra, Batang Tuaka dan Tempuling	10%	20%	70%
	Senandung / Ratapan						
	1	Ba ahoi	Tradisi yang dilakukan masyarakat petani padi dalam menanam dan pada saat memanen padi di sawah.	Kecamatan Enok, Kuindra dan Tempuling	10%	20%	70%
	2	Berzanji	Merupakan syair puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	10%	-
	3	Nyanyian Bapukung	Tradisi lisan yang dilakukan suku Banjar merupakan seni bernyanyi dalam menidurkan bayi yang dibalut kain panjang dan dimasukkan dalam ayunan dengan tuturan yang berisikan puji-pujian, doa dan sholawat.	Kecamatan yang populasi masyarakat suku Banjar mayoritas diantaranya : Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu Kuindra, Batang Tuaka dan Tempuling	70%	20%	10%
	4	Nyanyian Dodoi	Tradisi lisan yang dilakukan dalam menidurkan bayi yang dimasukkan dalam ayunan.	Menyebar di seluruh Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	20%	10%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	5	Ratib Saman	Tradisi lisan yang berisi tentang zikir kepada Allah SWT.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	30%	10%
	6	Bedenden	Tradisi lisan yang dilakukan suku laut / suku Duano merupakan ratapan dalam menghadapi cobaan hidup dan dendang anak Duano dalam menyampaikan isi hati.	Kecamatan Concong, Kuindra, Tanah Merah, Sungai Batang, Mandah	50%	35%	15%
C.	**Adat Istiadat**						
	1	Masa Pantang (Larangan bagi perempuan baru melahirkan)	Aturan adat yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam hal larangan bercampur dengan suami dan makanan tertentu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-
	2	Mencacak Tongkat	Tradisi membangun rumah mulai dari mencari lokasi hingga mendirikan tongkat rumah, dilakukan pada pagi hari dan pembacaan doa selamat.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	10%	-
	3	Tegak Payung	Tradisi membangun rumah pada saat mendirikan tiang rumah, dilakukan pada pagi hari dan pembacaan doa selamat.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	20%	5%
	4	Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan *Tuan Guru Sapat*	Tradisi pada saat pertama kali membuka lahan untuk pertanian atau perkebunan dan setiap tahun di bulan Muharram.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	5	Tepuk Tepung Tawar	Salah satu bagian prosesi yang sakral dalam upacara adat budaya Melayu. Tepuk tepung tawar biasanya dilakukan pada acara pelantikan pejabat atau tokoh adat dan daerah, sunatan, khususnya acara pernikahan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
D.	**Ritus**						
	Perayaan						
	1	Khitanan	Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW terutama bagi anak-anak laki-laki.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	98%	-	2%
	2	Khatam Al Quran	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam melaksanakan syukuran bagi Muslim yang telah menamatkan bacaan Al Quran.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-
	3	Mandi Bulan Safar	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam melakukan ritual mandi Safar dan berdoa pada hari Rabu terakhir/Arba Mustamir agar dapat dihindarkan dari bala dan marabahaya.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	20%	20%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	4	Mehararat / Mehalarat	Kegiatan masyarakat suku Banjar ketika pindah rumah, mehanyari kelambu bagi pengantin baru dan bepergian jauh. Kegiatan dilakukan dengan pembacaan doa mehararat dan doa selamat. Untuk mehararat mehanyari kelambu makanannya identitik bubur kikicak.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	30%	20%
	Peringatan Kelahiran						
	1	Menempah Bidan	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam hal menempah bidan kampong (bidan beranak) bagi ibu yang akan melahirkan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	30%	20%
	2	Lenggang Perut	Kegiatan dilakukan pada suku Melayu bagi kehamilan 7 bulan bagi seorang ibu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	30%	20%
	3	Tujuh Bulanan	Kegiatan dilakukan pada setiap suku daerah bagi kehamilan 7 bulan bagi seorang ibu dengan ritual yang berbeda antara satu suku lainnya.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	15%	5%
	4	Menguburkan Tembuni	Kegiatan dilakukan pada setiap suku daerah dalam mengubur tembuni (ari-ari) bayi setelah dibersihkan dan dimasukkan ke dalam wadah tempurung kelapa atau kaleng.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	95%	-	5%
	5	Cuci Lantai (Balas Bidan)	Kegiatan dilakukan pada setiap suku daerah dalam masa 40 hari setelah melahirkan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	20%	5%
	6	Tanggalan Pusat	Kegiatan mendoa dilakukan pada setiap suku daerah bagi bayi yang tanggal tali pusatnya.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	30%	20%	50%
	7	Aqiqah	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mengorbankan hewan sembelihan bagi seorang anak.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	8	Potong Rambut	Kegiatan dilakukan pada setiap suku daerah dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan seiring dengan aqiqah bagi bayi yang berumur 7 hari atau lebih diiringi doa dan sholawat.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	9	Betindik	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam menindik atau melubangi telinga bagi bayi perempuan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	95%	-	5%

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
				Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
10	Menatah Anak	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah bagi bayi yang baru bisa melangkah diiringi dengan doa.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	95%	-	5%
Upacara perkawinan						
1	Merisik	Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah dalam merisik (mencari informasi) calon pengantin wanita yang akan dijadikan isteri melalui perantara tanpa sepengetahuan pihak tuan rumah.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	30%	50%	20%
2	Meminang	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam meminang perempuan sesuai dengan persetujuan kedua keluarga calon pengantin.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	95%	-	5%
3	Betunang	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam mengikat calon mempelai wanita dengan sebentuk cincin tanda persetujuan (ikatan) bahwa seorang wanita sudah menjadi calon isteri.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	15%	5%
4	Mengantar Belanja	Kegiatan memberikan hantaran uang dan barang keperluan calon mempelai wanita dari calon mempelai pria.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	15%	5%
5	Berandam	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan cara mencukur anak rambut dan membersihkan seluruh anggota tubuh bagi calon mempelai.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	20%	20%
6	Menggantung	Kegiatan menghias rumah dan pelaminan calon pengantin.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	20%	20%
7	Bemule	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam mempersiapkan bahan makanan untuk pesta perkawinan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	15%	5%
8	Beselang	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah bagi tetangga membantu persiapan pesta perkawinan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	20%	20%
9	Betangas	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah bagi kedua calon mempelai untuk membersihkan diri untuk membuang keringat dengan uap rebusan dedaunan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	20%	20%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	10	Beinai	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan memasang inai di jari mempelai pada malam sebelum menikah	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	11	Membayar Pelangkahan	Kegiatan memberikan pelangkahan berupa cincin atau barang lainnya kepada saudara tua yang belum menikah (yang dilangkahi).	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	95%	-	5%
	12	Akad Nikah	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dalam melakukan ijab kabul perkawinan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-
	13	Tepuk Tepung Tawar dan Cecah Inai	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan memberikan bedak sejuk ke tangan kedua mempelai. Dilanjutkan dengan menaburkan beras putih, beras kunyit, bertih, air tawar dan terakhir inai dan ditutup dengan doa.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	14	Perhelatan Penganten	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan pesta perkawinan sebagai tanda syukur telah terlaksananya akad nikah kedua mempelai.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-
	15	Bejulang	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan cara menggendong penganten diarak menuju pelaminan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	30%	20%
	16	Mandi Pengantin	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan kegiatan mandi sehari setelah bersanding bagi kedua mempelai.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	17	Makan Betalam	Kegiatan yang banyak dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan kegiatan makan bersama dengan kedua keluarga mempelai.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	18	Malam Beulit	Kegiatan menemani pengantin menjelang masuk kamar pada malam pertama. Kegiatan ini berupa perkumpulan orang-orang atau keluarga sambil berbincang setelah pelaksanaan pesta perkawinan sambil menemani pengantin sebelum masuk ke kamar.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
Upacara kematian							
	1	Menguburkan Jenazah	Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah melakukan ritual menguburkan mayat.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	2	Turun Tanah	Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan doa pada hari kematian.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	3	Mendo'a Arwah (3, 7, 20, 25, 40,100 hari dan Haul)	Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan doa bersama pada hari-hari yang telah ditentukan	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	5%	5%
	4	Pindah Kubur	Kegiatan yang dilakukan pada setiap suku daerah dengan melakukan doa bersama pada saat perpindahan lokasi kuburan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	10%	10%	80%
	Ritual Kepercayaan						
	1	Semah Kampung	Kegiatan yang dilakukan pada suatu daerah dalam menjaga kampung agar terhindar dari bala dan bahaya yang melanda kampong.	Desa Pelanduk Kec. Mandah	50%	30%	20%
	2	Semah Laut	Kegiatan yang dilakukan oleh suku laut agar mendapat keselamatan dan rezeki di laut.	Kecamatan Concong, Kuindra dan Mandah	50%	30%	20%
	3	Jampi Kesurupan	Kegiatan yang dilakukan pada suatu daerah dalam mengobati orang kerasukan jin.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	10%	-
	4	Tolak Bala	Kegiatan yang dilakukan pada suatu daerah dengan melakukan doa bersama untuk menjaga kampung dari bala dan bahaya.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	30%	20%
E.	**Pengetahuan Tradisional**						
	Busana/Pakaian/Perhiasan						
	1	Telok Belanga	Pakaian adat suku Melayu berupa baju kurung dengan model baju leher bulat berkancing satu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	30%	20%
	2	Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan *Tuan Guru Sapat*	Pakaian adat suku Melayu berupa baju kurung untuk laki-laki, dengan model baju kerah tinggi berkancing lima.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	3	Destar	Perhiasan adat suku Melayu berupa mahkota (hiasan kepala) bagi penganten laki-laki.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	4	Manuskrip Gaung	Perhiasan adat suku Melayu berupa tutup kepala bagi perempuan yang terbuat dari kain sarung atau selendang.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	5%	5%
	5	Selempang	Hiasan busana adat suku Melayu berupa kain yang digunakan di bahu para laki-laki.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	6	Selendang	Hiasan busana adat suku Melayu berupa kain yang digunakan oleh perempuan yang dijahit dengan bentuk memanjang.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
				Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
7	Serban	Hiasan busana adat suku Melayu berupa kain segi empat yang digunakan untuk menutup kepala laki-laki setelah pulang dari tanah suci.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
8	Semutar	Ikat kepala laki-laki dari kain lepas.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	15%	25%	60%
9	Tanggui	Tutup kepala yang digunakan oleh petani terbuat dari anyaman pandan atau bambu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	30%	35%	35%
10	Dokoh	Perhiasan berupa kalung besar untuk penganten.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
11	Gelang	Perhiasan yang digunakan dipergelangan tangan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	5%	5%
12	Kalung	Perhiasan berupa rantai emas yang digunakan untuk leher.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	5%	5%
13	Subang	Perhiasan dipakai perempuan untuk telinga.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	5%	5%
14	Tengkolok	Kain tutup kepala wanita.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
15	Tudong Manto (Mante)	Selendang penutup kepala.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	40%	30%	30%
16	Tanjak	Perhiasan kepala yang terbuat dari kain songket digunakan laki-laki.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	5%	5%
17	Gelang Keroncong	Perhiasan wanita yang digunakan dipergelangan tangan jumlahnya lebih dari satu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	40%	30%	30%
18	Keronsang	Semat baju kebaya berantai dan bertingkat tingkat biasanya digunakan satu set sebanyak 3 tingkatan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	40%	30%	30%
19	Cincin Belah Rotan	Perhiasan berupa cincin untuk mengikat calon Isteri untuk mahar pernikahan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
20	Kerabu	Hiasan telinga wanita berupa permata dengan jumlah banyak yang digunakan dengan sumbat belakang /paku.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	20%	10%
21	Baju Kurung Laboh	Pakaian adat suku Melayu berupa baju kurung perempuan yang dipakai pada acara perkawinan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
22	Kebaya Laboh	Pakaian adat suku Melayu berupa kebaya panjang wanita yang longgar dengan hiasan kekek dan pisak	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	23	Kebaya Pendek	Pakaian adat suku Melayu wanita berupa kebaya dijahit sebatas pinggang.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	24	Kebaya Encim	Pakaian adat suku Melayu wanita berupa kebaya yang depannya runcing.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	25	Baju Kurung Sisit	Pakaian adat suku Melayu wanita kurung yang memakai tali untuk disisit/ditarik di leher dan lengan baju.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	Metode Pengobatan						
	1	Bekam	Teknik pengobatan dengan cara memanaskan mangkok atau gelas di atas kulit untuk mengeluarkan darah kotor.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	2	Selusuh	Teknik pengobatan dengan menggunakan air rendaman yang didoakan untuk memudahkan proses kelahiran.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	3	Tetemas	Teknik pengobatan suku Melayu dengan menggunakan kunyit dan kapur untuk dijauhkan dari makhluk halus.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	4	Pidaraan	Teknik pengobatan suku Banjar dengan menggunakan kapur dan kunyit untuk dijauhkan dari makhluk halus.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	Ramuan Tradisonal						
	1	Ramuan Kencur	Ramuan dengan bahan beras dan kencur untuk kebugaran tubuh dan menambah nafsu makan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	2	Ramuan Ganda Rusa	Ramuan dengan bahan daun rusa atau kisi-kisi, untuk pengobatan sakit perut dengan cara dipanaskan lalu dibarutkan keperut.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
		Ramuan Jerangau	Ramuan dengan bahan daun jerangau untuk pengobatan anak kejang- kejang.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
		Sedingin	Ramuan dengan bahan daun cocor bebek untuk pengobatan anak menurunkan panas.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
		Jelom (Rendaman Bunga Raya)	Ramuan dengan bahan rendaman bunga raya untuk pengobatan anak menurunkan panas.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
		Selasih	Ramuan dengan bahan rendaman selasih untuk membuang panas dalam dan kembung.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
		Kembang Semangkok	Ramuan dengan bahan kembang semangkok untuk pengobatan menurunkan panas dalam.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	Makanan dan Minuman Tradisional						

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	1	Kerabu	Makanan yang diolah dari Ikan atau sayur tanpa menggunakan minyak goreng.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	2	Cencaluk	Bahan utama dari makanan ini adalah udang pepay (udang kecil-kecil) setelah dibersihkan dimasukkan dalam tempat tertutup ditaburi garam dibiarkan selama 1 minggu (permentasi).	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	20%	5%
	3	Kepurun	Makanan yang terbuat dari sagu mentah yang dimasak dan biasanya dinikmati dengan masakan asam pedas ikan (khusus daerah Khairiah Mandah).	Kecamatan Khairiah Mandah, Kecamatan GAS	50%	25%	25%
	4	Laksa Sagu	Makanan yang diolah dari adonan tepung sagu yang diolah dengan pengukusan sebelum dikukus dibentuk sesuai keinginan dan dinikmati dengan kuah kari ditambah dengan sambal totok dan sayuran kol, kecambah mentah, irisan daun kunyit, timun dan perasan limau kesturi.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	5	Sempolet	Makanan yang diolah dari sagu mentah yang diolah dengan campuran sayuran daun pakis, bayam, katuk, kangkung, daun kesum, daun kunyit, daun selasih, udang, kerang, lada hitam, lada merah giling (campurkan) tanpa ditumis), jantung pisang mentah dan sambal terasi	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	6	Laksa Sagu Goreng	Makanan yang diolah dari Mie sagu yang direndam dijadikan Mie setelah kembang dan lembut ditiriskan lalu diolah dengan bumbu tumisan, dicampur dengan ikan bilis.	Kecamatan Mandah, GAS, Enok, Tembilahan	50%	25%	25%
	7	Gulai Sagu	Makanan yang diolah dari sagu rendang yang diolah dengan bahan yang sama dengan sempolet, namun gulai sagu ditumis bumbunya dan tidak menggunakan jantung pisang.	Kec.Mandah, GAS	50%	25%	25%
	8	Bubur Sagu	Makanan dari sagu mutiara yang dimasak dengan gula merah dan diberi kuah santan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	9	Sagu Rendang/ Sagu Tangkop	Makanan yang diolah dari tepung sagu, cara memakannya terkenal dengan istilah nangkop, dimana sagu dimakan dengan lauk pauk yang berkuah.	Menyebar di Kecamatan Mandah, GAS, Gaung, Pelangiran, Kateman	50%	25%	25%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	10	Ketupat	Makanan yang diolah dari beras yang sudah dicuci dimasak dalam jalinan anyaman daun kelapa direbus menggunakan waktu 2-3 jam.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	20%	10%
	11	Lontong Lepat	Makanan yang diolah dari beras hingga menjadi nasi lembek bersantan, air kapur sirih secukupnya, bungkus dengan daun pisang dan rebus lebih kurang 2 s/d 3 jam.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	12	Nasi Dagang	Makanan yang diolah dari beras yang dicambur dengan bahan dan bumbu minyak, bawang putih, bawang merah, halbe, garam cengkeh, kayu manis, serai, bunga lawang, kapulaga. Aron lalu setelah kering kukus	Kecamatan Mandah, Tembilahan, Enok	60%	20%	20%
	13	Nasi Samin (Nasi Minyak)	Nasi yang dimasak dengan minyak samin diberi bumbu bawang merah, bawang putih dan saos tomat.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	14	Pulut Serundeng	Makanan yang diolah dari pulut dan kelapa parut yang diberi bumbu lada merah, kunyit, kemiri, gula, ketumbar, jahe yang disangrai.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	15	Ayam Masak Putih	Makanan yang diolah dari ayam yang telah dibersihkan, ditumis dengan bumbu yang telah dihaluskan : merica, bawang putih, bawang merah, jahe, jintan putih, garam, buah keras (kemiri) dan santan	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-
	16	Ayam Masak Habang/Merah	Makanan yang diolah dari ayam yang telah dibersihkan, dimasak dengan sambal (cabe kering), saos tomat, bawang merah, bawang putih dan jahe.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-
	17	Tempoyak Durian	Makanan yang diolah dari buah durian dengan permentasi ditutup rapat untuk campuran penyedap masakan.	Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Enok, Tempuling, GAS, Kateman, Pelangiran,Concong	50%	25%	25%
	18	Masak Tempoyak	Makanan yang diolah dari ikan atau udang yang dimasak dengan campuran tempoyak (asam durian) dengan bumbu yang telah dihaluskan lada, kunyit, garam terakhir masukkan daun kunyit.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	19	Paes Ikan	Makanan yang diolah dari berbagai jenis ikan yang telah dibersihkan dengan proses setelah dibumbui dibungkus dengan daun pisang dan dikukus atau dipanggang	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	20	Paes Hati Ikan Pari	Makanan yang diolah dari hati ikan pari dicampur dengan sagu rendang, garam lalu dipanggang.	Kec. Mandah, Enok, GAS, Kateman, Pelangiran	50%	25%	25%
	21	Pekasam Ikan	Makanan yang diolah dari ikan yang ditaburi nasi, garam pada tempat tertutup dan didiamkan selama 3 s/d 4 hari	Kec. Mandah, Enok, GAS, Kateman, Pelangiran	50%	25%	25%
	22	Wadi Ikan	Makanan yang diolah dari ikan yang diawetkan yang dicampur dengan taburan beras gongseng, garam dan didiamkan selama 3-4 hari.	Kec. Tembilahan, Enok. Tempuling, Batang Tuaka, Gaung	50%	25%	25%
	23	Sambal Uap Ikan Bilis	Makanan yang diolah dari ikan bilis dibelah- belah, lada, bawang merah, bawang putih, tomat, belacan, uapkan di nasi yg sedang dikukus setelah itu diberi garam lalu haluskan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	24	Sambal Tanak Bilis	Makanan yang diolah dari ikan bilis, petai, bumbu yang dihaluskan lada, bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri kunyit lalu tumis.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	25	Senggang	Makanan yang diolah dari ikan laut yang sudah dibersihkan, haluskan bawang putih, bawang merah air asam jawa, lada rawit, garam dan kunyit.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	26	Ikan Pede	Makanan yang diolah dari ikan besar yang diasinkan dengan permentasi dan penjemuran dengan waktu lama.	Kec. Tanah Merah, Concong, Kuindra, Mandah	50%	25%	25%
	27	Lalak Jering	Makanan yang diolah dari jering direbus sampai empuk dengan bumbu santan, garam, merica, gula putih dan bawang putih yang dihaluskan lalu tumis sampai masak dan bumbu meresap dengan jering.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	28	Mandai (kulit cempedek yang diasinkan)	Makanan yang diolah dari kulit buah cempedak yang direndam dengan garam ditempat tertutup.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	29	Gangan Bakaroh	Makanan berkuah dari tongkol atau jantung pisang, kangkung, keladi, dan susupan yang diberi bumbu.	Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Tempuling	75%	15%	10%
	30	Gulai Kulit Rambai	Makanan dari kulit buah rambai yang dimasak dengan bumbu dan santan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	31	Gulai Umbut Kelapa	Makanan dari bagian batang yang muda pada pohon kelapa yang dimasak dengan santan dan bumbu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	32	Gulai Nangka	Sayur dengan bahan nangka muda dengan cara direbus dengan santan kelapa dan dicampur dengan bumbu yang dihaluskan antara lain: lada, bawang merah, bawang putih, garam, kunyit, jahe,lengkuas,serai, daun jeruk, daun salam.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-
	33	Acar Temu Pauh	Makanan pelengkap yang dicampur bahan- bahan seperti timun, wortel, nenas dan temu pauh.	Kec. Mandah	50%	25%	25%
	34	Bingka Kayapuk	Kue terbuat dari santan, telor, susu, tepung dan daun pandan dengan cara dikukus.	Kec.Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Batang Tuaka, Enok,Gaung	75%	15%	10%
	35	Bahulu Berendam	Kue terbuat dari tepung, telur dikocok sampai kembang lalu dikukus/dibakar setelah masak dimasukkan kedalam air rendaman gula yang sudah dimasak dengan cengkeh, kayu manis dan daun pandan.	Kec. Mandah, Tembilahan, GAS, Enok, Tempuling, Kateman, Kuindra	75%	15%	10%
	36	Buah Melaka (Kalalapun / Klepon / Onde- onde)	Kue terbuat dari tepung beras pulut yang didalamnya terdapat gula merah dan berselimutkan kelapa parut	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-
	37	Kikicak / Putri Berendam	Makanan yang terbuat dari tepung beras pulut yang dimasak dengan santan, gula merah dan daun pandan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-
	38	Bubur Sum-sum	Makanan yang terbuat dari tepung beras, santan, air kapur sirih, garam dan air gula merah	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	39	Bubur Ba'ayak	Makanan yang terbuat dari tepung beras, santan, gula merah, kapur sirih dan daun pandan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	40	Aman Sari	Kue yang terbuat dari tepung kacang hijau, santan, gula, telur dengan cara dikukus.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	41	Cermin Basah	Kue yang terbuat dari bahan gula, santan, telur, susu, tepung dengan cara dikukus.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	42	Antu Seome	Kue yang terbuat dari keledek yg dikukus lalu dihaluskan dicampur dengan santan, susu, gula, telur dimasak sampai kering dan bergerintil.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	43	Tepung Gomak	Kue yang terbuat dari tepung beras pulut, tepung kacang hijau, inti kelapa gula merah.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	44	Roti Jala (Jelurai)	Makanan yang terbuat dari tepung terigu yang dicampur dengan mentega, santan, garam, disantap dengan kuah seri kaya atau kuah kari.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
				Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
45	Dodol Labu	Kue yang terbuat dari buah labu yang dikukus dengan santan, gula merah, dan tepung pulut, biasanya akan dibuat ketika mengawali pesta perkawinan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
46	Dodol Pulut	Kue yang terbuat dari tepung pulut, santan, gula merah, gula putih dan garam dengan pengadukan yang sangat lama agar dapat dibentuk	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
47	Rendang Kasturi	Kue yang terbuat dari kacang hijau yang direbus dengan gula putih sampai empuk, setelah dingin lalu dicetak-cetak dan digoreng dengan adonan tepung beras, garam dan sedikit air kapur sirih.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
48	Haluwe Buah	Manisan yang terbuat dari buah-buah muda dengan cara direndam menggunakan air kapur sirih, dicampur dengan air gula yang sudah dimasak dan didinginkan selama beberapa malam.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
49	Haluwe Kelapa	Manisan buah yang biasanya dibuat dari buah kelapa muda dimasak dengan air gula sampai kering.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
50	Hasidah	Kue sebagai hiasan sajian makanan yang dibuat dari campuran tepung gandum dan gula, garam, air serta bawang goreng.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
51	Lemang	Makanan yang diolah dari beras ketan yang sudah dibersihkan lalu tambahkan santan, garam dan dimasukkan ke dalam potongan- potongan bambu yang sebelumnya sudah dimasukkan daun pisang muda dan masak dengan cara dibakar.	Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Kuindra, Tempuling, Enok, Gaung, Batang Tuaka	75%	15%	10%
52	Lempuk	Makanan yang diolah dari daging buah durian yang telah pisahkan dari bijinya dan dimasak dengan gula putih dimasak sampai kental dan setelah masak lalu dicetak.	Kecamatan Kemuning	50%	25%	25%
53	Pulut Panggang / Lempa	Makanan yang diolah dari beras pulut yang telah dibersihkan dan dicuci lalu diaron dengan santan, garam dan setelah mengering masukkan ke dalam daun pisang, diisi dengan sambal ikan teri atau udang bungkus dan panggang.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
54	Pais Pisang / Lepat Pisang	Kue yang diolah dari tepung beras, pisang, santan, gula putih, telur dan daun pisang untuk membungkus lalu dikukus.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
				Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
55	Pais Labu / Lepat Labu	Kue yang diolah dari buah labu dicampur tepung beras, garam, tepung gandum, gula pasir, santan, aduk rata lalu bungkus dengan daun pisang dan dikukus.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
56	Wajik	Makanan yang diolah dari beras pulut, santan, gula merah, gula putih, santan,minyak.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
57	Cingkarok	Cemilan yang diolah dari gula, ketan yang ditumbuk kasar dan dimasak jadi satu.	Kec. Enok, Sungai Batang,Tempuling, Kuindra, Tembilahan	50%	25%	25%
58	Gula Tapak	Makanan yang diolah dari sadapan air nira kelapa yang dimasak sampai mengental dengan campuran kayu resak.	Kec. Tempuling, Enok, Kempas, GAS, Mandah	80%	20%	-
59	Gula Juroh	Makanan yang diolah dari sadapan air nira kelapa yang dimasak sampai mengental.	Tempuling, Enok, Kempas, GAS, Mandah	50%	25%	25%
60	Teng-teng Jahe	Cemilan yang diolah dari kelapa setengah tua, diparut kasar dengan jahe lalu di gongseng sampai kering lalu dimasak dengan gula sampai agak kental lalu dicampur dengan gongsengan kelapa dan Jahe kemudian digiling dan dipotong sesuai keinginan.	Kec. Enok, Tembilahan, Tembilahan Hulu	50%	25%	25%
61	Tapai Pulut Daun Katu	Makanan fermentasi dari beras pulut yang di beri warna hijau dari daun katu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	20%	-
62	Bangkit Sagu	Kue kering yang terbuat dari tepung sagu, santan dan gula.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	20%	-
63	Sesagon	Cemilan kering yang terbuat dari kelapa yang agak muda diparut, tepung ketan dan gula.	Menyebar setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
64	Lempeng Sagu	Makanan yang terbuat dari tepung sagu, ada yang campur dengan kelapa parut dan ada juga dicampur nasi.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
65	Papudak (Sunduk Lawang)	Kue dari tepung beras, santan, gula putih, air daun pandan, adonan digulung dengan daun pisang memanjang dan dikukus. Ada juga yang menggunakan gula merah sehingga tidak perlu lagi air daun pandan.	Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Tempuling	50%	25%	25%
66	Pundut (Babangko)	Kue dari tepung beras, santan, air daun pandan, sebelum adonan dibungkus dengan daun pisang ditambahkan gula merah dan santan kental secukupnya lalu dikukus.	Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Batang Tuaka, Tempuling	70%	15%	15%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	67	Putu Mayang	Kue yang terbuat dari tepung beras, menggunakan cetakan untuk hasilnya seperti mie. Disajikan dengan kuah gula merah dan santan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	68	Putu Piring	Kue yang terbuat dari tepung beras yang berwarna kuning dari kunyit, diberi gula merah dan diberi taburan kelapa	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	69	Gula Gaet	Cemilan yang diolah dari gula merah dimasak dengan sedikit air sampai kental setelah agak dingin lalu ditempa dan ditarik-tarik dengan menggunakan tepung terigu setelah tarikan dan tempaan sudah cukup pas baru dilakukan pemotongan.	Kec. Enok, Sungai Batang, Tempuling, Kuindra, Tembilahan	50%	25%	25%
	70	Cendol Sagu	Minuman yang diolah dengan tepung sagu dicampur dengan air panas setelah mengental dicetak dan rendam dengan air dingin	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	71	Cendol Tepung Beras	Minuman yang diolah dengan tepung beras dicampur dengan air parutan daun pandan, air kapur sirih secukupnya, garam, dimasak sampai kental lalu angkat dan cetak masukkan di air dingin	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	72	Ular-Ular	Minuman yang diolah dengan tepung sagu yang dicampur dengan air panas dan mengental setelah dapat diadon lalu cetak sesuai keinginan, rendam di air dingin tunggu sampai keesokan harinya. Disajikan dengan parutan kelapa dan air gula merah	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	73	Kelapa Muda Gula Juroh	Minuman yang diolah dengan air kelapa dan daging kelapa muda yang dicampur dengan gula juroh.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
Mata Pencaharian							
	1	Berkebun	Kegiatan masyarakat dalam mengubah hutan alam menjadi perkebunan dengan menggunakan tata cara tradisional atau dengan pengetahuan tradisional masyarakat setempat.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	2	Berladang	Kegiatan yang mengubah hutan alam menjadi hutan garapan untuk bercocok tanam padi dengan metode musim hujan atau pengetahuan masyarakat setempat dalam berladang.	Kec. Kuindra, Enok, Tembilahan, Keritang, Reteh, Sungai Batang, Batang Tuaka,Kempas	75%	15%	10%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	3	Nelayan	Masyarakat yang kesehariannya bekerja di laut dan di sungai mencari ikan atau biota lainnya.	Kec. Concong, Tanah Merah, Batang Tuaka, Mandah, Sungai Batang.	75%	15%	10%
	4	Menongkah Kerang	Cara masyarakat Duano dalam menangkap kerang di padang lumpur dengan menggunakan sebilah papan sebagai tumpuan sebelah kakinya, untuk mendayung diatas lumpur sementara tangan untuk memungut / mencari kerang yang dikumpulkan dalam cangkalang yang terletak di depan.	Kec. Concong, Tanah Merah, Mandah, Kuindra	100%	-	-
F.	**Teknologi Tradisional**						
	Arsitektur/Ornamen						
	1	Teratak	Gubuk/pondok atau dangau tempat istirahat petani saat berladang.	Kec.Enok, Kuindra, Reteh,Sungai Batang, Keritang, Kempas,Tempuling, Batang Tuaka Tembilahan.	80%	10%	10%
	2	Langkau	Pondok tempat petani mengolah kelapa (menyalai, mengeringkan dan mengasap) menjadi kopra.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	20%	20%
	3	Rumah Belah Bubung	Rumah panggung dengan tinggi sekitar 2 meter dari permukaan tanah menggunakan bubung (bambu) dan desainnya seperti terbelah dua dibuat menggunakan material yang berasal dari alam. Untuk tiang, gelagar, tangga, bendul, dan rasuk digunakan kayu; dinding dan lantai menggunakan papan; sementara atapnya yang berbentuk seperti pelana kuda terbuat dari daun nipah atau daun rumbia.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	4	Manuskrip Gaung	Rumah yang seluruh bagiannya terbuat dari kayu. Sesuai dengan namanya, rumah limas mempunyai bentuk limasan dengan gaya panggung. Pondasi rumah limas terbuat dari kayu ulen.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	5	Rumah Panggung	Rumah yang dibangun di atas permukaan tanah atau air dibangun dengan menggunakan tongkat tinggi sebagai perlindungan terhadap binatang atau banjir.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	6	Selembayung	Hiasan yang terletak bersilangan pada kedua ujung perabung bangunan.Pada bangunan setiap pertemuan sudut atap diberi hiasan yang terbuat dari ukiran kayu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	40%	15%	35%
	7	Susunduk Lawang	Alat yang terbuat dari kayu panjang untuk mengunci pintu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	8	Rumah Kajang	Rumah masyarakat suku Duano/Laut yang berdiri di pesisir pantai, di dalam perahu beratapkan nipah	Kec. Sungai Batang, Concong, Mandah, Tanah Merah	30%	15%	55%
	9		dan bengkuang yang dianyam sedemikian rupa berbentuk persegi panjang yang dilipat dan diletak atau dipasang pada perahu mereka.				
	10	Sampan Leper	Sampan yang dibuat dengan bentuk leper, rata atau tidak pakai lunas di bagian bawahnya sebagai solusi/kearipan lokal masyarakat setempat saat air sungai sedang surut dan bisa didayung di atas lumpur.	Kec. Batang Tuaka	75%	15%	10%
Sistem Irigasi Tradisional							
	1	Pancuran Air	Mengalirkan air hujan dari atap rumah ke tempat penampungan air.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	2	Parit	Tempat mengalirnya air dari sungai ke parit atau dari anak parit ke parit.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	3	Pintu Klep	Salah satu jenis pintu air yang dapat bergerak secara otomatis berdasarkan tekanan air dengan ketinggian tertentu, digunakan untuk mengatur air masuk dan keluar	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
Peralatan Rumah Tangga Tradisional							
	1	Tudung Saji	Tempat penutup untuk melindungi makanan yang sudah dimasak terbuat dari anyaman pandan,bamban berbentuk kerucut.	Kec. Enok, Tempuling, Kuindra, Batang Tuaka, Tembilahan, Mandah	75%	15%	10%
	2	Bakul	Wadah yang terbuat dari anyaman buluh, pandan, purun, bamban.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	3	Lekar	Wadah yang terbuat dari anyaman lidi kelapa, lidi rumbia dan lidi nipah.	Kec. Enok, Mandah, Tempuling, GAS, Batang Tuaka, Gaung, Pelangiran, Kateman	40%	15%	45%
	4	Rage	Wadah yang terbuat dari anyaman pandan, rumbia, bambu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	40%	15%	45%
	5	Nyiru	Wadah yang terbuat dari anyaman buluh biasanya untuk menampi, menjemur, tempat meletak barang-barang.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	40%	15%	45%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	6	Ayakan	Wadah yang terbuat dari anyaman buluh yang dibuat berlubang-lubang kecil ditengah lingkaran untuk memisahkan, menyaring dan membuang yang tidak terpakai.	Kec. Enok, Mandah, Tempuling, GAS, Batang Tuaka,Gaung, Pelangiran,Kateman	60%	20%	20%
	7	Seprah	Alas dari kain putih memanjang untuk alas makan bersaji, hiding dan memakai paha/poho.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	40%	15%	45%
	8	Tikar Pandan	Alas duduk, alas makan, alas tidur yang terbuat dari anyaman pandan yang dikeringkan melalui proses tertentu.	Kec. Enok, Mandah, Tempuling, GAS, Batang Tuaka, Gaung, Pelangiran, Kateman	60%	20%	20%
	9	Tikar Purun	Tikar sebagai alas duduk, tidur dan tempat makan yang terbuat dari sejenis tumbuh-tumbuhan rawa yang bernama purun, dianyam sedemikian rupa.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	20%	20%
	10	Bakul Purun	Peralatan rumah tangga yang terbuat dari tumbuhan purun yang di amyam sedemikian rupa.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	20%	20%
	11	Bakul Bamban	Peralatan rumah tangga yang terbuat dari tumbuhan bamban yang dianyam sedemikian rupa.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	20%	20%
	Peralatan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Tradisional						
	1	Papan Tongkah Kerang	Papan kayu yang berukuran 1,50 cm digunakan untuk mencari kerang yang tidak bersambung.	Kec. Tanah Merah, Concong, Mandah, Sungai Batang	100%	-	-
	2	Sare	Alat tangkap ikan dalam sungai dengan menggunakan pelepah rumbia yang dipasang lidi- lidi rumbia.	Kec. Tanah Merah, Concong, Mandah, Sungai Batang	60%	20%	20%
	3	Ambai	Alat tambak udang di dalam sungai.	Kec. Mandah Kec. Tanah Merah, Concong, Mandah, Sungai Batang, Enok Batang tuaka	60%	20%	20%
	4	Pento	Alat penangkap kepiting yang terbuat dari bilah bamboo kayu tulang.	Kec. Mandah Kec. Tanah Merah, Concong, Mandah, Sungai Batang	60%	20%	20%
	5	Togog	Alat tangkap udang di kuala sungai yang terbuat dari rajutan benang nilon.	Kec. Mandah Kec. Tanah Merah, Concong, Mandah, Sungai Batang, Enok Batang tuaka.	60%	20%	20%
	6	Tunde	Alat tangkap ikan yang ditarik dengan sampan bentuknya seperti pancing.	Kec. Mandah	60%	20%	20%
	7	Solak	Alat untuk melepaskan sabut kelapa dari buah kelapa.	Kab. Inhil	90%	5%	5%
	8	Penyongkil/Cungki lan	Alat untuk memisahkan isi kelapa, pinang dari tempurung kelapa dan pinang.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	90%	5%	5%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	9	Ambong	Alat untuk membawa kelapa, komoditas lainnya yang teerbuat dari anyaman rotan bambu, yang biasanya disandang.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	10	Asak	Alat untuk menanam padi yang berbentuk seperti huruf T dengan runcing bagian bawahnya.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	11	Ani- ani/Ranggaman	Alat untuk memanen padi terbuat dari kayu sebesar genggaman tangan dan diselipkan pisau silet didalam kayu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	Pengrajin Tradisional						
	1	Tong Tek	Pengrajin tradisonal pandai besi pembuatan parang, peralatan pertanian dan peralatan rumah tangga.	Kec. Tembilahan, Enok,Tempuling, Kuindra, Batang Tuaka, Gaung	75%	15%	10%
	2	Tepung Sagu	Pengrajin tradisional pengolahan tepung sagu.	Kec. GAS, Gaung, Enok, Mandah	75%	15%	10%
	3	Sagu Lemak	Pengrajin tradisional pengolahan sagu lemak.	Kec. GAS, Gaung, Enok, Mandah	75%	15%	10%
	4	Gula Merah	Pengrajin tradisional pengolahan nira kelapa menjadi gula tapak.	Kec. GAS, Mandah, Enok, Tempuling, Batang Tuaka,Kempas	75%	15%	10%
	5	Gula Juroh	Pengrajin tradisional pengolahan nira kelapa yang sudah diolah tetapi tidak dibekukan.	Kec. GAS, Mandah, Enok, Tempuling, Batang Tuaka, Kempas	75%	15%	10%
	6	Tenun Indragiri Hilir	Pengrajin tradisional pembuatan kain sarung khas yang mempergunakan alat tenun bukan mesin (ATBN) yang memberikan corak khas kain Indragiri Hilir.	Kec. Tembilahan, Tanah Merah, Enok, Sungai Batang.	75%	15%	10%
	7	Pengrajin Batik	Pengrajin batik dengan motip khas Indragiri hilir biasanya, di ambil dari plora, pauna dan ukir Indragiri Hilir.	Tembilahan	75%	15%	10%
G.	**Seni**						
	Seni Musik Tradisional						
	1	Baahoi	Senandung masyarakat dalam bergotong royong berladang/bercocok tanam padi.	Kec.Kuindra, Enok, Batang Tuaka, Tempuling.	40%	30%	30%
	2	Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan *Tuan Guru Sapat*	Puji-pujian kepada Rasul dilakukan masyarakat ketika perayaan hari besar agama Islam dan hari- hari tertentu di Indragiri Hilir.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	3	Berdah	Kesenian masyarakat Melayu yang bernuansa islami, berupa Puji- pujian kepada Allah dan Rasul diiringi dengan Alat musik tradisional yang berupa gendang dengan mempunyai beberapa macam pukulan dan bentuk gendang, yang dimainkan secara berkelompok (grup).	Kec. Tembilahan, Mandah, Gas, Gaung, Kateman, Enok.	75%	15%	10%
	4	Manuskrip Gaung	Do'a dan puji-pujian kepada Allah Swt /Yang Maha Kuasa yang dilakukan berulang- ulang.	Kab. Inhil	90%	5%	5%
	5	Gambus	Alat musik petik tradisional masyarakat Melayu yang digunakan pada musik religi dan pengiring musik tarian zapin.	Kab. Inhil	75%	15%	10%
	6	Gebano/Gendang	Alat musik pukul yang terbuat dari kulit dan kayu yang dimainkan dan dipadukan dengan alat-alat musik lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam mengiringi musik Melayu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	7	Kompang	Alat musik yg digunakan untuk menyambut tamu dengan lagu puji-pujian dan sholawat.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	8	Terbangan	Alat musik pukul tradisional yang terbuat dari kulit yang terpadu dengan kayu pengiring dari alat–alat musik, kompang, hadrah, rebana, madihin, dan lain-lain	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	9	Maruwas	Alat musik tradisional pukul yang terbuat dari kulit dan kayu digunakan untuk musik dan tari zapin.	Tembilahan, Tembilahan Hulu, Enok Mandah, Gas, Kateman.	75%	15%	10%
	10	Rebana	Alat musik pukul yang dimainkan berkelompok/ grup yang mempunyai beberapa macam pukulan, biasanya mengiringi lagu-lagu qasidahan dan musik Melayu lainnya.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	80%	10%	10%
	11	Tambor	Alat musik yang yang terbuat dari kayu berbentuk tabung dimainkan menggunakan bilah rotan sebagai pemukul.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	75%	15%	10%
	12	Kelintang	Alat musik yang terdiri dari gong dan canang- canang kecil, merupakan alat musik masyarakat Melayu Timur / Iranon yang mempunyai beberapa jenis lagu.	Desa Kuala Patah parang Kec. Sungai Batang, Kec. Reteh.	80%	10%	10%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	13	Gendang Buluh	Alat musik yang terbuat dari potongan bambu yang dibuat sedemikian rupa, dimainkan dengan dipukul. Biasanya dimainkan saat waktu senggang, panen padi, perayaan hari besar tertentu, dimainkan satu orang pemain sekaligus sebagai penyanyi.	Kec. Keritang	50%	15%	35%
Seni Tari Tradisional							
	1	Zapin Balam Belage	Ragam tari zapin yang berkembang di Indragiri Hilir yang menggambarkan burung balam berlaga. ini merupakan tarian yang bercerita tentang perlawanan antara burung yang sedang berkelahi.	Kec. Mandah, GAS, Enok. Tembilahan.	10%	45%	45%
	2	Zapin Sisip	Tarian zapin khas Melayu banjar, ini merupakan tarian yang menceritakan para pemuda dan pemudi berpasang-pasangan menari bersuka ria.	Kec. Tembilahan, GAS, Gaung, Batang Tuaka, Enok, Tempuling	50%	25%	25%
	3	Tari Zapin Rantauan	Tarian yang menceritakan perempuan yang bersuka cita menunggu orang jauh yang akan datang.	Kec. Tembilahan, GAS, Gaung, Batang Tuaka, Enok, Tempuling	50%	25%	25%
	4	Tari Tirik Laran	Tari ini yang menceritakan kegundahan hati seorang isteri antara rela dan tidak rela melepaskan kepergian suami untuk pergi merantau agar bisa merubah kehidupan lebih baik lagi atau istri yang galau ditinggalkan suaminya untuk mencari pekerjaan dan pergi merantau.	Kec. Tembilahan, Kuindra, GAS, Gaung, Batang Tuaka, Enok, Tempuling	50%	25%	25%
	5	Joget Mande/joget Dangkong	Tari pergaulan masyarakat dalam bersuka dan bergembira biasanya ditampilkan pada perayaan pesta kawin dan hari-hari tertentu.	Kec. Mandah	30%	35%	35%
	6	Tari Pedang	Tari penyambutan tamu dan menggunakan properti pedang.	Kec. Reteh	50%	25%	25%
	7	Tari Kampilan / Tari Sondang	Tari penyambutan tamu dan pengantin datang pada masyarakat Melayu timur atau Iranun di daerah Kuala Patah Parang dan sekitarnya.	Kec. Sungai Batang, Reteh, Enok.	75%	15%	10%
	8	Tari Mayang	Tarian yang menggunakan mayang pinang yang telah diberi mantera dan apabila dipukulkan kepada para penonton maka penonton otomatis bisa menari.	Kec. Reteh	50%	25%	25%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	9	Debus	Pertunjukan dengan menggunakan mantera dan jampi-jampi yang menunjukkan kekebalan pemainnya.	Kec. Enok, Keritang, Reteh.	50%	25%	25%
Seni Sastra Tradisional							
	1	Madihin	Seni pertunjukan/Sastra lisan yang dimainkan perorangan atau lebih dengan menggunakan alat musik gendang/terbangan, bertutur secara spontanitas untuk hiburan masyarakat biasanya ditampilkan pada pesta perkawinan dan hari-hari tertentu dimasyarakat Melayu Banjar.	Kecamatan Tembilahan, Kuindra, Batang Tuaka, Tempuling, Enok.	80%	10%	
	2	Dodoi	Sastra lisan yang dilakukan suku Melayu dan Banjar merupakan seni bernyanyi dalam menidurkan bayi yang dimasukkan dalam ayunan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	
	3	Nandong	Nyanyian menidurkan anak.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	
	4	Lamut	Seni bertutur dalam sastra lisan yang di iringi dengan pukulan gendang/terbangan yang bercerita tentang cerita kebangsawanan, kemasyarakatan dan cerita religi yang bersifat sindiran terhadap pola kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat dan sebagai tunjuk ajar tentang agama dalam bermasyarakat dengan diiringi permainan gendang/terbangan dan bait-bait pantun nasehat.	Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kuindra	30%	35%	
	5	Syair	Sastra lisan yang disenandungkan dengan tujuan bermacam- macam diantaranya : syair panji, syair kiasan, percintaan, syair sejarah dan syair agama.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	
	6	Badenden	Sastra lisan yang merupakan ratapan dilakukan suku laut/suku duano merupakan ratapan dalam budaya bernafkah di lautan.	Kecamatan Kuindra, Concong, Tanah Merah, Sungai Batang,Mandah	50%	25%	
Seni Teater Tradisional							
	1	Teater Bangsawan	Seni teater tradisional Melayu yang berkisah tentang kerajaan dan kehidupan dalam istana.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	2	Drama	Seni teater yang bercerita tentang kehidupan bermasyarakat.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	
	3	Mamandak	Seni teater suku Banjar Indragiri Hilir yang bercerita tentang kerajaan dan kehidupan dalam istana.	Kec. Tembilahan, Tempuling	50%	25%	
	4	Wayang Bangsawan	Seni pertunjukan yang dilakukan oleh seorang dalang yang bercerita tentang kebangsawanan dengan menggunakan wayang.	Kec. Tembilahan, Tempuling, Kuindra.	50%	25%	
	5	Wayang Banjar	Seni pertunjukan yang bercerita tentang kehidupan masyarakat dengan menggunakan wayang kulit.	Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Gaung, Kuindra, Tempuling.	50%	25%	
	Seni Pertunjukan Tradisiona						
	1	Debus	Seni pertunjukan dengan senjata tajam yang telah dimantrai/jampi pada suku Jawa dan Melayu Indragiri Hilir yang mempertontonkan kekebalan tubuh.	Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Gaung, Kuindra, Tempuling, Enok.	50%	25%	
	2	Reog	Seni pertunjukan masyarakat Ponorogo pada suku Jawa Indragiri Hilir yang berasal dari Jawa Timur.	Kec. Tembilahan, Kempas, Keritang, Kemuning, Enok, Pulau Burung, Teluk Belengkong, Katemen.	70%	15%	
H.	**Bahasa**						
	Bahasa Indonesia		Bahasa Nasional	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	100%	-	-
	Bahasa Melayu		Bahasa daerah masyarakat Indragiri Hilir	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	1	Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan *Tuan Guru Sapat*	Bahasa perantau suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan	Kec. Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Batang Tuaka, Enok, Pelangiran, Kuindra	30%	35%	35%
	2	Dialek Mandah/Riau Lingga	Bahasa Melayu Pulau Penyengat yang berkembang sesuai dengan dialek bahasa lokal.	Kec. Mandah GAS, Gaung, Kateman.	70%	15%	15%
	3	Manuskrip Gaung	Bahasa Melayu yang berkembang sesuai dengan dialek bahasa lokal dan Melayu Timor/Iranon.	Kec. Reteh, Sungai Batang, Enok.	70%	15%	15%
	4	Dialek Melayu Pekan Tua / Indragiri	Bahasa Melayu yang berkembang sesuai dengan dialek bahasa lokal yang dipengaruhi oleh Bahasa Melayu kerajaan Indragiri.	Kec. Kempas, Enok, Tempuling.	70%	15%	15%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	5	Dialek orang Duano/ Suku Laut	Bahasa Melayu yang berkembang sesuai dengan dialek bahasa lokal etnis Duano dan suku laut lainnya.	Kec. Concong Kuindra, Mandah, Sungai Batang, Tanah Merah.	70%	15%	15%
I.	**Permainan Rakyat**						
	1	Ali oma	Permainan anak-anak dengan petak umpet yang diiringi nyanyian ali oma.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	2	Bola kasti	Permainan anak-anak beregu menggunakan lemparan bola kasti yang dilempar dan dipukul serta disambut.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	3	Manuskrip K.H. Abdurrahman Siddiq dikenal juga dengan sebutan *Tuan Guru Sapat*	Permainan anak-anak dipermainkan dengan cara menebak yang ada di dalam genggaman .	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	40%	30%	30%
	4	Calung (Goncang Kaleng)	Permainan anak–anak dengan petak umpet yang menggunakan kaleng ketika kaleng diguncang berarti telah ada yang berhasil mengelabui yang pajak biasanya bermain secara berkelompok 3 s/d 10 orang atau lebih.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	5	Manuskrip Gaung	Permainan sejenis catur di atas papan atau selembat kertas karton yang bersilang-silang, biasanya mempergunakan buah caturnya dari kerang siput, biji asam jawa dan potongan kertas.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	6	Lu Lu cina buta	Permainan anak–anak dengan petak umpet, salah satu anak ditutup matanya untuk mencari teman yang akan ditangkap yang tidak terlepas dari rantai tangan berkeliling diiringi dengan lagu lulu cina buta.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	7	Congkak	Permainan anak–anak yang menggunakan papan yang dinamakan *papan congklak* dan 98 (14 x 7) buah biji yang dinamakan *biji congklak* atau *buah congklak*. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kananya dianggap sebagai milik sang pemain.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	8	Gasing	Permainan dengan menggunakan sebuah gasing yang terbuat dari kayu, dimainkan dengan seutas tali agar bisa berputar pada poros dan berkeseimbangan pada suatu titik terbuat dari alat dari dimainkan dengan perorangan dan beregu. Dengan adu lama berputar dan main pangkah/mengdu gasing yang satu dengan gasing yang lain.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	9	Guli	Permainan yang menggunakan kelereng sejenis kaca yang bulat- bulat menggelinding dimainkan beramai-ramai dan dengan dijentik untuk mematikan lawan main	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	10	Layang-layang	Permainan menerbangkan layang-layang yang dihias dan diraut bambunya dan diberi kertas warna warni dan dibuat bunyi-bunyian, menggunakan benang atau tali.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	11	Lugu	Permainan yang terbuat dari tempurung/batok kelapa di bentuk hati dan di mainkan dengan menggunakan sebilah bambu yang dipipihkan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	60%	20%	20%
	12	Sepak raga/Takraw	Permainan perorangan dan beregu menggunakan bola yang terbuat dari anyaman rotan.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	13	Seremban	Permainan anak-anak perempuan menggunakan kulit kerang dan bola dimainkan berdua dan berkelompok.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	14	Yeye	Permainan anak-anak yang menggunakan karet gelang yang dijalin menjadi seperti tali dan dilangkahi atau dilompati.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	15	Engkaan/setatak	Permainan anak-anak yang dimainkan di lapangan yang dibuat bagan kotak-kotak untuk gambar untuk melompat- lompat dengan menggunakan buah engkaan yang terbuat dari kayu ataupun mar-mar.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	70%	15%	15%
	16	Langkah Tiung	Permainan anak-anak dengan melakukan langkah tiung dimainkan oleh beberapa regu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	17	Tam Tambuku	Permainan anak-anak dimainkan dengan berkelompok yang akan melewati pagar tangan dan anak yang belakang akan diberi pertanyaan dengan nyanyian.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	18	Lempar Sendal	Permainan anak-anak secara perorangan dan bereg dengan melempar sesuatu sengan menggunakan sendal, siapa yang kalah akan mengendong/menghambin temannya yang menang.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	19	Terompa Panjang	Permainan yang menggunakan terompa/ sandal panjang yang terbuat dari sebilah kayu digunakan secara bersama-sama untuk melangkah.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	20	Main Belon / Ikan- ikanan	Permainan yang dilakukan beberapa anak dibagi dua regu, satu regu harus melintasi garis regu satunya lagi, jika tertangkap atau tidak bisa melintasi maka regu anak tersebut tidak bisa lagi bermain dan bergantian menjadi penjaga/ penghalang.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	21	Ampar-ampar Pisang	Permainan anak-anak dilakukan dengan berpasangan (dua orang anak atau lebih) dengan menyanyikan lagu ampar-ampar pisang dan dengan menggerakkan tangan atau kaki. Apabila pemain memilih untuk menggunakan tangan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan merapatkan jari-jari kedua tangan. Tempelkan kedua telapak tangan (keduanya bersebelahan) pada media seperti meja, lantai dll. Kemudian mulailah bermain dengan menyanyikan lagu ampar-ampar pisang dan menggerakkan tangan kiri atau kanan terlebih dahulu sesuai dengan keinginan anak.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
J.	**Olah raga Tradisonal**						
	1	Silat	Ilmu bela diri dan seni menggerakkan tubuh untuk mengapresiasikan gerak kasar ke gerak lembut yang bernilai seni. Silat yang ada di Indragiri Hilir yaitu silat Pangean, kuntau, sendeng, gayung dan buah tujuh.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
	2	Sepak Raga	Olahraga tradisional yang menggunakan bola keranjang, yang terbuat dari jalinan rotan dan dimainkan secara perorangan dan beregu.	Menyebar pada setiap Kecamatan Kab. Indragiri Hilir	50%	25%	25%
K.	**Cagar Budaya**						
	1	Makam Tengku Syarif Mahmud	Wakil Sultan Riau Lingga yang memerintah di daerah Batin Enam Suku.	Jl. Tengku Syarif dan Jl. Datok Thalib Mandah	60%	20%	20%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	2	Makam Tuan Guru H. Khalil Bin. H. Abdul Shamad	Tokoh ulama Mandah.	Kampung Indragiri Mandah	50%	25%	25%
	3	Tapak Rumah Candu	Rumah Candu dibangun Belanda merupakan tempat para orang Cina pekerja kayu (Pop Log) dan Para Amtenar dan Anderneming dalam kegiatan untuk bersenang-senang dan berleha-leha berisitirahat sambil menghisap Candu dan perdagangan candu (Jual beli) diperkirakan dibangun 92 tahun yang lalu oleh Belanda.	Jalan Datok Kasim Tepi Sungai Mandah	20%	40%	40%
	4	Vihara Bhudi Dharma Sembuang	Rumah ibadah bagi Pemeluk Agama Budha. Kelenteng didirikan tahun 1832 yang sampai saat ini sudah mengalam renovasi sebanyak 7 kali.	Sembuang RT 07 RW 02 Mandah	90%	5%	5%
	5	Rumah Kuning (Eks. Peninggalan Belanda)	Rumah peninggalan Belanda yang diperkirakan dibangun sekitar awal tahun 1932-an. Usia bangunan sampai sekarang diperkirakan 87 Tahun, dan mendapat renovasi dari Pemerintah Daerah pada Tahun 2005.	Jalan Tengku Syarif Mandah	60%	20%	20%
	6	Meriam Langkap	Meriam ini berjumlah 5 buah, 4 buah masih tinggal dilokasi awal dan 1 buah dipindahkan ke Kantor Camat Mandah. Kondisi dari 4 buah meriam Berada pada Lintang Selatan daerah kampong Langkap Desa Igal.	Jalan Poros Mandah	40%	30%	30%
	7	Meriam Mandah	Meriam berjumlah 4 buah dengan ukuran yang berbeda-beda 2 buah meriam sama besarnya dan panjangnya yang paling besar dan dua buah lagi juga sama ukurannya dan panjangnya namun berukuran sedang. Kondisi meriam saat sekarang ini dapat dikatakan sudah termakan usia dan sangat prihatin kondisinya karena sudah lama tergerus dan terendam oleh keasinan air sungai, pada Tahun 2005. oleh Pemerintah dibangun tempat tapak untuk kedudukan meriam dimaksud.	Jl. Datuk Qasim Mandah	60%	20%	20%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	8	Kitab- Kitab : H. Idam H. Khalil Bin H. Abdul Samad	Kitab–kitab tua peninggalan H. Khalil Bin. H. Abdul Shamad Berdasarkan penanggalan yang terdapat pada Kitab-kitab Tua terdapat Tahun penerbitan buku yaitu Tahun 1334 H dan Jumlah Buku yang ada sekitar + 80 Kitab/Buku tentang Pernikahan, Perceraian, Fiqih, Tauhid, Tsawuf, Kehidupan dan berkehidupan, buku-buku dan Kitab-kitab ini merupakan salah satu kontribusi untuk Syiar Agama Islam pada masa hidupnya.	Jalan M. Saleh Thalaha Mandah	50%	25%	25%
	9	Makam Tuan Guru Haji Abdurrahman Ya'kub	Tokoh yang mensyiarkan agama Islam di Indragiri Hilir, beliau juga banyak mendirikan sekolah-sekolah (madrasah).	Masjid Baiturrahman, Desa Pasar Kembang, Kec. Keritang	70%	15%	15%
	10	Kitab Tuan Guru Haji Abdurrahman Ya'kub	Kitab-kitab peninggalan Tuan Guru Haji Abdurrahman Ya'kub yang ditulis langsung oleh beliau. Kitab-kitab beliau hanya tersisa empat dan lainnya banyak yang habis terbakar bersama Pondok Pesantren Tuan Guru Haji Abdurrahman Ya'kub di Desa Sei Gergaji.	Desa Pasar Kembang, Kec. Keritang	70%	15%	15%
	11	Kolam Taga Raja	Salah satu kolam ditepinya adalah merupakan tempat kuburan buaya putih yang terdampar kekeringan dan kolam ini disebut sebagai kolam buaya berdendang.	Jl. Pendidikan Suak Pangminah S. Guntung Kec. Kateman	40%	30%	30%
	12	Makam Syekh Abdul Sa'id Bin Affa/ Syekh Manshur Nashruddin	Seorang ulama dan merupakan Syekh Mufti berdarah bugis berasal dari Kesultanan Riau-Lingga Keturunan sultan ke IV Penyengat–Riau Lingga dan wafat di Sungai Guntung, pada 17-10-1923.	Parit 1 Bandar Sri Gemilan Kecamatan Kateman	70%	15%	15%
	13	Rumah dan Eks Tapak Kantor Bea dan Cukai	Bangunan rumah dan kantor dibangun pada tahun 1942, Kondisi bangunan kantor sudah tidak dapat digambarkan karena sudah tergerus oleh erosi dan abrasi dan sekarang hanya tinggal Tapak Bangunan Kantor yang berada pada tepian sungai. Menurut informasi bangunan rumah tersebut merupakan tempat persembunyian orang-orang Durai Kecamatan Moro ketika terjadi penyerangan oleh pihak Belanda.	Parit 2 Sungai Guntung Kec. Kateman	40%	30%	30%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	14	Meriam Kecil	Meriam ditemukan tahun 1972, saat ini keberadaan meriam terletak berada di halaman kantor Koramil Kecamatan Kateman.	Jl. Abd. Manaf dan Jl. Hasanuddin Taga Raja Kec. Kateman	70%	15%	15%
	15	Makam H. Syekh Abdurrahman Ya'kub	Tokoh ulama Keritang	Mesjid Baiturrrahman Kec. Keritang	70%	15%	15%
	16	Pondok Pesantren Nurul Wathan	Pondok yang didirikan oleh H. Syekh Abdurrahman Ya'qub bersama masyarakat sekitaran Tahun 1946 di Sungai Gergaji. Madrasah tersebut terbakar termasuk sejumlah buku hasil karangan beliau. Kemudian Madrasah dibangun kembali di Desa Pasar Kembang pada tahun 1954. Selanjutnya oleh ahli waris Madrasah Nurul Wathan ini dijadikan yayasan yang dikenal dengan nama Yayasan Nurul Wathan.	Pasar Kembang Kec. Keritang	70%	15%	15%
	17	Makam Batu Nunggul	Makam Keramat Batu Nunggul terletak di tepi danau Batu Nunggul Desa Tok Jimun Kecamatan Kemuning. Pada awalnya terdapat 2 (dua) makam yang diindentifikasi adalah makam Batu Nunggul suami isteri, yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai makam keramat. Saat ini kondisi di lapangan hanya terdapat 1 (satu) makam yang diduga makam isterinya, sementara makam suaminya sudah jatuh/longsong kedalam Danau Batu Nunggul karena erosi. Sampai saat ini makam tersebut masih dikunjungi masyarakat	Jl. Penunjang Keramat Tok Jimon Kec. Kemuning	40%	30%	30%
	18	Meriam Reteh	Merupakan meriam tua peninggalan zaman penjajahan Belanda yang ada di Kecamatan Reteh lalu dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Yudha Bhakti Parit 6 Jalan Telaga Biru Tembilahan	Parit 6 Jalan Telaga Biru Kec. Tembilahan Hulu			
	19	Situs Pendam Tujuh	Legenda Tujuh Anak Raja yang mati akibat di tawan oleh yang jahat, kemudian di kuburkan di lokasi yang sama ketujuh Gadis tersebut dinamakanlah Pendam Tujuh	Batu Ampar Lama Dusun I Bukit Bunga Batu Ampar Lama Kec. Kemuning	40%	30%	30%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	20	Batu Tanda Batas (Eks Peninggalan Belanda)	Batu tanda batas eks peninggalan Belanda berupa batu coran berbentuk segi empat dan bertulisan angka 2982, yang saat ini keberadaan benda berada di bawah bangunan rumah penduduk yang dulunya merupakan rumah sekolah zaman Belanda.	RT. 8 Raden Kepayang Lubuk Besar kec. Kemuning	20%	40%	40%
	21	Peninggalan Sesepuh Suku Iranon di Desa Kuala Patah Parang	Alat-alat peninggalan dari sesepuh Suku Iranon, berupa berupa alat-alat kesenian, (kelintang) senjata, (kampilan dan sondang), senjata tradisional/peralatan perang.	Desa Kuala Patah Parang, Kec. Sungai Batang	70%	15%	15%
	22	Makam Syekh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad	Makam seorang tokoh pensyiar agama Islam yangb lahir di Kelantan, Malaysia. Beliau sempat mendirikan Madrasah Tarbi'atul Islamiah sebelum meninggal.	Dusun Sungai Wanit, Desa Pandan Sari, Kec. Sungai Batang	70%	15%	15%
	23	Rumah Dinas Amir Enok (Eks Peninggalan Belanda)	Bangunan peninggalan Belanda yang kemudian digunakan untuk rumah dinas bagi "amir" di daerah Enok. Rumah ini dibangun pada tahun 1936.	Jl. Lintas Enok, Kel. Enok, Kec. Enok	50%	25%	25%
	24	Rumah BKIA Enok	Bangunan ini merupakan mess tempat tinggal bagi pegawai Keamiran Enok. Disebut Rumah BKIA karena bangunan ini pernah menjadi Kantor Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Enok.	Jl. Desa Enok, Kel. Enok, Kec. Enok	50%	25%	25%
	25	Rumah Pesanggrahan Enok	Bangunan peninggalan Belanda sebagai penginapan bagi tamu-tamu khususnya tamu pejabat kolonial.	Jl. Desa Enok, Kel. Enok, Kec. Enok	40%	30%	30%
	26	Makam Letda M Boya	Letnan Dua Mohamad Boya atau Letda M Boya adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia asal Indragiri Hilir.	Desa Sungai Rukam, Kec. Enok	70%	15%	15%
	27	Rumah Bea Cukai Reteh I (Eks Peninggalan Belanda)	Bangunan ini dibangun oleh Belanda. Rumah dinas ini pernah menjadi rumah dinas karyawan bea dan cukai Indonesia yang bertugas di Pulau Kijang	Jl. Pegawai, Kel. Pulau Kijang. Kec. Reteh	40%	30%	30%
	28	Rumah Bea Cukai Reteh II (Eks Peninggalan Belanda)	Bangunan ini dibangun oleh Belanda. Rumah dinas ini pernah menjadi rumah dinas karyawan bea dan cukai Indonesia yang bertugas di Pulau Kijang.	Jl. Utama, Kel. Pulau Kijang, Kec. Reteh	40%	30%	30%
	29	Makam Tua – Teluk Jenang	Pemakaman ini dahulunya merupakan komplek pemakaman raja-raja.	Jl. Teluk Jenang, Desa Simpang Gaung, Kec. Gaung	40%	30%	30%

No		Objek Pemajuan Kebudayaan	Deskripsi	Lokasi	Kondisi Faktual		
					Terawat	Kurang Terawat	Tidak Terawat
	30	Makam Tua – Teluk Kabung	Diperkirakan usia makam sudah sangat tua. Bentuknya masih asli tidak tersentuh rehabilitasi, hanya terdapat batu nisan dan batu galangnya.	Jl. Teluk Kabung, Desa Simpang Gaung, Kec. Gaung	40%	30%	30%
	31	Rumah Kuning–Gaung (Eks Peninggalan Belanda)	Bangunan jaman Kolonial Belanda. Bangunan ini telah direhabilitasi namun tidak mengubah bentuk asli bangunan.	Jl. Merdeka, Desa Kuala Lahang, Kec. Gaung	70%	15%	15%
	32	Makam-makam Tua Pelangiran	Terdapat sepuluh makam tua namun hanya dua saja yang mudah dikunjungi karena delapan makam lainnya ada di dalam hutan.	Desa Sungai Terap - Desa Sungai Enggang - Desa Tanjung Simpang, Kec. Pelangiran	40%	30%	30%
	33	Makam Syekh Abdurrahman Shiddiq	Seorang ulama dari Kerajaan Indragiri yang lebih dikenal dengan sebutan "Tuan Guru Sapat". Beliau berasal dari Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan. Tuan Guru Sapat adalah seorang pendakwah, pengajar, mufti, penulis dan petani kebun yang berhasil. Syair yang sangat dikenal dari Tuan Guru Sapat yaitu Syair Ibarat Khabar Kiamat.	Kampung Hidayat, Desa Teluk Dalam, Kec. Kuala Indragiri	80%	10%	10%
	34	Sondang	Senjata tradisional masyarakat suku Iranun/Melayu Timur yang terbuat dari besi atau tembaga, berkepala atau gagang reflika kepala naga atau buaya. Senjata ini tidak memiliki sarung senjata.	Kec. Reteh, Enok, Sungai Batang	70%	15%	15%
	35	Kampilan	Senjata tradisional masyarakat suku Iranun/Melayu Timur yang terbuat dari besi atau tembaga, berkepala atau gagang reflika kepala naga atau buaya. Senjata ini memiliki sarung senjata.	Kec. Reteh, Enok, Sungai Batang	70%	15%	15%

Sumber : Disparporabud Kab. Inhil

2.2.3.2. Olahraga

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kuat salah satunya dilakukan dengan olahraga. Selain itu olahraga juga sebagai sarana penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda, untuk itu peningkatan prestasi olahraga sangat penting dilakukan. Pembinaan dalam bidang olahraga dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat Daerah. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang

lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi. Berikut capaian Kinerja Sub urusan olahraga di Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel II- 13
Kinerja keolahrgaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	INDRAGIRI HILIR			
		2019	2020	2021	2022
Prestasi olahraga	Medali	18	2	38	73
Persentase Peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah	Persen	0	0	0	-27
Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat daerah	Medali	0	0	11	73

Sumber : Disparporabud Kab. Inhil

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang berhubungan dengan penentuan permasalahan pembangunan hingga kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasinya.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Sumber Daya Manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, program wajib belajar, beasiswa dan lain-lain.

Tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dipantau dari beberapa indikator pendidikan diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM),

Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka partisipasi Sekolah (APS) serta Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dalam mengukur kualitas tenaga pendidik.. Dari Tahun 2018-2022 capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II- 14
Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (persen)	95.34	95.52	95.99	99.99	BPS
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (persen)	81.26	82.06	82.59	82.06	BPS
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (persen)	105.85	105.93	104.56	103.92	BPS
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (persen)	99.3	102.01	99.97	101.92	BPS
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	99.08	99.75	99.77	99.99	BPS
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	91.70	92.13	92.27	85.57	BPS
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV)	73.91	71.97	72.96	71.99*	BPS
SPM Bidang Pendidikan :					
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95.39	95.94	96.02	92.78	DISDIK
Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	5.38	95.57	95.29207	N/A	DISDIK
Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	33.07	91.62	19.712706	N/A	DISDIK

Sumber : BPS Indragiri Hilir, 2023/ Dinas Pendidikan Kab Inhil

Data tabel diatas terlihat bahwa kinerja urusan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir relatif baik yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja meningkat dari tahun ke tahun.

Capaian APM SD/MI Indragiri Hilir tahun 2022 sebesar 99,99 persen hampir semua penduduk umur SD/MI dapat bersekolah sehingga juga mendorong terhadap pencapaian wajib belajar dan IPM Indragiri Hilir. Sementara, Selama periode 2019-2022 terdapat 17,94 persen penduduk usia sekolah SMP/MTs yang belum sekolah. Semakin kecilnya nilai APM setiap kenaikan jenjang disebabkan oleh terbatasnya jumlah sekolah dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak semua wilayah memiliki fasilitas pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi sehingga sulit mengakses fasilitas pendidikan tersebut. Jarak sekolah yang jauh membuat banyak masyarakat dengan keadaan ekonomi yang kurang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah karena bingung mencari biaya hidup sehari-hari dan tempat tinggal jika memutuskan tinggal di dekat sekolah, sementara

melakukan perjalanan pulang pergi tidak memungkinkan. Keadaan ini membuat tingginya putus sekolah dan rendahnya APM di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada Periode 2019-2022 berdasarkan jenjang pendidikan, nilai APK terlihat menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin sedikit penduduk yang bersekolah di jenjang tersebut. Nilai APK jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Indragiri Hilir melebihi angka 100 persen yaitu sebesar 103.92 yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar rentang usia 7-12 tahun, lebih jelasnya yaitu dari 105 murid, sebanyak 100 muridnya merupakan penduduk usia 7-12 tahun, di luar itu terdapat 4 sampai dengan 5 murid yang berasal dari golongan usia di atas 12 tahun atau bahkan di bawah usia 7 tahun. Berbagai hal bisa menjadi alasan, antara lain orang tua yang terkadang mendaftarkan anak yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu, angka mengulang kelas yang tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP untuk tahun yang sama, nilai APK sebesar 101.92. Artinya, dari sebanyak 100 penduduk usia 13-15 tahun, masih ada yang berada di luar renstang usia 13-15 tahun.

Pada kelompok umur 7-12 tahun (SD/MI) , 99,99 persen penduduk di kelompok usia tersebut bersekolah yang artinya hampir seluruh umur dimaksud telah bersekolah. Pada kelompok umur 13-15 tahun (SMP/MTs) , 85,57 persen penduduk di kelompok usia ini bersekolah, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (2021).Artinya masih terdapat sekitar 14,43 persen penduduk di kelompok umur ini yang tidak bersekolah. Pada saat pemerintah sudah mengusahakan kebijakan Wajib Belajar 12 tahun, hal ini harusnya tidak terjadi. Lokasi tempat tinggal yang jauh dari sarana pendidikan SMP dan keadaan ekonomi kurang mampu adalah beberapa penyebab seorang anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Seorang guru atau pendidikan profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau Diploma Empat (D.IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian) memiliki sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa

guru di Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan tahun 2022 yang sudah berkualifikasi akademik S-1/D-IV sebanyak 71.99 persen. Hal ini berarti bahwa masih terdapat sebanyak 28.01 persen yang belum berkualifikasi akademik S-1/D-IV.

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilirt terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang Kesehatan dapat diukur dari indikator Indeks Kesehatan seperti angka harapan hidup, Indeks Kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 kelahiran hidup, Jumlah Kematian Ibu dan Bayi. Selain itu kecukupan sarana dan prasarana serta sumberdaya Kesehatan juga menjadi tolok ukur kinerja Kesehatan yang diukur melalui indikator Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk, Rasio dokter per 1000 penduduk, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk. Kinerja Indikator-indikator Kesehatan yang tercantum adalah dalam rangka pencapaian indikator utama dalam urusan Kesehatan yakni Angka Harapan Hidup. Selama periode tahun 2019-2022, Angka harapan hidup di Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkat. Pada tahun 2019 AHH Kabupaten Indragiri Hilir 67.66 Tahun, sampai dengan tahun 2022 meningkat menjadi 68.31, ini berarti ada penambahan umur harapan hidup masyrakat Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan 68,31 Tahun. Namun pencapaian ini bila dibandingkan dengan Kabupaten tentangga seperti Indragiri Hulu dan pelalawan AHH Indragiri Hilir lebih Rendah. AHHH Indragiri Hulu mencapai 70.48 Tahun sementara pelalawan mencapai 71,53 Tahun pada tahun 2022, Begitu juga Provinsi Riau mencapai 71.95 Tahun.

Gambaran pencapaian kinerja urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II- 15
Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Angka Harapan Hidup	67.66	67.85	67.98	68.31	BPS
Indeks Kesehatan	0.733	0.736	0.738	0.743	DATA DIOLAH
Angka Kematian Bayi	24	24	71	41	DINKES
Jumlah Kematian Ibu	7	10	16	8	DINKES
Angka Stunting	27.7	24.4	28.4	28.5	SSGI
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0.005	0.006	0.006	0.006	BPS
Rasio dokter per 1000 penduduk	0.14	0.20	0.20	0.19	BPS
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.11	0.13	0.13	0.14	BPS
SPM Bidang Kesehatan :					
Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	77.68	77.07	71.2	66.98	DINKES
Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	48.79	60.29	57.8	67.5	DINKES
Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	79.62	76.3		70.08	DINKES
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	58.59	61.7	47	66.1	DINKES
Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	97.13		52	64.03	DINKES
Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	10.44	4.69	4.69	43.86	DINKES
Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	59.24	28.3	79.8	62.73	DINKES
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	14.26	4.63	1.55	68.97	DINKES
Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	88.12	41.16	18	62.97	DINKES
Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	78.97	82.22	82.4	91.09	DINKES
Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	29.09	18.22	80.75	DINKES
Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemaahkan daya manusia Immunodeficie mendapatkan layanan	13.69	25	27	58.74	DINKES

Sumber : BPS Indragiri Hilir, 2023/Dinas Kesehatan Kab. Inhil

Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir jika dirata-ratakan hanya mencapai 70 persen, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kelengkapan data yang dikirim puskesmas tidak lengkap dan tidak tepat waktu
2. Data sasaran dengan data kunjungan masih belum sesuai
3. Perhitungan kebutuhan sesuai SPM untuk variable dan komponen banyak yang sulit terpenuhi

4. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua standar pelayanan minimal dapat terpenuhi
5. Kegiatan/program masih belum optimal dikarenakan adanya pandemic covid-19
6. Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kefasilitas pelayanan kesesehatan seperti melakukan skrining HIV dan masih banyak ditemukan pasien tuberculosis yang putus obat
7. Masih minimnya penyediaan barang/jasa misalnya alat-alat skrining dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan obat-obatan
8. Masih minimnya pengetahuan Puskesmas tentang kebutuhan SPM sehingga tidak semua kebutuhan SPM terpenuhi
9. pikiranKolaborasi Rumah Sakit dan Puskesmas PONED dan PONEK belum maksimal
10. Sumber Daya yang masih kurang dan pengelola program yang sering berganti

a. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga kesehatan

Pada tahun 2022, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 3 rumah sakit pemerintah dan 1 Rumah Sakit Swasta. Selama periode 2019–2022, jumlah rumah sakit tidak mengalami perubahan dan yang berubah adalah jumlah penduduk yang meningkat dengan rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Indragiri Hilir relatif tetap yaitu sebesar 0,006 yang berarti setiap 1 rumah sakit melayani sebanyak 219.341 orang penduduk Indragiri Hilir. Sementara untuk fasilitas Kesehatan lainnya diwakili oleh indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk. Selama periode 2019-2022 kinerja indikator ini juga tidak mengalamai peningkatan yang signifikan, sampai denga tahun 2022 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk mencapai 0,14 persen. Meski telah memenuhi standar nasional dari sisi kuantitas, namun dari segi kualitas sarana dan prasarana relatif masih belum memadai. Kondisi puskesmas, peralatan dan obat-obatan belum mampu memenuhi standar sebuah puskesmas yang baik. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas harus menjadi agenda pembangunan ke depan.

Sumber Daya Kesehatan dapat dilihat melalui Indikator Rasio dokter per 1000 penduduk. Selama periode ini, rasio dokter per 1.000 penduduk memiliki tren berfluktuatif meningkat berkisar antara yaitu dari 0,14 sampai 0,20 Persen yang bermakna bahwa setiap 1 orang dokter melayani penduduk berkisar antara 15.593 20.972 penduduk. Kondisi rasio dokter Indragiri Hilir masih dibawah standar (15 dokter spesialis melayani 100.000 penduduk atau 1 dokter spesialis melayani 6.946 penduduk). Agar mencapai jumlah ideal, maka jumlah dokter di Indragiri Hilir sebanyak 52 orang dokter spesialis dari berbagai keahlian. Kondisi ini perlu menjadi target pada pembangunan kesehatan ke depan

b. Status Gizi Masyarakat

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. berdasarkan hasil survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 Angka Stunting diKabupaten Indragiri hilir berflutiatif meningkat. pada tahun 2018 angka stunting sebesar 27.70 persen menurun menjadi 24.40 persen pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 28.40 dan kembali meningkat menjadi 28.50 paada tahun 2022. berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan Kabupaten indragiri hilir dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Indragiri Hilir. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah populasi balita, dan adanya temuan kasus stunting baru. Selain itu Faktor deteminan yg mempengaruhi adalah (1) Bayi ada yang tidak diberikan ASI ekslusif (2) Ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan ANC minimal 6 kali (2 kali USG) disebabkan belum semua Puskesmas memiliki USG (3) Ibu hamil diberi tablet tambah darah namun masih ada yg tidak meminum secara rutin (4) Masih ditemukan kasus diare karena air bersih, jamban sehat dan sanitasi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mulai dari menciptakan program inovasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting seperti "GERAKAN SATU HATI" (GSH) jilid I dan II dimulai dari gerakan seluruh TP. PKK Kabupaten sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. Gerakan ini merupakan gerakan bersama dengan melibatkan seluruh ASN, Perbankan, Swasta, Perusahaan, LSM dan Organisasi untuk berdonasi yang akhirnya berhasil menurunkan prevalensi stunting, balita gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Sebaran Tenaga medis

Dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 menunjukkan bahwa setidaknya dalam satu kecamatan rata-rata sudah terdapat minimal satu puskesmas. Apabila dihitung rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kesehatan tersebut masih kurang memadai. Salah satu contohnya, dengan jumlah dokter sebanyak 139 orang dan jumlah penduduk Indragiri Hilir sebanyak 723.394 jiwa, berarti 1 (satu) dokter terbebani sekitar lima ribu penduduk. Beban ini masih terlalu besar sehingga jumlah dokter masih perlu ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayan kesehatan di Indragiri Hilir. Selain itu, jumlah penduduk juga terus meningkat sehingga kebutuhan akan tenaga kesehatan juga akan terus meningkat.

Berikut Data terkait Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Indragiri Hilir, 2022

Tabel II- 16
Sebaran Tenaga Kesehatan di Indragiri Hilir tahun 2022

		DR		DRG		S2 KESEHATAN	s1 KESMAS	BIDAN	PERAWAT	KESLING	NUTRISIONIS	PENYULUH KESEHATAN	PRANATA LABKES	PWT GIGI	FISIOTERAPHY	ASS.APOTEKER	APOTEKER	PSIKOLOGI	RM	NON KES	JUMLAH
		AKTIF	TB	AKTIF	TB																
	DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	6	18	10	11	6	3	0	0	2		1	1	0		17	75
1	PKM TEMBILAHAN KOTA	4	1	1	0	0	1	31	20	1	0	1	3	2		2	0		1	0	68
2	PKM GAJAH MADA	3	0	2	0	0	0	20	22	0	0	0	0	1		3	0			0	51
3	PKM TEMBILAHAN HULU	3	0	1	0	0	1	21	29	0	2	1	1	2		0	0			1	62
4	PKM SUNGAI SALAK	1	0	1	0	0	0	9	21	0	0	1	0	0		1	1			3	38
5	PKM KEMPAS JAYA	0	0	1	0	0	2	18	15	1	1	1	2	0		0	1			1	43
6	PKM SAPAT	1	0	0	0	0	0	7	7	0	3	0	1	0		0	0			0	19
7	PKM CONCONG LUAR	1	0	1	0	0	1	6	7	0	0	1	1	0		0	0			0	18

8	PKM KUALA ENOK	1	0	0	0	0	2	6	5	0	0	0	1	0		1	0			1	17
9	PKM TANAH MERAH	1	0	1	0	0	0	5	7	0	0	0	1	2		0	0			0	17
10	PKM ENOK	1	0	2	0	0	0	8	8	0	1	1	0	1		0	1			1	24
11	PKM PENGALIHAN ENOK	2	0	1	0	1	0	9	9	0	1	1	0	0		1	0			0	25
12	PKM TELUK PINANG	1	0	1	0	0	1	5	8	1	0	0	1	0		0	1			0	19
13	PKM SUNGAI ILIRAN	0	0	1	0	0	2	2	2	0	1	1	2	0		1	0			0	12
14	PKM SUNGAI PIRING	0	0	1	0	0	0	10	11	0	1	0	0	0		1	0			0	24
15	PKM SUNGAIRAYA	1	0	1	0	0	0	11	7	0	0	1	0	0		0	1			0	22
16	PKM KUALA LAHANG	2	0	1	0	0	0	5	7	0	1	0	1	0		1	1			0	19
17	PKM SIMPANG GAUNG	0	0	0	0	0	0	8	1	0	1	1	1	0		0	0			0	12
18	PKM PULAU KIJANG	0	1	0	0	0	1	12	9	1	1	1	1	1		0	1			1	30
19	PKM BENTENG	2	1	0	0	0	0	6	10	1	0	0	1	1		1	0			1	24
20	PKM KOTA BARU	0	0	1	0	0	1	14	13	1	1	0	1	0		1	1			1	35
21	PKM P. KERITANG	2	0	1	0	0	0	8	12	2	1	0	1	0		1	1			0	29
22	PKM SELENSEN	2	0	0	0	0	1	14	14	0	2	1	1	2		1	1			0	39
23	PKM KERITANG HULU	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	1	0		0	0			0	8
24	PKM MANDAH	1	1	1	0	0	0	7	7	0	0	0	1	0		3	0			0	21
25	PK.M BEKAWAN	1	0	1	0	0	0	6	5	0	0	0	1	0		1	0			0	15
26	PKM BATANG TUMU	1	0	0	0	0	1	8	6	0	0	0	1	1		1	0			0	19
27	PKM SUNGAI GUNTUNG	1	0	2	0	0	2	9	14	1	0	1	1	1		2	0			0	34
28	PKM PULAU BURUNG	1	0	0	0	0	2	11	11	0	1	0	1	0		0	0			0	27
29	PKM PELANGIRAN	1	0	1	0	0	0	15	10	0	1	1	1	0	1	0	0			0	31
30	PKM TELUK BELENGKONG	1	0	1	0	0	0	10	6	0	0	1	1	0		0	0			0	20
31	UPTD LAB KES	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	6	0	0	0	0			0	9
32	UPTO INSTALASI GUDANG FARMASI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1	2			2	6
	JUMLAH	37	4	24	0	7	36	312	319	16	22	16	34	16	1	23	11	0	1	29	906

Sumber : Dinas Kesehatan kab. Indragiri Hilir

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II- 17
Kinerja Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA				SUMBER
		2019	2020	2021	2022	
Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	57.84	54.13	55.10	56.00	PUTR
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	Persen	17.29	26.93	26.99	26.69	PUTR

a. Jalan dan Jembatan

Panjang dan kualitas jalan Kabupaten berdasarkan Data Teknis Jalan (DD1) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah 1.190.594 Km.

Kondisi Baik untuk jalan Kabupaten berdasarkan data diatas adalah sebanyak 50,22%, Kondisi Sedang 21,41 dan Kondisi Rusak sebanyak 23,49%. Sementara itu hasil rekapitulasi berdasarkan DD1 untuk kondisi mantap jalan sebesar 55,10% dan Kondisi Tidak Mantap Jalan sebesar 44,90%.

Berdasarkan data Teknik Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten (DD2) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, Total Panjang jembatan adalah 17.125,3 M dengan jumlah jembatan sebanyak 680 unit. Dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel II- 18
Panjang dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Jumlah Jembatan	680 unit
Panjang Jembatan	17.125,3 meter
NK 1	282 unit
NK 2	88 unit
NK 3	127 unit
NK 4	168 unit
NK 5	15 unit

Sumber : Dinas PUTR kab. Inhil

Berdasarkan data diatas maka Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 adalah 56.00 Persen. Terjadi penurunan dari 57.84 pada tahun 2019 kemudian meningkat Kembali menjadi 54.13 Persen tahun 2020 dan 55.10 persen pada tahun 2021. Terdapat peningkatan sebesar 1.87 Persen dari tahun 2021 ke Tahun 2022.

Ruas jalan mendukung sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Ruas jalan Pulau Kijang- Sanglar (Ruas 6) dan Ruas jalan Sanglar - Kota Baru (Ruas 7). panjang Ruas jalan Pulau Kijang-Sanglar 21.5 KM 32.62 persen dalam kondisi mantap (Baik + sedang) sementara 67.38 Persen dalam kondisi tidak mantap (rusak sedang + rusak berat) , Ruas jalan Sanglar- Kota baru dengan panjang 19 KM, Kondisi mantap (baik+sedang) 58.59 sementara kondisi tidak mantap (Rusak Ringan + Rusak Berat) 41.41 Persen.

Sementara Ruas jalan mendukung sektor pariwisata adalah ruas jalan Tembilahan-Trusan Mas(Ruas 23) dan Ruas jalan Terusan Mas-Sapat (Ruas 22). Panjang Total ruas jalan Tembilahan-Trusan Mas adalah 6.9 KM dengan kondisi jalan mantap 8.7 persen sementara Kondisi tidak mantab sebesar 91.3 Persen. Untuk Ruas jalan Terusan Mas-Sapat dengan panjang total 1.5 KM kondisi jalan mantap 13.3 Persen dan Kondisi tidak mantap 86.67 Persen.

Untuk ruas jalan yang mendukung Perindustrian dan Perdagangan merupakan kewenangan Provinsi yaitu Ruas jalan Tembilahan - simpang kuala saka - mandah dengan total panjang jalan 92.13,Jalan Kondisi mantap sebesar 23.15 persen sementara kondisi tidak mantap 76.85 Persen. Kemudian Ruas jalan Simpang Kuala saka - Teluk Lanjut - Sungai guntung - sebekek dengan total panjang jalan 82.02 KM.Kondisi jalan mantap 6.04 persen sementara tidak mantap 93.96 persen.

Tingginya persentase jalan tidak mantap ini disebabkan oleh Struktur tanah di Kab. Inhil yang pada umumnya gambut memerlukan konstruksi khusus/ kompleks sehingga membutuhkan biaya yang besar.

b. Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah kemampuan dan kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegaitan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Terdapat berbagai jenis sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air laut, air hujan, air tanah dan air permukaan. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang salah satunya adalah irigasi. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Sebagai suatu sistem pengaliran Sistem Irigasi menganggap irigasi terdiri atas lima (5) pilar irigasi yaitu: (i)

ketersediaan air; (ii) infrastruktur; (iii) pengelolaan irigasi; (iv) institusi irigasi; dan (v) manusia pelaku

Sesuai Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai Total luas Daerah irigasi Kabupaten indragiri hilir adalah 16.722 H. DIR dalam kondisi baik seluas 876 Ha atau hanya sebesar 5.23 Persen dari total luar DIR Kab. Indragiri Hilir yang terletak di Sialang Panjang.

c. Air Minum dan Sanitasi

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Di Indragiri Hilir, Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten / kota selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat, namun tidak signifikan. Pada tahun 2019 sebesar 17.29 persen dan sampai dengan tahun 2022 sebesar 26.69 persen. Penyebab Rendahnya capaian ini adalah Belum meratanya penyebaran SPAM dan jaringan perpipaan pada satuan permukiman diKabupaten Indragiri Hilir serta kinerja PDAM yang dalam kondisi salit. Hal ini hendaknya agar menjadi fokus pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Sementara untuk Sanitasi terkait dengan indikator Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD dapat berupa SPALD Setempat dan Terpusat. Di Kabupaten Indragiri Hilir Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan

pengolahan air limbah domestik pada tahun 2022 baru mencapai 35 persen. Kondisi ini masih jauh dari dikatakan layak untuk layanan sanitasi sesuai dengan target RPJMN yaitu 90 layak dan 15 Persen aman.

d. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Indragiri Hilir belum dapat maksimal hal ini terkendala belum ditetapkannya Ranperda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir, terkait pengajuan perizinan Pemanfaatan ruang/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi persyaratan dasar dalam perizinan berusaha maupun non berusaha menggunakan persetujuan KKPR berusahan/non berusaha oleh Forum Penataan Ruang dengan proses penilaian KKPR sebelum diterbitkannya dokumen Persetujuan KKPR mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi. Adapun jumlah KKPR Berusaha/Non Berusaha yang sudah diterbitkan dengan persetujuan KKPR per 31 Desember 2022 berjumlah 39 KKPR.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perumahan yaitu kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

a. Perumahan Rakyat

Rumah layak huni adalah didefenisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Selama periode 2019 – 2022, Rasio rumah layak huni di Indragiri Indragiri Hilir

terdapat peningkatan . Pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 89.72 persen selanjutnya meningkat pada tahun 2021 menjadi 89.87 persen dan tahun 2022 sebesar 89.88 persen, Artinya masih ada sekitar 10.12 Persen masyarakat Indragiri Hilir yang tidak memiliki rumah layak.

Selama Periode 2019-2022 telah terbangun 281 Unit Rumah Layak Huni. Pada tahun 2019 dan 2020 belum ada terbangun sementara tahun 2021 sebanyak 250 unit dan tahun 2022 sebanyak 31 Unit. Dari Total Rumah yang terdata Di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 204.201 unit, sebanyak 186.989 unit rumah dinyatakan layak huni sementara sebanyak 17.212 unit rumah dinyatakan tidak layak huni. Dari data dimaksud Cakupan ketersediaan rumah layak huni Di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 91.57 Persen, artinya tersisa 8.43 Persen ketersediaan rumah tidak layak huni.

b. Kawasan Permukiman

Berdasarkan SK kawasan Kumuh Nomor KPTS.133/II/HK-2017 , Luas Kawasan kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 176.26 Ha. Selama periode 2019–2022, Rasio permukiman layak huni di Indragiri Hilir terus meningkat. Pada tahun 2019 sebesar 99.37 persen dan terus meningkat sampai dengan tahun 2022 sebesar 99.40

Berdasarkan Pendataan RP2KPKPK Tahun 2021, Lokasi Kawasan kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir tersebar di 12 kawasan dengan total luas Kawasan kumuh 216,91 Ha dengan rata-rata tingkat kekumuhan sedang. Sampai dengan tahun 2022 pencapaian pengurangan Kawasan kumuh adalah 9.08 Ha atau 4.18 Persen dari total Kawasan kumuh. Masih tersisa sebanyak 207,83 kawasan kumuh yang belum tertangani. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 19
Capaian Pengurangan Kumuh Kabupaten Indragiri Hilir
Sampai dengan 2022

No	Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Total Luas Kumuh (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh (Ha) Tahun 2022	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Tembilahan Kota	Tembilahan	Tembilahan Kota	9,05	6,09	2,96
2	Tembilahan Hilir	Tembilahan	Tembilahan Hilir	39,39	2,99	36,4
3	Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	18,19	0	18,19
4	Kuala Enok	Tanah Merah	Kuala Enok Tanah Merah	11,88	0	11,88
5	Pulau Burung	Pulau Burung	Pulau Burung	2,33	0	2,33
6	Sungai Guntung	Kateman	Taga Raja	22,82	0	22,82
7	Pulau Kijang	Reteh	Pulau Kijang	15,96	0	15,96
8	Khairiah Mandah	Mandah	Khairiah Mandah	5,29	0	5,29
9	Kotabaru	Keritang	Kotabaru	18,49	0	18,49
10	Teluk Pinang	Gaung Anak Serka	Teluk Pinang	25,44	0	25,44
11	Sungai Salak	Tempuling	Sungai Salak	32,31	0	32,31
12	Kempas Jaya	Kempas	Kempas Jaya	15,76	0	15,76
Jumlah				216,91	9,08	207,83

Sumber : Dinas Perkim Kab. Indragiri Hilir

c. Prasarana Sarana Utilitas

Ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan Permukiman. Penyediaan PSU mencakup pembangunan jalan lingkungan, penyediaan Drainase Perumahan, Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah dan penyediaan Sanitasi Perumahan. Pelaksanaan bantuan PSU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Lingkungan perumahan di Kabupaen Indragiri Hilir mengalami penurunan. Di tahun 2020 sebesar 5.18 persen, kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4.50 persen.

Secara garis besar Bidang PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan

dan Permukiman. Bidang PSU Di samping pembangunan jalan lingkungan, bantuan PSU juga dapat mencakup penyediaan Drainase Perumahan, Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah dan penyediaan Sanitasi Perumahan. Berikut rekapitulasi Pencapaian kinerja urusan perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022

Tabel II- 20
Kinerja Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA				SUMBER
		2019	2020	2021	2022	
Rasio rumah layak huni	Persen	89.72	89.72	89.87	89.88	PERKIM
Rasio permukiman layak huni	Persen	99.37	99.37	99.37	99.40	PERKIM
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	N/A	5.18	5.18	4.50	PERKIM

Sumber : Dinas Perkim Kab. Indragiri Hilir

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbit dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non kebakaran Kabupaten/kota, Persentase Penegakan PERDA serta dilengkapi dengan capaian indikator standar pelayanan minimal pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Pencapaian kinerja urusan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 21
Kinerja Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	SATPOL PP
Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non kebakaran Kabupaten/kota	100	100	100	100	SATPOL PP

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	SATPOL PP
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat :					
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	0	0	0	0	SATPOL PP
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	123388	275590	163597	95540	BPBD
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	109495	142382	148779	85946	BPBD
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	-	201	BPBD
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00	100	100	100	DPKP

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2019-2022 dapat dikatakan berhasil dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbit dan aman tercapai. Namun

2.3.1.6. Sosial

Kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan pembangunan Indragiri Hilir dengan analisis pembangunan selama ini sebagai berikut:

a. Penerima Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlinduangan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteran Sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terus meningkat yaitu dari 90 persen pada tahun 2017 menjadi 100 persen pada tahun 2018. Indikator ini ditetapkan agar menjamin indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta

lanjut usia yang tidak potensial di Kabupaten Indragiri Hilir menerima jaminan sosial .

Selama periode 2017-2021, realisasi capaian indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017– 2019, realisasi kinerja indikator penyandang cacat baik fisik maupun mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial berkisar antara 90,00 persen -100 persen yang terkategori Tinggi – Sangat Tinggi.

Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja indikator ini sebesar 93,55 persen dan terkategori Sangat Tinggi. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan dengan realisasi kinerja 77,34 persen lalu mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 dengan realisasi kinerja 100 persen dengan kategori sangat tinggi, Meski capaian kinerja telah Sangat tinggi, namun upaya terus mempertahankan kinerja harus terus dilakukan agar penyandang cacat mendapat perlindungan sosial.

b. PPKS yang Menerima Bantuan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan bahwa indikator PPKS yang menerima bantuan sosial terus meningkat yaitu dari 60 persen pada tahun 2016 menjadi 100 persen pada tahun 2018. Indikator ini ditetap dan dimasukan dalam RPJMD untuk menjamin agar PPKS yang ada di Indragiri Hilir mendapat pembinaan dan bantuan sosial.

Selama periode 2017-2021, realisasi capaian indikator di Indragiri Hilir hampir sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2017-2019, realisasi kinerja indikator ini sebesar 80 –

82,50 persen yang terkategori Tinggi. Pada tahun 2020 realisasi indikator sebesar 100 persen namun karena target meningkat sehingga realisasi kinerja meningkat menjadi 111,11 persen dan terkategori sangat Tinggi. dan di tahun 2021 realisasi PPKS penerima Bantuan sosial menurun menjadi 96 persen dikarenakan target juga meningkat, Capaian indikator PPKS penerima bantuan sosial yang tinggi selama periode 2017-2021 perlu terus dipertahankan pada periode berikutnya.

Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa DTKS merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dasar hukum dari hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Tujuan dari DTKS adalah agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi:

1) Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti : fakir miskin dan anak terlantar.
2) Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: keluarga penerima manfaat - program keluarga harapan (KPM PKH) - keluarga penerima manfaat – program sembako (KPM Sembako).
3) Potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Dalam pengelolaan DTKS dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang terintegrasi. SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan , penyajian dan penyimpanan DTKS dengan memanfaatkan

teknologi informasi komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Data DTKS Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan perbaikan (Update) setiap bulan dengan memasukan ke SIKS-NG Kemensos melalui akun Supervisor Kabupaten.

Tabel II.22
Rekapitulasi DTKS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Tanggal SK	Nomor SK	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
1	10 Januari 2022	2/HUK/2022	335.541	119.557
2	25 Januari 2022	10/HUK/2022	335.545	119.557
3	10 Februari 2022	21/HUK/2022	335.074	119.307
4	25 Februari 2022	29/HUK/2022	334.632	116.065
5	10 Maret 2022	41/HUK/2022	334.606	116.054
6	21 Maret 2022	46/HUK/2022	334.606	116.054
7	04 April 2022	52/HUK/2022	334.550	116.007
8	9 Mei 2022	81/HUK/2022	340.162	117.791
9	6 Juni 2022	110/HUK/2022	346.034	119.393
JUMLAH			**3.030.750**	**1.059.785**

Sumber : Dinas Sosial Kab. Inhil

Terkait Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi. Karena permasalahan keterpencilan dan kemiskinan, maka KAT sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu penangnan khusus agar dapat hidup setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir tersebar di beberapa Kecamatan, yakni Kecamatan Reteh, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Mandah, Kecamatan Kateman, Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Concong dan Kecamatan Kemuning. Kehidupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sangat tergantung pada sumber daya alam, terutama hutan, sungai dan laut yang sebagian besar merupakan daerah perairan di Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi Suku KAT di Kabupaten Indragiri Hilir tersebar pada beberapa desa/kelurahan, mereka pada umumnya hidup dipinggir pantai dengan mata

pencaharian sebagai nelayan sedangkan yang di daratan dengan mata pencaharian bertani untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Demografis Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Indragiri Hilir ini terdapat di 7 (tujuh) Kecamatan dan tersebar di 12 (dua belas) Desa/Kelurahan, kehidupan mereka tergatung sekali pada sumber daya alam sekitarnya. Terutama sekali pada hutan, sungai dan laut yang sebagian besar merupakan daerah perairan di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun jumlah masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten indragiri hilir yang terdapat di 7 (tujuh) Kecamatan dan tersebar di 12 (dua belas) Desa/Kelurahan.

Mata pencaharian utama masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Duano di Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar sebagai Nelayan disamping itu ada juga sebagai buruh, pedagang, wiraswasta dan kebanyakan memiliki mata pencaharian lainnya, sedangkan masyarakat Suku Kubu umumnya bertani untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Ketenaga Kerjaan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika pada suatu daerah terdapat TPT yang tinggi, maka hal ini mengindikasikan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. TPT di Indragiri Hilir pada tahun 2019 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya (2019 sebesar 4,76 persen; 2020 sebesar 4,35 persen; 2021 sebesar 2,66 persen), meski sempat naik pada tahun 2019. TPT pada tahun 2022 adalah sebesar 1,50 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi, sekitar 2 orang adalah pengangguran, terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2021;3 orang).

b. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir mencatat, tingkat kesempatan kerja sebesar 98.50 % pada tahun 2022. Angkanya naik dari tahun sebelumnya yakni 95.45% Tahun 2019, 95.65% tahun 2020 dan 97.34% tahun 2021.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Angka ini untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terliat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu.

Pada periode 2019-2022, terjadi kenaikan TPAK Indragiri Hilir pada tahun 2019 hingga 2021, namun kembali merangkak turun pada tahun 2022. Pada tahun 2022, terjadi penurunan 4,59 poin atau sebesar 7 persen dibandingkan tahun 2021. TPAK Indragiri Hilir pada tahun 2022 sebesar 63,97 artinya dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 64 orang tersedia melakukan aktivitas ekonomi, dengan kata lain 63,97 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sisanya 36,03 persen bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).

Rangkuman pencapaian kinerja urusan Ketenaga kerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 23
Kinerja Indikator Urusan Ketenaga kerjaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64.44	69.17	68.56	63.97	BPS
Tingkat Kesempatan Kerja	95.45	95.65	97.34	98.50	BPS
Tingkat Pengangguran Terbuka	4.55	4.35	2.66	1.50	BPS

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelibatan perempuan dalam berbagai aktivitas telah menjadi bagian komitmen dari berbagai organisasi dunia. Salah satu konferensi perempuan yang diselenggarakan UNDP di Beijing menghasilkan kesepakatan bahwa pemberdayaan perempuan dan partisipasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pengambilan keputusan dan akses terhadap kekuasaan merupakan dasar bagi kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian di dunia (UN, 1995). Selanjutnya, pengarusutamaan gender menjadi salah satu agenda penting dalam setiap penentuan kebijakan. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa pemberdayaan gender bukan sesuatu hal yang bisa datang dengan sendirinya tanpa campur tangan eksternal (inisiatif khusus). Oleh sebab itu, program pemerintah perlu disusun untuk menciptakan kondisi bahwa perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi agen dalam pembangunan.

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks yang dirancang untuk mengukur kesetaraan gender. IDG adalah salah satu usaha UNDP untuk mengukur ketidaksetaraan gender antar negara, menggunakan ukuran estimasi pendapatan relatif wanita, partisipasi di posisi ekonomi dengan bayaran tinggi, dan akses ke posisi parlemen dan profesional. Indeks ini diperkenalkan bersamaan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), tapi mencakup topik- topik seperti pemberdayaan yang tidak tercakup dalam IPG.

Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2021 mengalami peningkatan 0,5 poin dibandingkan tahun 2020 yakni dari 64.45 poin tahun 2020 menjadi 64.50 poin pada tahun 2021, sementara data

tahun 2022 belum rilis. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan ketimpangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2021.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. IPG Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan trend positif, dimana tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dari 82.57 meningkat menjadi 82.74. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun tahun empat tahun terakhir tersebut menunjukkan kondisi yang stabil.

c. Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA)

Tujuan KLA ini secara umum untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA). Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir sendiri pada Tahun 2019 sampai Tahun 2021 masih mendapatkan Predikat Pratama. Namun pada tahun 2022 Kabupaten Indragiri Hilir berhasil meningkatkan Komitmenya dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dengan sukses meraih predikat Madya(naik satu tingkat dari Pratama) dalam Evaluasi Kabupaten/Kota layak anak yang dilaksanakan oleh KPPPA/ Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI

d. Rasio KDRT

KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap

keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga (UU PKDRT). Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban yang justru sebaliknya. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutupi.

Rasio KDRT di Kabupaten Indragiri Hilir masih tergolong kecil. Pada tahun 2019 sebesar 0.027 Persen menurun menjadi 0.091 Persen pada tahun 2021. KDRT di Kabupaten disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi ekonomi/kemiskinan, lingkungan, dan kebiasaan minuman keras. Perlu dilakukan edukasi pada pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan untuk mencegah tindakan kekerasan yang berujung perceraian.

Tabel II- 24
Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	82.57	82.34	82.37	82.74	BPS
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.83	64.45	64.50	n/a	BPS
Implementasi Pencapaian Kabupaten layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	DP2KBP3A
Rasio KDRT	0.027	0.037	0.091	n/a	DP2KBP3A

2.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Penyediaan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir hingga saat ini masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya: (i) keterbatasan lahan, (ii) anomali iklim dan (iii) bencana banjir.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022 sebagaimana dijabarkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel II- 25
Kinerja Indikator Urusan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Ketersediaan Pangan Utama (%)	109.00	103.90	104.20	101.10	DPTPHP
Produksi Beras (Ton)	45.36,.39	49.008,18	46.651,57	42.777,94	DPTPHP
Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	86.564,02	84.276,70	89.908,06	81.470,30	DPTPHP
Jumlah Produksi Ternak (ton)	475	487.99	512.33	519.1	DPTPHP
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	85.9	86.06	86.22	86.38	DPTPHP
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84.2	84.8	85.5	85.7	DPTPHP

Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan keberlanjutan, diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif (Urban Farming atau Kawasan Rumah Pangan Lestari), intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan terpenuhinya cadangan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

2.3.2.4. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indragiri Hilir dianalisis pada capaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Dari ketiga indeks tersebut

terjadi peningkatan pada IKU dan IKA sementara pada IKTL terlihat bahwa terjadi penurunan berfluktuatif. Perlu adanya upaya meminimalisir potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada aktivitas perekonomianserta aksi mitigasi yang dilakukan tidak hanya terhadap aktivitas ekonomi dari pelaku usaha akan tetapi juga domestic yang juga berkontribusi terhadap pencemaran air. Berikut data pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup.

Tabel II- 26
Kinerja Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53.04	57.79	64.79	67.66	DLHK
Indeks Kualitas Udara	52.22	92.15	88.63	90.61	DLHK
Indeks Kualitas Air	24.69	32.86	50.00	53.78	DLHK
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	92.91	50.72	46.11	49.05	DLHK

2.3.2.5. Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakankebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tahun 2022, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 486.707 orang. Sementara itu jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 480.817 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP el- sebesar 98.79 Persen

Berikut data Wajib KTP , Memiliki KTP, dan Persentase Tahun 2019-2022

Tabel II- 27
Wajib KTP , Memiliki KTP, dan Persentase Tahun 2019-2022 Kabupaten Indragiri Hilir

NAMA_KEC	2019			2020			2021			2022		
	WKTP	REKAM	%	WKTP	REKAM	%	WKTP	REKAM	%	WKTP	REKAM	%
RETEH	25,348	24,998	98.62	26,010	25,714	98.86	27,100	26,852	99.08	27495	27157	98.77
ENOK	24,533	24,253	98.86	24,962	24,779	99.27	25,699	25,577	99.53	26225	25957	98.98

NAMA_KEC	2019			2020			2021			2022		
	WKTP	REKAM	%	WKTP	REKAM	%	WKTP	REKAM	%	WKTP	REKAM	%
KUALA INDRAGIRI	9,753	9,476	97.16	10,201	10,003	98.06	10,829	10,694	98.75	11204	11066	98.77
TEMBILAHAN	53,123	52,574	98.97	54,715	54,233	99.12	56,212	55,892	99.43	57602	56946	98.86
TEMPULING	22,124	21,870	98.85	22,699	22,502	99.13	23,702	23,570	99.44	24436	24144	98.81
GAUNG ANAK SERKA	15,902	15,745	99.01	16,046	15,942	99.35	16,505	16,429	99.54	16898	16713	98.91
MANDAH	23,741	23,474	98.88	25,170	24,917	98.99	26,986	26,812	99.36	27851	27523	98.82
KATEMAN	24,874	24,410	98.13	26,422	26,039	98.55	28,189	27,844	98.78	29362	29028	98.86
KERITANG	42,130	41,343	98.13	43,906	43,286	98.59	45,386	44,884	98.89	46974	46357	98.69
TANAH MERAH	17,776	17,544	98.69	18,114	17,946	99.07	18,774	18,648	99.33	19278	19039	98.76
BATANG TUAKA	18,312	18,161	99.18	18,688	18,556	99.29	19,725	19,640	99.57	20472	20205	98.70
GAUNG	25,179	24,804	98.51	26,261	25,968	98.88	28,076	27,843	99.17	29107	28699	98.60
TEMBILAHAN HULU	31,775	31,481	99.07	32,959	32,689	99.18	34,172	34,006	99.51	35029	34614	98.82
KEMUNING	23,026	21,850	94.89	24,998	24,165	96.67	26,054	25,321	97.19	27589	27250	98.77
PELANGIRAN	19,075	18,771	98.41	20,056	19,830	98.87	20,916	20,717	99.05	21754	21424	98.48
TELUK BELENGKONG	5,923	5,792	97.79	6,112	6,040	98.82	6,418	6,344	98.85	6599	6523	98.85
PULAU BURUNG	12,541	12,225	97.48	13,084	12,906	98.64	13,745	13,541	98.52	14140	13991	98.95
CONCONG	8,012	7,906	98.68	8,003	7,926	99.04	8,487	8,425	99.27	8631	8531	98.84
KEMPAS	25,824	25,425	98.45	26,699	26,424	98.97	27,442	27,226	99.21	28284	27945	98.80
SUNGAI BATANG	7,400	7,312	98.81	7,280	7,227	99.27	7,588	7,531	99.25	7777	7705	99.07
JUMLAH	**436,371**	**429,414**	**98.41**	**452,385**	**447,092**	**98.83**	**472,005**	**467,796**	**99.11**	**486707**	**480817**	**98.79**

Sumber : Dukcapil Indragiri Hilir

2.3.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Kebijakan arah pembangunan ini dilandasi pemikiran bahwa pemberdayaan masyarakat perdesaan dan wilayah perdesaan akan mengurangi kemiskinan struktural masyarakat/wilayah perdesaan sehingga dapat menekan laju urbanisasi yang potensial menimbulkan permasalahan sosial. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya dan ekonomi dan Ketahanan Lingkungan agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Muara pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Kinerja IDM Kabupaten Indragiri Hilir terdapat peningkatan dari tahun 2019 dengan kategori Tertinggal meningkat menjadi berkembang pada tahun 2022 pada tingkat Kabupaten/Kota.

Berikut kondisi pembangunan desa yang diwakili ioleh indikator Indeks Desa membangunan beserta variable pembentuknya.

Tabel II- 28
Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Indeks Desa Membangun (IDM)	Tertinggal (0.5822)	Berkembang (0.6071)	Berkembang (0.6198)	Berkembang (0.6535)	KEMENDES
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.69	0.71	0.73	0.76	KEMENDES
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.45	0.49	0.50	0.55	KEMENDES
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.61	0.62	0.63	0.65	KEMENDES
Persentase Bumdes Aktif	21.83	96.45	100.00	97.46	DPMD

2.3.2.7. Kominikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran penyelenggara pemerintahan diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dan meningkatnya kepercayaan publik kepada birokrasi.

Indeks SPBE merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan tujuan (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, (2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan (3) Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Dalam pelaksanaannya, Indragiri Hilir baru dinilai pengimplementasian SPBE tahun 2021 dengan nilai 2.24 dan tahun

2022 dengan nilai 2.13. Terdapat penurunan nilai SPBE, hal ini disebabkan penilaian tahun 2021 masih bersifat mandiri sementara tahun 2022 telah dinilai oleh kemenpan rb. Pencapaian ini masih belum optimal, Pembangunan SPBE Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan arsitektur pembangunan SPBE nasional, Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Indragii Hilir yang belum mencapai nilai 3 dengan Kategori baik.

Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir sampai tahun 2022 telah melakukan pengelolaan terkait domain dalam rangka pengelolaan website. Terdapat 54 webside yang dikelola sampai tahun 2022 dengan system pengamanan SSL, dari kelseluruhan webside terdapat 40 website yang aktif.berikut data Website OPD menurut Jenis Pengamanan Yang Di Gunakan Di Lingkungan Pemda Kab.Inhil Tahun 2022

Tabel II- 29
Website OPD menurut Jenis Pengamanan Yang Di Gunakan Di Lingkungan Pemda Kab.Inhil Tahun 2022

NO	OPD	NAMA WEBSITE	JENIS PENGAMANAN	HASIL ANALISA DAN MONITORING APLIKASI
1	Sekretariat Daerah	setda.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
2	Sekretariat DPRD	dprd.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
3	Inspektorat Daerah	inspektorat.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
4	Dinas Pendidikan	disdik.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
5	Dinas Kesehatan	dinkes.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	dpurtr.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permungkiman	disperakim.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
8	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	disdamkar.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
10	Dinas Sosial	dinsos.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	disnakertians.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
12	Dinas Pengendalian Pendududuk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	dppkb.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
13	Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan	dlhk.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
16	Dinas Perhubungan	dishub.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
17	Dinas Komunukasi Informatika,Persandian dan Statistik	diskominfops.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	diskopumkm.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	dpmptsp.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan	disporabudpar.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	dpad.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif

NO	OPD	NAMA WEBSITE	JENIS PENGAMANAN	HASIL ANALISA DAN MONITORING APLIKASI
22	Dinas Perikanan	diskan.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
23	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultural, dan Pertenakan	dptphp.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
24	Dinas Perkebunan	disbun.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	disperindag.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
26	Badan Perencaan Pembangunan Daerah	bappeda.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bpkad.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
28	Badan Pendapatan Daerah	bapenda.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
29	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	bkpsdm.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	bakesbangpol.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
31	Badan penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
32	Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan	rsudpurihusada.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
33	Rumah Sakit Tengku Sulung Pulau Kijang	rsudtengkusulung.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
34	Rumah Sakit Raja Musa Sungai Guntung	rsudrajamusa.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
35	Kecamatan Tembilahan	tembilahan.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
36	Kecamatan Tembilahan Hulu	tembilahanhulu.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
37	Kecamatan Tempuling	tempuling.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
38	Kecamatan Batang Tuaka	batangtuaka.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
39	Kecamatan Concong	concong.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
40	Kecamatan Enok	enok.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
41	Kecamatan Gaung	gaung.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
42	Kecamatan Gaung Anak Serka	gaunganakserka.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
43	Kecamatan Kateman	kateman.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
44	Kecamatan Kempas	kempas.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
45	Kecamatan Kemuning	kemuning.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
46	Kecamatan Keritang	keritang.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
47	Kecamatan Kuala Indragiri	kualaindragiri.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
48	Kecamatan Mandah	mandah.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
49	Kecamatan Pelangeran	pelangeran.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
50	Kecamatan Reteh	reteh.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
51	Kecamatan Sungai Batang	sungaibatang.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
52	Kecamatan Tanah Merah	tanahmerah.inhilkab.go.id	SSL	Tidak Aktif
53	Kecamatan Pulau Burung	pulauburung.inhilkab.go.id	SSL	Aktif
54	Kecamatan Teluk Belengkong	telukbelengkong.inhilkab.go.id	SSL	Aktif

Sumber : Diskominfo kab. Indragiri Hilir

Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Hal ini perlu ditunjuk petugas/pejabat yang mengelola informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung-jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Komunikasi

dan Informatika, Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Berikut data terkait PPID Pembantu (OPD) dan PPID Desa Se-Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dibentuk.

Tabel II- 30
PPID Pembantu (OPD) dan PPID Desa Se-Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PPID	3	33	19	26	81

Sumber : Diskominfo kab. Indragiri Hilir

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 menegaskan bahwa diperlukan kebijakan affirmatif dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan II - 85 keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Berikut capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari tahun 2019-2022 yang secara umum kondisinya ditunjukan pada tabel berikut :

Tabel II- 31
Kinerja Indikator Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA				SUMBER
		2019	2020	2021	2022	
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	PUS	173525	167662	168091	185680	DP2KBP3A
Peserta KB Aktif	KB Aktif	194219	152800	133062	44630	DP2KBP3A
TFR	Nilai	2.38	2.31	2.21	2.28	DP2KBP3A

2.3.2.9. Perhubungan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud

dari interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Hal ini dikarenakan ketersediaan prasarana jalan sebagai jaringan aksesibilitas antar wilayah di Indragiri Hilir belumlah memadai.

Perkembangan kinerja indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 32
Kinerja Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA				SUMBER
		2019	2020	2021	2022	
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	3572	3944	3353	3463	DISHUB
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3	3	DISHUB
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	3572	3944	3353	3463	DISHUB

2.3.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah

Kinerja pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode tahun 2019-2022 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dapat diketahui dari perkembangan trend peningkatan Koperasi Aktif, Pertumbuhan Modal Koperasi berdasarkan modal sendiri dan modal luar, Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Indragiri Hilir. Secara rinci kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 33
Kinerja Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Koperasi Aktif	66.22	66.49	66.93	67.18	BPS
Pertumbuhan Modal Koperasi berdasarkan modal sendiri	-58.51	-8.72	-25.35	141.02	BPS
Pertumbuhan Modal Koperasi berdasarkan modal luar	-27.99	11.68	-41.57	124.40	BPS
Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-26.86	16.70	-2.60	0.90	BPS

2.3.2.11. Penanaman Modal

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah. Adapun perkembangan jumlah investasi dan indikator lainnya di Kabupaten Indragiri hilir dapat dijelaskan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel II- 34
Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Investasi PMA/PMDN sampai dengan tahun berkenaan	414,07	4.339,70	1.889,20	12.706,02	DPMPTSP
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	291	217	93	168	DPMPTSP
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.61	3.63	3.73	4.02	DPMPTSP

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian jumlah investasi di Kabupaten Indragiri Hilir meningkat tajam yaitu pada Tahun 2019 sebesar 414,07 milyar rupiah, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sebesar 4.339,70 milyar rupiah, pada Tahun 2021 sebesar 1.889,20 milyar rupiah, naik tajam pada Tahun 2022 sebesar 12.706,02 milyar rupiah. Indikator lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam pelayanan penanaman modal adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). IKM terhadap pelayanan terpadu satu pintu dengan kecenderungan meningkat. hal ini dipengaruhi oleh adanya inovasi-inovasi dalam peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir.

2.3.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam

mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan diarahkan pada pembangunan softskill dan hardskill pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat character building yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika, semangat profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan pengembangan softskill. Sedangkan pengembangan hardskill pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan dan ketrampilan bagi pemuda.

Berikut capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga diKabupaten Indragiri hilir tahun 2019-2022

Tabel II- 35
Kinerja Indikator Urusan kepemudaan dan olahraga
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	SATUAN	KINERJA				SUMBER
		2019	2020	2021	2022	
Prestasi olahraga	Medali	18	2	38	73	DISPARPORABUD
Persentase Peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah	Persen	550	104	179	-55	DISPARPORABUD
Persentase Peningkatan Pemuda Aktif	Persen	550	104	179	-55	DISPARPORABUD
Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat daerah	Medali	0	0	11	73	DISPARPORABUD

2.3.2.13. Statistik

indikator kinerja pembangunan daerah bidang urusan statistik Kabupaten Indragiri Hilir diwakili oleh Ketersediaan Dokumen Statistik. Periode 2019-2023 Kabupaten Indragiri Hilir telah menyediakan dokumen statistic yaitu Indragiri Hilir dalam angka dan Kabupaten dalam angka. Jumlah keterdediaan mengalamai penurunan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 180 buku menjadi 20 buku pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan teknologi, tidak banyak lagi berupa buku namun berupa soft file.

2.3.2.14. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Beberapa indikator yang menggambarkan pemajuan kabudayaan adalah (1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya Benda, (2) Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, (3) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pencapaian Kinerja indikator Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 36
Kinerja Indikator Urusan Kebudayaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	1	1	1	DISPORABUDPAR
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	1	1	1	DISPORABUDPAR
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1	DISPORABUDPAR

2.3.2.15. Persandian

Urusan Persandian merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah Kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah Kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. capaian kinerja indikator urusan persandian di Kabupaten Indragiri Hilir diwakili oleh Dokumen Elektronik yang diamankan melalui SANAPATI sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel II- 37
Pengamanan Dokumen Elektronik Sanapati
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

BULAN				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
JANUARI	20	50	59	39
FEBRUARI	39	59	50	44
MARET	46	62	45	67
APRIL	28	45	58	47
MEI	41	57	66	26

BULAN				
	2019	2020	2021	2022
JUNI	38	30	57	50
JULI	22	59	48	48
AGUSTUS	49	55	69	80
SEPTEMBER	27	48	45	64
OKTOBER	21	38	65	48
NOVEMBER	34	57	59	44
DESEMBER	45	66	58	63
TOTAL	410	626	679	620

Sumber : Diskominfopersantik Kab. Indragiri Hilir

2.3.2.16. Perpustakaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan berupaya untuk mewujudkan perpustakaan yang ideal bagi masyakarat umum. Perpustakaan ideal adalah sebuah perpustakaan yang mampu memberdayakan masyarakat, mampu melakukan revolusi minat baca pada masyarakat, mampu mengubah karakter masyarakat dari tidak suka membaca menjadi suka membaca, dan mampu mengubah masyarakat tuna informasi menjadi masyarakat yang berliterasi atau melek informasi. Salah satu bukti nyatanya adalah berdirinya perpustakaan daerah yang representative pada tahun 2020.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan adalah Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan, di tahun 2019 sebanyak 39.59 Persen kemudian meningkat sampai dengan tahun 2022 menjadi 70.25 Persen. Hal ini juga dipengaruhi oleh Nilai SKM Pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan yang perlahan lahan meningkat dari 90.91 Persen tahun 2019 menjadi 92,00 Persen ditahun 2022.

Secara lengkap capaian indikator kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 38
Kinerja Indikator Urusan Perpustakaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	39.59	50.17	60.75	70.25	DISPERPUSIF
Nilai SKM Pemustaka terhadap pelayanan	90.91	91.46	91.89	92.00	DISPERPUSIF

2.3.2.17. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan Indeks Kearsipan dan Persentase Perangkat Daerah Dengan pengelolaan Arsip yang tertib di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan peningkatan kinerja yang baik. pada Tahun 2019 Indeks kearsipan Indragiri Hilir baru mencapai 31,84 poin, namun tahun 2020 meningkat tajam menjadi 61.00 persen. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan arsip di Kabupaten Indragiri Hilir sudah terjadi perbaikan. Sementara untuk Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan baik mencapai 16 Persen pada tahun 2022 dari total 34 Perangkat Daerah (tidak termasuk Kecamatan) yang artinya baru sekitar 6 Perangkat Daerah yang masuk dalam kategori baik dalam pengelolaan arsip. Perlu usaha dan strategi yang terarah dalam perbaikan kondisi ini. Tabel dibawah ini adalah Capaian Indikator Urusan Kearsipan :

Tabel II- 39
Kinerja Indikator Urusan Kearsipan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Indeks Kearsipan	31.84	50.75	20.12	61.00	DISPERPUSIF
Persentase Perangkat Daerah Dengan pengelolaan Arsip yang tertib	1.00	6.00	11.00	16.00	DISPERPUSIF

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar yang menjadi sumber perekonomian bagi masyarakatnya. Secara umum Kabupaten Indragiri Hilir memiliki aktivitas kegiatan perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Selama periode 2019-2022 produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari 54.271,82 ton pada tahun 2019 meningkat menjadi 70.895,01 ton pada tahun 2022. Namaun pada produksi perikanan budidaya mengalami

penurunan yang signifikan yang semula (tahun 2019) 54.271,82 ton menurun menjadi 4.831,75 pada tahun 2022. Hal ini perlu upaya yang serius dalam menangani permasalahan ini. Secara detail kinerja urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2019 – 2022 dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 40
Kinerja Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Indragiri Hilir	54.271,82	54.271,82	60.330,35	70.895,01	BPS
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Indragiri Hilir	54.271,82	2.104,15	2.484,55	4.831,75	BPS

2.3.3.2. Pariwisata

Geliat sektor pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2019-2022 dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata dan tingkat hunian. Jumlah Kunjungan wisatawan di tahun 2019 sebanyak 91.137 orang, namun terjadi penurunan menjadi 42.127 pada tahun 2022. Salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinya pandemic covid 19 pada tahun 2020 dan berdampak sampai tahun 2021 dan 2022. Jumlah kunjungan wisata tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat hunian. Selama periode tahun 2019-2022 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap tingkat hunian. Pada tahun 2018 jumlah tingkat hunian sebesar 15.736 hunian, meningkat menjadi 21.758 pada tahun 2022. Selain itu, Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Indragiri Hilir perlu dilakukan peningkatan terutama sarana dan prasarananya serta bagaimana upaya promosi pariwisata yang lebih kreatif sehingga menimbulkan minat para pelancong untuk berkunjung ke Indragiri Hilir.

Tabel II- 41
Kinerja Indikator Urusan Pariwisata
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Kunjungan Wisatawan	91137	51728	56728	42127	DISPORABUDPAR
Tingkat Hunian	15736	7868	10868	21758	DISPORABUDPAR

2.3.3.3. Pertanian

Indragiri Hilir merupakan sentra kelapa Indonesia, bahkan dunia. Pada tahun 2022, produKsi pada lahan kelapa di Indragiri Hilir sebesar 263,732.34 Ton, perkembangan produksi kelapa ini relatif sama sejak tahun 2019. Luas lahan kelapa Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, memiliki porsi sebesar 84,76 persen dari total luas areal kelapa Provinsi Riau dengan kontribusi produksi sebesar 86,41 persen. Perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam di Kabupaten Indragiri Hilir mencakup hampir seluruh kecamatan kecuali di kecamatan Kemuning yang luasan dan produksinya relatif kecil. Perkebunan kelapa ini telah menjadi urat perekonomian penduduk Kabupaten Indragiri Hilir.

Secara umum data statistik menunjukkan bahwa produktivitas kelapa Indragiri Hilir memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan produktivitas meningkat sebesar 1,88 persen per tahun, namun capaian produktivitas saat ini masih dibawah potensinya yaitu sebanyak 9000 – 11.000 butir atau 1,5 – 2,0 ton kopra/hektar/tahun. Belum optimalnya produktivitas kelapa Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi petani kelapa antara (i) luasnya tanaman tua dan rusak - TTR, (ii) banyaknya tanggul yang rusak sehingga banyak tanaman kelapa sawit yang terancam rusak, dan (iii) serangan hama.

Pada masa yang hampir bersamaan, perkebunan kelapa khususnya kelapa dalam dihadapkan kepada banyak tanggul-tanggul yang sudah rusak sehingga mengancam tidak kurang dari 100. 000 hektar tanaman kelapa terinstrusi air laut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperbaiki tanggul dan trio tata airnya. Pada tahun 2017, sekitar 60.000 hektar perkebunan kelapa dalam rakyat masih memerlukan perbaikan tanggul dan trio tata air yang rusak dan kurang berfungsi.

Relatif rendahnya produktivitas kelapa juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya serangan hama kelapa khususnya serangan

hama kumbang tanduk. Kondisi cuaca yang cenderung lembab dan semakin luas replating kelapa sawit, dimana dalam pembenaman batang kelapa kurang sesuai SOP, maka batang kelapa sawit sisa replanting ini menjadikan media yang baik untuk berkembangan biaknya kumbang tanduk. Hama kumbang tanduk inilah yang menyerang tanaman kelapa dalam rakyat.

Hal yang terus menjadi perbincangan adalah harga jual kelapa bulat petani yang cenderung rendah. Akibat tekanan harga beli kelapa yang sudah lama rendah, menjadikan kebun-kebun kelapa kurang mendapat perhatian oleh petani. Kondisi harga jual kelapa rakyat yang rendah karena pasar kelapa bulat di Indragiri Hilir yang Monopsoni dan akan mengarah ke Monopoli. Campur tangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar posisi tawar petani menjadi lebih baik perlu dilakukan antara melalui resi gudang.

Selain itu terdapat permasalahan terkait perkebunan kelapa dalam kawasan hutan. Dalam hal ini berfokus pada 2 komoditas yaitu Kelapa dan Kelapa Sawit. Berdasarkan Kajian kerjasama dengan pihak ketiga, overlay dengan Peta Kawasan Hutan didapatkan data bahwa dari 341.000 Kebun Kelapa Rakyat terdapat 137.000 Ha (40%) diantaranya berada dalam kawasan hutan, sementara berdasarkan data Pusat Pengendalian pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) KemenLHK didapatkan bahwa dari 301.883 Hektar Kebun Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir, 139.532 Ha diantaranya berada dalam kawasan hutan.

Kebun yang berada dalam Kawasan hutan ini tentunya menyebabkan banyak kendala yang dihadapi oleh petani. Salah satunya adalah kendala dalam mengajukan permohonan bantuan salah satunya baik untuk komoditas kelapa maupun kelapa sawit. Karena bantuan-bantuan tersebut mensyaratkan posisi kebun yang berada dalam Kawasan hutan. Kendala lain yang dihadapi petani adalah terhambatnya proses pengurusan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dimana dokumen ini seharusnya dimiliki oleh petani swadaya yang memiliki lahan di bawah 25 Hektar sebagai salah satu bukti legalitas kebun.

Upaya mendorong industri miko/kecil berbasis kelapa di pedesaan adalah bentuk lainnya mendorong berkembang dan berjayanya kembali industri kelapa Indragiri Hilir. Selain itu peluang terkait dengan pengembangan potensi perkebunan kelapa dapat di laksankan dengan penyelenggaraan pembangunan kawasan pedesaan, dimana di Kabupaten Indragiri Hilir desa–desa yang memiliki potensi perkebunan kelapa dapat di tetapkan sebagai Kaswasan Perdesaan Perkebunan Kelapa Indragiri Hilir.

Secara umum, dalam perekonomian Indragiri Hilir, Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Indragiri Hilir menurut lapangan usaha dengan tren berfluktuatif menurun. Kontribusi sektor pertanian menurut sub sektor menunjukkan bahwa subsektor tanaman perkebunan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 57 persen diikuti perikanan (24 persen), kehutanan (11 persen), tanaman pangan (4 persen), tanaman hortikultura (1 persen) dan peternakan (1 persen) serta jasa pertanian dan perburuan (1 persen).

Selain Komoditi kelapa dalam, capaian kinerja komoditi lainnya seperti padi, Kakao dan lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel II- 42
Kinerja Indikator Urusan Pertanian
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Produktivitas padi	37	40	42	41	BPS
Luas Panen Padi	19.159	19.517	15.520	13.821	BPS
Produksi Padi	70.138,7	78.458,7	65.755,1	56.274,7	BPS
Produksi Beras	40.045,5	45.027,7	37.737,1	32.296,2	BPS
Konsumsi Beras	64.083,6	64.457,2	65.287,1	63.832,2	BPS
Produktivitas Jagung	n/a	24.29	n/a	36.62	BPS
Produktivitas Kedelai	n/a	11.03	n/a	11.06	BPS
Luas Areal Tanaman Perkebunan :					BPS
Kelapa Sawit/Oil Palm	81.346	81.737	81.795	82.025	BPS
Kelapa Dalam/Coconut	22.8077,2	22.5417	22.6037	22.6037	BPS
Kelapa Hibrida/Hybrid Coconut	35.855,02	35.564	35.398	35.195	BPS
Karet/Rubber	3.408	3.392	3.264	3.342	BPS
Kopi/Coffee	642.15	639	632	632	BPS
Kakao/Cocoa	954	944	989	974	BPS
Produksi Tanaman Perkebunan :					BPS
Kelapa Sawit/Oil Palm	267.045,9	268.881,7	269.138	269.983,9	BPS

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Kelapa Dalam/Coconut	264.449,7	262.992,4	263.731,9	263.732,3	BPS
Kelapa Hibrida/Hybrid Coconut	50.826,9	50,367,8	50.155,74	49.794,96	BPS
Karet/Rubber	4.721,64	4.698,63	4.540,58	4.646,23	BPS
Kopi/Coffee	251	243.71	242.74	242.74	BPS
Kakao/Cocoa	452,38	436,73	468,07	458,65	BPS

2.3.3.4. Perdagangan

Salah satu kegiatan ekonomi atau perdagangan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, dimana ekspor memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama bagi daerah yang berkembang.

Tabel II- 43
Kinerja Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Volume Ekspor	560.151,86	526.173,09	465.779,78	509.863,70	BPS
Nilai Ekspor	303,961,994.10	349,419,461.02	339,623,796.53	371,081,702.27	BPS
Volume Impor	22.802,21	21.328,38	20.733,43	20.827,95	BPS
Nilai Impor	68,779,597.00	65,652,804.00	71,969,318.00	73,143,626.00	BPS

Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari nilai ekspor dan import nonmigas. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai ekspor Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 adalah 371.081.702,27 US $ dan volume ekspor 509.863,70 ton. Berdasarkan pelabuhan muat, Guntung adalah pelabuhan dengan nilai ekspor terbesar dengan nilai ekspor 281.050.549,04 US $ atau 75,74 persen dari total nilai ekspor Kabupaten Indragiri Hilir. Jika dilihat berdasarkan negara tujuan ekspor Singapura adalah negara tujuan dengan nilai ekspor terbesar, diikuti oleh Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam.

Sementara nilai impor Kabupaten Indragiri Hilir adalah 73.143.626,00 US $ dan volume impor 20.827,95 ton. Nilai impor terbesar melalui pelabuhan Guntung (Kateman) yaitu 43.274.709,00 US $ atau 53,16 persen dari total nilai impor. Sedangkan 29.791.371,00 US

$ atau 40,73 persen melalui pelabuhan Tembilahan dan sisanya melalui pelabuhan Kuala Enok. Impor Kabupaten Indragiri Hilir terbesar berasal dari Singapura dan India.

2.3.3.5. Perindustrian

Sektor industri disini adalah Industri Pengolahan dengan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekatkepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling). Kontribusi Sektor industri ini dalam PDRB indragiri Hilir menempati posisi kedua setelah sektor pertanian.

Selama periode 2019-2022, realisasi indikator Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB memiliki trend meningkat yaitu dari 23.63 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 24.06 persen pada tahun 2020 dan meningkat lagi 24.63 pada tahun 2021 dan 25.06 persen pada tahun 2022. Meski kontribusi sektor industri Tinggi, namun pencapaian ini dapat jauh lebih tinggi karena sumberdaya yang tersedia masih banyak diekspor dengan nilai tambah rendah seperti kelapa bulat dan CPO. Disisi lain perkembangan ekspor dari sector UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini telah menunjukkan ke arah yang semakin baik terbukti dengan dilakukannya ekspor perdana UMKM PT. Bekawan Agro Mandiri yang memproduksi gula kelapa ke Malaysia beberapa waktu lalu. Oleh karena perlu upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri berfokus untuk membangun/mengembangkan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) sesuai dengan potensi sumberdaya alam saat ini.

2.3.4. Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Sekretariat Daerah

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diukur dengan 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja, capain kinerja SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II- 44
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Nilai	55.12	62.79	63.85	64.10
Prediket	CC	B	B	B

Sumber : LHE SAKIP Kemenpanrb 2023

Nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir menunjukan peningkatan dari tahun ketahun, namun tidak signifikan. Berdasarkan LHE SAKIP Tahun 2022 Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa nilai sebesar 64,10 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik” pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Adapun Rekomendasi dari LHE SAKIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Menyempurnakan penjabaran kinerja mulai dari level Bupati sampai level individu sehingga tercipta keselarasan dan mendorong tercapainya kinerja organisasi;
2) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi

berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan;

3) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
4) Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi ESAKIP untuk monitoring dan evaluasi kinerja daerah dan PD, sehingga dapat memberikan informasi yang mampu 'mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mengawal target kinerja daerah dan 'menggunakan hasil capaian kinerja tersebut sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment;
5) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja PD sebagai bahan evaluasi proses pencapaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
6) Memastikan seluruh laporan kinerja PD telah di-reviu Inspektorat sebelum dipublikasi untuk memastikan kualitas informasi yang terkandung dalam faporan kinerja tersebut;
7) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
8) Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi SAKIP PD agar mampu memberikan penilaian dan rekomendasi yang berkualitas sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan akuntabiltas kinerja;
9) Memastikan bahwa terdapat pemantauan atas tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi internal yang diberikan dan pelaksanaan pembinaan berkelanjutan kepada seluruh PD.

b. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelengggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Capaian Indeks Reformasi

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir , disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II- 45
Implementasi Indek Reformasi Birokrasi
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022
Nilai	60.05	60.37	60.42	63.07
Prediket	B	B	B	B

Sumber : LHE RB (Kemnpanrb) 2023

Tujuan evaluasi RB untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai Indeks RB Kabupaten Indragiri Hilir menunjukan peningkatan dari tahun ketahun, namun tidak signifikan.

Hasil evaluasi tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1) Melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh program reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PMPRB;
2) Meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi pada seluruh anggota organisasi dan unit kerja untuk menyamakan pemahaman dalam penerapan reformasi birokrasi sehingga dapat terwujud hasil perubahan unit kerja yang berkontribusi terhadap perubahan birokrasi ea rah yang lebih efektif dan efisien;
3) Memastikan keberadaan pemetaan produk kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan melakukan perbaikan jika ada kebijakan

yang menghambat atau tidak harmonis, serta membangunsistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan;

4) Menyusun peta proses bisnis sampai level terendah dan memastikan kesesuaian dan kelengkapan SOP atas seluruh aktifitas yang ada;
5) Meningkatkan penerapan manajemen SPBE sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional;
6) Menyusun kebijakan manajemen talenta dan melaksanakan asessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN;
7) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System, dan benturan kepentingan;
8) Mendorong seluruh PD melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri dan menginformasikan hasilnya kepada stakeholder serta melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan, dan kepatuhan standar pelayanan agar pada tahun berikutnya terjadi peningkatan hasil penilaian

2.3.5. Penunjang Urusan pemerintahan

2.3.5.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan

dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Capaian Indikator Kinerja Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II- 46
Kinerja Indikator Perencanaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	3.00	2.00	2.00	3.00	BAPPEDA
Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	88.79	93.96	91.35	93.34	BAPPEDA

2.3.5.2. Keuangan

Indeks pengelolaan Keuangan (IPKD) adalah perwakilan indikator dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan. IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangar. daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Nilai Indeks pengelolaan Keuangan (IPKD) Kabupaten Indragiri Hilir beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 nilai IPKD Inhil 57.22 dan meningkat menjadi 58.49 pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 meningkat Kembali menjadi 75.47 yang berarti pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kategori BAIK,. Sementara untuk Niai IPKD Tahun 2022 belum rilis oleh Kemendagri.

2.3.5.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan digunakan sebagai

dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Penilaian terhadap Indeks Profesinalitas ASN daiatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Sementara itu, Penilaian terhadap Indeks Sistem Merit diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengukuran Indeks Profesinalitas ASN dan Indeks Sistem Merit Kabupaten Indragiri Hilir baru dimulai tahun 2020 sampai sekarang dengan kinerja dilihat pada tabel berikut:

Tabel II- 47
Kinerja Indikator Perencanaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA			SUMBER
	2020	2021	2022	
Indeks Profesionalitas ASN	52.40	52.30	57.06	BKN
Indeks Sistem Merit	262.50	281.50	289.00	KASN

2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 umumnya menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Kembali berhasil masuk pada 10 besar dalam Indeks daerah yang sangat inovatif. Dari 415 Kabupaten yang terdata pada indeks inovasi daerah, Inhil tercatat sebagai Kabupaten yang sangat inovatif dengan nomor urut 6 dari 10 Kabupaten yang masuk dalam

kategori Kabupaten sangat inovatif. Sedangkan Capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan lainnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II- 48
Kinerja Indikator Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA			SUMBER
	2020	2021	2022	
Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (1.630)	Sangat Inovatif (62.42)	Sangat Inovatif (75.98)	Kemendagri
Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah	80	100	82.50*	BAPPEDA

2.3.6. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Indikator Kinerja yang terwakuli dalam urusan ini adalah Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Berikut data ketercapaian indikator dimaksud :

Tabel II- 49
Kinerja Indikator Perencanaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

URAIAN INDIKATOR	KINERJA				SUMBER
	2019	2020	2021	2022	
Maturitas SPIP	3 (Terdefinisi	3 (Terdefinisi	3 (Terdefinisi	3 (Terdefinisi	BPKP
Kapabilitas APIP	3 (Integrated)	3 (Integrated)	3 (Integrated)	3 (Integrated)	BPKP

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Kemampuan daya saing daerah dapat dilihat dari berbagai aspek. Adapun aspek yang dimaksud dapat berkenaan dengan kemampuan ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing infrastruktur dan daya saing investasi. Berikut ini adalah beberapa informasi yang berkenaan dengan kemampuan daya saing daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita. Berikut ini akan disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan

Tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari standar hidup yang makin membaik yang direpresentasikan oleh capaian indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Indragiri Hilir sempat menurun pada tahun 2021 dari 10,382 Ribu Rupiah pada Tahun 2019 menjadi 9,945 Ribu rupiah. Tahun 2022 kembali meningkat meningkat sebesar 10.234 Ribu Rupiah.

b. Tingkat Kesempatan Kerja

Penyerapan tenaga kerja di Indragiri Hilir tersebar di seluruh jenis lapangan usaha yang ada. Lapangan usaha yang terbanyak menyerap tenaga kerja antara lain pertanian sebesar 186 ribu jiwa atau 47,07 persen, selanjutnya sektor jasa sebanyak 103 ribu jiwa dan manufaktur 47 ribu jiwa dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2022.

Seiring dengan potret perekonomian di Indragiri Hilir yang memang didominasi oleh lapangan usaha pertanian dengan kontribusi sekitar 46,78 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indragiri Hilir. Dari sini tampak bahwa sebagai lapangan usaha yang mendominasi dalam perekonomian, pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang besar, karena lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha padat karya sehingga penyerapan tenaga kerjanya sangat baik.

Jika dilihat dari tingkat kesempatan kerja, terlihat bahwa selama kurun waktu beberapa tahun terakhir TKK Indragiri Hilir Terus meningkat seperti gambar breikut :

Gambar II-17
Tingkat kesempatan Kerja Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2022

Sumber : BPS 2023

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi kedua Perubahan RPJMD 2018-2023 berdasarkan atas suara pengguna produk infrastruktur secara langsung. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu *tools* yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspekif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (*outcome*).

Jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital bagi pembangunan suatu wilayah. Untuk kemudahan akses, pemerintah telah membangun jalan sepanjang lebih dari 1.634,06 km. Terdiri dari 163,32 km jalan negara, 280,15 km jalan provinsi dan 1.190,59 jalan Kabupaten serta 680 unit jembatan. Panjang dan kualitas jalan Kabupaten berdasarkan Data Teknis Jalan (DD1) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 yang dirilis pada 31 Maret 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel II-50
Panjang dan Kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Panjang (km)	Bahan Perkerasan (km)					Kondisi (km)		
	Hotmix	Aspal/ Penetrasi/ Makadam	Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	Baik	Sedang	Rusak
1.190,594	58,146	65,633	320,806	537,981	208,028	597,878	254,962	279,648

Sumber : Dinas PUTR Kab. Inhil

Kondisi Baik untuk jalan Kabupaten berdasarkan data diatas adalah sebanyak 50,22%, Kondisi Sedang 21,41 dan Kondisi Rusak sebanyak 23,49%. Sementara itu hasil rekapitulasi berdasarkan DD1 untuk kondisi mantap jalan sebesar 55,10% dan Kondisi Tidak Mantap Jalan sebesar 44,90%.

Berdasarkan data Teknik Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten (DD2) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 yang juga dirilis pada 31 Maret 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut,

Tabel II-51
Panjang Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Jumlah Jembatan	680 unit
Panjang Jembatan	17.125,3 meter
NK 1	282 unit
NK 2	88 unit
NK 3	127 unit
NK 4	168 unit
NK 5	15 unit

Sumber : Dinas PUTR Kab. Inhil

Pada Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan untuk untuk Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur tahun 2022, nilai IKLI yang diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel II-52
Hasil Akhir Survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan	Jumlah Responden	Nilai	Indikator	Indeks Kepuasan Per Unsur
SEDANG	400	65,02	Program Pembangunan Infrastruktur	69.17
			Kondisi dan Keadaan Infrastruktur	65.33
			Perawatan dan Pemeliharaan Infrastruktur	61.33
			Jumlah Infrastruktur Jalan	64.42
			Jumlah Infrastruktur Jembatan	64.83

Sumber : Laporan IKLI (Bappeda)

Secara umum, nilai Indeks Pelayanan pada Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur adalah 65,02 Persen. Berdasarkan table Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan pada Permenpan-RB 14/2017, dapat diketahui bahwa mutu pelayanan pada Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur adalah SEDANG untuk tahun 2022.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan menggunakan indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (2) Jumlah investor berskala nasional (PMA). Sampai dengan tahun 2022 Jumlah investor yang melaksanakan kegiatan atau usaha di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 168 Investor, dengan Nilai Investasi pada tahun 2022(PMDN/PMA) mencapai 12,706.02 Milyar Rupiah.

Kondisi daerah yang kondusif akan mendorong meningkatnya iklim investasi karena investor ingin modal yang telah ditanamkan dapat kembali lagi. Untuk itu diperlukan kepastian hukum dan supremasi hukum harus ditegakan serta didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja sumberdaya manusia dilakukan menggunakan indikator rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*depencency ratio*) adalah angka yang

menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Semakin tingginya prosentase *Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 sebesar 44,11 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mempunyai beban tanggungan sebanyak 44-45 orang yang dianggap belum produktif atau sudah tidak produktif lagi.

Angka ini lebih menurun jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya yaitu 47,23 tahun 2019 dan stabil diangka 44,10-44,11 sampai dengan tahun 2022. Dengan kata lain beban tanggungan penduduk untuk membiayai penduduk yang tidak produktif juga menurun.

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan yang menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pencapaian ini tentu saja menjadi salah satu poin penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya akan terjabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan di setiap perangkat daerah.

Berikut rekapitulasi capaian kinerja indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan berdasarkan aspek pembangunan daerah.

Tabel II.53
Rekapitulasi Capaian Indikator Pembangunan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022

NO	ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN	Satuan	CAPAIAN KINERJA			
			2019	2020	2021	2022
2.2.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
2.2.1	**Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi**					
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,15	0,43	4,46	5,31
2.2.1.2	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Juta	44.774,87	44.967,54	46.972,37	49.468,27
2.2.1.3	Laju Inflasi	Persen	2,4	3,3	1,09	4,82
2.2.1.4	PDRB Per Kapita	Rp. Ribu	87.346,96	99.283,21	111.536,24	126.254,97
2.2.1.5	Perkembangan Indeks Gini	Poin	0,303	0,31	0,297	0,296
2.2.1.6	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,54	5,93	6,18	5,98
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.2.2.1	Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	98,64	98,33	98,1	98,5
2.2.2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun	66,84	66,54	66,63	67,37
2.2.2.3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,66	67,85	67,98	68,31
2.2.2.4	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,9	11,91	11,93	12,19
2.2.2.5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,22	7,23	7,24	7,26
2.2.2.6	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Orang/Tahun	10.382	9.954	9.945	10.234
2.2.2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,55	4,35	2,66	1,50
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
2.2.3.1	Seni Budaya					
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	0	1	1	1
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang	Cabud	1	1	1	1

NO	ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN	Satuan	CAPAIAN KINERJA			
			2019	2020	2021	2022
	dilestarikan					
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cabud	1	1	1	1
2.2.3.2	Olahraga					
	Prestasi olahraga	Medali	18	2	38	73
	Persentase Peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah	Persen	0	0	0	-27
	Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat daerah	Medali	0	0	11	73
2.3.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
2.3.1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
2.3.1.1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (persen)	Tahun	95,34	95,52	95,99	99,99
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (persen)	Tahun	81,26	82,06	82,59	82,06
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (persen)	Tahun	105,85	105,93	104,56	103,92
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (persen)	Tahun	99,3	102,01	99,97	101,92
	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	Tahun	99,08	99,75	99,77	99,99
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	Tahun	91,7	92,13	92,27	85,57
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV)	Persen	73,91	71,97	72,96	71,99
2.3.1.2.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,66	67,85	67,98	68,31
	Indeks Kesehatan	Indeks	0,733	0,736	0,738	0,743
	Angka Kematian Bayi	Angka	24	24	71	41
	Jumlah Kematian Ibu	Angka	7	10	16	8
	Angka Stunting	Angka	27,7	24,4	28,4	28,5
	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	Persen	0,005	0,006	0,006	0,006

NO	ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN	Satuan	CAPAIAN KINERJA			
			2019	2020	2021	2022
	Rasio dokter per 1000 penduduk	Persen	0,14	0,2	0,2	0,19
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Persen	0,11	0,13	0,13	0,14
2.3.1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum seta Perlindungan Masyarakat					
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non kebakaran kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100
	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100	100
2.3.1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	82,5	100	96	80
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	0,14	100
2.3.2.	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
2.3.2.1.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64,44	69,17	68,56	63,97
	b. Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	95,45	95,65	97,34	98,5
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,55	4,35	2,66	1,5
	d. Upah Minimum Kabupaten/Kota	Rupiah	2.750.618	2.984.696	2.984.696	2.984.696
2.3.2.2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	82,57	82,34	82,37	82,74
	b. Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	82,57	64,45	64,5	n/a
	c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,567	0,546	0,542	n/a

NO	ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN	Satuan	CAPAIAN KINERJA			
			2019	2020	2021	2022
2.3.2.3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
	Ketersediaan Pangan Utama (%)	Persen	109	103,9	104,2	101,1
	Produksi Beras (Ton)	Ton	45.369,39	49.008,18	46.651,57	42.777,94
	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Ton	86564,02	84276,7	89908,06	81470,3
	Jumlah Produksi Ternak (ton)	Ton	475	487,99	512,33	519,1
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persen	85,9	86,06	86,22	86,38
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	84,2	84,8	85,5	85,7
2.3.2.5.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53,04	57,79	64,79	67,66
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	52,22	92,15	88,63	90,61
	Indeks Kualitas Air	Indeks	24,69	32,86	50	53,78
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	92,91	50,72	46,11	49,05
2.3.2.7.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Indeks Desa Membangun (IDM)	Status/Nilai	Tertinggal -0,5822	Berkembang -0,6071	Berkembang -0,6198	Berkembang -0,6535
	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Nilai	0,6903	0,7116	0,7265	0,7572
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Nilai	0,4472	0,4899	0,5002	0,5528
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Nilai	0,6091	0,6197	0,6327	0,6504
	Persentase Bumdes Aktif	Persen	21,83	96,45	100	97,46
2.3.2.10.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai	n/a	n/a	2,24	2,13
	Indeks SPBE	Nilai	n/a	n/a	2,24	2,13
2.3.2.11.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah					
	Koperasi Aktif	Persen	66,22	66,49	66,93	67,18

NO	ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN	Satuan	CAPAIAN KINERJA			
			2019	2020	2021	2022
	Pertumbuhan Modal Koperasi berdasarkan modal sendiri	Persen	-58,51	-8,72	-25,35	141,02
	Pertumbuhan Modal Koperasi berdasarkan modal luar	Persen	-27,99	11,68	-41,57	124,4
	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persen	-26,86	16,7	-2,6	0,9
2.3.2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
	Jumlah Investasi PMA/PMDN sampai dengan tahun berkenaan	Milyar Rp	414,07	4.339,70	1.889,20	12.706,02
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	291	217	93	168
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	3,61	3,63	3,73	4,02
2.3.2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	0	1	1	1
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	1	1	1	1
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	1	1	1	1
2.3.2.16.	Bidang Urusan Perpustakaan					
	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	Persen	39,59	50,17	60,75	70,25
	Nilai SKM Pemustaka terhadap pelayanan	Indeks	90,91	91,46	91,89	92
2.3.2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					
	Indeks Kearsipan	Indeks	31,84	50,75	20,12	61
	Persentase Perangkat Daerah Dengan pengelolaan Arsip yang tertib	Persen	1	6	11	16
2.3.3.	**Urusan Pemerintahan Pilihan**					

NO	ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN	Satuan	CAPAIAN KINERJA			
			2019	2020	2021	2022
2.3.3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					
	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Indragiri Hilir	Ton	54.271,82	54.271,82	60.330,35	70.895,01
	Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Indragiri Hilir	Ton	54.271,82	2.104,15	2.484,55	4.831,75
2.3.3.2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
	Kunjungan Wisatawan	Orang	91137	51728	56728	42127
	Tingkat Hunian	Kamar	15736	7868	10868	21758
2.3.3.3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	4,00	3,50	4,01	4,34
	Produktivitas padi	Kw/Ha	36,61	40,2	42,37	40,72
	Luas Panen Padi	Ha	19.159,29	19.516,84	15.520,17	13.820,60
	Produksi Padi	Ton	70.138,75	78.458,70	65.755,10	56.274,74
	Produksi Beras	Ton	40.045,57	45.027,78	37.737,13	32.296,29
	Konsumsi Beras	Ton	64.083,64	64.457,29	65.287,17	63.832,22
	Produktivitas Jagung	Kw/Ha	n/a	24,29	n/a	36,62
	Produktivitas Kedelai	Kw/Ha	n/a	11,03	n/a	11,06
	Luas Areal Tanaman Perkebunan				348.115	348.205
	Kelapa Sawit/Oil Palm	Ha	81.346	81.737	81.795	82.025
	Kelapa Dalam/Coconut	Ha	228.077,19	225.417	226.037	226.037
	Kelapa Hibrida/Hybrid Coconut	Ha	35.855,02	35.564	35.398	35.195
	Karet/Rubber	Ha	3.408	3.392	3.264	3.342
	Kopi/Coffee	Ha	642,15	639	632	632
	Kakao/Cocoa	Ha	954	944	989	974

NO	ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN	Satuan	CAPAIAN KINERJA			
			2019	2020	2021	2022
	Produksi Tanaman Perkebunan					
	Kelapa Sawit/Oil Palm	Ton	267.045,85	268.881,67	269.137,95	269.983,88
	Kelapa Dalam/Coconut	Ton	264.449,67	262.992,42	263.731,86	263.732,34
	Kelapa Hibrida/Hybrid Coconut	Ton	50.826,91	50.367,80	50.155,74	49.794,96
	Karet/Rubber	Ton	4.721,64	4.698,63	4.540,58	4.646,23
	Kopi/Coffee	Ton	251	243,71	242,74	242,74
	Kakao/Cocoa	Ton	452,38	436,73	468,07	458,65
2.3.3.4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
	Volume Ekspor	Ton	560.151,86	526.173,09	465.779,78	509.863,70
	Nilai Ekspor	US $	303.961.994,10	349.419.461,02	339.623.796,53	371.081.702,27
	Volume Impor	Ton	22.802,21	21.328,38	20.733,43	20.827,95
	Nilai Impor Kabupaten Indragiri Hilir	US $	68.779.597	65.652.804	71.969.318	73.143.626
2.3.3.5.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
	Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	23,63	24,06	24,63	25,06
2.3.4.	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**					
2.3.4.1	Sekretariat Daerah					
	Nilai AKIP	Prediket	CC (55.12)	B (62.79)	B (63.85)	B (64.10)
	Nilai LPPD	Prediket	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Indeks Reformasi Birokrasi	Prediket	B (60.05)	B (60.37)	B (60.42)	B (63.07)
2.3.5.	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**					
2.3.5.1.	Perencanaan					
	Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Dokumen	3	2	2	3

NO	ASPEK/FOKUS/URUSAN/BIDANG URUSAN	Satuan	CAPAIAN KINERJA			
			2019	2020	2021	2022
	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Persen	88,79	93,96	91,35	93,34
2.3.5.2.	Keuangan					
	Indeks pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	57,22	58,49	75,47	77.74*
2.3.5.3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	n/a	52,4	52,3	57,06
	Indeks Sistem Merit	Nilai	n/a	262,5	281,5	289
2.3.5.5.	Penelitian dan Pengembangan					
	Indeks Inovasi Daerah	Prediket	n/a	Sangat Inovatif (1.630)	Sangat Inovatif (62.42)	Sangat Inovatif (75.98)
	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah	Persen	n/a	80,00	100,00	82,50
2.3.6.	**Pengawasan**					
	Maturitas SPIP	Nilai	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)
	Kapabilitas APIP	Nilai	3 (Integrated)	3 (Integrated)	3 (Integrated)	3 (Integrated)
	Indeks Integitas	Nilai	n/a	n/a	73,2	72,65
2.3.7.	Sekretariat Dewan	Persen	100	100	100	100
	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100	100
	Persentase Prolegda yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil pembangunan yang diharapkan dari suatu tujuan pembangunan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Berbagai Capaian pembangunan seharusnya dapat terlihat pada sasaran pembangunan (sasaran pokok) dengan indikator sebagai tolok ukurnya. Pada analisis kinerja pembangunan jangka menengah Indragiri Hilir dapat dilihat pada capaian pembangunan selama empat pembangunan tahunan yakni tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022.

Kinerja Pembangunan dapat dilihat dari capaian indikator sasaran pembangunan sebagai pengejawantahan perwujudan visi dan misi pembangunan. Adapun capaian pembangunan Indragiri Hilir pada awal pelaksanaan pembangunan RPJMD masih belum maksimal dengan capaian “Sangat Tinggi” hanya sebesar 36,96 persen dan capaian “Tinggi” sebesar 4,35 persen. Adapun yang memiliki status “Sangat Rendah” mencapai 2,17.Belum optimalnya analisis ini disebabkan oleh minimnya data dan informasi yang diperoleh dari indikator yang telah disusun sehingga masih memerlukan perbaikan pemenuhan data dan informasi.

Pada tahun kedua pelaksanaan pembangunan jangka menengah, pencapaian pembangunan mengalami peningkatan dimana capaian dengan status “Sangat Tinggi” sama dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 36,96 persen dan sementara capaian “Tinggi” mengalami kenaikan menjadi 8,70 persen. Kondisi ini tentu saja merupakan peningkatan dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah dimana capaian status meningkat kualitasnya. Adapun yang memiliki status “Sangat Rendah” mencapai 0,00 persen. Pemenuhan data dan informasi pada tahun ini sudah cukup baik jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada tahun 2021, pelaksanaan pembangunan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 dimana capaian pembangunan dengan status “Sangat Tinggi” sama dengan tahun sebelumnya yakni 36,96 persen. Sementara capaian lain mengalami penurunan, seperti pada capaian “Tinggi” turun menjadi 6,52 persen. Terlebih capaian status “Sangat Rendah” yang naik signifikan dari o,oo Persen tahun 2020 menjadi 4,35 persen.

Pada tahun 2022, pelaksanaan pembangunan Kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama pada kinerja sangat tinggi yakni mencapai 41,30 persen, namun status N/A atau data tidak tersedia mengalami kenaikan menjadi 6.52 persen. Hal ini diakibatkan oleh belum tersedianya data-data realisasi kinerja terutama pada indikator yang bersifat sectoral yang bersumber dari Perangkat Daerah.

Secara lengkap, capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II – 54
Capaian Indikator Sasaran RPJMD (Perubahan) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				REALISASI				CAPAIAN KINERJA (%)				Rata-Rata
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP (Predikat)	B	B	B	B	CC	B	B	B	75	100	100	100	100
		Nilai LPPD (Nilai)	Tinggi	Sanga Tinggi	Sanga Tinggi	Sanga Tinggi	Tinggi	Sanga Tinggi	Sanga Tinggi	Sanga Tinggi	100	100	100	100	100
		Opini BPK atas LKPD (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	96.14
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.07	2.08	2.08	2.09	1.75	2.4	2.24	2.13	84.54	100	100	100	100
		Indeks Inovasi Daerah (Kategori)	N/A	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	N/A	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	N/A	100	100	100	97.82
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	78.47	84.31	85.12	87.65	82.38	83.15	83.4	83	100	99	98	95	64.11
3	Meningkatnya kualitas pelayanan insfrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air bersih	29.00	35.00	42.00	48.00	17.29	26.93	26.99	26.69	59.62	76.94	64.26	55.60	58.17
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	40.00	46.00	57.00	65.00	25			35.00	62.50			53.85	65.49
4	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Persentase Penyediaan Infrastruktur	57.80	58.24	58.67	59.50	37.85				65.49				
5	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	55.00	78.72	40.24	N/A	55.00	78.72	40.24	N/A	98.71
6	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	44.68	46.78	47.54	48.56	44.68	46.77	47.5	46.10	100	99.98	99.92	94.93	87.07
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	92.91	92.15	93.12	93.5	52.22	92.15	88.63	90.61	56.20	100.00	95.18	96.91	75.95
		Indeks Kualitas Air	52.22	52.86	52.99	52.55	24.69	32.86	50	53.78	47.28	62.16	94.36	100	94.70
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24.69	50.72	52.55	53.87	92.91	50.72	46.11	49.05	100.00	100	87.75	91.05	96.76

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				REALISASI				CAPAIAN KINERJA (%)				Rata-Rata
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
8	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >25 tahun (tahun)	7.22	7.23	7.52	8	7.22	7.23	7.24	7.26	100.00	100	96.28	90.75	99.23
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.90	11.91	12.00	12.50	11.9	11.91	11.93	12.19	100.00	100	99.42	97.52	99.41
9	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	67.66	67.85	68.05	69.90	67.66	67.85	67.98	68.31	100.00	100	99.90	97.73	78.08
10	Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp per kapita per tahun)	11,987	12,724	13,565	13,800	10382	9954	9,945	10234	86.61	78.23	73.31	74.16	80.37
11	Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi kelembagaan Masyarakat	60.00	65.00	70.00	75.00	52.35	53.5	55.00	55	87.25	82.31	78.57	73.33	80.37
12	Meningkatnya keikutsertakan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	Tingkat Keberdayaan Masyarakat	60.00	65.00	70.00	75.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99.09
13	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	82.57	83.41	83.58	84	82.57	82.34	82.37	N/A	100.00	98.72	98.55	N/A	96.97
14	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman sosial masyarakat	Indeks Rasa Aman	66.66	75.8	75.8	75.8	N/A	N/A	N/A	73.5	N/A	N/A	N/A	96.97	96.97
15	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	53.4483	-62.963	N/A	100.00	53.45	-62.96	N/A	98.10
16	Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	6.54	5.93	5.75	5.34	6.54	5.93	6.18	5.98	100.00	100	92.52	99.88	100
17	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.55	4.35	4.3	4	4.55	4.55	2.66	1.5	100.00	100	100.00	100	110
18	Meningkatnya produksi sektor potensial	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	60.46	68.6	69.2	69.8	84.8	99.27	111.43	126.25	140.26	100	100.00	100	100
19	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi PMDN (Milyar Rupiah)	385.23	448.6	1681.9	2782.6	385.23	448.597	1855.34	8013.01	100.00	100	100.00	100	89.53
20	Meningkatnya nilai ekspor daerah	Nilai ekspor bersih perdagangan (juta Rupiah)	301.51	409.15	410.12	412.67	303.96	349.419	339.624	371.082	100.00	85.40	82.81	89.92	89.53

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				REALISASI				CAPAIAN KINERJA (%)				Rata-Rata
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
21	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	N/A	Rendah	Sedang	N/A	N/A	Sedang	Tinggi	N/A	N/A	100	100	100

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi dimaksud merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna memprakarsai dan memperbarui sebuah produk, proses, ataupun jasa yang telah ada sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, inovasi lebih ditekankan bagaimana pemerintah daerah membuat gagasan baru baik melalui teknologi informasi maupun secara klasikal, yang bertujuan meningkatkan efektif dan efisiennya pelayanan kepada publik. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, masyarakat maupun stakeholder mampu mendapatkan optimalisasi dari apa yang diharapkan dengan lebih cepat, relevan dan berkualitas. Adapun inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel II.55
Inovasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
Inovasi Daerah Tema Covid -19 Tahun 2020				
1	Video New Normal Life Sektor Pasar Modern Di Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
2	Video New Normal Life Sektor Pasar Tradisonal	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kepala Daerah
3	Video New Normal Life Sektor Transportasi Umum Di Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kepala Daerah
4	Video New Normal Life Sektor Ptsp Di Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kepala Daerah
5	Video New Normal Life Sektor Restoran Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
6	Video New Normal Life Sektor Perhotelan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
7	Video New Normal Life Sektor Objek Wisata Di Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
Inovasi Daerah Tahun 2020 Skor Indeks Penilian Kemendagri 1.630 (Sangat Inovatif) Peringkat 101 Kabupaten Seluruh Indonesia				
1	Gerakan Magrib Mengaji	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
2	Program Inovasi “Posyandu Bougenville” Upt Puskesmas Tembilahan Kota	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kepala Daerah
3	Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Di Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digita	OPD
4	Pembangunan Pos Keamanan Terpadu Satu Atap (Babinsa Dan Bhabinkamtibmas)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digita	OPD
5	Simpati (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kepala Daerah
6	Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Aplikasi Informasi Pemerintah Dan Masyarakat (Inpas) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kepala Daerah
7	Peningkatan Sitem Informasi Kebencanaan Di Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kepala

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
				Daerah
8	Layanan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Di Kabupaten Indragiri Hilir (Lokasi Kecamatan Kemuning)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
9	Gerakan 1 Desa 1 Kelurahan 1 Rumah Tahfidz Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (Dmij) Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
10	Inovasi Pelayanan Forum Anak Peduli Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
11	Inovasi Layanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Akupuntur Medik) Di Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kepala Daerah
12	Dmac-Hd (Digital Media Analytic Center – Health District)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digita	OPD
13	Inovasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digita	OPD
Inovasi Daerah Tahun 2021 Skor Indeks Penilian Kemendagri 62.42 (Sangat Inovatif) Peringkat 7 Kabupaten Seluruh Indonesia				
1	Tim Sirtu (Penyisir Peraturan) Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
2	Inovasi "Nasi Uduk Inhil" (Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Indragiri Hilir) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
3	Inovasi "Pidada Inhil" (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
4	Inovasi Daerah "Demi Tuan Inhil" (Dermaga Miring Untuk Anak Negeri Indragiri Hilir) Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
5	Inovasi "Piagam Pualam" (Pelayanan Prima 3 Jam Pengurusan Izin Reklame) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
6	Inovasi "Si Atah Padi" (Sidang Istbat Nikah Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
7	Inovasi Daerah "Layanan Kopi Inhil" (Layanan Konsultasi Online Pengawasan Intern Kabupaten Indragiri Hilir) Produk Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
8	Inovasi Daerah "Teman Sehati" (Tanah Merah Menjemput Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir) Produk Inovasi Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
9	Inovasi Daerah "Sultan" (Sistem Kemudahan Layanan Tata Ruang) Produk Inovasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
10	Inovasi Daerah "Si Prima 15 Menit" (Inovasi Pelayanan Ramah, Menyenangkan, Akurat Dan Cepat 15 Menit) Produk Inovasi Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
11	Inovasi Pemanfaatan Air Budidaya Lele Bioflok Untuk Tanaman Produk Inovasi Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
12	Inovasi Daerah "Si Kapal Layar" (Sitem Informasi Kas Dan Pencairan Digital Langsung Bayar) Produk Inovasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
13	Inovasi Daerah "Biore" (Bilik Video Conference) Produk Inovasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
14	Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Informasi Pemerintah Dan Masyarakat (Inpas) Tv Digital Produk Inovasi Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Tekno logi	OPD
15	Inovasi Daerah "Gerakan Satu Hati Peduli Stunting Di Kabupaten Indragiri Hilir" Produk Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kepala Daerah
16	Inovasi Daerah "Permata Trc-19" (Pemutus Rantai Tim Reaksi Covid -19) Produk Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
17	Inovasi Daerah "Sop Pais Umi" (Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Usaha Mikro) Produk Inovasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
18	Inovasi "Si Papa Ku" (Aplikasi Pendamping Penatausahaan Keuangan) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Produk Inovasi Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
19	Inovasi Daerah "Teras Kita" (Tim Percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Produk Inovasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	OPD
20	Inovasi Daerah "Tim Informasi Cakra" (Cepat, Akurat, Kredibel, Respon Dan Akuntabel) Produk Inovasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
21	Inovasi Daerah "D' Bumil O" (Data Ibu Hamil Online) Produk Inovasi Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
22	Inovasi Daerah "Kelapa Muda" (Komunikasi Elektronik Pelayanan Prima, Mudah Dan Akurat) Produk Inovasi Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
23	Inovasi Daerah "Salaman" (Satuan Relawan Pemadam Kebakaran) Produk Inovasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kepala Daerah
24	Inovasi Daerah "Sapa Rasa" (Sapa Pasien, Rangkul Dengan Santun) Produk Inovasi Rsud Raja Musa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
25	Inovasi Daerah "Sagu Mandah" (Inovasi Sistem Akuntabilitas Guna Untuk Masyakat Lebih Mudah) Produk Inovasi Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
26	Inovasi Daerah "Paten Pepes" (Pelayanan Andmistrasi Terpadu Kecamatan Spesial Pesisir) Produk Inovasi Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
27	Inovasi Daerah "Tim Si Cepat Peduli Ham" (Tim Koordinasi Percepatan Kabupaten Indragiri	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non	OPD

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
	Hilir Peduli Ham) Produk Inovasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir		Digital	
28	Inovasi Daerah "Korsi Panas" (Kontak Informasi Pelayanan Akuntabel Dan Sistematis) Produk Inovasi Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
29	Inovasi Daerah "Inti Reteh" (Registrasi Online Surat Pindah Di Kecamatan Reteh) Produk Inovasi Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
30	Inovasi Daerah "Tanam Kelapa" (Tamu Senang, Nyaman, Keamanan Dan Pelayanan Prima) Produk Inovasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
31	Inovasi Daerah "Tipekk" (Tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan) Produk Inovasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	OPD
32	Inovasi Daerah "Tim Trembesi" (Tim Percepatan Pelayanan Pelatihan Berbasis Kompetensi) Produk Inovasi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	OPD
33	Inovasi Daerah "Simpidade & Kiambang" (Sistim Informasi Pelayanan Dari Desa & Kelurahan, Inovatif, Murah, Berkualitas, Menyenangkan) Produk Inovasi Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
34	Inovasi Daerah "Ada Si Udin Ocit" (Administrasi Surat Izin Dispensasi Nikah Online Bagi Calon Pengantin) Produk Inovasi Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
35	Inovasi Daerah "Sikes" (Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Secara Online) Produk Inovasi Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
36	Inovasi Daerah "Sapat" (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi) Produk Inovasi Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
37	Inovasi Daerah "Tim Kape Muda" (Tim Koordinasi Penyambutan Tamu Daerah) Produk Inovasi Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	OPD
38	Inovasi Daerah "Tim Persada" (Tim Percepatan Kerjasama Daerah) Produk Inovasi Bagian Kerjasama Dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	OPD
39	Inovasi Daerah "Tali Serat" (Taman Literasi Sekolah Dan Masyarakat) Produk Inovasi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
40	Inovasi Daerah "Wardan-Mbak Ikha" (Warga Damai, Aman, Membangun Kampung Indah, Kreatif, Harmonis, Dan Asri) Produk Inovasi Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
41	Inovasi Daerah "Jam Tangan" (Jaga Kampung Dengan Semangat Gotong Royong) Produk Inovasi Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
42	Inovasi Daerah "Kodok's Melonchat" (Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telepon Dan Chat) Produk Inovasi Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
43	Inovasi Daerah "Invest" (Inovasi Pengurusan Surat Tanah) Produk Inovasi Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
44	Inovasi Daerah "Si Pelangi Pagi" (Sistem Pengaduan Dan Layanan Administrasi Pelangiran Penggunaan Aktif Tekhnologi) Produk Inovasi Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
45	Inovasi Daerah "Pantai Cermin" (Pelayanan Tani Cerdas, Cermat Dan Integrasi) Produk Inovasi Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
46	Inovasi Daerah "Slip" (Sistem Layanan Informasi Perkim) Produk Inovasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
47	Inovasi Daerah "Layanan Siaap" (Sistem Aplikasi Administrasi Produk Hukum Daerah) Produk Inovasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
48	Inovasi Daerah “Bu Kia Pertama” (Buku Kesehatan Ibu Dan Anak Menjadi Persyaratan Tambahan Masuk Sekolah) Produk Inovasi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
49	Inovasi Daerah "Kelapa Kopyor Bisa" (Kegiatan Pengolahan Pangan Komoditas Pertanian Yang Berorientasi Bisnis Agro) Produk Inovasi Pemerintah Kecamatan Sungai Batang Bekerjasama Dengan Tim Penggerak Pkk Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat
50	Inovasi Daerah "Tim Koordinasi Percepatan Kampung Qur'ani" Produk Inovasi Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
51	Inovasi Daerah "Sipetus" (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
52	Inovasi Daerah "Tim Siber" (Tim Penyisir Kebersihan) Produk Inovasi Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
Inovasi Daerah Tahun 2022 Skor Indeks Penilian Kemendagri 67.63 (Sangat Inovatif) Peringkat 11 Kabupaten Seluruh Indonesia				
1	Sipori (Sistem Pelayanan Obat Rawat Inap) Produk Inovasi Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
2	Pembelok Padi (Pemurnian Benih Lokal Padi) Produk Inovasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
3	Amal Setyacu (Animal Safety And Rescue) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
4	Aplikasi Pidada Inhil (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) Produk Inovasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	Kepala Daerah
5	Sigap Airi (Sistem Informasi Geografis Aplikasi Perpipaan Air Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
6	Timpas (Tim Patroli Sampah) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
7	Si Panglink (Sistem Pengaduan Lingkungan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno	OPD

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
	Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir		logi	
8	Inovasi Lapor Urc Saja Bermenu Si Pentol Kuah (Produk Inovasi Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir)	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
9	Inovasi Sahabat Sejiwa Podcast Satpol Pp (Produk Inovasi Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
10	Inovasi Japri (Jemput Antar Berkas Perizinan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
11	Inovasi Duri Bidara (Dialog Radio Interaktif Bicara Daerah Kita) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
12	Inovasi Damkar Road To School (Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
13	Budaya Sijata Anadara Granosa (Budidaya Sistem Jaring Tancap Anadara Granosa) Produk Inovasi Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Digital	Masyarakat
14	Kelola Nypa Palm (Kegiatan Pengelolaan Nypa Palm) Produk Inovasi Bentuk Lainnya Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	ASN
15	Pak Sani (Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini) Produk Inovasi Pelayanan Publik Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
16	Inovasi Tulis (Waktu Hemodialisa) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
17	Sipori (Sistem Pelayanan Obat Rawat Inap) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rsud Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
18	Satgas P2ab (Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Air Bersih) Produk Inovasi Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
19	Pembelok Padi (Pemurnian Benih Lokal Padi) Produk Inovasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
20	Kotaku Online (Konsultasi Penatausahaan Keuangan Online) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
21	Laksa Inhil (Layanan Konsultasi Online Kerja Sama Daerah Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Bagian Kerja Sama Dan Perbatasan Sekretariat Darah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
22	Si Punak (Sistem Informasi Pengaduan Kekerasan Perempuan Dan Anak) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berecana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
23	Inovasi E-Absensi Asn Kab. Inhil (Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
24	Database Inhil (Desa Tangguh Bencana Se Kabupaten Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
25	Forum Pembaharuan Inhil (Forum Koordinasi Bersama Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir) Produk Inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
26	Inovasi Sahabat (Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
27	Si Perjake (Sistem Pendaftaran Jaminan Kesehatan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
28	Inovasi Spion Rs (Sistem Penddaftaran Online Rumah Sakit) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Raja Musa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
29	Inovasi Pemeran Si Kancil Inhil (Pemberdayaan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
30	Kreasi (Berkreativitas Di Gemilang Televisi) Produk Inovasi Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
31	Si Mantap (Sistem Informasi Manajemen Tata Pengaduan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Raja Musa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
32	Simpati Terintegrasi (Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir Terintegrasi) Produk Inovasi Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
33	Asinan (Asistensi Perizinan Kateman) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
34	Layanan Siaap Versi Ii (Sistem Aplikasi Admnistrasi Produk Hukum Daerah Versi Ii) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
35	Kami (Kolom Aspirasi Masyarakat) Berbasis Online Sebagai Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
36	Inovasi Juang (Pejuang Untuk Atasi Banjir Dan Genangan) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
37	Sapu Ob (Simpati Pada Pasien Usai Operasi Bedah) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rsud Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
38	Sidoi Meloncat (Sistem Infomasi Daftar Online Melalui Telepon Dan Chating) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Rsud Tengku Sulung Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
39	Sepeda Ontel (Sistem Penyerahan Spm Online Terkoneksi Langsung) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
40	Sampan Layar (Sistem Pencairan Langsung Bayar) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
41	Fokus Tuntas (Forum Koordinasi Penuntasan Stunting Terintegrasi) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
42	Laju Perahu Inhil (Layanan Pengajuan Pembangunan Rumah Layak Huni Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
43	Rebana (Rumah Terdampak Bencana) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
44	Sorum (Sistem Informasi Transportasi Umum) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
45	Romantis (Mikro Dan Kecil Cepat, Nyaman Dan Gratis) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
46	Aplikasi Simona (Sistem Informasi Monitoring Lapangan) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
47	Pesta Padi (Perubahan Status Tanpa Di Urus) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kepala Daerah
48	Tanjak Pelepah {Tim Peningkatan Pajak Untuk Pendataan, Validasi Dan Penepatan Pajak Air Tanah) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	OPD
49	Sinema Gemilang (Inovasi Nenas Madu Gemilang) Produk Inovasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
50	Pul Kompas (Pusat Layanan Kelompok Masyarakat Peduli Stunting) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
51	Tajuk Reteh (Data Jaringan Penduduk Kecamatan Reteh) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
52	Inovasi E-Cuti (Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
53	Tipekk Terintegrasi (Tim Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Terintegrasi) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
54	Bu Kia Langsing (Buku Kesehatan Ibu Dan Anak Sebagai Langkah Awal Pencegahan Dan Pemantauan Stuting) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
55	Peta Kan Online (Pencatatan Kapal Perikanan Online) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
56	Peta Koper Online (Pencatatan Komoditi Perikanan Online) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
57	Juklak Perkada (Pengajuan Dan Pelaksanaan Pengaturan Acara Kepala Daerah) Produk Inovasi Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
58	Inovasi Si Petus Bergerak (Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
59	Si Panda Sakti (Sistem Informasi Pengusulan Penyediaan Dan Pemeliharaan Fasilitas Transportasi Sungai) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
60	E-Office Penatausahaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Berbasis Elektronik (Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
61	Sicepat (Inovasi Cermat Dan Tepat) Produk Inovasi Pelayanan Publik Administrasi Kecamatan Di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
62	Udang Pedes (Usaha Perdagangan Peningkatan Ekonomi Desa) Bumdes Sumber Rezeki Produk Inovasi Desa Kelapa Patih Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
63	Inovasi Muda Mudi (Mudah Urus Dokumen Anjab Abk Untuk Di Legalisasi) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tekno logi	OPD
64	Inovasi Tanjung Simpang (Transportasi Antar Jemputan Anak Sekolah Gratis Di Pelangiran) Produk Inovasi Pelayanan Publik Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
65	Inovasi Dm Dan Ht Center Bagi Pasien Diabetes Melitus Dan Hipertensi Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Upt. Puskesmas Kuala Enok Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	ASN
66	Fokus Si Nona Rika (Forum Komunikasi Sistim Informasi Pelayanan Toko Daring Dan Katalog Lokal) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
67	Rumah Indah Inhil (Rumah Inovasi Daerah Indragiri Hilir) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kepala Daerah
68	Inovasi Kelapa Pendan Wangi (Kelompok Papa Peduli Jamban Keluarga Indragiri) Produk Inovasi Upt Puskesmas Tembilahan Hulu Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
69	Cakra Bertajuk Linmas (Layanan Informasi Online Masyarakat) Produk Inovasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Tekno logi	OPD
70	Silayang Tuan (Sistem Layanan Pengumpulan Data Survey Dan Rekomendasi Penelitian) Produk Inovasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
71	Pendekar Umkm (Pengembangan Desa Kolam Renang Dan Gerai Umkm) Produk Inovasi Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
72	Si Tangkas (Sistem Pembangunan Tanggul Mekanik Dengan Swakelola) Produk Inovasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
73	Kelapa Hibrida (Kegiatan Pola Partisipatif Untuk Hilirisasi Bersifat Mandiri Dan Berdaya Saing) Produk Inovasi Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
74	Periuk Wak Atan (Pelopor Tertib Ukur Daerah Wajib Akurat Alat Takaran Dan Ukurannya) Produk Inovasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
75	Klinik Putri (Klinik Pelayanan Umum Terintegrasi) Produk Inovasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
76	Pegulat (Pengembangan Produk Gula Semut) Produk Inovasi Desa Karya Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
77	Inovasi Festival Teater Klasik Bangsawan Secara Virtual Produk Inovasi Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Digital	OPD
78	Trc Rakit (Tim Reaksi Cepat Orang Sakit) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
79	Inovasi Gratis (Inovasi Gerakan Paud Terintegrasi) Produk Inovasi Dinas Penidikan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kepala Daerah
80	Inovasi Osps Mpa (Online System Pengaduan Siaga Masyarakat Peduli Api) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	OPD
81	Kopi (Konsultasi Online Pengawasan Intern) Terintegrasi Produk Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
82	Si Tanduk (Sistim Imformasi Data Penduduk) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
83	Si Pintar Kerja (Sistem Informasi Pendaftaran Pencari Kerja) Produk Inovasi Pelayanan Publik Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupeten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
84	Inovasi Besung Mi-Seraga (Bebas Pasung Membangun Insan Sehat Jiwa Dan Raga) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
85	Klinik Kopukm (Klinik Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah) Produk Inovasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
86	Layanan Pesona (Layanan Pengaduan Stunting Online) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
87	Inovasi Siap Desa (Evaluasi Apb Desa) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
88	Simeldik (Sistem Informasi Manajemen Elektronik Peserta Didik) Ppdb Online Sd Negeri 032 Tembilahan Produk Inovasi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD

NO	JUDUL INOVASI	BENTUK INOVASI	JENIS	INISIATOR
89	Inovasi Simdana (Sistim Informasi Darurat Bencana) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
90	Sapat 2.0 (Sistem Administrasi Pelayanan Akuntabel Terintegrasi 2.O) Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Tekno logi	OPD
91	Inovasi Geber Metik Nuja Annafi (Gerakan Bersama Membatik Nuja Annafi) Produk Inovasi Lainnya Pada Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat
92	Inovasi Kampung Kb (Keluarga Berkualitas) Terintegrasi Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
93	Inovasi Forum Percepatan Corporate Social Responbility (Csr) Produk Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
94	Inovasi Pemenang (Pengembangan Nanas Gemilang) Produk Inovasi Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
95	Inovasi Saprading (Pengembangan Sapi Perah Dan Pedaging) Produk Inovasi Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	OPD
96	Teman Sehati Terintegrasi Kecamatan Tanah Merah Menjemput Pelayanan Kesehatan Daerah Pesisir Tahun 2021 Produk Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
97	Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Upgrade	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Non Digital	Kepala Daerah
98	Inovasi Rumah Si Mas Appe (Rumah Singgah Masyarakat Dan Aparat Pemerintah) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Kecamatan Enok	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	OPD
99	Pantas Adek Tahu (Papan Transparansi Online Informasi Aset Desa Kecamatan Tembilahan Hulu) Inovasi Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	OPD

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Bab ini akan menguraikan terkait gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu serta proyeksi kerangka pendanaan periode yang akan datang berdasarkan dari hasil analisis kebijakan keuangan masa lalu.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu yang dianalisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang akan menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 DOFD Kabupaten Indragiri Hilir hanya mencapai angka 12% yang berarti masuk dalam kategori kurang. Memasuki tahun 2018 sampai dengan tahun 209 DOFD Kabupaten Indragiri Hilir turun menjadi 8% yang berarti masuk ke dalam kategori sangat kurang, Kemudian ditahun 2020 naik menjadi 9 % dan kembali naik menjadi 12% pada tahun 2021. Fluktuasi tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan dan penurunan PAD dalam lima tahun terakhir terutama pada komponen Pendapatan Pajak Daerah. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Indragiri Hilir yang sebesar 10% masih masuk kategori **sangat kurang** karena nilai DOF nya antara 0,00%-10,00%. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat dan masuk kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif dalam sehingga penerimaannya perlahan tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Pendapatan	1.807.880	1.880.755	1.996.971	1.962.245	1.953.975	**1.920.365**
Pendapatan Asli Daerah	214.785	157.482	153.746	180.960	226.601	**186.715**
Persentase	**12%**	**8%**	**8%**	**9%**	**12%**	**10%**

Sumber: *Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2017-2021 menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata–rata mengalami kenaikan sebesar 2% per tahun. Fluktuasi ini tidak lepas dari efek pandemi *Covid-19* yang membuat kontribusi pendapat asli daerah terkoreksi sebesar 12% pada tahun 2021. Pendapatan transfer dari pemerintah

pusat juga mengalami realokasi dan refocusing hingga mengalami kenaikan hanya sebesar 1%.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan "Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah". Penerimaan daerah ini terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah dijelaskan sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah ini meliputi semua penerimaan uang yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mana tidak perlu dibayarkan kembali. Termasuk pula penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan);
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan

pendapatan daerah harus mampu mencipatakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) mengalami trend fluktuatif menurun dengan rata-rata kenaikan sebesar 2% pertahun dari Rp. 1,8 miliar di tahun 2017 menjadi Rp. 1,9 miliar di tahun 2021.

Gambar III.1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

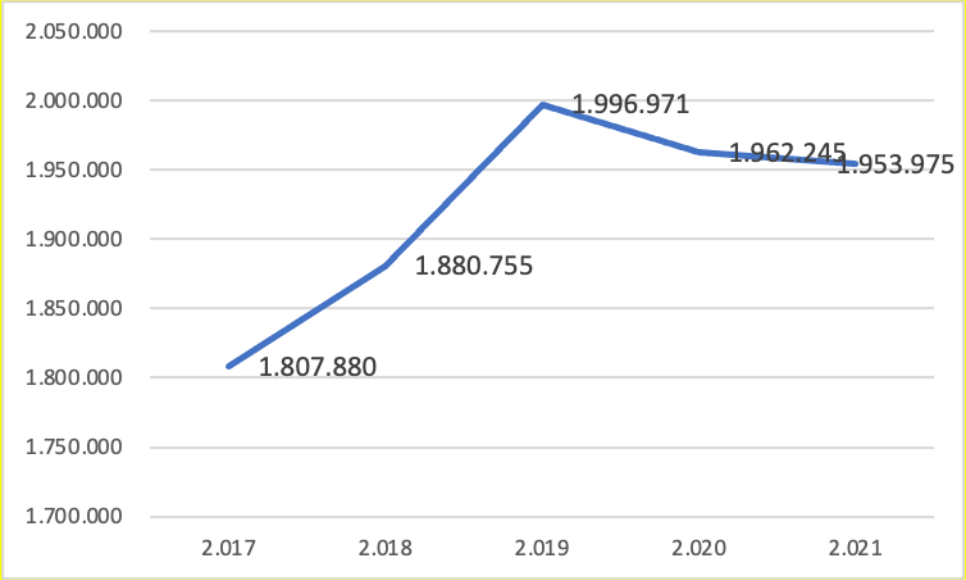

Sumber: Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir terbaik pada tahun 2019. Jika dilihat lebih dalam, terdapat komponen pendapatan yang nilainya naik dan ada juga yang nilainya menurun.

PAD mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 3% pertahun dari tahun 2017 sebesar Rp. 214 miliar, turun cukup signifikan menjadi Rp. 157 miliar di tahun 2018 dan kembali naik menjadi Rp. 226 miliar ditahun 2021. Pendapatan transfer stabil dengan rata-rata kenaikan sebesar 1% pertahun dari Rp. 1,593 miliar di tahun 2017 menjadi Rp 1,639 miliar di tahun 2021. Sedangkan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah tercatat naik dengan rata-rata pertumbuhan 8% pertahun dari Rp. 71 miliar ditahun 2018, meningkat hingga Rp 88 miliar di tahun 2021.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak daerah

   Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pajak yang dipungut sebagai sumber pendapatan asli daerah kabupaten meliputi: PBB-P2, BPHTB, PBJT (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Tenaga Listrik), Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

2) Retribusi Daerah

   Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungak Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jenis Retribusi terdiri atas:

   a. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
      - Pelayanan Kesehatan;
      - Pelayanan Kebersihan;
      - Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
      - Pelayanan Pasar; dan
      - Pengendalian Lalu Lintas

   b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
      - Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
      - Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
      - Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
      - Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
      - Pelayanan jasa kepelabuhanan;
      - Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga;
      - Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :

- Persetujuan Bangunan Gedung;
- Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Pengelolaan Pertambangan Rakyat

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden BUMD Kabupaten Indragiri Hilir di lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya yaitu Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD, dll.

Gambar III.2
Trend Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

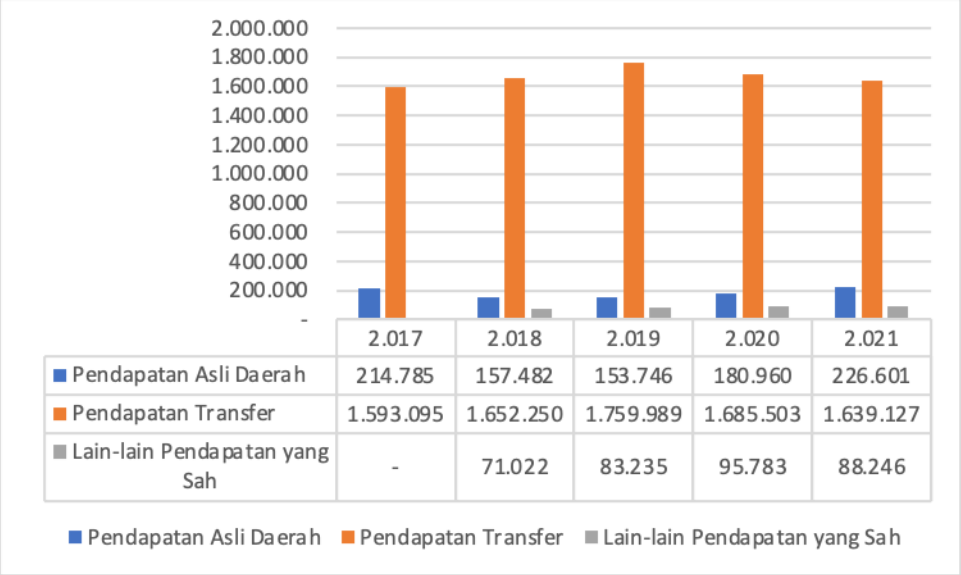

	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
Pendapatan Asli Daerah	214.785	157.482	153.746	180.960	226.601
Pendapatan Transfer	1.593.095	1.652.250	1.759.989	1.685.503	1.639.127
Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	71.022	83.235	95.783	88.246

Sumber: Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2022(diolah)

Sumber pendapatan terbesar pada struktur pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir berasal dari pendapatan transfer, disusul PAD dari pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah,

kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada kurun waktu 2017-2021, PAD konsisten naik dengan rata-rata pertumbuhan 3% dengan optimalisasi tertinggi pada sektor lain-lain PAD yang sah. Pembatasan kegiatan perekonomian, pelayanan umum dan pelayanan usaha serta adanya stimulus pengurangan pajak/retribusi menjadi beberapa alasan turunnya PAD di tahun 2018 dan 2019. Kondisi ini dapat dicapai dengan adanya penataan pengelolaan keuangan yang baik dan didukung oleh kebijakan yang kuat dari Kepala Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	**PENDAPATAN**	**1.807.880**	**1.880.755**	**1.996.971**	**1.962.245**	**1.953.975**	**2%**
01.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**214.785**	**157.482**	**153.746**	**180.960**	**226.601**	**3%**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	27.550	32.646	35.514	55.499	44.025	16%
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	3.742	6.853	6.437	2.991	5.360	26%
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.522	13.564	10.363	9.950	16.789	15%
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	171.972	104.419	101.432	112.519	160.428	3%
01.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.593.095**	**1.652.250**	**1.759.989**	**1.685.503**	**1.639.127**	**1%**
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.439.251	1.510.237	1.662.049	1.599.047	1.531.837	2%
01.02.02	Transfer Pemerintah Provinsi	153.845	142.014	97.940	86.455	107.290	-7%
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**-**	**71.022**	**83.235**	**95.783**	**88.246**	**8%**
01.03.01	Pendapatan Hibah	-	71.022	83.235	95.783	87.827	8%
01.03.02	Pendatan Dana Darut	-	-	-	-	-	
01.03.03	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	419	

Sumber: Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 5 tahun mengalami fluktuasi yang stabil namun belum maksimal, sehingga kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan agar capaian rata-rata pertumbuhan dapat direalisasikan dengan baik dan maksimal.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. Urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2017-2021 realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata menurun mencapai -1% per tahun dari Rp. 2 miliar pada tahun 2017, turun menjadi Rp. 1,8 miliar di tahun 2018, naik pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,9 miliar dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi Rp. 1,8 miliar.

Fluktuasi belanja tersebut seirama dengan fluktuasi pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar III.3
Realisasi Belanja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

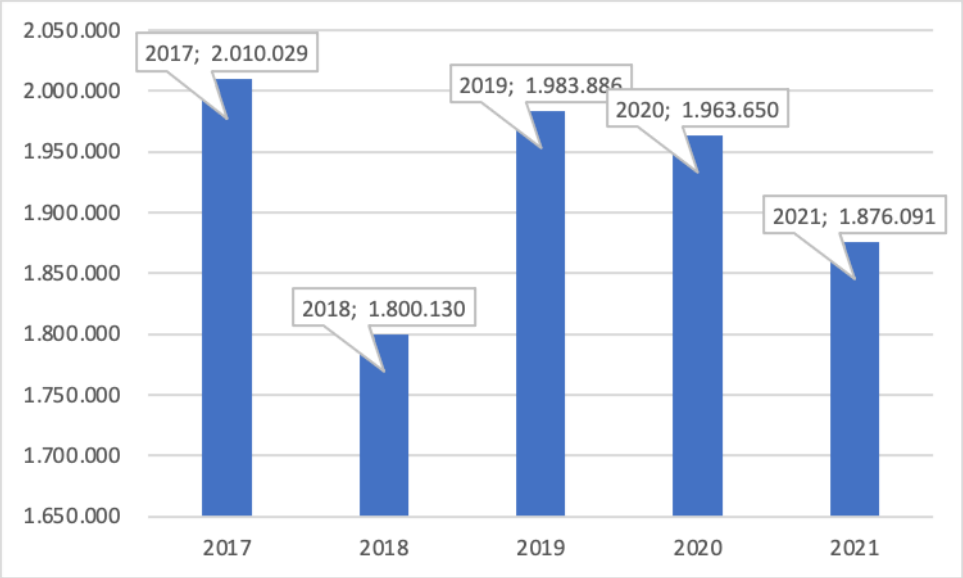

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah

Dari gambar dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Belanja Daerah menunjukkan kinerja berfluktuatif dan cenderung stagnan dengan pertumbuhan -1%. Hal ini sangat kuat dipengaruhi oleh serapan belanja yang ada pada masing-masing OPD.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja

tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Fluktuasi belanja operasi sangat dipengaruhi oleh adanya belanja subsidi pada tahun 2020. Untuk belanja pegawai stagnan, hanya mengalami kenaikan 0% pertahun dari Rp. 775 miliar di tahun 2017, turun meskipun tidak signifikan pada tahun 2018 menjadi Rp. 773 miliar dan stagnan sampai tahun 2021 sebesar Rp. 764 miliar.

Sedangkan belanja hibah yang tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 95 miliar rupiah dan turun pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 42 miliar. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang pada tahun 2017-2021 mengalami rata-rata kenaikan sebesar -12%.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	**Belanja**	**2.010.029**	**1.800.130**	**1.983.886**	**1.963.650**	**1.876.091**	**-1%**
02.01	**Belanja Operasi**	**1.652.128**	**1.582.237**	**1.719.905**	**1.672.273**	**1.408.987**	**-4%**
02.01.01	Belanja pegawai	775.611	773.531	805.680	772.661	764.273	0%
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	501.349	483.453	569.823	535.532	597.142	5%
02.01.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
02.01.04	Belanja Subsidi	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	13%
02.01.05	Belanja Hibah	95.115	65.332	44.716	56.176	42.848	-15%
02.01.06	Belanja Biaya Provisi	-	-	-	-	-	
02.01.07	Belanja Bantuan Sosial	300	566	807	1.013	2.723	81%
02.01.08	Belanja Bantuan Keuangan	277.752	257.355	296.879	302.889	-	-22%
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	
02.02	**Belanja Modal**	**353.140**	**213.660**	**257.568**	**264.520**	**182.879**	**-12%**
02.02.01	Belanja Modal Tanah	367	-	-	89	5	-97%
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.908	44.753	61.310	123.885	58.950	12%
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.514	67.472	68.290	80.173	66.496	0%

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
02.02.04	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	191.737	81.315	99.301	51.429	51.768	-21%
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.613	106	14	5.118	5.661	9071%
02.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	20.014	28.653	3.826	-	-48%
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	
02.03	**Belanja Tak Terduga**	**214**	**96**	**-**	**21.952**	**486**	**-77%**
02.03.01	Belanja Tak Terduga	214	96	-	21.952	486	-84%
02.04	**Transfer**	**4.548**	**4.137**	**6.413**	**4.905**	**283.738**	**1427%**
02.04.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.548	4.137	6.413	4.905	283.738	1427%
02.04.02	Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa	3.174	3.381	4.074	4.393	4.342	8%
02.04.03	Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa	1.374	756	1.242	512	411	-15%
02.04.04	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	278.985	
02.04.05	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	1.097	-	-	

Sumber: *BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*

3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman dan dari hasil divestasi. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun waktu tahun 2017-2021 hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5
Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
03.01	**Penerimaan Pembiayaan**	**217.943**	**5.059**	**80.466**	**97.165**	**116.210**	**358%**
	Penggunaan SILPA	**215.943**	**3.059**	**80.466**	**95.165**	**114.398**	**618%**
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	**2.000**	**2.000**	-	**2.000**	**1.812**	**-36%**
		-	-	-	-	-	
03.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.000**	**5.225**	**10.425**	**3.700**	-	**-15%**
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	**5.000**	**5.225**	**10.425**	**3.700**	-	**-15%**
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	

Sumber: *BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dapat memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Indragiri Hilir berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada Tabel berikut ini,

Tabel III.6
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021
(Juta Rupiah)

No	Uraian	Ref	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
1	**ASET**							
2	**ASET LANCAR**							
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	2.831	77.778	83.292	101.467	164.527	685%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1	574	421	626	31	177	100%
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1	72	-	-	5	-	-100%
6	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.1	3.172	1.431	9.998	10.859	49.531	227%
7	Kas di Bendahara Kapitasi JKN FKTP	5.3.1.1.1	3.434	-	1	12	17	466%
8	Setara Kas Lainnya	5.3.1.1.1	3.203	1.635	3.809	1.889	763	-7%
9	Kas di Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1	157	-	-	-	-	-100%
10	Investasi Jangka Pendek		-	-	2.179	182	0	-96%
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	71.804	81.001	92.030	125.816	129.533	17%
12	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.3	(30.937)	(39.740)	-	-	-	-36%
13	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.4	11.537	11.529	11.595	11.595	11.916	1%
14	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.5	(3.653)	(11.518)	-	-	-	58%
15	Penyisihan Piutang		-	-	(65.245)	(98.342)	(113.007)	33%
16	Penyisihan Piutang Dana Bergulir		-	-	-	-	-	
17	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	0	0	-	-50%
18	Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.3.1.1.6	16.822	16.426	22.655	17.215	16.878	2%
19	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.7	(84)	(82)	-	-	-	-51%
20	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.3.1.1.8	16.541	-	-	-	-	-100%
21	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.3.1.1.9	(83)	-	-	-	-	-100%
22	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	5.3.1.1.10	12.180	1.516	-	6.345	10.911	-39%
23	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.11	(61)	(8)	-	-	-	-94%
24	Piutang Pendapatan Lainnya	5.3.1.1.12	54	54	54	54	-	-25%

No	Uraian	Ref	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
25	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	5.3.1.1.13	(48)	(48)	-	-	-	-50%
26	Belanja Dibayar Dimuka		-	-	-	-	-	
27	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-	-	-	
28	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-	-	-	
29	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat		-	-	-	-	-	
30	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-	-	
31	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-	-	-	-	
32	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	-	-	-	-	
33	Piutang Lainnya		-	-	-	-	-	
34	Penyisihan PiutangLainnya		-	-	-	-	-	
35	Uang Muka	5.3.1.1.14	22	22	-	-	57	-50%
36	Beban Dibayar dimuka	5.3.1.1.15	338	170	201	51	64	-20%
37	Persediaan	5.3.1.1.16	41.578	48.452	54.463	55.092	35.137	-2%
38	**Jumlah Aset Lancar**		149.453	189.040	215.658	232.271	306.503	20%
39			-	-	-	-	-	
40	**INVESTASI JANGKA PANJANG**		-	-	-	-	-	
41	Investasi Non Permanen		-	-	-	-	-	
42	Pinjaman Jangka Panjang		-	-	-	-	-	
43	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-	-	-	-	
44	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-	-	-	-	
45	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1	14.440	12.442	12.450	10.440	448	-31%
46	Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	5.3.1.2.2	(1.244)	(6.980)	(6.980)	(7.815)	-	93%
47	**Jumlah Investasi Non Permanen**		13.196	5.462	5.471	2.625	448	-48%
48	Investasi Permanen		-	-	-	-	-	
49	Penyertaan Modal Pemda	5.3.1.2.3	106.697	111.922	122.399	125.897	125.987	4%
50	Investasi Permanen Lainnya		-	-	-	-	-	

No	Uraian	Ref	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
51	**Jumlah Investasi Permanen**		106.697	111.922	122.399	125.897	125.987	4%
52	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**		119.893	117.384	127.869	128.522	126.434	1%
53			-	-	-	-	-	
54	**ASET TETAP**		-	-	-	-	-	
55	Tanah	5.3.1.3.1	483.316	633.754	592.837	584.880	535.883	4%
56	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	540.795	589.975	675.654	788.591	850.147	12%
57	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.183.561	1.225.143	1.314.310	1.372.341	1.582.064	8%
58	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	2.265.536	2.320.778	2.417.978	2.487.135	2.614.246	4%
59	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	18.697	18.184	13.217	12.647	13.114	-8%
60	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	522.039	553.457	546.862	577.030	410.473	-5%
61	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.629.524)	(1.844.225)	(2.056.688)	(2.314.142)	(2.651.394)	13%
62	**Jumlah Aset Tetap**		-	3.497.067	3.504.169	3.508.482	3.354.534	-1%
63			3.384.420	-	-	-	-	-100%
64	**DANA CADANGAN**		-	-	-	-	-	
65	Dana Cadangan		-	-	-	-	-	
66	**Jumlah Dana Cadangan**		-	-	-	-	-	
67			-	-	-	-	-	
68	**ASET LAINNYA**		-	-	-	-	-	
69	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.4.1	1.471	1.446	1.446	1.107	1.107	-6%
70	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.4.2	1.237	1.946	1.840	1.720	1.751	12%
71	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.3	13.202	13.820	13.820	14.006	14.006	2%
72	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.4	2.098	2.675	3.044	3.044	3.093	11%
73	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.5	(1.537)	(1.284)	(1.719)	(2.130)	(2.377)	13%
74	Aset Lain-Lain	5.3.1.4.6	153.971	153.947	142.859	142.170	72.691	-14%
75	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.7	(89.934)	(90.036)	(89.827)	(89.707)	-	-25%
76	**Jumlah Aset Lainnya**		80.507	82.514	71.463	70.209	90.272	4%
77			-	-	-	-	-	

No	Uraian	Ref	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
78	**JUMLAH ASET**		3.734.274	3.886.005	3.919.159	3.939.484	3.877.743	1%
79			-	-	-	-	-	
80	**KEWAJIBAN**		-	-	-	-	-	
81	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		-	-	-	-	-	
82	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	2.649	807	66	20	34	-41%
83	Utang Bunga		-	-	-	-	-	
84	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-	-	-	-	
85	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	3.529	7.421	13.298	80	175	52%
86	Utang Belanja	5.3.2.1.3	63.348	52.087	92.298	19.408	62.929	51%
87	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	27.459	1.519	2.361	5.733	1.696	8%
88	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		96.986	61.834	108.024	25.241	64.833	30%
89			-	-	-	-	-	
90	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		-	-	-	-	-	
91	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-	-	-	-	
92	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-	-	-	
93	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-	-	-	-	
94	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-	-	-	-	
95	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-	-	-	-	
96	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		-	-	-	-	-	
97	**Jumlah Kewajiban**		96.986	61.834	-	25.241	64.833	7%
98			-	-	-	-	-	
99	**EKUITAS**		-	-	-	-	-	
100	Ekuitas	5.3.3	3.637.288	3.824.171	3.811.135	3.914.244	3.812.910	1%
101	**Jumlah Ekuitas**		3.637.288	3.824.171	3.811.135	3.914.244	3.812.910	1%
102			-	-	-	-	-	
103	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**		3.734.274	3.886.005	3.919.159	3.939.484	3.877.743	1%

Sumber: *BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)*

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2017-2021 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solavabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur menggunakan rasio lancar dan rasio *quick.* Rasio lancar yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Rasio ini dapat digunakan untuk menunjukan efisiensi siklus operasi. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017-2021 fluktiatif setiap tahun dengan rata-rata rasio antara 0,11 sampai dengan 0,65.

Berikut ini terlihat rasio lancar Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan):

Tabel III.7
Rasio Lancar Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Aset Lancar	Hutang Jangka Pendek	Rasio Lancar
1	2017	149.453	96.986	0,65
2	2018	189.040	61.834	0,33
3	2019	215.658	108.024	0,50
4	2020	232.271	25.241	0,11
5	2021	306.503,42	64.833	0,21

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

1. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2017-2021 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 0,00 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 0,03. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2017-2021 fluktiatif dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Indragiri Hilir cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Tabel III.8
Rasio Hutang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2021 (dalam Jutaan)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	96.985,74	61.833,99	0,00	25.240,57	64.833,07
EKUITAS	3.637.287,86	3.824.170,70	3.811.134,85	3.914.243,74	3.812.910,35
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	**0,03**	**0,02**	**0,00**	**0,01**	**0,02**

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

b) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif hingga ditahun 2021 mencapai angka 0,02 Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017 mencapai 0,03 Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah total kewajiban kurun waktu 2017-2021 tidak pernah lebih dari 1% dari total aset yang ada yang terjadi di tahun 2017 sampai dengan 2021. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel III.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
KEWAJIBAN	96.985,74	61.833,99	0,00	25.240,57	64.833,07
AKTIVA	3.734.273,60	3.886.004,69	3.919.158,88	3.939.484,31	3.877.743,42
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	**0,03**	**0,02**	**0,00**	**0,01**	**0,02**

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

2. Rasio Aktivitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan keuntungan.

a) Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2017-2021 tren tetap. Adapun rasio di tahun 2017 tidak dapat terdeteksi karena aktiva tetap pada tahun 2017 tercatat 0, namun rasio pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,05%. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektifitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel III.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021
(dalam Jutaan)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	214.785,34	157.482,35	153.746,22	180.959,69	226.601,41
AKTIVA TETAP	0,00	3.497.066,64	3.504.168,79	3.508.481,84	3.354.533,62
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP		**0,05**	**0,04**	**0,05**	**0,07**

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, semakin tinggi rasionya maka semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2017-2021 relatif tetap. Rasio ditahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mencapai 0,02% sampai dengan 0,06%. Secara keseluruhan dari tahun 2017-2021 rata-rata nilai total aset daerah terbilang cukup masih rendah efektifitasnya dan masih perlu dioptimalkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah kedepannya dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki.

Tabel III.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2017– 2021 (dalam Jutaan)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	214.785,34	157.482,35	153.746,22	180.959,69	226.601,41
TOTAL AKTIVA	3.734.273,60	3.886.004,69	3.919.158,88	3.939.484,31	3.877.743,42
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	**0,02**	**0,02**	**0,04**	**0,02**	**0,06**

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah**.**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2021 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; dan
b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 40% pertahun. Proporsi Belanja untuk pemenuhan

kebutuhan aparatur di tahun 2017 sebesar 38% dari total pengeluaran daerah dan proporsinya stabil sampai dengan tahun 2021 yaitu sebesar 41%.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2017	775.611	2.015.029	38%
2	2018	773.531	1.805.355	43%
3	2019	805.680	1.994.311	40%
4	2020	772.661	1.967.350	39%
5	2021	764.273	1.876.091	41%
Rata-rata		**778.351**	**1.931.627**	40%

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya, analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2017-2021 cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 5% pertahun dari Rp. 1,16 miliar tahun 2017 menjadi Rp. 1,14 miliar ditahun 2021. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh naik dan turunnya belanja transfer dan belanja bantuan sosial. Belanja transfer pos belanja bagi hasil hanya tercatat pada tahun 2021 naik optimal menjadi sebesar Rp. 4.6 miliar. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.13
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2022 (dalam Jutaan)

Uraian	REALISASI					APBD	Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	**1.165.087**	**1.112.378**	**1.173.332**	**1.172.203**	**1.379.808**	**1.143.783**	**5%**
Belanja Operasi	**1.150.778**	**1.098.784**	**1.150.082**	**1.136.741**	**811.845**	**815.852**	**-7%**
Belanja pegawai	775.611	773.531	805.680	772.661	764.273	759.347	0%
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	-	13%
Belanja Hibah	95.115	65.332	44.716	56.176	42.848	54.174	-15%
Belanja Biaya Provisi	-	-	-	-	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	300	566	807	1.013	2.723	2.332	81%
Belanja Bantuan Keuangan	277.752	257.355	296.879	302.889	-	-	-22%
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Belanja Tak Terduga	**214**	**96**	**-**	**21.952**	**486**	**43.000**	**-77%**
Belanja Tak Terduga	214	96	-	21.952	486	43.000	#DIV/0!
Transfer	**9.095**	**8.274**	**12.825**	**9.811**	**567.477**	**284.931**	**1427%**
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.548	4.137	6.412	4.905	283.739	**4.660**	1427%

Uraian	REALISASI					APBD	Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa	3.174	3.381	4.074	4.393	4.342	-	8%
Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa	1.374	756	1.242	512	411	-	-15%
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	278.985	**280.271**	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	1.097	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
Pengeluaran Pembiayaan	**5.000**	**5.225**	**10.425**	**3.700**	-	-	**-15%**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	**5.000**	**5.225**	**10.425**	**3.700**	-	-	**-15%**
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pata tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2017-2021) perkembangan defisit riil anggaran relatif fluktuatif namun mempunyai tren positif. Defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2017 sebesar minus Rp 207 miliar dan pada tahun 2020 sebesar minus Rp . 5,1 miliar. Adapun 2018, 2019 dengan 2021 terjadi surplus rill anggaran dengan nilai sebesar Rp 77 miliar pada tahun 2021.

Tabel III.14
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Realisasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	**Realisasi Pendapatan Daerah**	1.807.880	1.880.755	1.996.971	1.962.245	1.953.975
	Dikurangi realisasi	-				
2	**Belanja Daerah**	2.010.029	1.800.130	1.983.886	1.963.650	1.876.091
3	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	5.000	5.225	10.425	3.700	0
	Defisit riil	**-207.148,55**	**75.400,14**	**2.659,33**	**-5.104,83**	**77.884,18**

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Tabel III.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	215.943	3.059	80.466	95.165	114.398
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasilpenjulan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	2.000	2.000	-	2.000	1.812
Total Komposisi Penutup Defisit	**217.943**	**5.059**	**80.466**	**97.165**	**116.210**

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Tabel III.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Persen)

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	99,08%	60,46%	100,00%	97,94%	98,44%
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasilpenjulan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	0,92%	39,54%	0,00%	2,06%	1,56%

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2017-2021 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau akibat Lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel III.17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan)

Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	**217.943**	99,08%	**5.059**	60,46%	**80.466**	**100%**	**97.165**	97,94%	**116.210**	98,44%
Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPD hingga tahun 2026. Dalam konteks pandemi global Covid-19, ruang fiskal pada periode RPD kemungkinan besar akan menyempit seiring penerimaan dana transfer kedepan yang kemungkinan semakin berkurang. Oleh karena itu, penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih efektif dan efisien terkait pemulihan ekonomi dampak Covid-19 maupun untuk prioritas lainnya.

Pada bagian kerangka pendaaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2023 hingga 2026.

Secara umum, arah kebijakan perekonomian Indragiri Hilir tahun 2023-2026 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2023-2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Percepatan penanganan Covid-19 masih menjadi prioritas belanja daerah yang diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk masuk kembali ke dunia usaha. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan
2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Indragiri Hilir. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan

infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama terkait pemulihan pasca Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 hingga 2021 (APBD) yang disesuaikan dengan dengan mempertimbangkan target-target keuangan dalam perubahan tahun 2022 dan RAPBD Tahun 2023.

Penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2026 dilakukan dengan memerhatikan asumsi dasar ekonomi makro yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN dan APBD Provinsi Riau. Kondisi perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2023-2026 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Riau dan Nasional.

a. Proyeksi Pendapatan

Dalam mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan, dilakukan redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang berbasis kinerja. Disamping itu, dalam rangka akselerasi pembangunan, daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal. Dalam pilar pertama ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendorong creative and sustainable financing berbasis kerjasama melalui skema Sinergi Pendanaan. Pilar kedua merupakan penguatan local taxing power dengan tetap menjaga perekonomian dan kemudahan berusaha di daerah dengan cara menurunkan administration dan compliance cost, memperluas basis pajak, dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lain. Untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel, dalam pilar ketiga ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, meningkatkan kualitas pengalokasian belanja daerah, dan meningkatkan kualitas SDM dan pengawasan internal. Dalam pilar keempat, yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional, dilakukan dengan cara penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD, Pengendalian dalam kondisi darurat, dan sinergi bagan akun standar. Keuangan negara merupakan konsolidasi antara APBN dan APBD, sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang dapat melakukan konsolidasi keuangan Pusat dan Daerah dan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dengan membangun sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal nasional berbasis interkoneksi dan interoperabilitas.

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2020). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan

dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Dengan melihat bahwa kondisi keuangan lokal secara umum ditahun 2022 diproyeksikan mulai membaik maka beberapa komponen PAD yang ditahun 2020 mangalami penurunan yaitu Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, maka ditahun 2022 dua komponen ini ditargetkan nilainya membaik seperti realisasi tahun 2021. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan naik mengingat pandemi Covid-19 sudah dalam tahap *recovery*. Adapun proyeksi secara umum menggunakan tahun dasar realisasi APBD 2021.

Komponen pendapatan daerah pada tahun 2024-2026 ditargetkan naik pertahun sampai dengan tahun 2026 yang didongkrak oleh peningkatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Masing-masing pendapatan akan ditargetkan naik khususnya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebesar 2% sampai dengan 15%, dimana total pendapatan asli daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 200 miliar dan akan terus naik sampai dengan tahun 2026 menjadi Rp. 255 miliar. Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomi sehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana transfer yang akan disalurkan ke daerah. Di samping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan Ekstensifikasi dan Intensifkasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama

untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib. Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut.

Mengacu pada kinerja perekonomian pusat dan Kabupaten Indragiri Hilir yang dipekirakan belum akan mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023, maka proyeksi pendapatan transfer tahun 2023 diasumsikan tidak jauh dengan tahun 2021. Pada awal tahun 2024 diharapkan target vaksinasi Covid-19 khususnya vaksin Booster terpenuhi sehingga telah tercapai *herd immunity*. Kondisi tersebut diasumsikan akan berdampak positif pada kinerja perekonomian. Oleh karena itu, pada tahun 2024 sampai dengan 2026, pendapatan transfer diproyeksi naik perkomponen. Angka tersebut cukup realistis mengingat LPE Provinsi dan LPE Nasional telah ditargetkan secara normal. Meskipun demikian, proyeksi pendapatan transfer belum berani dipasang angka di atasnya karena karakteristik pandemi yang penuh ketidakpastian.

Skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

1) Dana Perimbangan;
2) Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan nilainya naik dari tahun 2021 menjadi 1,2 miliar pada tahun 2024 dan ditargetkan rata-rata kenaikan sebesar 0,26% pada tahun 2026.

Adapun Lain-lain pendapatan yang sah juga ditargetkan naik sebesar 5,44% dari angka dasar tahun 2021, namun angkanya masih dalam proses perumusan. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.18
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026
(dalam jutaan)

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
1	**PENDAPATAN**	**1.640.306**	**1.663.002**	**1.685.361**
01.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**203.594**	**250.730**	**265.941**
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	50.105	84.990	89.270
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	3.406	3.481	3.586
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16.661	16.661	16.661
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.422	145.598	156.424
01.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.436.711**	**1.412.273**	**1.419.420**
01.02.01	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**1.335.162**	**1.340.943**	**1.345.590**
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**1.166.604**	**1.172.385**	**1.177.033**
1.2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak	75.425	78.179	79.742
1.2.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	205.321	208.348	211.432
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	885.858	885.858	885.858
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-
1.2.1.3	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	168.558	168.558	168.558
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-
1.2.1.3	**Dana Desa**	168.558	168.558	168.558
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	101.549	71.330	73.830
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
	Pendapatan Bantuan Keuangan	-	-	-
01.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	-	-	-
01.03.01	**Pendapatan Hibah**	-	-	-
01.03.02	**Pendatan Dana Darurat**	-	-	-
01.03.03	**Pendapatan Lainnya**	-	-	-

Sumber: Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Seperti yang terlihat pada tabel III.17 di atas, Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain sebagai berikut:

a. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
b. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat ;
c. Pemberian *Reward* dan *Punishment* ;
d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
e. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
f. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
g. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi.
h. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
i. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
j. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
k. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
l. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya; dan

m. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah;

b. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada periode ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan menggunakan prinsip *money follow program* dalam mengalokasikan pagu indikatif belanja langsung OPD yang artinya program dan kegiatan strategis menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran terlebih dahulu.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja

langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui :

1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
3) Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat;
4) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
5) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
   a) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD; dan
   b) Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
6) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Indragiri Hilir,

termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Anggaran belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi sesuai dengan tuntutan regulasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun Anggaran 2024 anggaran belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir diproyeksikan sebesar Rp 1,690 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.1,152 miliar, belanja modal sebesar Rp 218 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp.30 miliar. Pada Tahun Anggaran 2026 anggaran belanja daerah Kabupaten Indragiri Hilir diproyeksikan mengalami sedikit kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya mengikuti proyeksi pendapatan dengan hitungan pesimis dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,88% di mana pada tahun 2026 belanja operasi menjadi sebesar Rp 1,182 miliar, belanja modal sebesar Rp 227 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp.20 miliar. Sehingga proyeksi total belanja pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1,735 Miliar. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.19
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
2	**Belanja**	1.690.306	1.713.002	1.735.361
02.01	**Belanja Operasi**	1.131.500	1.089.049	1.112.936
02.01.01	Belanja pegawai	750.000	760.000	770.000
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000	312.549	326.436
02.01.03	Belanja Bunga	-	-	-
02.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-
02.01.05	Belanja Hibah	30.000	15.000	15.000
02.01.06	Belanja Biaya Provisi	-	-	-
02.01.07	Belanja Bantuan Sosial	1.500	1.500	1.500
02.01.08	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
		-	-	-
02.02	**Belanja Modal**	218.236	304.310	306.878
02.02.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
02.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000	20.000	15.000
02.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000	65.000	60.000

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
02.02.04	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	117.686	218.700	231.213
02.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500	550	600
02.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50	60	65
		-	-	-
02.03	**Belanja Tak Terduga**	50.000	25.000	20.000
02.03.01	Belanja Tak Terduga	50.000	25.000	20.000
02.04	**Transfer**	290.569	294.643	295.547
02.04.01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-
02.04.02	Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa	5.011	8.499	8.927
02.04.03	Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa	341	348	359
02.04.04	Belanja Bantuan Keuangan	285.218	285.796	286.261
02.04.05	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Sedangkan arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2024-2026, meliputi:

1) Pemulihan *pasca Covid-19* berikut dampak sosialnya;
2) Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah;
3) Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS;
4) Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran;
5) Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan;
6) Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan; dan
7) Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen

belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Penggunaan belanja operasi dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Prioritas I digunakan untuk memenuhi belanja wajib mengikat, di antaranya belanja pegawai, belanja rutin Perangkat Daerah seperti tagihan listrik, telepon, air dan internet. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi komponen Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik ± 2,00% pertahun. Penekanan kenaikan belanja pegawai sebesar 2,00% bertujuan untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai. Prioritas II meliputi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program-program unggulan Bupati. Prioritas III digunakan untuk membiayai program-program urusan di luar prioritas I dan II. Selain itu, pada tahun 2024 perlu diprioritaskan belanja operasi untuk dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, di antaranya pengembangan kawasan pariwisata percepatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah dan pelayanan publik yang bersifat dasar.

Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu mengalokasikan Belanja Tak Terduga sebagai antisipasi perkembangan pandemi *Covid-19 varian Delta dan Omicron* yang diperkirakan masih berlangsung. Belanja transfer masih diprioritaskan untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Setelah itu, belanja transfer digunakan untuk mewujudkan infrastruktur desa yang tidak menjadi kewenangan kabupaten. Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel III.20
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (Juta Rupiah)

Uraian	Proyeksi		
	2024	2025	2026
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	**1.102.070**	**1.096.143**	**1.102.047**
Belanja Operasi	**761.500**	**756.500**	**766.500**
Belanja pegawai	730.000	740.000	750.000
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	30.000	15.000	15.000
Belanja Biaya Provisi	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	1.500	1.500	1.500
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Belanja Tak Terduga	**50.000**	**25.000**	**20.000**
Belanja Tak Terduga	50.000	25.000	20.000
Transfer	**290.569**	**294.643**	**295.547**
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-
Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa	5.011	8.499	8.927
Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa	341	348	359
Belanja Bantuan Keuangan	285.218	285.796	286.261
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**	**-**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

c. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

Sedangkan arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp. 50 miliar dan direncanakan berasal dari pelampauan pendapatan daerah dan penghematan belanja daerah tahun sebelumnya.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

a. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito;
b. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD;
c. Pada anggaran Tahun 2023 perlu dipersiapkan dana cadangan untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.21
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026
(Juta Rupiah)

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
03.01	**Penerimaan Pembiayaan**	50.000	50.000	50.000
	Penggunaan SILPA	50.000	50.000	50.000
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-
03.02	**Pengeluaran Pembiayaan**	-	-	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2024 hingga 2026 diproyeksi dengan tren relatif meningkat namun landai. Untuk itu prioritas belanja harus diefektifkan. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.22
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.640.306	1.663.002	1.685.361
2	Penerimaan Pembiayaan	50.000	50.000	50.000
	TOTAL PENERIMAAN	**1.690.306**	**1.713.002**	**1.735.361**
	(***Dikurangi***):			
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.102.070	1.096.143	1.102.047
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**588.236**	**616.859**	**633.314**

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/ subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel III.23
Proyeksi Kapasitas Pagu OPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.640.306	1.663.002	1.685.361
2	Penerimaan Pembiayaan	50.000	50.000	50.000
	Kapasitas Riil Pagu OPD	1.690.306	1.713.002	1.735.361

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Tabel III.24
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**588.236**	**616.859**	**633.314**
	Prioritas I	392.855	411.971	422.961
	Prioritas II	195.381	204.888	210.353

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

BAB IV

PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2024-2026 ini merupakan tindak lanjut dari pembangunan daerah sebelumnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Indragiri Hilir pada akhir tahun 2026 nanti. Berbagai capaian telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga tidak dapat dipungkiri pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif pada pencapaian visi dan misi Provinsi Riau maupun Nasional. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang menyertai sehingga perlu adanya antisipasi dan penyelesaian secara terintegratif pada kebijakan pembangunan, khususnya dalam meredam berkembangnya permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis yang berkembang bersifat dinamis, khususnya berbagai fenomena yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi capaian pembangunan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan ke depan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024-2026, permasalahan dan isu strategis difokuskan kepada kondisi terkini dan telaah terhadap isu strategis internasional, nasional dan regional.

Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Proses identifikasi dan analisa permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional maupun internasional harus ditelaah dan dianalisa untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPD Kabupaten Indragiri Hilir periode pembangunan 2024-2026 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sampai perumusan program prioritas.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika

berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2024-2026, permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kabupaten Indragiri Hilir sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yakni: **"BELUM OPTIMALNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR".**

Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas SDM Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.
2. Belum Optimalnya Kemandirian Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan.
3. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada bagan berikut,

Gambar IV.1
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026

Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan dan antisipasi serta penyelesaiannya, perlu adanya penjabaran dari masalah pokok menjadi masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

1. **Belum Optimalnya Kualitas SDM Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat**

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal

tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur untuk penunjang kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk membantu percepatan realisasi visi pembangunan daerah. Dalam membangun kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Indragiri Hilir masih berupaya untuk meningkatkan berbagai sarana prasarana pembangunan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan wilayah lain, bahkan secara nasional.

Gambar IV.2
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2022

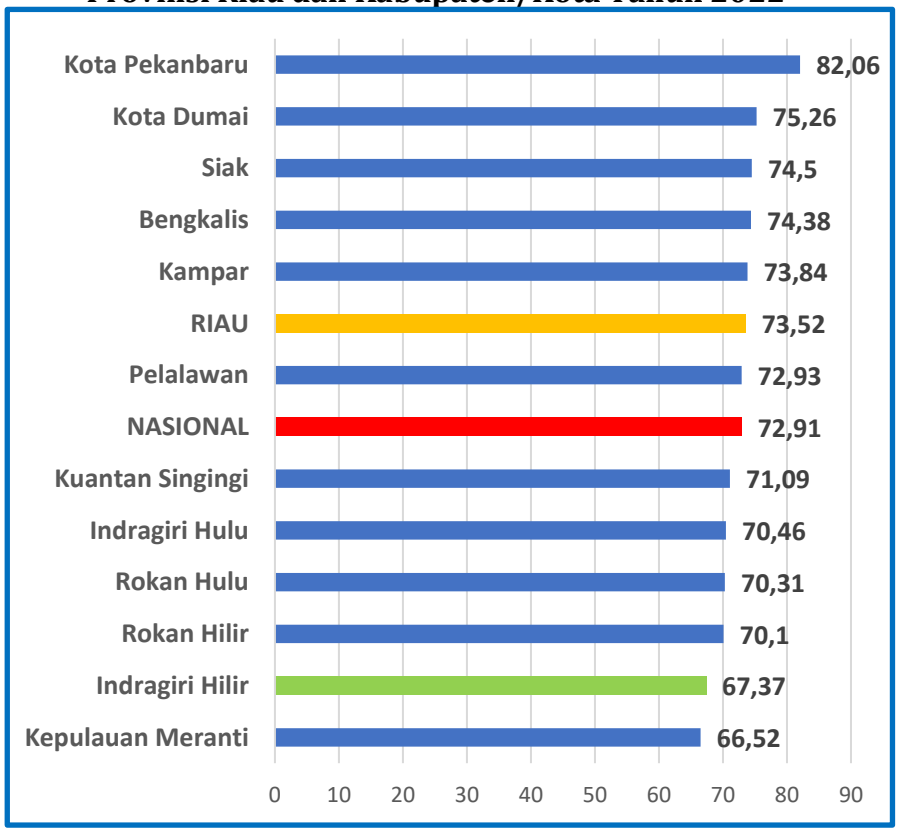

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir terlihat masih berada jauh di bawah angka capaian Provinsi Riau dan Nasional. IPM **Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 67,37** di mana angka ini berada di peringkat kedua terbawah setelah Kabupaten Kepuluauan Meranti (IPM 66,52). Sementara itu,

capaian IPM Provinsi Riau berada di angka 73,52 dengan IPM Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi di angka 82,06 dan capaian Nasional berada di angka 72,91.

Rendahnya capaian IPM Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan hasil dari capaian seluruh komponen penyusun IPM yaitu dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kondisi ekonomi masyarakat. Pada peningkatan mutu pendidikan wilayah, Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk memberikan pelayanan dalam hal sarana pendidikan baik kualitas tenaga pengajar maupun fasilitas fisik pendidikan sekolah. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan seperti sulitnya akses, belum optimalnya pendanaan dan masih terdapat kekurangan yang terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir dibanding wilayah lain.

Hal ini juga terlihat dari capaian indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir yang masih cukup jauh dari harapan. Begitu juga pada capaian rata-rata lama sekolah Indragiri Hilir yaitu selama 7,26 tahun dan harapan lama sekolah Indragiri Hilir selama 12,19 tahun yang merupakan angka terendah di Provinsi Riau.

Tabel IV.1
Rata Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah (tahun)
Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

WILAYAH	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	HARAPAN LAMA SEKOLAH
NASIONAL	**8,69**	**13,10**
RIAU	**9,22**	**13,29**
INDRAGIRI HILIR	**7,26**	**12,19**
Kuantan Singingi	8,76	13,36
Indragiri Hulu	8,4	12,58
Pelalawan	8,72	12,68
Siak	9,87	12,85
Kampar	9,39	13,59
Rokan Hulu	8,55	12,86
Bengkalis	9,71	13,16
Rokan Hilir	8,28	12,83
Kepulauan Meranti	7,88	12,84
Kota Pekanbaru	11,93	15,56
Kota Dumai	10,15	13,32

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Gambar IV.3
Angka Harapan Hidup Nasional dan Provinsi Riau
Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2022

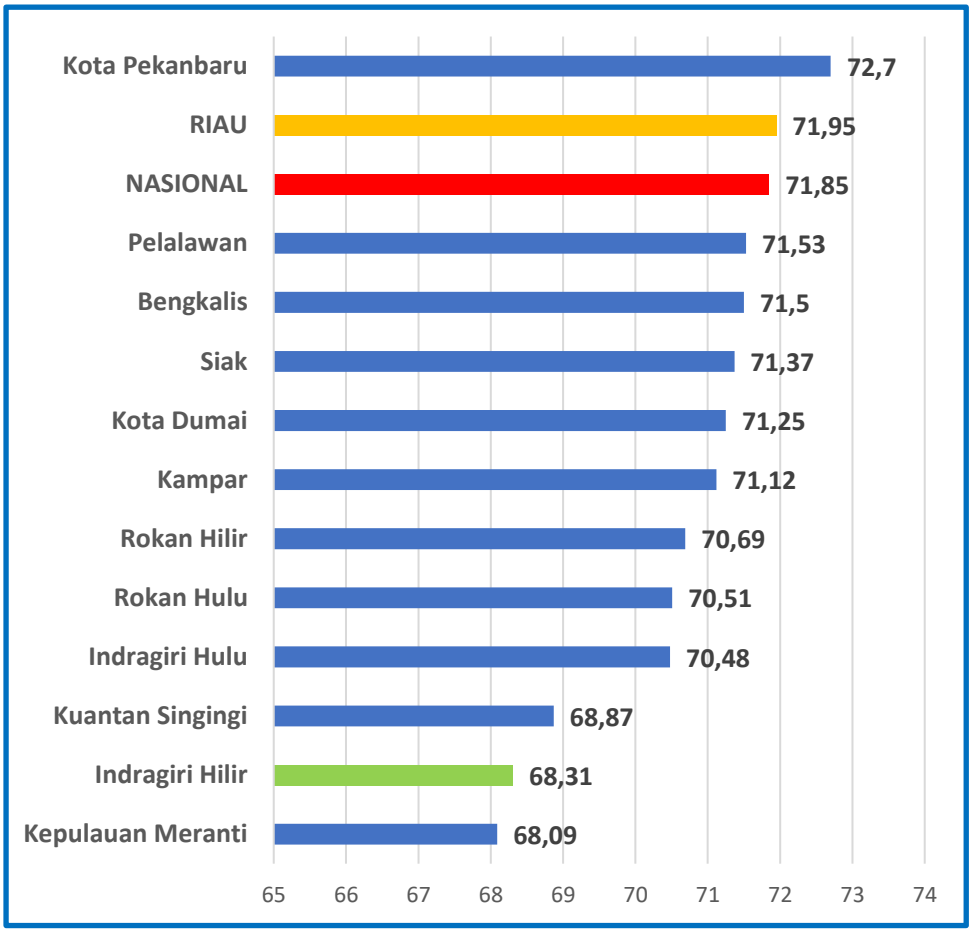

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Permasalahan lain terkait pembangunan sumber daya manusia adalah belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terlihat bahwa capaian **angka harapan hidup Indragiri Hilir (68,31 tahun)** berada di peringkat terendah kedua di Provinsi Riau, dimana Provinsi Riau sendiri memiliki capaian angka harapan hidup sebesar 71,95 tahun yang berada di atas angka Nasional yang mencapai 71,85 tahun.

Selain dari kualitas SDM, dalam melihat permasalahan pembangunan ini juga merujuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu domain utama tujuan pembangunan nasional. Terlihat bahwa capaian angka kemiskinan di

Indragiri Hilir (5,98%) berada di bawah angka Provinsi Riau (6,78%), bahkan angka Nasional yang mencapai 9,54 persen.

Gambar IV.4
Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Riau
Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2022

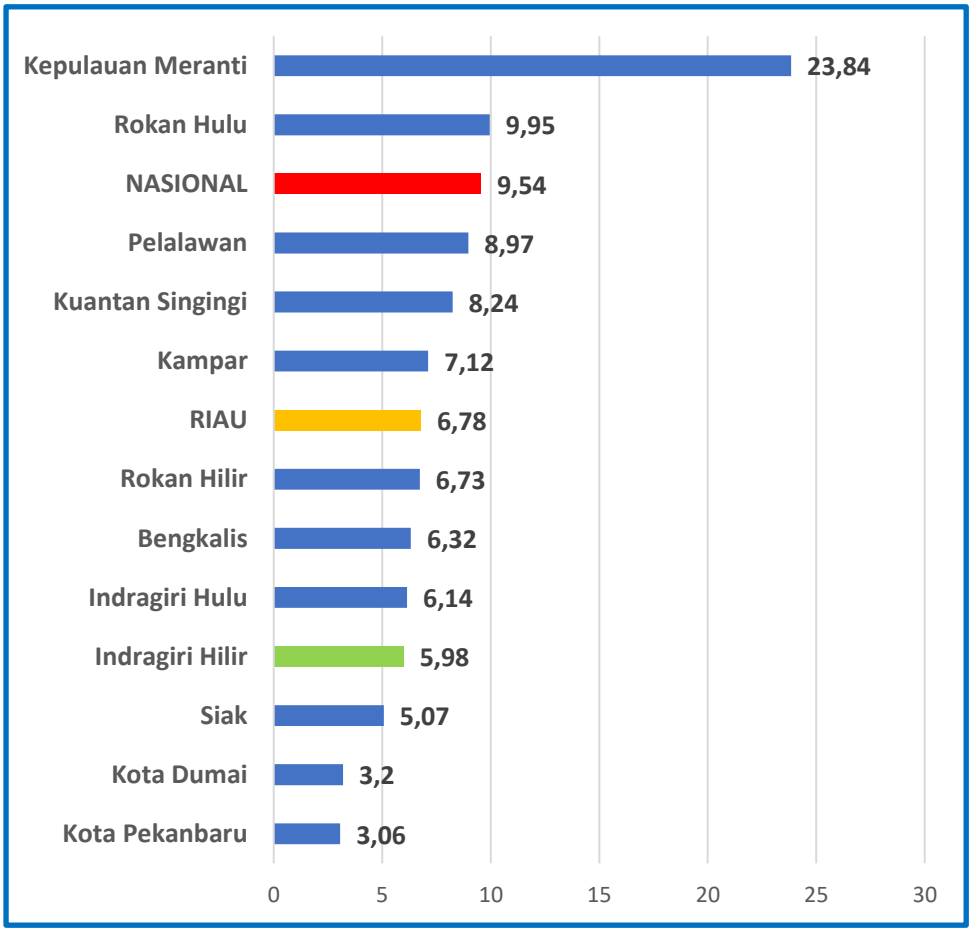

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

2. Belum Optimalnya Kemandirian Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan

Dalam melihat kondisi perekonomian saat ini, penekanan pemerintah daerah untuk membangun perekonomian adalah melalui peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja menjadi perhatian ke depannya mengingat Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan masih dengan kondisi yang belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, berbagai arah kebijakan ditujukan kepada penguatan ketahanan perekonomian maupun pemulihan ekonomi daerah.

Gambar IV.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

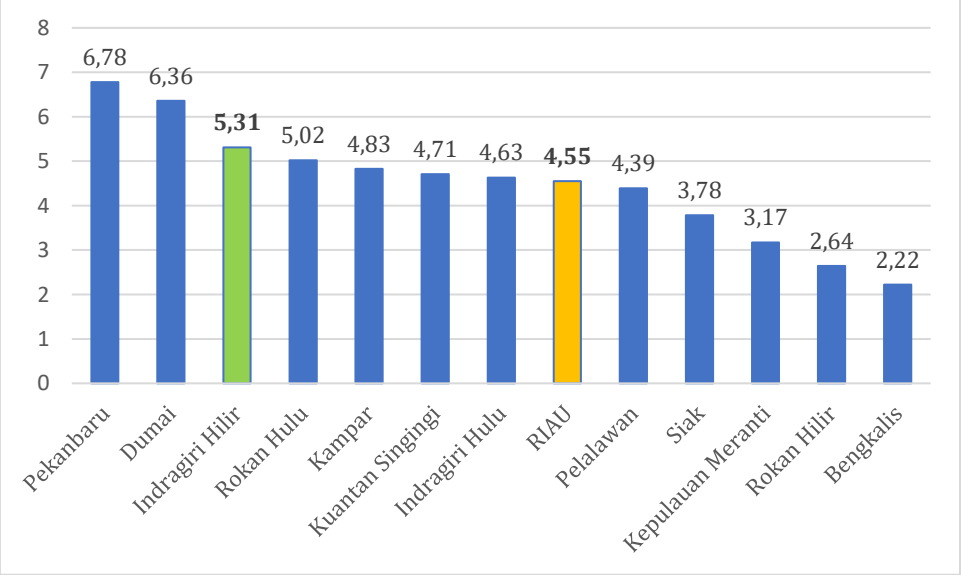

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Pada tahun 2022, Pasca Pandemi COVID-19 telah terjadi selama lebih dari satu tahun dengan penanganan serta pemulihan perekonomian yang telah dilakukan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir; pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Riau semakin membaik. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang seluruhnya bernilai positif. Pertumbuhan ekonomi **Kabupaten Indragiri Hilir mencapai angka 5,31**. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir berada di peringkat ketiga se-Provinsi Riau di bawah Kota Pekanbaru, Kota Dumai.

Gambar IV.6
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

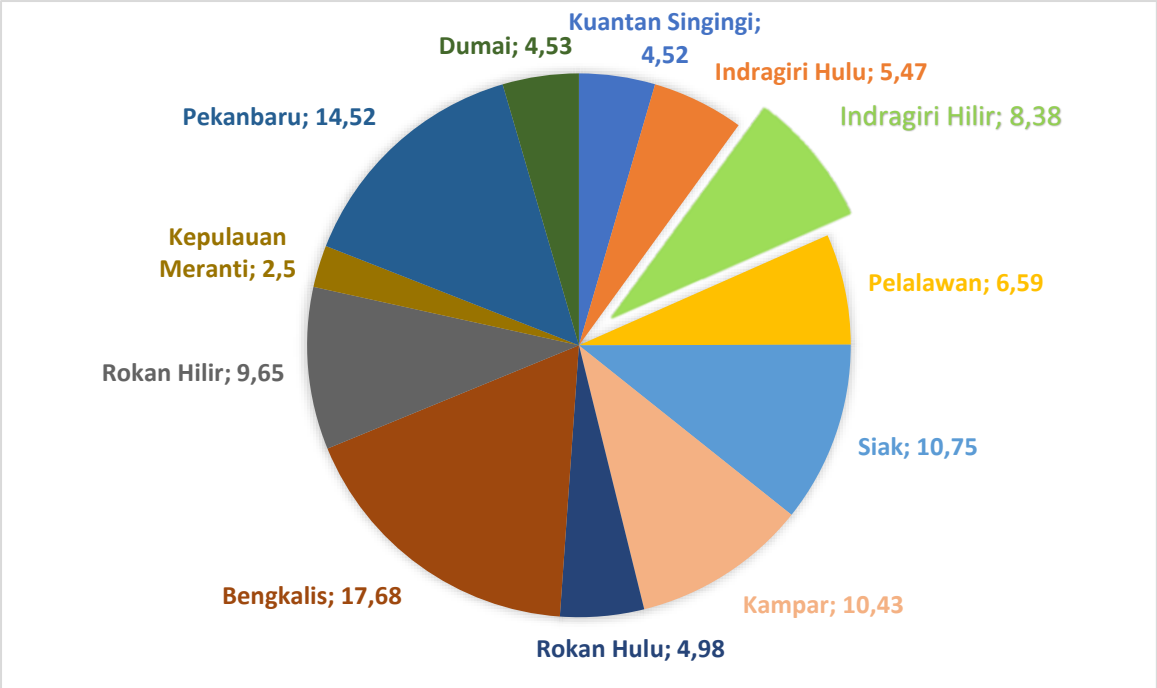

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Sementara itu, kontribusi perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir masih berada di tingkat bawah yaitu sebesar **8,38% terhadap perekonomian Provinsi Riau**. Angka ini berada pada peringkat enam berdasarkan kontribusi daerah terhadap perekonomian Provinsi. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam peningkatan nilai tambah sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengakselerasi capaian perekonomian daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur berperan sebagai penggerak di sektor perekonomian dan akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraamasyarakat.

Salah satu poin utama dalam melihat permasalahan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bagaimana pemerintah daerah menyediakan

aksesibilitas yang bermanfaat khususnya kondisi sarana jalan. Selain sarana konektivitas wilayah, penyediaan sanitasi layak dan air minum layak juga menjadi *concern* pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Terlihat sanitasi di Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik, namun akses masyarakat terhadap air minum layak masih kurang. Beberapa rangkuman permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal yaitu keterbatasan pengelolaan sumberdaya lokal dan belum terintegrasinya dengan kawasan pusat pertumbuhan.
2. Permasalahan aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut dan; telekomunikasi, serta infrastruktur ke wilayah-wilayah terpencil serta akses dan sarana prasarana pariwisata.
3. Permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengan daerah pesisir (banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, erosi, interusi) serta rawan konflik sosial.
4. Adanya konflik Lahan perkebunan kelapa dalam (perkebunan rakyat) dan lahan pemukiman yang masih masuk kawasan hutan.
5. Kebijakan tata ruang yang belum ditetapkan
6. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan ~~a~~ntar wilayah
7. Belum berkembangnya wilayah-wilayah cepat tumbuh. Hal ini disebabkan antara lain:
    a. Keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
    b. Kurangnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah;
    c. Kurangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
    d. Lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasarna diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non

pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;

e. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
f. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta
g. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

3. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga juga menemui kesulitan dalam menentukan target-terget kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi masih perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai.

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja juga

memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas sumber daya manusia (ASN) pemerintah daerah.

Koordinasi antar OPD di Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal disebabkan oleh adanya ego sektoral sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan daerah masih dilaksanakan oleh OPD yang terpisah-pisah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, maupun aset, sehingga menyulitkan tata usaha pelaporan keuangan daerah. Koordinasi antara perangkat daerah dalam sinkronisasi data pencapaian kinerja juga masih kurang. Basis data yang masih belum *reliabel*, sehingga berimplikasi pada kesulitan dalam mengukur capaian pembangunan untuk merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis *baseline* data yang akurat. Salah satu penyebabnya adalah belum memiliki sistem *database* yang handal sehingga segala informasi dan data belum dapat dikolektifkan dalam satu sistem.

Permasalahan yang lebih khusus adalah terkait pengelolaan SAKIP. SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran dan pengklasifikasian kinerja instansi pemerintah. SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2022 memeperoleh nilai 64,10 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berjalan cukup baik namun masih diperlukan keberlanjutan. Hal ini juga dibuktikan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang belum maksimal dengan capaian 63,07 (kategori B).

Terdapat beberapa hal yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 menjadi bukti semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penggunaannya maupun administrasinya.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif tehadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah perubahan *software* klaim JKN BPJS sehingga klaim hanya dapat terlaksana selama 9 bulan yang membuat pelayanan lambat. Kemudian dalam penerapannya masalah rumah layak huni mempunyai permasalahan tenaga teknis (teknik sipil) yang masih kurang, masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dan terbatasnya dokumen perencanaan dan database sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pelayanan yang berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bentuk rendahnya kualitas pelayanan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif serta lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip *good governance*.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan pada periode pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026, maka berbagai poin-poin kebijakan pada pelaksanaan periode pembangunan daerah harus selaras dengan perkembangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada periode pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan permasalahan utama Kabupaten Indragiri Hilir "**Belum Optimalnya Kemandirian Dan Pemerataan Pembangunan**

Masyarakat Indragiri Hilir" akan dirincikan menjadi empat permasalahan pokok dengan penjabaran permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Keterkaitan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Belum optimalnya kualitas SDM guna meningkatkan taraf hidup masyarakat	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada tingkatan rumah sakit, puskesmas sampai ke posyandu.
		Ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan masih terus perlu ditingkatkan
		Masih adanya kasus stunting dibeberapa wilayah kabupaten Indragiri Hilir
		Kurang meratanya penempatan tenaga medis di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sampai ke tingkat desa
	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan	Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan
		Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata
		Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi masih kurang dan penyebarannnya masih belum merata di semua wilayah Kabupaten Indragiri Hilir
		Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti Perpustakaan dan laboratorium masih belum mencukupi
		Implementasi pendidikan anak usia dini belum optimal

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
	Belum cukupnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup layak	Sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha masyarakat baik rumah tangga maupun industry dan sector komersial lainnya
	Belum optimalnya daya saing lapangan usaha di Indragiri Hilir	Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk mengurus perijinan lapangan usaha secara merata
Belum optimalnya kemandirian perekonomian berbasis sektor unggulan	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah	Dukungan pengembangan komoditas dan produk unggulan bagi UMKM, IKM dan koperasi belum optimal
		Pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan komoditas dan produk unggulan belum optimal
		Masih rendahnya pengembangan inovasi dalam pengelolaan produk unggulan
		Pengembangan sistem infomasi dan promosi potensi komoditas dan produk unggulan belum optimal
		Regulasi dan kebijakan untuk kemudahan berinvestasi belum efektif
	Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan	Belum optimalnya kebijakan untuk pemfasilitasian dan pembukaan akses pemasaran
		Belum optimalnya dukungan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
		Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan bagi UKM, IKM dan Koperasi
		Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
	Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup	sampah yang ramah lingkungan dan pengelolaan Limbah
		Masih terdapat bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan akibat penurunan kualitas lingkungan hidup
		Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan belum optimal mendukung pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.
		Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi masih belum mencukupi
		Masih kurangnya pemerataan pembangunan sistem penyediaan air minum
		Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum pada kawasan pemukiman
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah	Kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum optimal
		Belum terinternalisasinya pelaksanaan Reformasi Birorasi di seluruh unit kerja, khususnya dalam membangun budaya kerja
		Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan tertata baik belum optimal
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk pengelolaan keuangan dan asset daaerah
	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu
		Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum merata di semua wilayah
		Belum optimalnya penyederhanaan regulasi untuk peningkatan pelayanan publik

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

4.2.1 ISU STRATEGIS INTERNASIONAL

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir adalah

adanya Pandemi Covid-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona masih satu *family* dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari Tahun 2020, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari 2020 virus Corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah di berbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia. Beberapa dampak yang terjadi akibat Covid-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi.

Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran. Isu strategis Pandemi Covid-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif terhadap perencanaan pembangunan pasca Pandemi Covid-19. Selain isu strategis Pandemi Covid-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir seperti:

A. *Sustainable Development Goals*/SDGs

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut ***Sustainable Development Goals* (SDGs).** Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan

pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya *(Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability, Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;

7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai wilayah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana salah satu upaya adalah mengarusutamakan berbagai tujuan penggunaan lahan apalagi Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Topografi yang ekstrim. Hal ini dikarenakan Tutupan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir telah berkurang lebih karena ekspansi kebun kelapa sawit ke dalam kawasan hutan begitu juga untuk kebutuhan

permukinan. Hal ini tentu saja berdampak pada hilangnya modal alam terutama keanekaragaman hayati, frekuensi bencana banjir dan tanah longsor bertambah serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

B. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed Stated Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia. Adapun kondisi perekonomian Indragiri Hilir juga terkena imbasnya dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,76 persen pada tahun 2020.

C. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya

beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

Sebagai wilayah yang memiliki 58.647 ha (lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh hektar) kawasan hutan lindung, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Upaya penerapan ekonomi ramah lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir akan memberi rasa aman pada generasi selanjutnya sekaligus pada habitat satwa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika penjagaan atas jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah

meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1) Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius;
2) Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan;
3) Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim;
4) Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim; dan
5) Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui *"Katowice Climate Package"* yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada

lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Indonesia diharapkan tidak hanya bertahan sebagai sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, di mana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

4.2.2 ISU STRATEGIS NASIONAL

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

1) Visi, Misi, 5 (Lima) Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
i) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

b) Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c) Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

d) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

e) Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Penyebaran pusat-pusatpertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Pengentasan kemiskinan; dan
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- Moderasi beragama; dan
- Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- Pembangunan Rendah Karbon.

g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Dalam kebijakan nasional ini setidaknya terdapat tiga kebijakan yang memiliki kontribusi cukup signifikan dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yakni transformasi ekonomi, penyederhaaan regulasi dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan pembangunan nasional di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pertama, transformasi ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi minus pada tahun 2020, berpengaruh pada kebijakan percepatan pemulihan ekonomi. Di tahun-tahun selanjutnya, arah kebijakan perekonomian ditransformasikan dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Hal ini diperkirakan akan memengaruhi peta perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir yang selama ini disokong oleh dua sektor terkuat yaitu pertanian dan perdagangan.

Kedua, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Sampai dengan tahun 2024, telah diagendakan penyederhanaan sejumlah aturan melalui UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Terbitnya UU Cipta Kerja di tahun 2020 yang menaungi sejumlah sektor penting seperti ketenagakerjaan, lingkungan dan investasi diperkirakan akan membawa dampak besar bagi tatanan sosial ekonomi masyarakat. Penyederhanaan birokrasi yang diprioritaskan untuk

mempermudah investasi akan berdampak pada pemangkasan birokrasi dan eselonisasi. Hal ini turut berpengaruh pada kondisi kinerja aparatur pemerintahan di daerah.

Ketiga, pembangunan sumberdaya manusia. Produktivitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 174 negara (Human Capital Index, World Bank, 2020), di bawah Vietnam, Malaysia dan Thailand. Padahal, struktur penduduk Indonesia sedang didominasi penduduk usia produktif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin meraih bonus demografi. Beberapa kebijakan nasional yang akan mempengaruhi arah pembangunan daerah diantaranya pengendalian penduduk, pemenuhan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, revolusi mental, pendidikan karakter dan moderasi beragama untuk memperkuat toleransi.

2) Arah Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan wilayah Sumatera pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah nasional diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pada pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di Provinsi Riau yakni pengembangan komoditas unggulan karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya.

4.2.3 ISU STRATEGIS REGIONAL

Perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kondisi kekinian daerah yang memotret berbagai isu-isu strategis yang berkembang di dalam masyarakat dan pembangunan daerah.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaannya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah kabupaten/kota, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya..

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang terjadi di Riau, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yaitu :

"TERWUJUDNYA RIAU YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN UNGGUL DI INDONESIA (RIAU BERSATU)"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Misi Pertama : **Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan kesetaraan gender. Selain itu, untuk mewujudkan sumber daya yang beriman melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

2. Misi Kedua : **Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.**

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui peningkatan pelayanan transportasi, cakupan pelayanan air minum dan sanitasi rumah tangga, cakupan layanan listrik bagi rumah tangga, infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air. Juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau) melalui peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca.

3. Misi Ketiga : **Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.**

   Misi ini diarahkan untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya aing melalui peningkatan kemandirian ekonomi dan penurunan kesenjangan pendapatan, peningkatan investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Misi Keempat : **Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.**

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pemajuan Budaya Melayu melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Melayu Riau. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata melalui peningkatan kunjungan dan kenyamanan wisatawan mancanegara.

5. Misi Kelima : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi.**

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan public melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 ini, tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan ke depan adalah:

a) Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya Saing
b) Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman
c) Meningkatkan kualitas infrastruktur
d) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau)
e) Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing
f) Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu
g) Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata
h) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahu 2005 – 2025

RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir sudah memasuki periode terakhir dari pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, telaahan ini menjadi penting untuk diperhatikan sebagai upaya memastikan setiap visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir sudah terlaksana dengan baik. Berdasarkan kondisi umum Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 yaitu:

"INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025"

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka, adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjanjikan bagi masa depan daerah dan masyarakatnya yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayah jauh lebih berpotensial.

BERJAYA adalah suatu keberhasilan dalam mencapai keadaan yang lebih baik, makmur, adil dan sejahtera sebagai sebuah prestasi disegala bidang, baik secara fisik dan mental spiritual, maupun jasmaniah dan rohaniah melalui ikhtiar dan kerja keras yang dilakukan secara bersama-sama dan seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan Indragiri Hilir dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, nilai kebudayaan Melayu yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, nilai dan norma hukum yang berlaku.

GEMILANG sebagai sebuah kemajuan yang hebat akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis, dan konseptual antara pemerintah dengan seluruh *stakeholders,* yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik yang semakin bekualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunaka ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin daripada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusi pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosial budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin melalui tingkat pendidikan masyarakat terendah dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat kesehatanmasyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang. Disamping indikator-indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu 2005 - 2025, telah ditentukan misi yang merupakan penopang bagi pencapaian visi tersebut. Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan 5 misi pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. **Mewujudkan daya saing daerah**; adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan *(sustainable),* meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. **Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis**; adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menunjang hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.
3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya**; adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas diseluruh wilayah, dan tersedianya pelayanan sosial dan pelayanan dasar lainnya yang bermutu dan menjangkau keseluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.
4. **Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya**; adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang memungkinkan berkembangnya seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintah pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah meIebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni Melayu, maka

harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan teals dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan kebih sejahtera.

5. **Mewujudkan daerah yang memiliki peran pentingpada tingkat regional, nasional dan internasional**; adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan system kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional, nasional dan internasional, sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integritas yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

Tujuan pembangunan jangka panjang periode 2005-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang be~aya dan gemilang sebagai landasan bagi tahapan pembangunan berikutnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4.2.4 ISU STRATEGIS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Indragiri Hilir yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2024-2026. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Indragiri Hilir dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan

Peningkatan Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia sebagai penggerak utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian

yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan baik dalam kaitannya dengan kesetaraan gender serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Selain dari sisi kesehatan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi titik vital dalam upaya pembangunan manusia yang sehat dan kuat. Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi poin penting bagi stakeholder dalam memberikan layanan medis kepada seluruh masyarakat Indragiri Hilir tanpa terkecuali. Aksesibilitas dan konektivitas yang cukup sulit di beberapa wilayah menjadikan hambatan bagi terjangkaunya layanan medis. Kondisi ini yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan cakupan akses dan kualitas layanan terhadap Pendidikan dan Kesehatan.

2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan

Saat ini, pemerintah pusat memiliki fokus dalam pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrim yang mencapai USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Kondisi ini menyebabkan pemerintah memberikan intervensi kepada rumahtangga yang mengalami kemiskinan ekstrim supaya maju dan bertumbuh melalui berbagai program seperti subsidi, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim, hingga

program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kapasitas ekonomi keluarga.

3. Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Industri Hulu dan Hilir Pertanian

Sumberdaya alam dan lingkungan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi *(resource based economy)* dan sekaligus sebagai modal pertumbuhan hidup *(life support system).* Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Namun di lain pihak, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agrasif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi Iingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar.

Dalam pelaksanaan era persaingan global tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing, diperlukan paradigma sesuai dengan perkembangannya, yang semula berorientasi pada pertumbuhan industri berskala besar, bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian Indragiri ilir yang paling unggul adalah sektor perkebunan dengan komoditi utamanya adalah Kelapa. Tanaman kelapa sangat berperan dalam perekonomian sebagai penyedia lapangan tenaga kerja, bahan baku industri dalam negeri dan konsumsi langsung di Indragiri Hilir. Meskipun demikian, kebanyakan usaha tani kelapa di Indragiri Hilir tidak terkait langsung dengan industri pengolahan, industri hilir, serta industri jasa, dan keuangan. Kabupaten Inhil memiliki produksi kelapa terbesar skala Nasional dan Internasional. Hal ini didukung dengan luas lahan mencapai 429.694 hektare, dan mayoritas (70%) perekonomian masyarakatnya bergantung pada sektor tersebut.

Sehingga Pemerintah Daerah sedang dan akan melakukan berbagai kebijakan/program terkait demikian dengan pengembangan agribisnis untuk mengangkat perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Pembangunan Kewilayahan Berbasis Ketahanan Ekologi

Fenomena alam gelombang pasang, angin puting beliung, banjir yang mengakibatkan longsor, abrasi dan erosi merupakan masalah serius yang semakin mempersulit keadaan karena hampir setiap tahun, daerah ini dilanda bencana alam yang memporak-porandakan permukiman penduduk, lahan pertanian serta merusak berbagai fasilitas umum, mengancam keselamatan pelayaran yang pada akhimya bermuara kepada kerugian material dan korban jiwa. Pembangunan kewilayahan antar Kecamatan yang tidak seimbang ditambah dengan kondisi geografis yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Kondisi global yang mengalami krisis iklim menuntut perubahan pembangunan berkelanjutan, keberadaan pemerintah dibutuhkan kebijakan yang pro pada lingkungan digaungkan agar pemerintah mengedepankan ketahanan ekologi dalam perencanaan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berbasis ekologi merupakan salah strategi untuk menjamin kedaulatan air, pangan, energi, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

5. Perwujudan Reformasi Birokrasi di Seluruh Urusan Pemerintahan

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang

bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

Reformasi birokrasi yang belum berjalan sebagaimana diharapkan diduga terkait erat dengan kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi seperti tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN yang masih tetap berlangsung dan pengawasan terdahap kinerja birokrasi yang masih lemah. Secara internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri masih merupakan masalah kompleks yang membutuhkan upaya pemecahan secara bertahap dan terarah dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang disusun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2022. Dokumen RPD menjadi acuan bagi OPD menyusun Renstra serta penyusunan RKPD. Dokumsn RPD dengan RPJMD tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, hanya tentang tidak adanya visi misi dan program kampanye pada dokumen RPD dikarenakan pemilukada serentak akan dilakukan di tahun 2024.

Bab V dalam dokumen RPD ini memuat tujuan dan sasaran, di mana tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Kabupaten Indragiri Hilir dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun sampai tahun 2026.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025 adalah "**INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025**". Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

1. Mewujudkan daya saing daerah; adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan *(sustainable),* meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menunjang hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminatif.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya; adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas diseluruh wilayah, dan tersedianya pelayanan sosial dan pelayanan dasar lainnya yang bermutu dan menjangkau keseluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.

4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya; adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang memungkinkan berkembangnya seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintah pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah meIebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni Melayu, maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan teals dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan kebih sejahtera.
5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional, nasional dan internasional; adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan system kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional, nasional dan internasional, sehingga perlu semakin dimantapkan identitas dan integritas yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Indragiri Hilir. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian serta sebagai kelanjutan dari RPJMD ke–3, dan RPJMD ke – 4 pada hal ini disebut RPD, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indragiri Hilir yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dengan tetap memiliki nilai-nilai luhur budaya lokal. Kesejahteraan yang makin meningkat ditandai dengan makin meratanya pendapatan

seluruh lapisan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, ditandai dengan makin meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pendidikan, meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kualitas tumbuh kembang, kesejahteraan dan perlindungan anak. Pencapaian sasaran pokok sebagaimana yang dimaksud pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam 4 (empat) tahap RPJMD, hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan dalam bentuk proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up.*

Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indikator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan target pembangunan Nasional (RPJMN).

Tabel V.1
Perbandingan Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Nasional

No	RPJMN Tahun 2020-2024						RPJMD Provinsi Riau					RPD Kab. Indragiri Hilir			
	Indikator	Target					Indikator	Target				Indikator	Target		
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		2024	2025	2026
1	IPM						IPM	72,94	73,21-73,44	73,43-7369	73,74-73,91	IPM	67,79	68,07	68,35
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,55	10,95	10,45	10,05	9,38	Tingkat Kemiskinan (%)	7,00	6,52-6,87	6,31-6,65	5,97-6,05	Tingkat Kemiskinan (%)	5,47	5,24	5,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00	3,80	3,60	3,20	2,90	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,42	4,12-4,30	3,92-4,13	3,43-3,74	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,44	1,41	1,38
4	Indeks Gini						Indeks Gini	0,327	0,322-0,333	0,319-0,329	0,316-0,324	Indeks Gini	0,286	0,280	0,275
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,36	2,69-3,04	2,82-3,49	2,10-3,75	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5.55	5.81	6.09
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)						PDRB per Kapita (Juta Rp)					PDRB per Kapita (Juta Rp)	133.39	137.10	140.92

Tujuan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2024–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana berikut:

Tabel V.2
Indikator Tujuan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Akhir
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	67,37	68,35
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,31	6.09
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	B (63,07)	B (66.21)

**data sementara*

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing–masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu :

1. Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan untuk membantu pengembangan kompetensi. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Kabupaten Indragiri Hilir yang berkompeten dan berdaya saing.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
b) Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat
c) Meningkatnya pendapatan masyarakat
d) Meningkatnya kualitas kesempatan kerja

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan

Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indoensia. Hancurnya sektor perkonomian sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di beberapa daerah merosot tajam. Adanya fenomena Pandemi Covid-19 ini membuat seluruh daerah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya agar tidak semakin terpuruk. Kabupaten Indragiri Hilir termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan sektor perekonomian Indragiri Hilir yang dilakukan dengan memanfaatan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif.

Selain mengelola sektor–sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasaran setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Dalam pengembangan perekonomian Indragiri Hilir terdapat hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak signifikan atau menimbulkan permasalahan bagi Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik.

Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

a) Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah
b) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
c) Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)*

Tata kelola pemerintah yang baik *(Good Governance)* merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai–nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan *Good Governance* tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

a) Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
b) Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah
c) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024–2026

RPD			Kondisi Awal	Tahun Target		
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**2022**	**2024**	**2025**	**2026**
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat		**Indeks Pembangunan Manusia**	**67,37**	**67,79**	**68,07**	**68,35**
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,743	0,750	0,754	0,758
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,581	0,582	0,583	0,585
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,708	0,715	0,718	0,721
	Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Kemiskinan	5,98	5,47	5,24	5,00
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,50	1,44	1,41	1,38
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**5,31**	**5.55**	**5.81**	**6.09**
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,34	4.64	4.87	5.12
		LPE Sektor Industri Pengolahan	4,68	5.34	5.60	5.88

RPD			Kondisi Awal	Tahun Target		
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**2022**	**2024**	**2025**	**2026**
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.31	68.05	68.43	68.81
		Indeks Risiko Bencana	168.4*	162	158	154
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	Indeks Infrastruktur	58.99	63.33	65.71	67.88
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**B (63.07)**	**B (64.08)**	**B (65.13)**	**B (66.21)**
	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	B (64,10)	B (68,01)	BB (70,90)	BB (71,23)
		Indeks Profesionalitas ASN	57,06	58,10	58,12	58,15
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Integritas	72,65	74,00	74,50	75,00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75,47*	78,32	79,82	81,65
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	83.40	89,64	92,24	94,83

kondisi data tahun 2021/angka sementara

Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Keterkaitan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan daerah dengan perangkat daerah dapat dlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.4
Keterkaitan (Cascading) IKU Daerah dengan IKU OPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
1. Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	**Indeks Pembangunan Manusia**			
1.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**Indeks Kesehatan**			
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan
		Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan masyarakat	Tingkat Akreditasi RS	Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan
			Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Puri Husada Tembilahan	Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan
		Menigkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
		Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan masyarakat	Tingkat Akreditasi RS	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
			Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Tengku Sulung	Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
		Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan masyarakat	Tingkat Akreditasi RS	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
			Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Raja Musa Sungai Guntung	Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa
		Meningkatkan kualitas kependudukan,	Tingkat Angka Kelahiran Total (TFR)	DP2KBP3A

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Pengendalian Penduduk serta Kesertaan Ber-KB.		
		Meningkatnya akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (mCPR)	DP2KBP3A
			Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP2KBP3A
1.2. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	**Indeks Pendidikan**			
		Meningkatkan Mutu/ Kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal yang merata dan berkeadilan	Angka Partisipasi Sekolah (7-12) Angka Partisipasi Sekolah (13-15)	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Dinas Pendidikan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Peningkatan Pemuda Aktif	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
			Persentase Peningkatan prestasi olahraga Tingkat Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
		Meningkatnya Peran Aktif Pemuda	Cakupan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Daerah	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
		Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Nilai SKM Pemustaka terhadap pelayanan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
1.3. Meningkatnya pendapatan masyarakat	**Indeks Pengeluaran**			
		Mewujudkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat	Tingkat Penurunan Jumlah PPKS	Dinas Sosial
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Tertangani	Dinas Sosial
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasamya di Luar Panti	Dinas Sosial
		Meningkatkan peran sektor industri dan perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
			Ekspor bersih perdagangan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Pertumbuhan volume ekspor	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Terjaganya stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
1.4. Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	**Tingkat Kemiskinan**			
	Tingkat Pengangguran Terbuka			
		Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Persentase Kenaikan UMK	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
		Meningkatnya kemandirian warga Transmigrasi	Persentase Transmigran Mandiri	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**			
2.1. Meningkatnya produktifitas	**LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**			

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
sektor perekonomian unggulan daerah	**LPE Kategori Industri Pengolahan**			
		Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis unggulan daerah	Persentase UMKM dan Koperasi yang naik skala usaha	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang aktif	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
			Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah baru	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil	Nilai Evaluasi RB Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil	Nilai AKIP Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Inhil	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Meningkatkan Investasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase pertumbuhan investasi daerah sampai dengan tahun berkenaan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Investasi PMA/PMDN sampai dengan tahun berkenaan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
			Tingkat Hunian Akomodasi	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
		Meningkatnya Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat	Jumlah Desa Wisata dan Desa Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
		Optimalisasi Pelestarian Warisan Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan	jumlah produkstivitas tanaman perkebunan	Dinas Perkebunan
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
			Jumlah Produksi Ternak	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
		Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Petani	Cakupan Bina Kelompok Petani	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
		Meningkatkan Hasil Kelautan dan Perikanan	LPE subkategori perikanan	Dinas Perikanan
		Meningkatnya Kapasitas Produksi Melalui Peningkatan Penangkapan dan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan
			Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
2.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**			
	Indeks Risiko Bencana **Indeks Infrastruktur**			
		Menurunkan resiko bencana dan dampak bencana	Luas wilayah terdampak bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		meningkatnya efektifitas pencegahan, penenganan bencanan dan pemulihan pasca bencana	persentase kesadaran masyarakat peduli bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			persentase rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan bencana	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan wilayah terdampak bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Menjamin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
			Indeks Kualitas Air (IKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
			Indeks Kualitas Lahan (IKL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Sumber Pencemar	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Pengendalian Lingkungan Hidup	Persentase timbulan sampah dan limbah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Indeks Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Terpenuhinya Akses Air bersih	Persentase penduduk berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Meningkatkan Pelaksanaan pelayanan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Meningkatnya Layanan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatkan pembangunan pelayanan prasarana dan sarana bangunan gedung insfrastruktur Pekerjaan Umum	Jumlah Kepatuhan PBG pertahun per satuan bangunan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Meningkatnya pembangunan/gedung ber PBG	Jumlah bangunan ber-PBG per satuan bangunan pertahun	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air	Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Air	Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Meningkatkan keterwujudan tertib Tata Ruang	Persentase ketaatan pembangunan terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Meningkatnya pelayanan KKPR	Jumlah Persetujuan/Konfirmasi/Rekomendasi KKPR(PKKPR/KKKPR/RKKPR) yang diterbitkan pada tahun N	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	Indekss Infrastruktur.	Dinas Perhubungan
		Meningkatkan kelancaran dan Keselamatan aksesibiltas menuju KSPP,Pusat Pemerintahan dan Layanan Publik	Rasio konektivitas kabupaten	Dinas Perhubungan
			Persentase Tingkat penurunan kecelakaan darat/perairan	Dinas Perhubungan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman	Rasio permukiman layak huni	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai	Rasio rumah layak huni	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di Desa	Indeks Desa Membangun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Sosial Indeks Ketahanan Ekonomi Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	**Indeks Reformasi Birokrasi**			
3.1. Meningkatnya profesionalitas ASN akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	**Nilai SAKIP .**			
	Indeks Profesionalitas ASN			
		Meningkatkan Kualitas layanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Sekretariat Dprd
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	Sekretariat Dprd

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		program legislasi daerah		
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan Integritas, Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen Aparatur	Indeks Sistem Merit	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Nilai LPPD (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	Sekretariat Daerah
			Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	Sekretariat Daerah
			Persentase pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memiliki kategori sangat tinggi	Sekretariat Daerah
3.2. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	**Indeks Integritas**			
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.			
		Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di BKAD	Opini BPK (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan secara akurat, akuntabel dan tepat waktu	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
			Persentase SKPD yang menyusun laporan BMD secara akurat, akuntabel dan tepat waktu	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Baik	Level Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya Profesionalisme aparatur pengawasan internal Pemerintah	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
3.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik .**			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Waktu Penyelesaian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan secara elektronik dan Penyelenggaraan Informasi Pelayanan Publik Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
			disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
			Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik
			Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik
		Meningkatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP Kab Inhil	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Menciptakan rasa tentram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Menurunnya jumlah pelanggaran Perda	Persentase Penegakan PERDA	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya Profesionalisme Personil Satpol PP dalam pelaksanaan Tugas	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Satuan Polisi Pamong Praja

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan penanganan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat	Persentase penurunan kejadian kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		Meningkatkan kehidupan masyarakat Indragiri Hilir yang demokratis, kondusif, dan berwawasan kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat	Persentase potensi konflik yang di fasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan komponen masyarakat tentang ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, dan Pilkades.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
		Meningkatkan tata kelola kearsipan daerah	Indeks Kearsipan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan pengelolaan Arsip yang tertib	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Kecamatan
		Terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di Kecamatan Tembilahan Hulu	

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024-2026 disertai dengan definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator sehingga dalam proses evaluasi nantinya *stakeholder* dapat bersama-sama melakukan validasi.

Tabel V.5
Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
		Tingkat Kemiskinan	$\frac{\textbf{Jumlah Penduduk Miskin}}{\textbf{Jumlah Penduduk}} x100\%$
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$.
		PDRB per Kapita	$\frac{PDRB\ adh\ Berlaku}{Jumlah\ Penduduk}\ x\ 100\%$
	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{Jumlah\ Penduduk\ Angkatan\ Kerja\ Menganggur}{Jumlah\ Penduduk\ Angkatan\ Kerja}\ x\ 100\%$
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
		LPE Kategori Industri Pengolahan	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**IKLH=(0,376xIKA) +(0,405xIKU) +(0,219xIKL)** Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

<table>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran</th><th>Indikator</th><th>Definisi Operasional</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>Indeks Risiko Bencana</td><td> 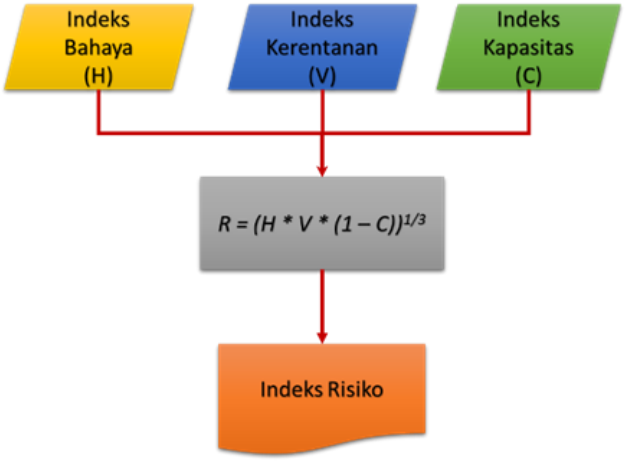
</td></tr>
<tr><td>Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan</td><td>Indeks Infrastruktur</td><td>Indeks Infrastruktur =
0,3255 x jalan + 0,3343 x air + 0,5133 x sanitasi + 0,5033 x pkpl + 0,5153 x i_kom_inv
Variabel Indeks Infrastruktur :
<table><tr><th>Definisi</th></tr><tr><td>% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x</td></tr><tr><td>% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x</td></tr><tr><td>%Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x</td></tr><tr><td>% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN</td></tr></table></td></tr>
</table>

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
			Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	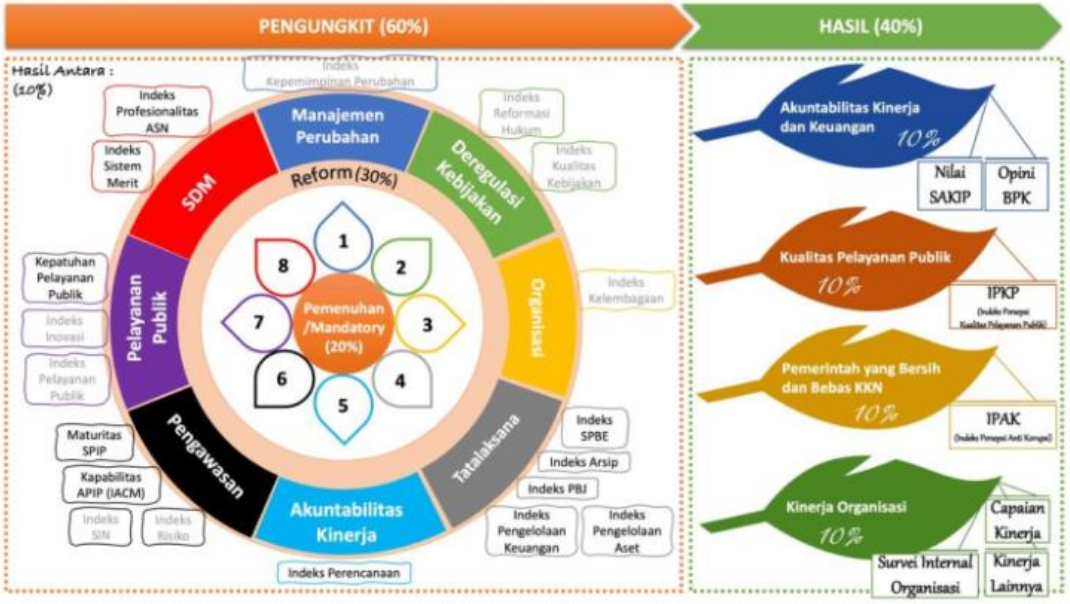

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	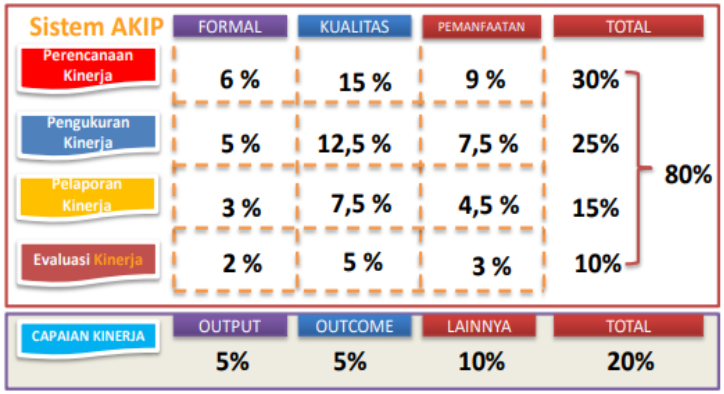
		Indeks Profesionalitas ASN	Merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Integritas	Survey penilaian integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui survey pihak eksternal

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah: a) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) b) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) c) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) d) Penyerapan anggaran (20) e) Kondisi keuangan daerah (15) Opini BPK atas LKPD (15)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	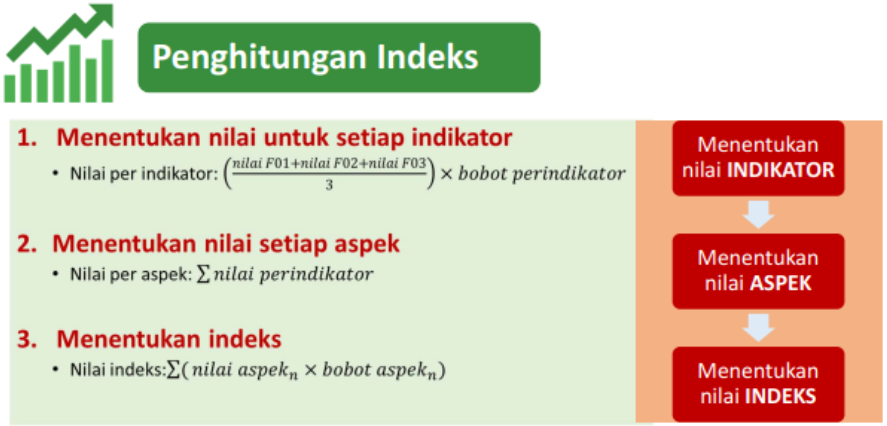 Pembobotan Aspek: a) Kebijakan Pelayanan (30%) b) Profesionalisme SDM (18%) c) Sarana Prasarana (15%) d) Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%) e) Konsultasi dan Pengaduan (15%) f) Inovasi (7%)

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Perencanaan merupakan salah satu proses yang menentukan tindakan masa depan, proses memilih urutan pilihan yang dapat dimaksimalkan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia, maka dibutuhkan langkah-langkah taktis strategis ke setiap segi operasional. Strategi harus dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghadapi berbagai tantangan dan problematika dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai lebih efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komperehensif mengenai langkah pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan mendukung pencapaian pembangunan daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya – upaya dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026.

6.1 STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian langkah strategis yang dilaksanakan melalui program – program indikatif yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026. Strategi yang disusun, diharapkan mampu mengarahkan sasaran pembangunan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran – sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026. Rumusan strategi tersebut dapat dilihat pada tabel VI.1 berikut:

Tabel VI.1.
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran			Strategi	
Tujuan 1	**Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat**			
	Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	2	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan
	Sasaran 3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3	Optimalisasi pengentasan kemiskinan
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	4	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
Tujuan 2	**Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan**			
	Sasaran 5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	5	Pengembangan potensi agroindustri daerah
	Sasaran 6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6	Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	7	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah
Tujuan 3	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**			

Tujuan/Sasaran			Strategi	
	Sasaran 8	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	8	Memperkuat manajemen ASN seluruh urusan pemerintahan
			9	Reformasi manajemen pemerintahan melalui Percepatan implementasi Akuntabilitas Kinerja
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	10	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah
	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	11	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan berbasis elektronik

Strategi pembangunan diatas akan dilaksanakan pada Tahun 2024, 2025 dan 2026, berikut penjabaran dari strategi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026:

1. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas yang harus diperhatikan dan dirancang dengan matang untuk mengimbangi kebutuhan kualitas daya saing manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan. Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan berbasis IT. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menjangkau layanan Pendidikan dengan lebih mudah, nyaman dan mampu mengembangkan minat, bakat, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan usaha. Selain Pendidikan, Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang harus diperhatikan Pemerintah Indragiri Hilir agar kualitas layanan kesehatan secara merata dapat lebih mudah diakses masyarakat. Dengan begitu, masyarakat mampu menjangkau fasilitas kesehatan yang mudah dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

2. Optimalisasi pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan standar hidup rata-rata disuatu daerah, hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan kondisi ekonomi saat ini, dampak dari Covid-19 yang masih terasa, kenaikan inflasi, membuat perekonomian masyarakat tidak stabil. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah penduduk miskin di tahun 2021, sehingga perlu upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menangani kemiskinan. Salah satu penanganan kemiskinan yang dapat dilakukan yaitu optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan penduduk miskin di perdesaan harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, ini penting untuk mendorong pembangunan ekonomi di desa. Dengan memaksimalkan potensi sumberdaya terutama pada bidang pertanian, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah.

3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Kualitas daya saing SDM sangat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, tenaga kerja yang unggul dan terampil akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Banyak factor yang mempengaruhi tingginya Produktivitas tenaga kerja, selain kualitas skill yang dimiliki, besarnya peluang penempatan pekerja, kemauan kerja keras dan kerja cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini sudah diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga Pemerintah daerah sudah mempersiapkan Rencana Pembangunan Industri, yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024. Hal ini akan membuka peluang besar bagi investor untuk menanamkan usaha di Kabupaten Indragiri Hilir yang akan berdampak pada banyaknya penyerapan tenaga kerja sesuai lapangan kerja yang tersedia. Dengan ini perlu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, sehingga angkatan kerja ini mampu memenuhi kualifikasi dari bidang usaha yang dibutuhkan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

4. Pengembangan potensi agroindustri daerah

Pembanguan ekonomi daerah harus dilakukan dengan menggali dan mengeksplor potensi sumber daya yang tersedia. Percepatan pembangunan ekonomi daerah harus berfokus pada pengembangan Kawasan dan produk andalannya. Kabupaten Indragiri Hilir yang berjuluk **"Negeri Hamparan Kelapa Dunia"** dan diketahui merupakan daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, melihat potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sector pertanian dan industri pengolahan menjadi sector utama yang memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah. Pertanian merupakan sector yang penting dalam pembangunan ekonomi, selain mencukupi kebutuhan pangan, sector pertanian dapat berkembang menjadi sector industri unggulan daerah. Titik krusial pembangunan ekonomi adalah bergesernya produk (hasil pertanian) yang berupa bahan mentah ke sektor industri. Industri yang mengolah hasil-hasil pertanian primer menjadi produk olahan adalah proses dari agroindustri. Dengan upaya pengembangan potensi agroindustri maka diharapkan mampu memberikan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, memperluas pasar bagi produk pertanian, meningkatkan kesejahteraan para petani, pekebun dan peternak. Menindaklanjuti hal tersebut dan melihat potensi yang ada, maka upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pengembangan perkebunan kelapa rakyat, Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan, serta Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis. Dengan ini diharapkan pengembangan potensi agroindustri di Kabupaten Indragiri Hilir ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian

Dalam pembangunan ekonomi terkadang terdapat aktivitas-aktivitas yang mampu merusak ekosistem lingkungan hidup, sebagai contoh adanya pabrik pengolahan tepung beras yang pasti diperlukan pengolahan dari residu/limbahnya. Hal ini dapat memicu pencemaran bahkan meracuni lingkungan yang akhirnya secara bertahap mampu mendegradasi ekosistem lingkungan. Kerusakan yang terjadi pada berbagai ekosistem, menyebabkan terganggunya komponen-komponen yang menyusun suatu

ekosistem lingkungan hidup. Dengan ini perlu adanya upaya pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup. Dengan pengawasan lingkungan hidup yang ketat, diharapkan mampu meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup, sehingga kesejahteraan masyarakat dan kemajuan menuju pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

6. **Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah**

   Infrastruktur menjadi salah satu bukti dan kunci pembangunan fisik yang mampu memberikan pengaruh cukup signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Pada saat ini Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur perhubungan seperti jalan (jalan penghubung daerah perbatasan), jembatan, drainase dan pembangunan perumahan/pemukiman yang layak. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersinergi dan berkelanjutan. Pembanguan Infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, akan mempermudah dan meningkatkan aktivitas masyarakat. Sehingga diharapkan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah ini mampu mempercepat pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

7. **Memperkuat manajemen ASN**

   Manajemen ASN adalah Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan SDM/ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasinya sendiri yang tentunya akan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja daerah. Diperlukan berbagai macam langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah demi menciptakan ASN berkualitas dan pelayanan publik yang optimal diantaranya Meningkatkan Akuntabilitas, Menguatkan Rasa Nasionalisme,

Membentuk Etika Publik, Menumbuhkan Sikap Anti Korupsi, Menciptakan Komitmen Mutu, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Optimal kepada masyarakat.

8. **Reformasi manajemen pemerintahan melalui Percepatan implementasi Akuntabilitas Kinerja**

   Birokrasi merupakan instrument penting sebagai roda penggerak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses system secara rasional menjamin mekanisme dan system kerja yang terstruktur dan teratur. Sebagai upaya penyempurnaan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan reformasi birokrasi. Dengan reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara. Hal ini sebagai upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess), dan sumber daya manusia aparatur. Menindaklanjuti hal tersebut maka berbagai upaya perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan, digitalisasi tata kelola keuangan daerah, dan optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT. Dengan percepatan implementasi reformasi birokrasi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan tugas, fungsi dalam melayani masyarakat menjadi lebih professional, efektif dan efisien.

9. **Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah**

   Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam pencapaian efektifitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemerintahan yang dikenal dengan suatu sistem pengendalian internal untuk memberikan kepastian bahwa pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak. Upaya meningkatkan fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien

dan bebas korupsi ke masa depan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat pengawasan intern pemerintah serta dengan sungguh-sungguh melaksanakan secara konsekuen dan konsisten Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

10. **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan berbasis elektronik**

    Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk meningkatkan keterpaduan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dibutuhkan manajemen dan tata kelola SPBE artinya bahwa Dalam SPBE tidak hanya sekedar pelaksanaan layanan sistem aplikasi ataupun sistem informasi pada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, melainkan melebih itu, SPBE juga memiliki berbagai macam domain dalam penerapannya yaitu, domain kegiatan pemerintahan, domain teknologi dan informasi, dan domain layanan. SPBE memberikan peluang bagi pemerintah dalam mendorong dan merealisasikan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatis serta akuntabel, peningkatan kerja sama antar instansi pemerintah dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, memberikan kualitas dan kantitas dalam jangkauan layanan kepada pengguna masyarakat selaku SPBE, dan menurunkan angka kejahatan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme melalui aplikasi sistem pengaduan masyarakat.

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024 – 2026, dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam

penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya. Fokus/Tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar VI.1
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026

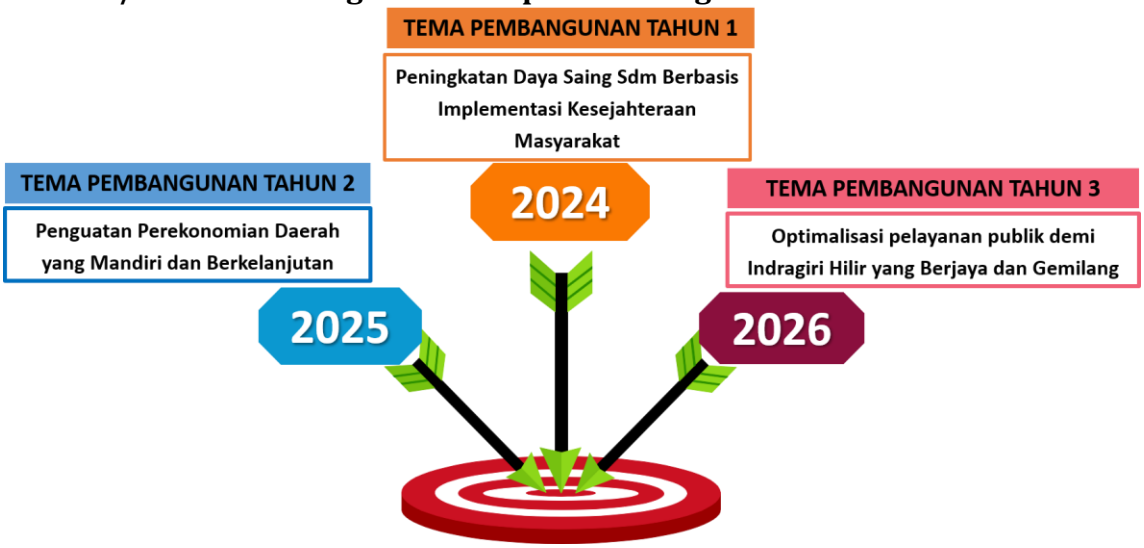

Dengan fokus/tema pembangunan diatas, berikut penjabaran agenda pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026.

1) Agenda Pembangunan Tahun I (2024)

Pada Tahun 2024 ini Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tema pembangunan **"Peningkatan Daya Saing SDM berbasis Implementasi Kesejahteraan Masyarakat".** Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir difokuskan pada bidang Pendidikan, kesehatan, social, ekonomi, dan pemerintahan. Beberapa bidang terserbut menjadi prioritas pembangunan dikarenakan merupakan bidang krusial dalam pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perlu dilakukan pemerataan kualitas layanan kesehatan kemudian peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT dan Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kompetensi yang unggul diharapkan kualitas SDM mampu bersaing, sehingga akan meningkatkan derajat ekonomi dan social masyarakat. Pembanguan ekonomi juga dilakukan pada tahun ini dengan upaya pengembangan perkebunan kelapa rakyat dan digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan. Dengan ini diharapkan akan mempercepat meningkatkan kualitas perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah daerah perlu melaksanakan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tema dan focus pembangunan diharapkan pada tahun 2024 ini menjadi titik awal yang maksimal dalam pembagunan Kabupaten Indragiri Hilir.

2) Agenda Pembangunan Tahun II (2025)

Dengan melanjutkan pembangunan tahun pertama (2024), Kebijakan pembangunan tahun kedua (2025) Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tema **"Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan"**. Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2025 pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir fokus utama pembangunannya adalah pada bidang ekonomi. Dengan memperhatikan potensi sektor unggulan daerah, maka beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu Peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah, kemudian Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan. Mengingat bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi besar pada produk-produk pertanian maka untuk pengembangannya perlu diupayakan pembangunan agribisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk produk mentah pertanian diolah menjadi produk yang bernilai lebih. Selain penguatan pada bidang ekonomi, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu memperhatikan pembangunan pada bidang kesehatan dan Pendidikan. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan dan layanan Pendidikan sudah dapat terakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian untuk mengantisipasi kebutuhan sosial masyarakat yang belum terpenuhi dengan maksimal pada tahun ini Kabupaten Indragiri Hilir perlu melalukan Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian mendukung upaya dalam pembangunan daerah agar berjalan dengan semestinya maka perlu adanya peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan dan digitalisasi tata kelola keuangan daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan optimal dan mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

3) Agenda Pembangunan Tahun III (2026)

Kebijakan pembangunan tahun ketiga (2026) menjadi tahun penentuan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Pada tahun ini mengusung tema pembangunan, "**Optimalisasi pelayanan publik demi Indragiri Hilir yang Berjaya dan Gemilang".** Merujuk tema pembangunan ini

Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun ini akan berupaya untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu pada bidang ekonomi dengan peningkatan pendapatan petani pada sektor unggulan daerah, peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja. Kemudian upaya tersebut diperkuat dengan pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, serta mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup. Melihat kebutuhan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, perlu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dan perumahan, dengan ini diharapkan kebutuhan masyarakat terkait jalan, jembatan, irigasi, drainase, air bersih, serta rumah layak huni sudah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya-upaya tersebut perlu didukung oleh Pemerintah daerah dengan upaya digitalisasi tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT. Pelaksanaan pembangunan tahun terakhir ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel VI.2.
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan		
							2024	2025	2026
Tujuan 1	**Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat**								
	Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	1	Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan			
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	2	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	2	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar			

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan		
							2024	2025	2026
	Sasaran 3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	3	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMKM			
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	4	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	4	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja			
Tujuan 2	**Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan**								

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan		
							2024	2025	2026
	Sasaran 5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	5	Pengembangan potensi agroindustri daerah	5	Pengembangan perkebunan kelapa rakyat			
					6	Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan			
					7	Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif			
	Sasaran 6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6	Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian	8	Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup			

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan		
							2024	2025	2026
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	7	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	9	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur menuju Kawasan Sentra produksi pangan (KSPP), konektivitas terhadap pusat pemerintahan, layanan publik dan perumahan			
Tujuan 3	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**								
	Sasaran 8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	8	Memperkuat manajemen ASN	10	Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan Kompetensi			

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan		
							2024	2025	2026
			9	Reformasi manajemen pemerintahan melalui Percepatan implementasi Akuntabilitas Kinerja	11	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	10	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah	12	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			
					13	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah			
	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	11	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang	14	Meningkatkan kualitas tata kelola TIK			

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan		
							2024	2025	2026
				berorientasi Pada Layanan berbasis elektronik					

6.3 PROGRAM PRIORITAS

Dengan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan diatas, maka perlu adanya langkah nyata dari rumusan tersebut melalui program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah ini merupakan program yang menggambarkan keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut penjabaran program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2024-2026

Tabel VI.3.
Keselaran program dengan Tujuan dan sasaran Program Prioritas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan			Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		OPD
							K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	
Tujuan 1. Mewujudkan Kesejahteraan Dan Daya Saing Masyarakat															
Indeks Pembangunan Manusia					Poin	67,37	67,79		68,07		68,35		68,35		
Sasaran 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat															
Indeks Kesehatan					Poin	0,743	0,75		0,754		0,758		0,758		
Strategi 1. Akselerasi Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan															
1	Pemerataan Kualitas Layanan Kesehatan	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	100	100	44.710.534.000	100	43.458.848.000	100	43.030.411.000	100	131.199.793.000	Dinas Kesehatan
		2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Ketersediaan Obat-Obatan, Alat Kesehatan dan makanan serta minuman sesuai Standar	%	100	100	194.318.000	100	169.709.000	100	151.322.000	100	515.349.000	Dinas Kesehatan
		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDMK) Yang Memiliki Kompetensi	%	100	100	1.149.922.000	100	1.004.307.000	100	895.508.000	100	3.049.737.000	Dinas Kesehatan
		4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang sesuai standar	%	100	100	5.866.068.000	100	5.123.258.000	100	4.568.235.000	100	15.557.561.000	RSUD Puri Husada Tembilahan

Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan				Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		OPD
								K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	
			5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang sesuai standar	%	80	80	1.477.434.000	90	1.290.349.000	100	1.150.548.000	100	3.918.331.000	RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang
			6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang sesuai standar	%	100	100	1.461.058.000	100	1.276.046.000	100	1.137.800.000	100	3.874.904.000	RSUD Raja Musa Sungai Guntung
			7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana(KB)	%	36,92	46,92	836.900.000	56,92	730.918.000	66,92	651.735.000	66,92	2.219.553.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga BerencanaDan Pemberdayaan PerempuanDa n Perlindungan Anak
			8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	60	100	773.603.000	100	675.642.000	100	602.447.000	100	2.051.692.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga BerencanaDan Pemberdayaan PerempuanDa n Perlindungan Anak
Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat																
Indeks Pendidikan						Poin	0,581	0,582		0,583		0,585		0,585		
Strategi 1. Akselerasi Kualitas Dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan																
	2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	%	91,13	91,5	19.228.084.000	92	16.793.268.000	92,5	14.973.988.000	92,5	50.995.340.000	Dinas Pendidikan
					APK SD	%	106	105,9		105,5		105		105		Dinas Pendidikan
					APK SMP	%	104,1	104,1		104		103		103		Dinas Pendidikan

Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan				Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		OPD
								K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PaketA	%	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan
			10	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	%	99	99	125.127.000	99,5	109.282.000	100	97.442.000	100	331.851.000	Dinas Pendidikan
					Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	%	70	70		80		95		95		Dinas Pendidikan
Sasaran 3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat																
Indeks Pengeluaran						Poin	0,708	0,715		0,718		0,721		0,721		
Strategi 2. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan																
	3	Optimalisasi Perlindungan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	11	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	30	70	91.493.000	80	79.906.000	100	71.249.000	100	242.648.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			12	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	%	100	100	764.190.000	100	667.422.000	100	595.115.000	100	2.026.727.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan				Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		OPD
								K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	
			13	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	%	100	100	618.575.000	100	540.242.000	100	481.715.000	100	1.640.532.000	Dinas Sosial
			14	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	%	100	100	700.645.000	100	611.920.000	100	545.629.000	100	1.858.194.000	Dinas Sosial
	4	Peningkatan Pendapatan pelaku usaha pertanian	15	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	5	2	3.696.446.000	2	3.228.367.000	2	2.878.630.000	2	9.803.443.000	Dinas Pangan,Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
					Persentase Ketersediaan Prasarana Perbenihan	%	15	15		15		15		15		Dinas Pangan,Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
					Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	60	62		65		65		70		DINAS PERKEBUNAN
Sasaran 4. Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran																
Tingkat Kemiskinan						**%**	5,98	5,47		5,24		5,00		5,00		
Tingkat Pengangguran Terbuka						%	1,50	1,44		1,41		1,38	1,38	1,38		
Strategi 3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja																
	5	Peningkatan Keterampilan Dan Keahlian Angkatan Kerja	16	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	%	94,66	83	445.065.000	83	388.706.000	83	346.595.000	249	1.180.366.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan					Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		OPD
									K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	
				17	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	6,5	6,5	556.041.000	6,7	485.625.000	6,8	433.015.000	6,8	1.474.681.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				18	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun	Dokumen		1	69.360.000	1	60.576.000	1	54.013.000	1	183.949.000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Tujuan 2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan																	
Laju Pertumbuhan Ekonomi							%	4,44	5,14		5,40		5,67	5,67	5,67		
	Sasaran 5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah																
	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan						%	4,01	4,64		4,87		5,12	5,12	5,12		
	LPE Kategori Industri Pengolahan						%	4,61	5,34		5,60		5,88	5,88	5,88		
		Strategi 4. Pengembangan Potensi Agroindustri Daerah															
		6	Pengembangan Perkebunan Kelapa Rakyat	19	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	%	42,5	42,5	556.511.000	50	486.039.000	50	433.385.000	45,75	1.475.935.000	Dinas Perkebunan
		7	Digitalisasi Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Dan Perikanan	20	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	70.000 Ton	70.000 Ton	1.415.685.000	72.000 Ton	1.236.418.000	74.000 Ton	1.102.472.000	74.000 Ton	3.754.575.000	Dinas Perikanan
				21	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5.500 Ton	5.600 Ton	673.028.000	5.700 Ton	587.800.000	5.800 Ton	524.120.000	5.800 Ton	1.784.948.000	Dinas Perikanan
				22	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Ketersediaan pangan dan konsumsi ikan perkapita pertahun	Kg/KAP/TH	40,15 Kg/KAP/TH	40,15 Kg/KAP/TH	61.752.000	40,2 Kg/KAP/TH	53.932.000	40,25 Kg/KAP/TH	48.088.000	40,25 Kg/KAP/TH	163.772.000	Dinas Perikanan
				23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	%	74	76	157.550.000	78	137.598.000	80	122.692.000	80	417.840.000	Dinas Pangan,Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan

Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan				Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		OPD
								K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	
		8	Pengembangan Kawasan Terpadu Guna Menguatkan Pembangunan Agribisnis, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	%	20	15	2.100.000.000	15	2.100.000.000	15	2.100.000.000	45	6.300.000.000	Dinas Pangan,Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
						Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	%	20	15		15		15		45		Dinas Pangan,Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
						Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	20	15		15		15		45		Dinas Pangan,Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
				25	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	%	100	100	618.630.000	100	540.294.000	100	481.759.000	100	1.640.683.000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
				26	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan	%	20	40	390.704.000	50	341.229.000	60	304.261.000	60	1.036.194.000	DinasPariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
				27	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Objek	2 Objek	3 Objek	651.177.000	3 Objek	568.719.000	3 Objek	507.107.000	3 Objek	1.727.003.000	DinasPariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
				28	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina	%	100	100	394.831.000	100	344.833.000	100	307.477.000	100	1.047.141.000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
				29	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	50	10	304.167.000	10	265.650.000	10	236.871.000	30	806.688.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana																
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						Indeks	63,31	68,05		68,43		68,81	68,81	68,81		
Indeks Risiko Bencana						Nilai	168,40	162,00		158,00		154,00	154,00	154,00		
	Strategi 5. Meminimalisir Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Aktivitas Perekonomian															

Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan				Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		OPD
								K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	
9	Mengoptimalkan Pengawasan Aktivitas Ekonomi Yang Berpotensi Degradasi Lingkungan Hidup	31	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,78	53,89	370.973.000	53,99	323.996.000	54,09	288.896.000	54,09	983.865.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
				Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,61	90,71		90,81		90,91		90,91		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		32	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	%	100	100	4.125.525.000	100	3.603.119.000	100	3.212.783.000	100	10.941.427.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
		33	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	%	100	100	2.581.341.000	100	2.254.459.000	100	2.010.228.000	100	6.846.028.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sasaran 7. Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan																
Indeks Infrastruktur						Persen	58,99	63,33		65,71		67,88	67,88	67,88		
Strategi 6. Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pembangunan Daerah																
10	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Perhubungan Dan Perumahan	34	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	%	80	80,29	2.885.021.000	85,1	2.519.672.000	90,17	2.246.718.000	90,17	7.651.411.000	Dinas Perhubungan
		35	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	70	75	6.129.620.000	81,84	7.804.485.000	92,47	6.337.937.000	92,47	20.272.042.000	Dinas Perhubungan
		36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang jalan dalam kondisi mantap	%	56	57,25	32.597.220.000	57,5	80.469.515.000	57,75	75.385.328.000	57,75	188.452.063.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		37	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	%	2	5	1.404.537.000	10	1.226.678.000	15	1.093.789.000	15	3.725.004.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		38	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan	%	0,79	0,9	596.384.000	1,1	520.852.000	1,5	464.424.000	1,5	1.581.660.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
		39	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,57	0,54	545.161.000	0,49	476.111.000	0,45	424.543.000	0,45	1.445.815.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan					Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		OPD
									K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	
				40	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Kawasan Permukiman yang tertangani	%	8,96	13,65	127.441.000	20,7	111.301.000	27,74	99.245.000	27,74	337.987.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
				41	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU	%	0	100	7.703.124.000	100	29.727.695.000	100	22.998.864.000	100	60.429.683.000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				42	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi jumlah penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	%	27,68	29,55	2.318.023.000	30,67	2.024.497.000	31,79	1.805.177.000	31,79	6.147.697.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
				43	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan	Unit	0	10	91.500.000	10	79.912.000	50	71.256.000	70	242.668.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
				44	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Ha	9.4	12.2	7.411.637.000	15	6.473.117.000	17.8	5.771.865.000	45	19.656.619.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Tujuan 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)																	
Indeks Reformasi Birokrasi							Predi ket	B (63.07)	B (64.08)		B (65.13)		B (66.21)	B (66.21)	B (66.21)		
	Sasaran 8. Meningkatnya Profesionalitas Asn Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah																
	Nilai AKIP						Predi ket	B (64.10)	B (68.01)		BB (70.90)		BB (71.23)	BB (71.23)	BB (71.23)		
	Indeks Profesionalitas ASN						Nilai	57,06	58,1		58,12		58,15	58,15	58,15		
		Strategi 7. Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Seluruh Urusan Pemerintahan															
		11	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dan Implementasi Perencanaan	45	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan	%	100	100	4.891.988.000	100	4.272.524.000	100	3.809.667.000	100	12.974.179.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan				Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		OPD
								K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	
			Pembangunan Daerah	46	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	52	52	1.308.066.000	53	1.142.428.000	54	1.018.665.000	54	3.469.159.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
				47	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab. Inhil	%	100	100	1.680.326.000	100	1.468.560.000	100	1.309.668.000	100	4.458.554.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				48	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	21.837.745.000	100	19.072.484.000	100	17.006.306.000	100	57.916.535.000	Sekretariat Daerah
Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah																
Indeks Integritas						Indeks	76,77	81,71		83,35		85,00	85,00	85,00		
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah						Nilai	75,47	82,28		84,55		86,83	86,83	86,83		
	Strategi 7. Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Seluruh Urusan Pemerintahan															
		12	Peningkatan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan	49	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan yang diselesaikan	%	0	70	4.519.996.000	80	3.947.637.000	85	3.519.978.000	85	11.987.611.000	Inspektorat Daerah
		13	Digitalisasi Tata Kelola Keuangan Daerah	50	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	%	100	100	346.917.082.000	100	347.043.503.000	100	347.346.165.000	100	1.021.306.750.000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
				51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-4,91	2	3.997.409.000	3	3.491.219.000	4	3.113.008.000	4	10.601.636.000	Badan Pendapatan Daerah

Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan			Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Outcome	Satuan	Kondisi Awal RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		OPD
							K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	K	Pagu	
Sasaran 10. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik															
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik					persen	83,40	89,64		92,24		94,83	94,83	94,83		
Strategi 7. Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Seluruh Urusan Pemerintahan															
14	Optimalisasi Kinerja Pelayanan Publik Berbasis IT	52	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	%	30	100	3.833.613.000	100	3.348.168.000	100	2.985.450.000	100	10.167.231.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
		53	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. inhil	%	74	74	1.971.494.000	92	1.721.845.000	100	1.535.307.000	100	5.228.646.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
				Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK	%	84	50		75		100		100		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
		54	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi dengan baik	%	73,1	80,71	4.785.285.000	91,37	4.179.336.000	100	3.726.570.000	100	12.691.191.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

6.4 PROYEK STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir perlu menyusun langkah konkrit dalam ketercapaian Tujuan Pembangunan yang telah disusun. Seperti diketahui, Tujuan Kabupaten Indragiri Hilir fokus ke dalam empat bidang, antara lain Bidang Sumber daya manusia, Bidang Ekonomi, Bidang kesejahteraan, dan bidang Pemerintahan. Proyek strategis daerah untuk melaksanakan ketercapaian empat bidang tersebut antara lain:

1. Bidang Sumber Daya Manusia
   - Peningkatan kapasitas tenaga pendidik.
   - Pembentukan Unit kelompok belajar informal (PKBM).
   - Akses layanan pendidikan dan kesehatan.
2. Bidang Kesejahteraan
   - Bantuan sosial tunai untuk kemiskinan Ekstrem
   - Pemberdayaan masyarakat melalui padat karya
   - Peningkatan balai latihan kerja (menjahit, perbengkelan, kerupuk ikan, pengelolaan kelapa)
3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
   - Perbaikan sarana prasarana sektor pertanian dan implementasi lahan sawah yang dilindungi.
   - Percepatan pelepasan perkebunan yang berada dalam kawasan.
   - Pemberian bantuan kemudahan perizinan serta pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM.
   - Pengembangan ekonomi kreatif melalui intensitas penyelenggaraan event.
   - Normalisasi parit perkotaan.
   - Peningkatan bantuan rumah korban bencana.
   - Peningkatan jalan dan jembatan Kawasan Sentra produksi pangan (KSPP) dan konektivitas terhadap pusat pemerintahan dan layanan publik.
   - Peningkatan layanan air minum, sanitasi/ persampahan perkotaan.
   - Pembangunan rumah layak huni dan penuntasan kawasan kumuh serta Relokasi kawasan kumuh.
4. Bidang Pemerintahan
   - Peningkatan kualitas layanan publik dengan melakukan revitalisasi kantor-kantor pemerintah.

- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek/diklat

5. Infrastruktur
   - Percepatan Fungsi bandara Tempuling dan percepatan penyerahan ke Pemerintah Pusat
   - Penyelenggaraan pelabuhan daerah, transpotasi sungai/laut dan penyeberangan
   - Pembangunan koridor angkutan perkotaan (bus mikro)
   - Jalan Rengat-Kuala Cenaku

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026 yang berisi program-program untuk mencapai pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk periodesasi RPD ini. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan.

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hilir. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada RPD Tahun 2024-2026. Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan

dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Dalam penganggaran program, perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Kebutuhan pendanaan dalam RPD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah. kerangka pendanaan dalam perhitungannnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPD sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024–2026 secara rinci tercantum pada Tabel VII.1 dan Tabel VII. 2 berikut ini:

Tabel VII.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

Uraian	REALISASI					APBD	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi 2023 (RKPD)	Proyeksi		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2024	2025	2026
Belanja	**1.165.087**	**1.112.378**	**1.173.332**	**1.172.203**	**1.379.808**	**1.143.783**	**2%**	**1.120.611**	**1.102.070**	**1.096.143**	**1.102.047**
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	**1.165.087**	**1.112.378**	**1.173.332**	**1.172.203**	**1.379.808**	**1.143.783**	**2%**	**1.120.611**	**1.102.070**	**1.096.143**	**1.102.047**
Belanja Operasi	**1.150.778**	**1.098.784**	**1.150.082**	**1.136.741**	**811.845**	**815.852**	**2%**	**801.397**	**761.500**	**756.500**	**766.500**
Belanja pegawai	775.611	773.531	805.680	772.661	764.273	759.347	2%	732.356	730.000	740.000	750.000
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Belanja Subsidi	2.000	2.000	2.000	4.000	2.000	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	95.115	65.332	44.716	56.176	42.848	54.174	2%	67.958	30.000	15.000	15.000
Belanja Biaya Provisi	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	300	566	807	1.013	2.723	2.332	10%	1.083	1.500	1.500	1.500
Belanja Bantuan Keuangan	277.752	257.355	296.879	302.889	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	**214**	**96**	**-**	**21.952**	**486**	**43.000**	**2%**	**25.960**	50.000	25.000	20.000

Uraian	REALISASI					APBD	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi 2023 (RKPD)	Proyeksi		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2024	2025	2026
Belanja Tak Terduga	214	96	-	21.952	486	43.000	2%	25.960	50.000	25.000	20.000
Transfer	**9.095**	**8.274**	**12.825**	**9.811**	**567.477**	**284.931**	**5%**	**293.254**	290.569	294.643	295.547
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.548	4.137	6.412	4.905	283.739	**4.660**	5%	5.247	-	-	-
Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Desa	3.174	3.381	4.074	4.393	4.342	-	-	-	5.011	8.499	8.927
Bagi Hasil Retribusi Ke Pemerintah Desa	1.374	756	1.242	512	411	-	-	-	285.218	285.796	286.261
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	278.985	**280.271**	5%	288.007	285.218	285.796	286.261
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	1.097	-	-	-		-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	**5.000**	**5.225**	**10.425**	**3.700**	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	**5.000**	**5.225**	**10.425**	**3.700**	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	REALISASI					APBD	Proyeksi Pertumbuhan	Proyeksi 2023 (RKPD)	Proyeksi		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2024	2025	2026
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, 2022 (diolah)

Dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan.

7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan dapat dilihat pada Lampiran

Tabel VII.2
Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**785.403.774.000,00**		**890.555.064.000,00**		**919.979.307.000,00**		**2.595.938.145.000,00**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**374.672.709.000,00**		**396.493.724.000,00**		**420.758.171.000,00**		**1.191.924.604.000,00**	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100 %	355.270.372.000,00	100%	379.548.269.000,00	100%	405.648.485.000,00	100%	1.140.467.126.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	91,13%	91,50%	19.228.084.000,00	92,00%	16.793.268.000,00	92,50%	14.973.988.000,00	92,50%	50.995.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		APK SD	106 %	105,90%		105,50%		105,00%		105,00%		DINAS PENDIDIKAN
		APK SMP	104,10%	104,10%		104,00%		103,00%		103,00%		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100 %	100 %		100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100 %	100 %		100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	99,00%	99,00%	125.127.000,00	99,50%	109.282.000,00	100%	97.442.000,00	100%	331.851.000,00	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	70,00%	70,00%		80,00%		95,00%		95%		DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap Rombel	87,00%	87,00%	49.126.000,00	88,00%	42.905.000,00	90,00%	38.256.000,00	90%	130.287.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**297.019.258.000,00**		**312.505.803.000,00**		**330.180.153.000,00**		**939.705.214.000,00**	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	123.579.458.000,00	100%	128.809.832.000,00	100%	134.580.337.000,00	100%	386.969.627.000,00	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	93.072.084.000,00	100%	104.154.273.000,00	100%	115.568.505.000,00	100%	312.794.862.000,00	RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	15.416.345.000,00	100%	16.081.659.000,00	100%	16.832.099.000,00	100%	48.330.103.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	9.852.592.000,00	100%	10.928.399.000,00	100%	12.078.920.000,00	100%	32.859.911.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	66,98%	100%	44.710.534.000,00	100%	43.458.848.000,00	100%	43.030.411.000,00	100%	131.199.793.000,00	DINAS KESEHATAN
		Persentase Layanan Kesehatan yang sesuai standar	73,00%	80,00%	5.866.068.000,00	85,00%	5.123.258.000,00	90,00%	4.568.235.000,00	90,00%	15.557.561.000,00	RUMAH SAKIT UMUM PURI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												HUSADA TEMBILAHAN
		Persentase layanan kesehatan yang sesuai standar	73,00%	80,00%	1.461.058.000,00	85,00%	1.276.046.000,00	90,00%	1.137.800.000,00	90,00%	3.874.904.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA
		Persentase layanan kesehatan yang sesuai standar	73,00%	80,00%	1.477.434.000,00	85,00%	1.290.349.000,00	90,00%	1.150.548.000,00	90,00%	3.918.331.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDMK) Yang Memiliki Kompetensi	69,72%	78,00%	1.149.922.000,00	85,00%	1.004.307.000,00	90,00%	895.508.000,00	90,00%	3.049.737.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Ketersediaan Obat Obatan, Alat Kesehatan dan makanan serta minuman sesuai Standar	70,00%	80,00%	194.318.000,00	90,00%	169.709.000,00	100 %	151.322.000,00	100 %	515.349.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	66,72	80,00%	239.445.000,00	85,00%	209.123.000,00	90,00%	186.468.000,00	90,00%	635.036.000,00	DINAS KESEHATAN
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**58.890.257.000,00**		**104.829.979.000,00**		**98.462.342.000,00**		**262.182.578.000,00**	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	13.068.459.000,00	100%	12.810.494.000,00	100%	12.778.285.000,00	100%	38.657.238.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	9,4 Ha	12,2 Ha	7.411.637.000,00	15 Ha	6.473.117.000,00	17,8 Ha	5.771.865.000,00	45 Ha	19.656.619.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi jumlah Peduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	27,68 %	29,55 %	2.318.023.000,00	30,67%	2.024.497.000,00	31,79%	1.805.177.000,00	31,79%	6.147.697.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan	0 Unit	10 Unit	91.500.000,00	10 Unit	79.912.000,00	50 Unit	71.256.000,00	70 Unit	242.668.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah PBG Bangunan Gedung yang diterbitkan Pertahun	74 Unit	80 Unit	1.846.381.000,00	85 Unit	1.612.578.000,00	90 Unit	1.437.883.000,00	255 Unit	4.896.842.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang jalan dalam kondisi mantap	56,00%	57,25 %	32.597.220.000,00	57,50%	80.469.515.000,00	57,75%	75.385.328.000,00	57,75%	188.452.063.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih	50 %	50 %	152.500.000,00	50%	133.188.000,00	50%	118.759.000,00	50%	404.447.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang	2,00%	5,00%	1.404.537.000,00	10,00%	1.226.678.000,00	15,00%	1.093.789.000,00	15%	3.725.004.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**14.104.402.000,00**		**36.212.914.000,00**		**29.649.670.000,00**		**79.966.986.000,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	85 %	100 %	5.118.132.000,00	100%	5.364.589.000,00	100%	5.651.567.000,00	100%	16.134.288.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan	0,79 %	0,90%	596.384.000,00	1,10%	520.852.000,00	1,50%	464.424.000,00	1,50%	1.581.660.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,57 %	0,54 %	545.161.000,00	0,49%	476.111.000,00	0,45%	424.543.000,00	0,45%	1.445.815.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Kawasan Permukiman yang tertangani	8,96 %	13,65 %	127.441.000,00	20,70%	111.301.000,00	27,74%	99.245.000,00	27,74%	337.987.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU	0,23%	0,28%	7.703.124.000,00	0,28%	29.727.695.000,00	0,28%	22.998.864.000,00	0,28%	60.429.683.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Palayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,33%	14.160.000,00	0,33%	12.366.000,00	0,33%	11.027.000,00	0,33%	37.553.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**				**31.214.044.000,00**		**31.405.285.000,00**		**32.024.470.000,00**		**94.643.799.000,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	13.711.942.000,00	100 %	14.423.805.000,00	100 %	15.237.056.000,00	100 %	43.372.803.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	4.475.584.000,00	100 %	4.667.470.000,00	100 %	4.898.037.000,00	100 %	14.041.091.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100%	5.880.540.000,00	100 %	6.072.940.000,00	100 %	6.324.419.000,00	100 %	18.277.899.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-52 %	3 %	2.302.163.000,00	4%	2.010.639.000,00	5%	1.792.821.000,00	5%	6.105.623.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	100 %	100 %	2.581.341.000,00	100 %	2.254.459.000,00	100 %	2.010.228.000,00	100 %	6.846.028.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non kebakaran	100 %	100 %	2.262.474.000,00	100 %	1.975.972.000,00	100 %	1.761.909.000,00	100 %	6.000.355.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**9.503.104.000,00**		**9.107.359.000,00**		**8.904.501.000,00**		**27.514.964.000,00**	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	4.949.193.000,00	100 %	5.130.128.000,00	100 %	5.358.141.000,00	100 %	15.437.462.000,00	DINAS SOSIAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	100 %	100 %	618.575.000,00	100 %	540.242.000,00	100 %	481.715.000,00	100 %	1.640.532.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang Menerima Bantuan Sosial	100 %	100 %	90.219.000,00	100 %	78.794.000,00	100 %	70.258.000,00	100 %	239.271.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100 %	100 %	2.308.029.000,00	100 %	2.015.754.000,00	100 %	1.797.378.000,00	100 %	6.121.161.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	100 %	100 %	700.645.000,00	100 %	611.920.000,00	100 %	545.629.000,00	100 %	1.858.194.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100 %	100 %	657.540.000,00	100 %	574.273.000,00	100 %	512.060.000,00	100 %	1.743.873.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	100 %	100 %	178.903.000,00	100 %	156.248.000,00	100 %	139.320.000,00	100 %	474.471.000,00	DINAS SOSIAL
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**108.036.916.000,00**		**107.237.925.000,00**		**105.121.801.000,00**		**320.396.642.000,00**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**6.699.192.000,00**		**6.725.824.000,00**		**6.846.295.000,00**		**20.271.311.000,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	90 %	90%	5.528.154.000,00	90%	5.703.083.000,00	98%	5.934.354.000,00	98%	17.165.591.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen	69.360.000,00	1 Dokumen	60.576.000,00	1 Dokumen	54.013.000,00	1 Dokumen	183.949.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	94,66 %	83,00%	445.065.000,00	83,01%	388.706.000,00	83,02%	346.595.000,00	83,02%	1.180.366.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	6,50%	6,50%	556.041.000,00	6,70%	485.625.000,00	6,80%	433.015.000,00	6,80%	1.474.681.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	28,00%	35,00%	100.572.000,00	36,00%	87.834.000,00	40,00%	78.318.000,00	40%	266.724.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**5.228.068.000,00**		**5.466.777.000,00**		**5.748.661.000,00**		**16.443.506.000,00**	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	4.913.606.000,00	100 %	5.192.141.000,00	100 %	5.503.778.000,00	100 %	15.609.525.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	30,00%	40,00%	91.493.000,00	60,00%	79.906.000,00	80,00%	71.249.000,00	0,8	242.648.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	67,00%	71,00%	50.613.000,00	73,00%	44.203.000,00	75,00%	39.414.000,00	75%	134.230.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga	40,00%	70,00%	27.992.000,00	80,00%	24.446.000,00	90,00%	21.797.000,00	90%	74.235.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Kuantitas Penyajian Data Gender dan Anak	100 %	100 %	10.694.000,00	100 %	9.339.000,00	100 %	8.328.000,00	100 %	28.361.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	75,00%	80,00%	46.623.000,00	85,00%	40.719.000,00	90,00%	36.308.000,00	0,9	123.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pendampingan dan Perlindungan Anak	60,00%	80,00%	87.047.000,00	90,00%	76.023.000,00	90,00%	67.787.000,00	90%	230.857.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**464.355.000,00**		**405.552.000,00**		**361.607.000,00**		**1.231.514.000,00**	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	74,00%	76,00%	157.550.000,00	78,00%	137.598.000,00	80,00%	122.692.000,00	80,00%	417.840.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Jumlah Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	80,00%	83,50%	232.177.000,00	83,70%	202.776.000,00	83,90%	180.802.000,00	83,90%	615.755.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Produktivitas Padi	40,92 Kuintal/Ha	41 Kuintal/Ha		41,25 Kuintal/Ha		41,5 Kuintal/Ha		41,5 Kuintal/Ha		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan	20,00%	30,00%	33.168.000,00	35,00%	28.968.000,00	40,00%	25.828.000,00	40,00%	87.964.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	44,83 %	50,00%	41.460.000,00	60,00%	36.210.000,00	70,00%	32.285.000,00	70,00%	109.955.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**11.798.186.000,00**		**11.297.050.000,00**		**11.036.710.000,00**		**34.131.946.000,00**	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	22 %	100 %	6.146.868.000,00	100%	6.361.351.000,00	100%	6.635.713.000,00	100%	19.143.932.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	236.028.000,00	1 Dokumen	206.140.000,00	1 Dokumen	183.808.000,00	3 Dokumen	625.976.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,78 Indeks	53,89 Indeks	370.973.000,00	53,99 Indeks	323.996.000,00	54,09 Indeks	288.896.000,00	54,09 Indeks	983.865.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,61 Indeks	90 ,71 Indeks		90,81 Indeks		90,91 Indeks		90,91 Indeks		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11. 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	35 %	35 %	615.084.000,00	35%	537.197.000,00	35%	478.999.000,00	35%	1.631.280.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11. 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	100 %	100 %	36.390.000,00	100%	31.782.000,00	100%	28.338.000,00	100%	96.510.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang diterbitkanoleh Pemerintah Daerah	100 %	100 %	107.265.000,00	100 %	93.681.000,00	100 %	83.533.000,00	100 %	284.479.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11. 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Peningkatan Masyarakat/Kelompok Masyarakata dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100 %	36.390.000,00	100 %	31.782.000,00	100 %	28.338.000,00	100 %	96.510.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Penyuluhan/Peringatan Hari Lingkungan Hidup/ Pameran Lingkungan Hidup	%	100 %	36.390.000,00	100 %	31.782.000,00	100 %	28.338.000,00	100 %	96.510.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	61.804.000,00	100 %	53.977.000,00	100 %	48.130.000,00	100 %	163.911.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	25.469.000,00	100 %	22.243.000,00	100 %	19.834.000,00	100 %	67.546.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	100 %	100 %	4.125.525.000,00	100 %	3.603.119.000,00	100%	3.212.783.000,00	100 %	10.941.427.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**7.732.313.000,00**		**8.004.331.000,00**		**8.351.395.000,00**		**24.088.039.000,00**	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	97,2 %	19,44 %	7.391.402.000,00	19,44 %	7.706.599.000,00	19,44 %	8.085.922.000,00	19,44 %	23.183.923.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk	98,79%	99,90%	137.670.000,00	99,50%	120.234.000,00	100%	107.206.000,00	100%	365.110.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil	83,64%	97,00%	113.682.000,00	95,00%	99.283.000,00	100%	88.527.000,00	100%	301.492.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan ketersediaan database kependudukan	99,00%	99,00%	58.906.000,00	99,00%	51.444.000,00	99,00%	45.870.000,00	99,00%	156.220.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	9 OPD	27 OPD		38 OPD		45 OPD		110 OPD		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Penerbitan Data Kependudukan	145 Buku	170 Buku	30.653.000,00	170 Buku	26.771.000,00	170 Buku	23.870.000,00	510 Buku	81.294.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**12.159.926.000,00**		**11.419.425.000,00**		**10.957.963.000,00**		**34.537.314.000,00**	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	90 %	90 %	6.191.966.000,00	90 %	6.207.174.000,00	90 %	6.310.383.000,00	90 %	18.709.523.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	73,10%	80,71 %	272.925.000,00	91,37 %	238.365.000,00	100%	212.541.000,00	100 %	723.831.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa	100%	100%	145.560.000,00	100%	127.128.000,00	100%	113.354.000,00	100 %	386.042.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi dengan baik	73,10%	80,71%	4.785.285.000,00	91,37%	4.179.336.000,00	100%	3.726.570.000,00	100 %	12.691.191.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	100%	100%	764.190.000,00	100%	667.422.000,00	100%	595.115.000,00	100 %	2.026.727.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**1.641.365.000,00**		**1.433.513.000,00**		**1.278.213.000,00**		**4.353.091.000,00**	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program KKBPK	17,50%	21,50%	30.862.000,00	22,50%	26.953.000,00	23,50%	24.031.000,00	23,50%	81.846.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	36,92%	46,92%	836.900.000,00	56,92%	730.918.000,00	66,92%	651.735.000,00	66,92%	2.219.553.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	60%	100%	773.603.000,00	100%	675.642.000,00	100%	602.447.000,00	100%	2.051.692.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**16.885.462.000,00**		**18.425.217.000,00**		**16.998.789.000,00**		**52.309.468.000,00**	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	90 %	98,24 %	7.870.821.000,00	98,94 %	8.101.060.000,00	99,94 %	8.414.134.000,00	99,94 %	24.386.015.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	80,00%	80,29 %	2.885.021.000,00	85,10%	2.519.672.000,00	90,17%	2.246.718.000,00	90,17%	7.651.411.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	70,00%	75,00%	6.129.620.000,00	81,84 %	7.804.485.000,00	92,47%	6.337.937.000,00	92,47%	20.272.042.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**11.363.029.000,00**		**10.725.374.000,00**		**10.341.017.000,00**		**32.429.420.000,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	21,00 %	100 %	5.557.922.000,00	100 %	5.655.361.000,00	100 %	5.820.260.000,00	100 %	17.033.543.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	62,00 %	100 %	3.833.613.000,00	100 %	3.348.168.000,00	100 %	2.985.450.000,00	100 %	10.167.231.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. inhil	74,00 %	74,00%	1.971.494.000,00	92,00%	1.721.845.000,00	100%	1.535.307.000,00	100 %	5.228.646.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK	84,00 %	50,00%		75,00%		100 %		100 %		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**6.388.212.000,00**		**6.586.857.000,00**		**6.851.091.000,00**		**19.826.160.000,00**	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	76 %	78,81 %	5.575.478.000,00	79,81 %	5.877.046.000,00	81,5 %	6.218.176.000,00	81,5 %	17.670.700.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin	43,00%	43,00%	36.771.000,00	44,00%	32.114.000,00	45,00%	28.634.000,00	45,00%	97.519.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang aktif	71,00%	71,00%	25.394.000,00	73,00%	22.177.000,00	75,00%	19.775.000,00	75,00%	67.346.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	15 UMKM	15 UMKM	28.187.000,00	16 UMKM	24.617.000,00	18 UMKM	21.950.000,00	49 UMKM	74.754.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Cakupan Koperasi yang Memiliki Kompetensi Berdaya Saing	75,00%	75,00%	100.461.000,00	76,00%	87.738.000,00	78,00%	78.234.000,00	78,00%	266.433.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Mandiri	5 Koperasi	5 Koperasi	35.349.000,00	6 Koperasi	30.872.000,00	8 Koperasi	27.528.000,00	19 Koperasi	93.749.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentese Usaha Mikro dan Kecil	72,00%	72,00%	351.760.000,00	74,00%	307.215.000,00	75,00%	273.933.000,00	75,00%	932.908.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Unit Usaha Yang Di Fasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	65,00%	65,00%	234.812.000,00	66,00%	205.078.000,00	68,00%	182.861.000,00	68,00%	622.751.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**8.307.555.000,00**		**8.266.860.000,00**		**8.352.675.000,00**		**24.927.090.000,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	35%	6.952.626.000,00	35%	7.083.507.000,00	30%	7.297.520.000,00	100%	21.333.653.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50,00%	10,00%	304.167.000,00	10,00%	265.650.000,00	10,00%	236.871.000,00	80%	806.688.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	170 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	221.213.000,00	20 Pelaku Usaha	193.201.000,00	20 Pelaku Usaha	172.271.000,00	60 Pelaku Usaha	586.685.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Waktu Layanan Izin	80,00%	85,00%	373.297.000,00	90,00%	326.026.000,00	95,00%	290.706.000,00	95,00%	990.029.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kedisipilinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal yang Terlaksana	80,00%	85,00%	179.735.000,00	90,00%	156.974.000,00	95,00%	139.968.000,00	95,00%	476.677.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Sistem Informasi Penanaman Modal	90,15%	90,20 %	276.517.000,00	90,30 %	241.502.000,00	91,00%	215.339.000,00	91,00%	733.358.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**12.868.774.000,00**		**12.267.602.000,00**		**11.936.595.000,00**		**37.072.971.000,00**	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	50 %	55 %	6.505.903.000,00	60 %	6.710.451.000,00	65 %	6.981.468.000,00	65 %	20.197.822.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Wirausaha Muda yang Berkembang	Orang	10 Orang	325.587.000,00	15 Orang	284.358.000,00	20 Orang	253.551.000,00	45 Orang	863.496.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang berprestasi	718%	25,00%	5.868.460.000,00	280%	5.125.347.000,00	-63 %	4.570.104.000,00	-63 %	15.563.911.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina	100 %	100 %	168.824.000,00	100 %	147.446.000,00	100 %	131.472.000,00	100 %	447.742.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**394.299.000,00**		**344.368.000,00**		**307.060.000,00**		**1.045.727.000,00**	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	394.299.000,00	100 %	344.368.000,00	100 %	307.060.000,00	100 %	1.045.727.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**447.719.000,00**		**391.022.000,00**		**348.663.000,00**		**1.187.404.000,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah	100 %	37,00%	447.719.000,00	74,00%	391.022.000,00	100 %	348.663.000,00	100 %	1.187.404.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**1.073.233.000,00**		**937.329.000,00**		**835.782.000,00**		**2.846.344.000,00**	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	2 Objek	3 Objek	651.177.000,00	3 Objek	568.719.000,00	3 Objek	507.107.000,00	3 Objek	1.727.003.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kesenian tradisional yang berkembang	2 Jenis	2 Jenis	192.942.000,00	2 Jenis	168.510.000,00	2 Jenis	150.254.000,00	6 Jenis	511.706.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	1 Objek	2 Objek	149.528.000,00	2 Objek	130.593.000,00	2 Objek	116.444.000,00	6 Objek	396.565.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap museum	%	80,00%	79.586.000,00	82,00%	69.507.000,00	85,00%	61.977.000,00	85,00%	211.070.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**4.345.803.000,00**		**4.331.720.000,00**		**4.382.833.000,00**		**13.060.356.000,00**	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	66,5 %	67 %	3.887.021.000,00	68,45 %	3.931.037.000,00	70 %	4.025.556.000,00	70 %	11.843.614.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	41,00%	43,00%	444.445.000,00	47,00%	388.162.000,00	50,00%	346.112.000,00	50,00%	1.178.719.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Peningkatan jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Eksemplar	3 Eksemplar	14.337.000,00	1 Eksemplar	12.521.000,00	1 Eksemplar	11.165.000,00	1 Eksemplar	38.023.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**239.425.000,00**		**209.104.000,00**		**186.452.000,00**		**634.981.000,00**	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku.	3,20%	19,40%	213.620.000,00	35,50%	186.567.000,00	51,60%	166.357.000,00	51,60%	566.544.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip sesuai dengan Standar Baku yang dikelola pada tahun berkenaan	%	100%	10.035.000,00	100%	8.764.000,00	100%	7.814.000,00	100%	26.613.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan penggunaan arsip yang diberikan sesuai SOP	%	100%	15.770.000,00	100%	13.773.000,00	100%	12.281.000,00	100%	41.824.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**44.638.623.000,00**		**44.780.889.000,00**		**45.553.155.000,00**		**134.972.667.000,00**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**7.570.675.000,00**		**7.550.034.000,00**		**7.642.418.000,00**		**22.763.127.000,00**	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	5.420.210.000,00	100 %	5.671.884.000,00	100 %	5.967.738.000,00	100 %	17.059.832.000,00	DINAS PERIKANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	KABUPATEN/KOTA											
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	70.895,01 Ton	72.000 Ton	1.415.685.000,00	73.000 Ton	1.236.418.000,00	74.000 Ton	1.102.472.000,00	74.000 Ton	3.754.575.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	4831,75 Ton	5.000 Ton	673.028.000,00	5.200 Ton	587.800.000,00	5.400 Ton	524.120.000,00	5.400 Ton	1.784.948.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Ketersediaan pangan dan konsumsi ikan perkapita pertahun (Dengan Satuan:Kg/Kapita/Tahun)	40,15 Kg/KAP/TH	40,15 Kg/KAP/TH	61.752.000,00	40,20 Kg/KAP/TH	53.932.000,00	40,25 Kg/KAP/TH	48.088.000,00	40,25 Kg/KAP/TH	163.772.000,00	DINAS PERIKANAN
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**1.114.237.000,00**		**973.142.000,00**		**867.717.000,00**		**2.955.096.000,00**	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan	20,00%	40,00%	390.704.000,00	50,00%	341.229.000,00	60,00%	304.261.000,00	60 %	1.036.194.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dipromosikan	40,00%	50,00%	699.416.000,00	60,00%	610.850.000,00	70,00%	544.675.000,00	70 %	1.854.941.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkembang	23,33%	25 %	24.117.000,00	30,00%	21.063.000,00	40,00%	18.781.000,00	40,00%	63.961.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**27.429.947.000,00**		**27.809.588.000,00**		**28.536.071.000,00**		**83.775.606.000,00**	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	12.660.112.000,00	100 %	13.464.872.000,00	100 %	14.342.897.000,00	300 %	40.467.881.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	66,24 %	68,53 %	9.206.199.000,00	68,53 %	9.485.607.000,00	100 %	9.860.469.000,00	68,53 %	28.552.275.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	20,00%	15,00%	174.136.000,00	15,00%	152.083.000,00	15,00%	135.609.000,00	15,00%	461.828.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	20,00%	15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	20,00%	15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Persentase ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	42,50%	42,50%	556.511.000,00	50,00%	486.039.000,00	50,00%	433.385.000,00	50,00%	1.475.935.000,00	DINAS PERKEBUNAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	5,00%	2,00%	3.696.446.000,00	2,00%	3.228.367.000,00	2,00%	2.878.630.000,00	2,00%	9.803.443.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Persentase Ketersediaan Prasarana Perbenihan	15,00%	15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	60,00%	62,00%		65,00%		70,00%		70,00%		DINAS PERKEBUNAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	5,00%	4,50%	62.190.000,00	4,00%	54.315.000,00	3,50%	48.428.000,00	3,50%	164.933.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	5,00%	10,00%	441.008.000,00	10,00%	385.162.000,00	10,00%	343.437.000,00	10,00%	1.169.607.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
		Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	20,00%	25,00%	8.292.000,00	30,00%	7.242.000,00	35,00%	6.457.000,00	35,00%	21.991.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan evaluasi	80,00%	82,00%	63.001.000,00	85,00%	55.023.000,00	88,00%	49.062.000,00	88,00%	167.086.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan (Kelompok Tani) yang Meningkat Kapasitasnya	18,65%	20,00%	58.044.000,00	23,00%	50.694.000,00	26,00%	45.200.000,00	26,00%	153.938.000,00	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase cakupan bina kelompok tani	65,00%	68,00%	504.008.000,00	70,00%	440.184.000,00	75,00%	392.497.000,00	75,00%	1.336.689.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**7.442.743.000,00**		**7.503.999.000,00**		**7.665.103.000,00**		**22.611.845.000,00**	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	5.841.583.000,00	100 %	6.105.592.000,00	100 %	6.418.201.000,00	100 %	18.365.376.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang Direkomendasikan	100 %	100 %	65.502.000,00	100%	57.207.000,00	100%	51.009.000,00	100%	173.718.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	100%	100%	618.630.000,00	100%	540.294.000,00	100%	481.759.000,00	100%	1.640.683.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitasn dan jumlah ketersediaan Harga barang kebutuhan pokok	70,00%	75,00%	291.120.000,00	80,00%	254.256.000,00	80,50%	226.709.000,00	80,50%	772.085.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	483 US$	490 US$	371.178.000,00	500 US$	324.176.000,00	510 US$	289.056.000,00	510 US$	984.410.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	32,02%	50,00%	181.950.000,00	60,00%	158.910.000,00	70,00%	141.693.000,00	70,00%	482.553.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	55,00%	60,00%	72.780.000,00	70,00%	63.564.000,00	80,00%	56.676.000,00	80,00%	193.020.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**716.881.000,00**		**626.102.000,00**		**558.273.000,00**		**1.901.256.000,00**	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina	85,00%	100%	394.831.000,00	100%	344.833.000,00	100%	307.477.000,00	100%	1.047.141.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	80,00%	100%	154.657.000,00	100%	135.073.000,00	100%	120.439.000,00	100%	410.169.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	100%	100%	167.393.000,00	100%	146.196.000,00	100%	130.357.000,00	100%	443.946.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**364.140.000,00**		**318.024.000,00**		**283.573.000,00**		**965.737.000,00**	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Bina Transmigrasi dan Penemapatan Transmigrasi	100 %	100 %	289.000.000,00	100 %	252.400.000,00	100 %	225.058.000,00	100 %	766.458.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Bina Transmigrasi	100 %	100 %	75.140.000,00	100 %	65.624.000,00	100 %	58.515.000,00	100 %	199.279.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**159.144.069.000,00**		**148.453.318.000,00**		**141.552.602.000,00**		**449.149.989.000,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**73.923.260.000,00**		**68.217.876.000,00**		**64.374.956.000,00**		**206.516.092.000,00**	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	48.202.725.000,00	100 %	45.754.274.000,00	100 %	44.344.903.000,00	100 %	138.301.902.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	21.837.745.000,00	100 %	19.072.484.000,00	100 %	17.006.306.000,00	100 %	57.916.535.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	100 %	3.882.790.000,00	100 %	3.391.118.000,00	100 %	3.023.747.000,00	100 %	10.297.655.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**85.220.809.000,00**		**80.235.442.000,00**		**77.177.646.000,00**		**242.633.897.000,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	54.379.721.000,00	100 %	53.299.683.000,00	100 %	53.159.919.000,00	100 %	160.839.323.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	30.841.088.000,00	100 %	26.935.759.000,00	100 %	24.017.727.000,00	100 %	81.794.574.000,00	SEKRETARIAT DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**412.940.263.000,00**		**410.804.097.000,00**		**410.116.193.000,00**		**1.233.860.553.000,00**	
5.01	**PERENCANAAN**				**12.915.810.000,00**		**12.443.454.000,00**		**12.223.413.000,00**		**37.582.677.000,00**	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	8.540.113.000,00	100 %	8.620.836.000,00	100 %	8.814.709.000,00	100 %	25.975.658.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kab. Inhil	100 %	100 %	1.680.326.000,00	100 %	1.468.560.000,00	100 %	1.309.668.000,00	100 %	4.458.554.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD,	100 %	100 %	2.695.371.000,00	100 %	2.354.058.000,00	100 %	2.099.036.000,00	100 %	7.148.465.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		RPD,RENSTRA RKPD dan RENJA)										
5.02	**KEUANGAN**				**386.628.182.000,00**		**385.790.862.000,00**		**385.840.577.000,00**		**1.158.259.621.000,00**	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	18.879.161.000,00	100 %	18.795.265.000,00	100 %	18.997.674.000,00	100 %	56.672.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	95 %	100 %	13.547.934.000,00	100 %	13.590.454.000,00	100 %	13.824.271.000,00	100 %	40.962.659.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100 %	100 %	346.917.082.000,00	100 %	347.043.503.000,00	100 %	347.346.165.000,00	100 %	1.041.306.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	100 %	100 %	3.286.596.000,00	100 %	2.870.421.000,00	100 %	2.559.459.000,00	100 %	8.716.476.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	-4,91 %	2 %	3.997.409.000,00	3 %	3.491.219.000,00	4 %	3.113.008.000,00	4 %	10.601.636.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**11.188.819.000,00**		**10.641.856.000,00**		**10.333.139.000,00**		**32.163.814.000,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	6.296.831.000,00	100 %	6.369.332.000,00	100 %	6.523.472.000,00	100 %	19.189.635.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan	100 %	100 %	4.891.988.000,00	100 %	4.272.524.000,00	100 %	3.809.667.000,00	100 %	12.974.179.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1.308.066.000,00**		**1.142.428.000,00**		**1.018.665.000,00**		**3.469.159.000,00**	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52,00%	52,00%	1.308.066.000,00	53,00%	1.142.428.000,00	54,00%	1.018.665.000,00	54,00%	3.469.159.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**899.386.000,00**		**785.497.000,00**		**700.399.000,00**		**2.385.282.000,00**	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	100 %	899.386.000,00	100 %	785.497.000,00	100 %	700.399.000,00	100 %	2.385.282.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**17.021.501.000,00**		**16.212.898.000,00**		**15.763.509.000,00**		**48.997.908.000,00**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**17.021.501.000,00**		**16.212.898.000,00**		**15.763.509.000,00**		**48.997.908.000,00**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%	100 %	11.540.953.000,00	100 %	11.426.343.000,00	100 %	11.495.496.000,00	100 %	34.462.792.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan yang diselesaikan	%	70,00%	4.519.996.000,00	80,00%	3.947.637.000,00	85,00%	3.519.978.000,00	85,00%	11.987.611.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan	%	71,00%	960.552.000,00	73,00%	838.918.000,00	75,00%	748.035.000,00	75,00%	2.547.505.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**78.306.707.000,00**		**79.993.265.000,00**		**82.586.970.000,00**		**240.886.942.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**78.306.707.000,00**		**79.993.265.000,00**		**82.586.970.000,00**		**240.886.942.000,00**	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	8.237.120.000,00	100 %	8.767.860.000,00	100 %	9.345.291.000,00	100 %	26.350.271.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	3.768.850.000,00	100 %	4.010.531.000,00	100 %	4.273.880.000,00	100 %	12.053.261.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	4.500.201.000,00	100 %	4.784.748.000,00	100 %	5.095.559.000,00	100 %	14.380.508.000,00	KECAMATAN TEMPULING
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.829.911.000,00	100 %	2.984.557.000,00	100 %	3.159.195.000,00	100 %	8.973.663.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	1.831.780.000,00	100 %	1.913.925.000,00	100 %	2.011.407.000,00	100 %	5.757.112.000,00	KECAMATAN CONCONG
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	3.593.686.000,00	100 %	3.784.622.000,00	100 %	4.001.529.000,00	100 %	11.379.837.000,00	KECAMATAN ENOK
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.582.565.000,00	100 %	2.733.595.000,00	100 %	2.901.383.000,00	100 %	8.217.543.000,00	KECAMATAN GAUNG
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	3.398.041.000,00	100 %	3.590.995.000,00	100 %	3.806.796.000,00	100 %	10.795.832.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.915.701.000,00	100 %	3.068.351.000,00	100 %	3.242.387.000,00	100 %	9.226.439.000,00	KECAMATAN KATEMAN
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	3.202.316.000,00	100 %	3.406.054.000,00	100 %	3.628.301.000,00	100 %	10.236.671.000,00	KECAMATAN KEMPAS
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.626.986.000,00	100 %	2.788.000.000,00	100 %	2.965.044.000,00	100 %	8.380.030.000,00	KECAMATAN KEMUNING
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.871.862.000,00	100 %	3.045.551.000,00	100 %	3.237.089.000,00	100 %	9.154.502.000,00	KECAMATAN KERITANG
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.471.182.000,00	100 %	2.571.335.000,00	100 %	2.693.647.000,00	100 %	7.736.164.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.911.104.000,00	100 %	3.077.894.000,00	100 %	3.264.052.000,00	100 %	9.253.050.000,00	KECAMATAN MANDAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.739.283.000,00	100 %	2.894.859.000,00	100 %	3.068.853.000,00	100 %	8.702.995.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.512.506.000,00	100 %	2.642.335.000,00	100 %	2.790.834.000,00	100 %	7.945.675.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	3.466.453.000,00	100 %	3.664.172.000,00	100 %	3.885.074.000,00	100 %	11.015.699.000,00	KECAMATAN RETEH
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.356.434.000,00	100 %	2.475.833.000,00	100 %	2.613.074.000,00	100 %	7.445.341.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	2.418.523.000,00	100 %	2.536.841.000,00	100 %	2.674.042.000,00	100 %	7.629.406.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	1.896.141.000,00	100 %	1.993.255.000,00	100 %	2.104.720.000,00	100 %	5.994.116.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	8.647.000,00	100 %	7.551.000,00	100 %	6.733.000,00	100 %	22.931.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	65 %	70 %	272.430.000,00	80 %	237.932.000,00	100 %	212.156.000,00	90 %	722.518.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	116.541.000,00	100 %	101.782.000,00	90 %	90.757.000,00	100 %	309.080.000,00	KECAMATAN TEMPULING
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	95.679.000,00	100 %	83.562.000,00	100 %	74.510.000,00	100 %	253.751.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	18.755.000,00	100 %	16.379.000,00	100 %	14.604.000,00	100 %	49.738.000,00	KECAMATAN CONCONG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	36.371.000,00	100 %	31.765.000,00	100 %	28.324.000,00	100 %	96.460.000,00	KECAMATAN ENOK
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	10.638.000,00	100 %	9.289.000,00	100 %	8.282.000,00	100 %	28.209.000,00	KECAMATAN GAUNG
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	37.957.000,00	100 %	33.150.000,00	100 %	29.559.000,00	100 %	100.666.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	23.733.000,00	100 %	20.726.000,00	100 %	18.481.000,00	100 %	62.940.000,00	KECAMATAN KATEMAN
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	76.661.000,00	100 %	66.953.000,00	100 %	59.698.000,00	100 %	203.312.000,00	KECAMATAN KEMPAS
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	59.181.000,00	100 %	51.686.000,00	100 %	46.087.000,00	100 %	156.954.000,00	KECAMATAN KEMUNING
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	71.280.000,00	100 %	62.253.000,00	100 %	55.508.000,00	100 %	189.041.000,00	KECAMATAN KERITANG
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	11.134.000,00	100 %	9.724.000,00	100 %	8.670.000,00	100 %	29.528.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	36.439.000,00	100 %	31.824.000,00	100 %	28.376.000,00	100 %	96.639.000,00	KECAMATAN MANDAH
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	9.006.000,00	100 %	7.865.000,00	100 %	7.013.000,00	100 %	23.884.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	649.000,00	100 %	566.000,00	100 %	505.000,00	100 %	1.720.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	78.433.000,00	100 %	68.501.000,00	100 %	61.079.000,00	100 %	208.013.000,00	KECAMATAN RETEH
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	82.865.000,00	100 %	72.371.000,00	100 %	64.530.000,00	100 %	219.766.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	20.372.000,00	100 %	17.792.000,00	100 %	15.864.000,00	100 %	54.028.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
		Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	100 %	100 %	21.901.000,00	100 %	19.127.000,00	100 %	17.055.000,00	100 %	58.083.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	2.301.200.000,00	100 %	2.009.805.000,00	100 %	1.792.076.000,00	100 %	6.103.081.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	726.800.000,00	100 %	634.767.000,00	100 %	566.001.000,00	100 %	1.927.568.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	935.423.000,00	100 %	816.971.000,00	100 %	728.467.000,00	100 %	2.480.861.000,00	KECAMATAN TEMPULING
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	252.633.000,00	100 %	220.642.000,00	100 %	196.739.000,00	100 %	670.014.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	268.374.000,00	100 %	234.389.000,00	100 %	208.998.000,00	100 %	711.761.000,00	KECAMATAN CONCONG
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	879.000.000,00	100 %	767.694.000,00	100 %	684.527.000,00	100 %	2.331.221.000,00	KECAMATAN ENOK
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	240.795.000,00	100 %	210.302.000,00	100 %	187.520.000,00	100 %	638.617.000,00	KECAMATAN GAUNG
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	812.345.000,00	100 %	709.479.000,00	100 %	632.619.000,00	100 %	2.154.443.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	766.876.000,00	100 %	669.767.000,00	100 %	597.209.000,00	100 %	2.033.852.000,00	KECAMATAN KATEMAN
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	732.114.000,00	100 %	639.408.000,00	100 %	570.138.000,00	100 %	1.941.660.000,00	KECAMATAN KEMPAS
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	371.795.000,00	100 %	324.714.000,00	100 %	289.537.000,00	100 %	986.046.000,00	KECAMATAN KEMUNING
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	369.584.000,00	100 %	322.783.000,00	100 %	287.815.000,00	100 %	980.182.000,00	KECAMATAN KERITANG
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	241.519.000,00	100 %	210.935.000,00	100 %	188.084.000,00	100 %	640.538.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	241.000.000,00	100 %	210.482.000,00	100 %	187.680.000,00	100 %	639.162.000,00	KECAMATAN MANDAH
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	349.431.000,00	100 %	305.182.000,00	100 %	272.121.000,00	100 %	926.734.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	34.890.000,00	100 %	30.471.000,00	100 %	27.170.000,00	100 %	92.531.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	865.600.000,00	100 %	755.991.000,00	100 %	674.092.000,00	100 %	2.295.683.000,00	KECAMATAN RETEH
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	285.792.000,00	100 %	249.602.000,00	100 %	222.562.000,00	100 %	757.956.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	100 %	100 %	293.150.000,00	100 %	256.028.000,00	100 %	228.292.000,00	100 %	777.470.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	100 %	100 %	63.909.000,00	100 %	55.816.000,00	100 %	49.769.000,00	100 %	169.494.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	30.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	100 %	100 %	9.000.000,00	100 %	9.000.000,00	100 %	9.000.000,00	100 %	27.000.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	100 %	100 %	34.725.000,00	100 %	30.327.000,00	100 %	27.042.000,00	100 %	92.094.000,00	KECAMATAN GAUNG
		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	%	100 %	84.765.000,00	100 %	74.031.000,00	100 %	66.011.000,00	100 %	224.807.000,00	KECAMATAN KATEMAN
		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	100 %	100 %	51.414.000,00	100 %	44.903.000,00	100 %	40.039.000,00	100 %	136.356.000,00	KECAMATAN KEMUNING
		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	100 %	100 %	35.640.000,00	100 %	31.127.000,00	100 %	27.754.000,00	100 %	94.521.000,00	KECAMATAN KERITANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	100 %	100 %	9.279.000,00	100 %	8.104.000,00	100 %	7.226.000,00	100 %	24.609.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	100 %	100 %	102.205.000,00	100 %	89.263.000,00	100 %	79.592.000,00	100 %	271.060.000,00	KECAMATAN MANDAH
		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	100 %	100 %	64.925.000,00	100 %	56.703.000,00	100 %	50.560.000,00	100 %	172.188.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	100 %	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	30.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	102.734.000,00	100 %	89.725.000,00	100 %	80.004.000,00	100 %	272.463.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	92.852.000,00	100 %	81.094.000,00	100 %	72.309.000,00	100 %	246.255.000,00	KECAMATAN TEMPULING
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	52.402.000,00	100 %	45.766.000,00	100 %	40.807.000,00	100 %	138.975.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	122.323.000,00	100 %	106.833.000,00	100 %	95.259.000,00	100 %	324.415.000,00	KECAMATAN CONCONG
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	53.814.000,00	100 %	46.999.000,00	100 %	41.908.000,00	100 %	142.721.000,00	KECAMATAN ENOK
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	58.204.000,00	100 %	50.833.000,00	100 %	45.326.000,00	100 %	154.363.000,00	KECAMATAN GAUNG
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	99.601.000,00	100 %	86.988.000,00	100 %	77.565.000,00	100 %	264.154.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	21.613.000,00	100 %	18.876.000,00	100 %	16.831.000,00	100 %	57.320.000,00	KECAMATAN KATEMAN
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	62.745.000,00	100 %	54.799.000,00	100 %	48.862.000,00	100 %	166.406.000,00	KECAMATAN KEMPAS
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	45.557.000,00	100 %	39.788.000,00	100 %	35.477.000,00	100 %	120.822.000,00	KECAMATAN KEMUNING

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Umum yang di selesaikan										
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	36.304.000,00	100 %	31.706.000,00	100 %	28.271.000,00	100 %	96.281.000,00	KECAMATAN KERITANG
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	16.703.000,00	100 %	14.587.000,00	100 %	13.007.000,00	100 %	44.297.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	85.740.000,00	100 %	74.882.000,00	100 %	66.770.000,00	100 %	227.392.000,00	KECAMATAN MANDAH
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	79.473.000,00	100 %	69.409.000,00	100 %	61.890.000,00	100 %	210.772.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	64.925.000,00	100 %	56.703.000,00	100 %	50.560.000,00	100 %	172.188.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	74.016.000,00	100 %	64.643.000,00	100 %	57.640.000,00	100 %	196.299.000,00	KECAMATAN RETEH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	80.189.000,00	100 %	70.034.000,00	100 %	62.447.000,00	100 %	212.670.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	107.298.000,00	100 %	93.711.000,00	100 %	83.559.000,00	100 %	284.568.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	100 %	100 %	136.631.000,00	100 %	119.329.000,00	100 %	106.402.000,00	100 %	362.362.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	30.506.000,00	100 %	26.642.000,00	100 %	23.756.000,00	100 %	80.904.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	45.429.000,00	100 %	39.676.000,00	100 %	35.378.000,00	100 %	120.483.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	44.273.000,00	100 %	38.665.000,00	100 %	34.477.000,00	100 %	117.415.000,00	KECAMATAN TEMPULING
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	34.934.000,00	100 %	30.510.000,00	100 %	27.204.000,00	100 %	92.648.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	11.823.000,00	100 %	10.325.000,00	100 %	9.206.000,00	100 %	31.354.000,00	KECAMATAN CONCONG
		Persentase Desa/Kelurahan	100 %	100 %	30.515.000,00	100 %	26.650.000,00	100 %	23.763.000,00	100 %	80.928.000,00	KECAMATAN ENOK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		yang Tertib Administrasi										
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	152.951.000,00	100 %	133.581.000,00	100 %	119.111.000,00	100 %	405.643.000,00	KECAMATAN GAUNG
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	62.922.000,00	100 %	54.953.000,00	100 %	49.000.000,00	100 %	166.875.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	50.768.000,00	100 %	44.338.000,00	100 %	39.534.000,00	100 %	134.640.000,00	KECAMATAN KATEMAN
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	161.815.000,00	100 %	141.322.000,00	100 %	126.011.000,00	100 %	429.148.000,00	KECAMATAN KEMPAS
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	41.131.000,00	100 %	35.922.000,00	100 %	32.031.000,00	100 %	109.084.000,00	KECAMATAN KEMUNING
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	144.368.000,00	100 %	126.084.000,00	100 %	112.425.000,00	100 %	382.877.000,00	KECAMATAN KERITANG
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	11.599.000,00	100 %	10.130.000,00	100 %	9.032.000,00	100 %	30.761.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	34.524.000,00	100 %	30.151.000,00	100 %	26.885.000,00	100 %	91.560.000,00	KECAMATAN MANDAH
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	155.146.000,00	100 %	135.498.000,00	100 %	120.820.000,00	100 %	411.464.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
		Persentase Desa/Kelurahan	100 %	100 %	43.469.000,00	100 %	37.964.000,00	100 %	33.851.000,00	100 %	115.284.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		yang Tertib Administrasi										
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	67.053.000,00	100 %	58.562.000,00	100 %	52.217.000,00	100 %	177.832.000,00	KECAMATAN RETEH
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	20.336.000,00	100 %	17.760.000,00	100 %	15.836.000,00	100 %	53.932.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	10.729.000,00	100 %	9.370.000,00	100 %	8.354.000,00	100 %	28.453.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
		Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	100 %	100 %	95.792.000,00	100 %	83.660.000,00	100 %	74.597.000,00	100 %	254.049.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**84.814.147.000,00**		**14.964.544.000,00**		**14.687.463.000,00**		**114.466.154.000,00**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**84.814.147.000,00**		**14.964.544.000,00**		**14.687.463.000,00**		**114.466.154.000,00**	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	90 %	90 %	8.289.591.000,00	95 %	8.113.701.000,00	100 %	8.082.697.000,00	100 %	24.485.989.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	1.040.753.000,00	100 %	908.963.000,00	100 %	810.491.000,00	100 %	2.760.207.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	100%	100%	73.923.764.000,00	100 %	4.579.386.000,00	100 %	4.579.386.000,00	100 %	83.082.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan teregister di Kabupaten Inhil	100 %	100 %	181.950.000,00	100 %	158.910.000,00	100 %	141.694.000,00	100 %	482.554.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	100 %	177.219.000,00	100 %	154.778.000,00	100 %	138.010.000,00	100 %	470.007.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik yang di fasilitasi	100 %	100 %	1.200.870.000,00	100 %	1.048.806.000,00	100 %	935.185.000,00	100 %	3.184.861.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH				**1.690.306.000.000,00**		**1.713.002.000.000,00**		**1.735.361.000.000,00**		**5.138.669.000.000,00**	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

8.1.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VIII.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Awal 2022	Target		
			2024	2025	2026
1	IPM	67.37	67.79	68.07	68.35
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5.98	5.47	5.24	5.00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.50	1.44	1.41	1.38
4	Indeks Gini	0.296	0.286	0.28	0.275
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5.31	5.55	5.81	6.09
6	PDRB per Kapita (Juta Rp)	126.25	133.39	137.10	140.92

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangan oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel VIII.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
1	Indeks Kesehatan	Indeks	0,743	0,750	0,754	0,758
2	Indeks Pendidikan	Indeks	0,581	0,582	0,583	0,585
3	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,708	0,715	0,718	0,721
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,98	5,47	5,24	5,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,50	1,44	1,41	1,38
6	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	4,34	4.64	4.87	5.12
7	LPE Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,68	5.34	5.60	5.88
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,31	68,05	68,43	68,81
9	Indeks Risiko Bencana	Nilai	168.4*	162	158	154

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
10	Indeks Infrastruktur	Persen	58.99	63.33	65.71	67.88
11	Nilai AKIP	Prediket	B (64.10)	B (68.01)	BB (70.90)	BB (71.23)
12	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	57,06	58,10	58,12	58,15
13	Indeks Integritas	Indeks	72,65	74,00	74,50	75,00
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	75,47*	78,32	79,82	81,65
15	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Persen	83,40	89,64	92,24	94,83

8.1.3. Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86

Tahun 2017. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VIII.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
I.	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**					
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,37	67,79	68,07	68,35
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,98	5,47	5,24	5,00
3	Indeks Gini	-	0,296	0,286	0,280	0,275
4	PDRB per Kapita	Juta Rp	126,25	133,39	137,10	140,92
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,50	1,44	1,41	1,38
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,44	5,14	5,40	5,67
7	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,01	4,64	4,87	5,12
8	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,61	5,34	5,60	5,88
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,31	68,05	68,43	68,81
10	Indeks Risiko Bencana	Nilai	168,40	162,00	158,00	154,00
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Prediket	B (63.07)	B (64.08)	B (65.13)	B (66.21)
12	Nilai AKIP	Prediket	B (64.10)	B (68.01)	BB (70.90)	BB (71.23)
13	Indeks Integritas	Indeks	76,77	81,71	83,35	85,00
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	75,47	82,28	84,55	86,83
II.	**Kesejahteraan Sosial**					
1	Indeks Kesehatan	Poin	0,743	0,750	0,754	0,758
2	Indeks Pendidikan	Poin	0,581	0,582	0,583	0,585
ASPEK DAYA SAING						
I.	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**					
1	Indeks Pengeluaran	Poin	0,708	0,715	0,718	0,721
II.	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**					
1	Indeks Infrastruktur	Persen	58,99	63,33	65,71	67,88
III.	**Fokus Iklim Investasi**					
1	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	persen	83,40	89,64	92,24	94,83
2	Persentase pertumbuhan investasi daerah sampai dengan tahun berkenaan	Persen	572,56	6	7	8
IV.	**Fokus Sumber Daya Manusia**					
1	Rasio Ketergantungan	Persen	44,11	43,50	43,25	43,00
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
	Rata-rata Lama Sekolah	Persen	7,28	7,50	8,00	8,73
	Harapan Lama Sekolah	Persen	12,00	12,50	13,00	13,50
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,70	98,75	98,77	99,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	persen	92,21	93,00	94,00	95,00
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12)	persen	99,99	101,04	101,06	101,08
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15)	Persen	85,57	92,55	92,69	92,83
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan	Indeks	B	B	B	B
	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi	Persen	70,00	75,00	85,00	95,00
	Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persen	85,00	89,00	92,00	95,00
	APK PAUD	Persen	91,13	91,50	92,00	92,5
	APK SD	Persen	106,00	105,90	105,50	105,00
	APK SMP	Persen	104,10	104,10	104,00	103,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	100	100	100	100
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	Persen	99,00	99,00	99,5	100
	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar	Persen	70,00	70,00	80,00	95,00
	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap Rombel	Persen	87,00	87,00	88,00	90,00
b) Kesehatan						
	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,31	68,77	69,01	69,25
	Angka Kematian Ibu	Orang	8	7	6	5
	Angka Kematian Bayi	Orang	41	31	20	10
	Angka Kematian Balita	Orang	3	3	2	1
	Persentase penerapan PHBS	Persen	25,00	55,00	65,00	75,00
	Persentase FKTP yang terakreditasi	Persen	86,66	93,00	96,00	100,00
	Persentase Layanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persen	66,98	100	100	100
	Persentase Layanan Kesehatan yang sesuai standar	Persen	73,00	80,00	85,00	90,00
	Persentase Sumberdaya Kesehatan (SDMK) Yang Memiliki Kompetensi	Persen	69,72	78,00	85,00	90,00
	Cakupan Ketersediaan Obat Obatan, Alat Kesehatan dan makanan serta minuman sesuai Standar	Persen	70,00	80,00	90,00	100,00
	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persen	66,72	80,00	85,00	90,00
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap.	Persen	56,00	57,25	57,5	57,75
	Persentase penduduk berakses air bersih	Persen	27,68	29,55	30,67	31,79

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	Persen	0,00	25,00	45,00	75,00
	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Perkotaan	Unit	0	10	10	50
	Jumlah Kepatuhan PBG pertahun per satuan bangunan	Unit	74	80	85	90
	Jumlah bangunan ber-PBG per satuan bangunan pertahun	Unit	74	80	85	90
	Persentase ketaatan pembangunan terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Persen	20,00	25,00	35,00	40,00
	Jumlah Persetujuan/Konfirmasi/Rekomendasi KKPR(PKKPR/KKKPR/RKKPR) yang diterbitkan pada tahun N	Dokumen	80	90	100	100
	Rasio Pengelolaan SDA Dalam Kondisi Baik	Persen	12,00	12,25	12,50	12,75
	Persentase Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	Persen	11,00	11,25	11,50	11,75
	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Ha	9,40	12,20	15,00	17,80
	Proporsi jumlah Peduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	Persen	27,68	29,55	30,67	31,79
	Proporsi jumlah rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan	Unit	0	10	10	50
	Jumlah PBG Bangunan Gedung yang diterbitkan Pertahun	Unit	74	80	85	90
	Persentase SDM jasa Konstruksi yang terlatih	Persen	50	50	50	50
	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang	Persen	2	5	10	15
d) Perumahan Rakyat						
	Persentase luasan kawasan kumuh	Persen	0,65	0,54	0,5	0,46
	Rasio rumah layak huni	Persen	89.88	89.93	89.95	89.99
	Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan	Persen	0,79	0,90	1,10	1,50
	Persentase Luas Kawasan Permukiman yang tertangani	Persen	8,96	13,65	20,70	27,74
	Persentase peningkatan PSU	Persen	0,23	0,28	0,28	0,28
	Persentase Peningkatan Palayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen	0	0,33	0,33	0,33
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	100	100
	Persentase Penegakan PERDA (%)	Persen	100	100	100	100
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Orang	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	(Orang)					
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Kebakaran	Persen	100	100	100	100
	Cakupan penanganan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	persen	100	100	100	100
	Persentase penurunan kejadian kebakaran	persen	28	29	30	32
	Luas wilayah terdampak bencana	Hektar	92,5	80	60	50
	persentase kesadaran masyarakat peduli bencana	Persen	14,59	41,29	47,59	47,59
	persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	Persen	100	100	100	100
	persentase rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	Persen	86,7	88	90	92
	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanggulangan wilayah terdampak bencana	Persen	80,97	82	85	88
	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	-52	3	4	5
	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan	Persen	100	100	100	100
	Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100	100
f) Sosial						
	Tingkat Penurunan Jumlah PPKS	Persen	64,33	75	85	100
	Persentase PPKS yang Tertangani	Persen	60,85	75	90	100
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasamya di Luar Panti	Persen	88,8	93	97	100
	Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	Persen	100	100	100	100
	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang Menerima Bantuan Sosial	Persen	100	100	100	100
	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	100	100
	Persentase PPKS yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial	Persen	100	100	100	100
	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100
	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	Persen	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,66	62,98	63,08	63,28

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	25,00	30,00	30,00	30,00
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun	Dokumen		1	1	1
	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan	Persen	94,66	83,00	83,01	83,02
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	6,50	6,50	6,70	6,80
	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Persen	28,00	35,00	36,00	40,00
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Implementasi Pencapaian Kab layak Anak (KLA)	Poin KLA	616,59	647,00	677,00	700,00
	Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak Per 100.000 Penduduk Perempuan dan Anak	Per 100.000	10,37	10,27	10,18	10,08
	Cakupan Pelayanan dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persen	100	100	100	100
	Indeks Pembangunan Gender IPG)	Indeks	86,69	87,18	88,68	89,18
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,78	67,78	68,78	69,78
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	40,79	41,29	41,79	42,29
	Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah	Persen	0,76	0,86	0,91	0,95
	Persentase keterwakilan Perempuan di Parlemen	Persen	8,89	11,11	11,11	11,11
	Cakupan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	30,00	40,00	60,00	80,00
	Cakupan Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	67,00	71,00	73,00	75,00
	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	40,00	70,00	80,00	90,00
	Cakupan Kuantitas Penyajian Data Gender dan Anak	Persen	100	100	100	100
	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00
	Cakupan Pendampingan dan Perlindungan Anak	Persen	60,00	80,00	90,00	90,00
c) Pangan						
	Produktivitas Padi	Kw/Ha	40,92	41	41,25	41,5
	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	9,61	5	5	5
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85,7	86	86,2	86,4
	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	Persen	101,1	104,5	104,7	104,9
	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	287.361,07	80	81	82
	Jumlah Produksi Ternak	Ton	1742	558	568	578
	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Persen	74,00	76,00	78,00	80,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	Persentase Ketersediaan Pangan (Jumlah Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	Persen	80,00	83,50	83,70	83,90
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	20,00	30,00	35,00	40,00
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	44,83	50,00	60,00	70,00
d) Pertanahan						
e) Lingkungan Hidup						
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,61	90,71	90,81	90,91
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	53,78	53,89	53,99	54,09
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	49,05	50,45	51,82	53,19
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,66	68,05	68,43	68,81
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Sumber Pencemar	Persen	100	100	100	100
	Persentase timbulan sampah dan limbah yang tertangani	Persen	100	100	100	100
	Persentase luas RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Persen	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun	Dokumen	3	1	1	1
	Persentase pemenuhan RTH yang memenuhi standar	Persen	35,00	35,00	35,00	35,00
	Persentase Kegiatan Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	100	100	100
	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang diterbitkanoleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Masyarakat/Kelompok Masyarakata dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen		100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Acara Penyuluhan/Peringatan Hari Lingkungan Hidup/ Pameran Lingkungan Hidup	Persen		100	100	100
	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100
	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	100	100	100	100
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Indeks Kepuasan Masyarat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks	80,95	82,00	83,00	85,00
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	80,30	85,00	90,00	95,00
	Waktu Penyelesaian Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hari	7	7	7	7
	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	98,79	99,90	99,50	100
	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	83,64	97,00	95,00	100
	Cakupan ketersediaan database kependudukan	Persen	99,00	99,00	99,00	99,00
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	OPD	9,00	27,00	38,00	45,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	berdasarkan janjian kerjasama					
	Jumlah Penerbitan Data Kependudukan	Buku	145	170	170	170
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Indeks Desa Membangun	Indeks	Berkembang (0.6535)	Berkembang (0.6732)	Berkembang (0.6833)	Berkembang (0.6936)
	Indeks Ketahanan Sosial	Nilai	0,7572	0,7801	0,7918	0,8037
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Nilai	0,5528	0,5695	0,578	0,5867
	Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Nilai	0,6504	0,6701	0,6801	0,6903
	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik	Persen	73,10	80,71	91,37	100
	Cakupan pelaksanaan Kerjasama antar desa	Persen	100	100	100	100
	Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi dengan baik	Persen	73,10	80,71	91,37	100
	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persen	100	100	100	100
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
	Tingkat Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,16	2,15	2,14	2,13
	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	Persen	51,46	52,96	54,46	60,00
	Persentase Pengguna Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	2,28	2,58	2,88	3,18
	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program KKBPK	Persen	17,50	21,50	22,50	23,50
	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persen	36,92	46,92	56,92	66,92
	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	60,00	70,00	75,00	80,00
i) Perhubungan						
	Rasio konektivitas kabupaten	Persen	69,2	70,5	71,39	72,8
	Persentase Tingkat penurunan kecelakaan darat/perairan	Persen	-9	20	33	44
	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Sesuai Standar	Persen	80,00	80,29	85,10	90,17
	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	70,00	75,00	81,84	92,47
j) Komunikasi dan Informatika						
	Indeks SPBE	Indeks	2,13	2,3	2,5	3
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan Intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Persen	42	50	75	100
	Cakupan Data dan Informasi yang tersedia secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	Persentase Tingkat Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	30	37	74	100
	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi (Dengan Satuan:Persen)	Persen	62	100	100	100
	Persentase jumlah aplikasi PD yang jaringan aplikasinya diawasi oleh Dinas Kominfopers kab. inhil (Dengan Satuan:Persen)	Persen	74	74	92	100
	Persentase terpenuhinya sistem pelayanan informasi berbasis TIK (Dengan Satuan:Persen)	Persen	84	50	75	100
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	Persentase UMKM dan Koperasi yang naik skala usaha	Persen	61,78	63	65	67
	Persentase Koperasi yang aktif	Persen	67,2	70	72	75
	Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah baru	Persen	74	77	80	83
	Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin	Persen	43,00	43,00	44,00	45,00
	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	15	15	16	18
	Cakupan Koperasi yang Memiliki Kompetensi Berdaya Saing	Persen	75,00	75,00	76,00	78,00
	Jumlah Koperasi yang Mandiri	Koperasi	5	5	6	8
	Persentese Usaha Mikro dan Kecil	Persen	72,00	72,00	74,00	75,00
	Persentase Jumlah Unit Usaha Yang Di Fasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	Persen	65,00	65,00	66,00	68,00
l) Penanaman Modal						
	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP Kab Inhil	Nilai	4,02	4,2	4,35	4,51
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Penanaman Modal	Nilai	90,15	90,2	90,3	91
	Persentase pertumbuhan investasi daerah sampai dengan tahun berkenaan	Persen	572,56	6	7	8
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	170	2	2	2
	Jumlah Investasi PMA/PMDN sampai dengan tahun berkenaan	Milyar Rp	12,706	762	889	1,016
	Tingkat Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	50,00	10,00	10,00	10,00
	Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi	Pelaku Usaha	170	20	20	20
	Persentase Kesesuaian Waktu Layanan Izin	Persen	80,00	85,00	90,00	95,00
	Tingkat Kedisipilinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal yang Terlaksana	Persen	80,00	85,00	90,00	95,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	90,15	90,20	90,30	91,00
m) Kepemudaan dan Olahraga						
	Persentase Peningkatan Pemuda Aktif	Persen	0	5	4,5	4
	Persentase Peningkatan prestasi olahraga Tingkat Daerah	Persen	564	106	181	-59

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Daerah	Medali	73	29	82	33
	Cakupan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Persen	0	2	2,2	2,5
	Jumlah Wirausaha Muda yang Berkembang	Orang		10	15	20
	Persentase Atlet yang berprestasi	Persen	718	25,00	280	-63
	Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina	Persen	100	100	100	100
n) Statistik						
	Persentase dokumen data statistik daerah yang tepat waktu	Persen	100	100	100	100
o) Persandian						
	Persentase terciptanya pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	100	37,00	74,00	100
p) Kebudayaan						
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100
	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	1	1	1	1
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	Objek	2	3	3	3
	Jumlah kesenian tradisional yang berkembang	Jenis	2	2	2	2
	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Objek	1	2	2	2
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap museum	Persen		80,00	82,00	85,00
q) Perpustakaan						
	Nilai SKM Pemustaka terhdap pelayanan	Nilai	91,89	92,30	93,63	95,00
	Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	Persen	60,75	62,45	64,75	65,70
	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	Persen	41,00	43,00	47,00	50,00
	Peningkatan jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Persen		3	1	1
r) Kearsipan						
	INDEK KEARSIPAN	Nilai	24,44	24,51	24,52	24,53
	Persentase Perangkat Daerah dengan pengelolaan Arsip yang tertib	Persent	0	32	65	100
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku.	Persen	3,2	19,4	35,5	51,6
	Persentase Arsip sesuai dengan Standar Baku yang dikelola pada tahun berkenaan	Persen	0	100	100	100
	Persentase perizinan penggunaan arsip yang diberikan sesuai SOP	Persen	0	100	100	100
Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	70895,01	72000	73000	74000
	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4831,75	5000	5200	5400
	Ketersediaan pangan dan konsumsi ikan perkapita pertahun (Dengan Satuan:Kg/Kapita/Tahun)	Kg/Kapita/Tahun	40,15	40,15	40,20	40,25
b) Pariwisata						

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	42.127	88.000	95.500	100.000
	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	39,83	43	47	50
	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan	Persen	20,00	40,00	50,00	60,00
	Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dipromosikan	Persen	40,00	50,00	60,00	70,00
	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkembang	Persen	23,33	25,00	30,00	40,00
c) Pertanian						
	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	Persen	43,73	44	44,5	45
	Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	632,789	634,789	636,789	638,789
	jumlah produkstivitas tanaman perkebunan	Ton	1.165	1.170	1.175	1.180
	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Pertanian	persen	120	125	130	135
	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan	Jenis	4	4	4	4
	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	persen	20,00	15,00	15,00	15,00
	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	persen	20,00	15,00	15,00	15,00
	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	persen	20,00	15,00	15,00	15,00
	Persentase ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	persen	42,50	42,50	50,00	50,00
	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	persen	5,00	2,00	2,00	2,00
	Persentase Ketersediaan Prasarana Perbenihan	persen	15,00	15,00	15,00	15,00
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	persen	60,00	62,00	65,00	70,00
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	persen	5,00	4,50	4,00	3,50
	Persentase Penurunan Serangan OPT	persen	5,00	10,00	10,00	10,00
	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	persen	20,00	25,00	30,00	35,00
	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan evaluasi	persen	80,00	82,00	85,00	88,00
	Persentase Kelembagaan (Kelompok Tani) yang Meningkat Kapasitasnya	persen	18,65	20,00	23,00	26,00
	Persentase cakupan bina kelompok tani	persen	65,00	68,00	70,00	75,00
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
f) Perdagangan dan Perindustrian						
	Tingkat Inflasi	Persen	4,82	3,9	3,7	3,5
	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	4,61	5,34	5,6	5,88
	Ekspor bersih perdagangan	US$	483	490	500	510
	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Persen	29,17	30,63	32,16	33,76

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	Komoditas	9	7	6	5
	Pertumbuhan volume ekspor	Persen	12,18	12,35	12,66	12,9
	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang Direkomendasikan	Persen	100	100	100	100
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif	Persen	100	100	100	100
	Persentase Stabilitasn dan jumlah ketersediaan Harga barang kebutuhan pokok	Persen	70,00	75,00	80,00	80,50
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	32,02	50,00	60,00	70,00
	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	55,00	60,00	70,00	80,00
	Cakupan Industri Kecil dan Menengah yang Dibina	Persen	85,00	100	100	100
	Cakupan Verifikasi Lapangan Izin Usaha Industri	Persen	80,00	100	100	100
	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	100	100	100	100
h) Transmigrasi						
	Persentase Transmigran Mandiri	Persen	35,00	37,00	40,00	45,00
	Cakupan Bina Transmigrasi dan Penemapatan Transmigrasi	Persen	100	100	100	100
	Cakupan Bina Transmigrasi	Persen	100	100	100	100
Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan						
a) Sekretariat Daerah						
	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Administrasi Umum	Persen	100	100	100	100
	Persentase pemibnaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelengaraaan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	100
	Persentase pemibnaan, penataan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelengaraaan di bidang perekonomian dan pembangunan	Persen	100	100	100	100
	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	100	100
	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100
	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	100
b) Sekretariat DPRD						
	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	Persen	100	100	100	100
	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan						
	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Persen	96.84*	100	100	100
	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kab. Inhil	Persen	100	100	100	100
	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPD,RENSTRA RKPD dan RENJA)	Persen	100	100	100	100
b) Keuangan						
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9,16	8	9	10
	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	persen	25	21	22	23
	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan secara akurat, akuntabel dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100
	Persentase SKPD yang menyusun laporan BMD secara akurat, akuntabel dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100
	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100
	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100
	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	Persen	-4,91	2,00	3,00	4,00
c) Kepegawaian						
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	57,06	58,1	58,12	58,15
	Indeks Sistem Merit	Nilai	281,5	290,5	291	291,5
	Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan	Persen	100	100	100	100
d) Pendidikan dan Pelatihan						
	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	52,00	52,00	53,00	54,00
e) Penelitian dan Pengembangan						
	Indeks Inovasi Daerah	Prediket	Sangat Inovatif (75.98)	Sangat Inovatif (77.98)	Sangat Inovatif (78.98)	Sangat Inovatif (79.98)
	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah	Persen	82,5	86	87	88
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100	100	100
Pengawasan						
	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)
	Level Kapabilitas APIP	level	Level 3	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan yang diselesaikan	Persen	0	70	80	85

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	0	71	73	75
Kewilayahan						
	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan di Kecamatan	Persen	100	100	100	100
	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Persen	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang di selesaikan	Persen	100	100	100	100
	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	Persen	100	100	100	100
	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Persen	100	100	100	100
Pemerintahan Umum						
	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara.	Persen	60	60	65	70
	Persentase potensi konflik yang di fasilitasi	Persen	80	80	85	85
	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan komponen masyarakat tentang ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Persen	94	94	95	95
	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, dan Pilkades.	Persen	74	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	100	100	100	100
	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	Persen	100	100	100	100
	Persentase Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan teregister di Kabupaten Inhil	Persen	100	100	100	100
	Persentase penanganan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	100	100	100	100
	Persentase penyelesaian konflik yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	100

BAB IX

PENUTUP

Bab Penutup menguraikan pengoperasian Rencana Pembangunan Daerah agar mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten dengan jabatan Kepala daerah berakhir di tahun 2023. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah

Berakhir Pada Tahun 2023. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berisi penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2024-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, serta memerhatikan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN.

9.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).* Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah ini dengan sebaik-baiknya;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2024 hingga 2026;
3. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas;
4. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir wajib menyebarluaskan Perkada tentang Rencana Pembangunan Daerah kepada seluruh pemangku kepentingan;

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang ada dalam dokumen RPD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada masa yang akan datang.